



**KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA MALANG
TAHUN ANGGARAN 2021**

**MALANG
TAHUN 2020**

DAFTAR ISI

| | | |
|-------------------------|---|-----------|
| COVER | | |
| DAFTAR ISI | | i |
| BAB I | PENDAHULUAN | 1 |
| | 1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah | 1 |
| | 1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD | 2 |
| | 1.3 Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD | 3 |
| BAB II | KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH | 5 |
| | 2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah | 5 |
| | 2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah..... | 8 |
| BAB III | ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN APBD | 11 |
| | 3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN | 11 |
| | 3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD | 12 |
| BAB IV | KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH | 16 |
| | 4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun 2021 | 16 |
| | 4.2 Target Pendapatan Daerah | 27 |
| BAB V | KEBIJAKAN BELANJA DAERAH | 29 |
| | 5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja | 29 |
| | 5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tak Terduga | 40 |
| BAB VI | KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH | 41 |
| | 6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan | 41 |
| | 6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan..... | 42 |
| BAB VII | STRATEGI PENCAPAIAN | 43 |
| BAB VIII | PENUTUP | 46 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. Penyusunan KUA merupakan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode satu tahun. KUA merupakan kebijakan di bidang keuangan sebagai pernyataan yang dibuat dan diterapkan oleh kepala daerah dan disepakati oleh DPRD untuk menjelaskan manajemen keuangan daerah. Secara umum, kebijakan di bidang keuangan merupakan tindakan resmi yang diambil oleh suatu organisasi untuk mendukung pelaksanaan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai di bidang keuangan. Kebijakan memberikan suatu kerangka untuk manajemen keuangan dan acuan untuk melaksanakan urusan-urusan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. KUA tahun anggaran 2021 pada dasarnya memuat kebijakan umum daerah tahun 2021 yang menjadi pedoman dan ketentuan umum dalam penyusunan Rancangan APBD tahun anggaran 2021. Kebijakan umum ini diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran. Rancangan KUA yang disusun memuat Kerangka ekonomi makro daerah, asumsi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya.

Sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Peraturan tersebut mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyediakan informasi perencanaan pembangunan dan

keuangan daerah dimana layanan informasi tersebut dibangun dan dikembangkan secara terintegrasi. Adapun dokumen perencanaan pembangunan dan keuangan tersebut harus sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Sejalan dengan kedua Peraturan tersebut, diterbitkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 27 Januari 2019 Nomor 130/736/SJ tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang menginstruksikan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan pemetaan terhadap nomenklatur program dan kegiatan dalam RPJMD dengan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 dan melakukan perubahan nomenklatur perencanaan pembangunan. Hasil pemetaan nomenklatur program dan kegiatan tersebut dituangkan dalam Berita Acara dan dijadikan acuan dalam penyusunan RKPD dan KUA-PPAS.

Pemerintah Kota Malang menyusun kebijakan umum APBD sebagai pelaksanaan RPJMD Kota Malang sebagaimana Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang Tahun 2018-2023 untuk periode tahun ketiga. Rancangan KUA disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan Rancangan APBD tahun anggaran 2021 dan ditetapkan dengan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Malang dengan DPRD Kota Malang. Dalam kaitan tersebut, maka KUA akan menjadi dokumen perencanaan pembangunan yang secara politis menjembatani RKPD Kota Malang Tahun 2021 dengan penyusunan Rancangan APBD Kota Malang Tahun 2021.

1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 bertujuan:

1. Menyusun kerangka ekonomi makro daerah tahun 2021 yang akuntabel guna dijadikan dasar perencanaan pembangunan;
2. Menyusun Asumsi dasar penyusunan APBD yang rasional dan realistis yang akan digunakan sebagai dasar Penyusunan APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2021;
3. Sebagai pedoman yang digunakan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD TA. 2021 yang selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan rancangan APBD TA. 2021;
4. Menyusun kebijakan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah yang sistematis untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun 2021 berpedoman pada beberapa peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 43 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021;
13. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Malang Tahun 2005-2025;

14. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang Tahun 2018-2023;
15. Peraturan Walikota Malang Nomor 24 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2021.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Kebijakan ekonomi daerah merupakan bagian dari pembangunan daerah. Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Oleh karena itu, arah kebijakan ekonomi daerah Kota Malang disusun dengan berpedoman pada kondisi ekonomi Kota Malang, Provinsi dan Nasional serta tetap memerhatikan dinamika perekonomian global.

Krisis ekonomi yang terjadi akibat pandemi COVID-19 tidak akan seperti krisis pada umumnya. Seiring berjalannya waktu, jumlah korban jiwa akibat infeksi COVID-19 di Eropa dan AS terus meningkat dan secara global belum ada penyebaran pandemi COVID-19 yang menurun. Kendati kasus COVID-19 berkurang drastis di Tiongkok, namun kasus baru tetap masih ada. Kondisi darurat kesehatan dunia akan menyebabkan 'resesi global yang besar. Resesi ekonomi terutama akan menghantam negara-negara miskin dan negara yang ekonominya rentan. Arah Kebijakan Ekonomi perlu menyesuaikan di tengah resesi ekonomi seiring dengan penyebaran pandemi COVID-19 yang belum jelas kapan mulai menurun.

Akibat adanya pandemi COVID-19, Pemerintah merespon dengan mengeluarkan peraturan dan arah kebijakan baru sebagaimana termaktub dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 menyebutkan bahwa sesuai dengan Tema RKP Tahun 2021: *"Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial"*, dengan fokus pembangunan diarahkan kepada *Pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi, Reformasi Sistem Kesehatan Nasional, Reformasi Sistem Perlindungan Sosial dan Reformasi Sistem Ketahanan Bencana*, dengan sasaran dan target yang harus dicapai antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 4,5-5,5 persen dengan tingkat inflasi secara nasional berkisar antara 3,0 persen;
2. Sasaran tingkat kemiskinan pada kisaran 9,2 – 9,7 persen; IPM menjadi 72,78-72,90; gini rasio pada kisaran 0,377 – 0,379; tingkat pengangguran terbuka 7,5-8,2 persen;
3. Sasaran pemerataan pembangunan antar wilayah: kontribusi wilayah terhadap pembangunan nasional; Sumatera 3,9-5,1 persen, Jawa-Bali 4,8-5,5 persen, Kalimantan 3,6-5,7 persen, Sulawesi 5,4-7,0 persen, Nusa Tenggara 3,5-5,2 persen, Maluku 5,2-6,2 persenan Papua 2,6-5,8 persen.

Sedangkan 7 Prioritas Pembangunan Nasional adalah:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Kondisi perekonomian Nasional tersebut tentunya mempengaruhi perkembangan perekonomian di daerah, termasuk di Provinsi Jawa Timur. Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur mempunyai kontribusi cukup besar terhadap perekonomian nasional yang menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi Jawa Timur merupakan penyangga perekonomian nasional. Sektor industri dan perdagangan mempunyai peran yang cukup besar, sehingga memberikan sumbangan pertumbuhan ekonomi nasional. Ditengah pandemi COVID-19 Pemerintah Provinsi Jawa Timur fokus dalam meningkatkan pemulihan ekonomi dengan tema pembangunan: *"Mempercepat Pemulihan Ketahanan Ekonomi dan Kehidupan Masyarakat dengan fokus pada Industri, Pariwisata, Investasi, Kesehatan dan Infrastruktur di Jawa Timur"*.

Sejalan dengan arah kebijakan Nasional, arah kebijakan ekonomi Provinsi Jawa Timur dengan Prioritas Pembangunan antara lain:

1. Pembangunan Manusia melalui peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan serta Pengentasan Kemiskinan;
2. Pemerataan Pembangunan dan Penguatan Konektivitas serta Manajemen Kebencanaan;
3. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Pariwisata, Kualitas Ketenagakerjaan serta Perluasan Kesempatan Kerja;
4. Peningkatan Ketahanan Pangan, Pengelolaan Sumber Daya Air, Energi dan Pelestarian Lingkungan Hidup; dan
5. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban.

Kelima Prioritas tersebut merupakan landasan pembangunan Provinsi Jawa Timur dalam mendukung Lima Prioritas Nasional. Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Timur yang menjadi arah bagi kebijakan ekonomi terdapat pada Prioritas Jawa Timur ketiga, yaitu *"Pembangunan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Pariwisata, Kualitas Ketenagakerjaan serta Perluasan Kesempatan Kerja"*. Penyebaran pandemi virus COVID-19 di Jawa Timur memerlukan perhatian yang cukup

serius karena menimbulkan korban jiwa serta kerugian material dan telah berdampak pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, fokus pembangunan diarahkan kepada percepatan pemulihan ketahanan ekonomi dan kehidupan masyarakat dengan fokus pemulihan industri, pariwisata, investasi, kesehatan dan infrastruktur di Jawa Timur.

Sektor yang paling terkena imbas adalah sektor jasa seperti pariwisata. Imbas lain dari pandemi COVID-19 terhadap perekonomian antara lain adalah penurunan kinerja ekspor, penurunan kinerja pertumbuhan ekonomi (terutama pada sektor-sektor terdampak seperti akomodasi, transportasi, retail, dan manufaktur), serta penurunan aliran modal. Melihat dampak-dampak tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur berupaya untuk mengeluarkan beberapa kebijakan sosial ekonomi. Di antaranya adalah mengamankan kelancaran pemasaran dan distribusi produk pertanian, restrukturisasi kredit bagi pelaku ekonomi terdampak, padat karya tunai (*cash for work*) untuk pelaku ekonomi kecil terdampak, dan jaring pengaman sosial (*social safety net*).

Sejalan dengan arah kebijakan Nasional dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2021, tema pembangunan Kota Malang: “*Mempercepat pemulihan ketahanan ekonomi dan kehidupan masyarakat*”, dengan fokus pada *Industri Kreatif, Pariwisata, kemudahan Investasi, melalui penguatan SDM, penyederhanaan birokrasi dan pemerataan infrastruktur*” dengan arah kebijakan ekonomi makro tahun 2021 diantaranya:

1. Akselerasi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan berdaya saing tinggi;
2. Meningkatkan produktivitas dan efisiensi sektor yang unggul dan berdaya saing;
3. Modernisasi infrastruktur dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia; dan
4. Mendorong investasi.

Keempat arah kebijakan ekonomi Kota Malang tersebut dilakukan melalui strategi umum sebagaimana yang telah dijabarkan dalam RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023. Strategi umum tersebut yang kemudian menjadi landasan arah kebijakan ekonomi Kota Malang pada tahun 2021 pula. Adapun strategi umum pada arah kebijakan ekonomi Kota Malang yang tertuang dalam RPJMD Kota Malang tahun 2018-2023, diantaranya:

- a) Optimalisasi perekonomian melalui pengembangan sektor ekonomi kreatif, pengembangan pengelolaan pasar, pariwisata dan UMKM
- b) Peningkatan kualitas infrastruktur, sarana dan prasarana perkotaan dengan menjamin kualitas transportasi, perumahan dan pemukiman serta ruang terbuka.
- c) Penerapan konservasi energi, pengelolaan persampahan dan pengembangan pola tata ruang serta peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Kebijakan sektor pertanian dalam merespon pandemi COVID-19 dalam menjaga ketersediaan pangan dan harga pangan yang terjangkau di Kota Malang dengan memperkuat intensifikasi pertanian untuk meningkatkan produktifitas pertanian,

memperbaiki logistik pangan yang berperan penting dalam menjaga ketahanan pangan, mengurangi kelangkaan stok pangan dan disparitas bahan pokok pangan.

2.2 Arah kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini dikarenakan dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan sangat tergantung dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat perlu dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik. Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunannya tidak bisa dilepaskan dari faktor pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan manajemen yang baik pula.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari penerimaan fiskal daerah. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal telah menempatkan pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi yang amat potensial untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah. Selain pendanaan melalui APBD, terdapat sumber pendanaan lainnya di luar APBD (Non APBD) antara lain pendanaan melalui APBN, PHLN, Obligasi daerah, dana kemitraan dunia usaha, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan dan Program Kemitraan yang semuanya merupakan potensi sumber penerimaan daerah guna menunjang beban belanja pembangunan daerah. Selain itu, sumber pendanaan juga bersumber dari *public private partnership* (PPP). Bentuk PPP antara lain: Kontrak Servis, Kontrak Manajemen, Kontrak Sewa, Kontrak *Build-Operate-Transfer* (BOT) dan Kontrak Konsesi.

Kebijakan keuangan Kota Malang Tahun 2021 disusun dalam rangka mewujudkan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023 yang merupakan tahun kedua, dan tidak terlepas dari kemampuan keuangan daerah sebagai salah satu faktor yang penting dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Malang. Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 130/736/SJ pada tanggal 27 Januari 2020, menyebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2021 meliputi aspek Pendapatan dan aspek Belanja, serta aspek Pembiayaan. Aspek Pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Sedangkan aspek Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Adapun Aspek Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Kebijakan pendapatan daerah diarahkan untuk Peningkatan sumber pendapatan daerah melalui Pendapatan Asli Daerah, baik Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah. Dalam 5 (lima) tahun terakhir, kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah terus meningkat sebagaimana ditunjukkan Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1 Perkembangan PAD terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2015-2019

| Tahun | PAD | Pendapatan Daerah | Proporsi (%) |
|-------|--------------------|----------------------|--------------|
| 2015 | 363.978.160.111,08 | 1.876.858.611.232,58 | 19,39% |
| 2016 | 387.431.571.214,55 | 1.735.398.662.849,55 | 22,33% |
| 2017 | 514.963.444.965,56 | 1.915.269.662.466,56 | 26,89% |
| 2018 | 528.207.937.856,91 | 1.986.432.106.698,91 | 26,59% |
| 2019 | 613.052.028.554,00 | 2.189.478.934.214,69 | 28,00% |

Ditengah pandemi COVID-19, Target pendapatan Daerah tahun 2021 diproyeksikan sebesar Rp. 1.874.052.406.685,30 dimana Kelompok PAD ditargetkan sebesar Rp. 641.411.037.175,21 atau sebesar 34,23% dari total pendapatan daerah. Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Pajak Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan yang menjadi tumpuan Pemerintah Kota Malang dan pelaksanaannya mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sedangkan Kelompok Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah disesuaikan dengan Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 yang memuat alokasi Tranfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

Belanja Daerah dalam 5 tahun terakhir mengalami peningkatan alokasi, terutama belanja yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian prioritas pembangunan daerah. Adapun alokasi belanja langsung sebagaimana Tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.2 Perkembangan Alokasi Belanja Langsung terhadap Alokasi Belanja Daerah Tahun 2015-2019

| Tahun | Alokasi Belanja Langsung | Belanja Daerah | Proporsi (%) |
|-------|--------------------------|----------------------|--------------|
| 2015 | 1.075.265.776.096,77 | 2.132.444.361.610,28 | 50,42 |
| 2016 | 972.438.255.448,74 | 1.974.487.562.026,98 | 49,25 |
| 2017 | 1.221.393.706.394,05 | 2.100.230.441.533,63 | 58,16 |
| 2018 | 1.424.354.064.979,63 | 2.360.831.551.277,57 | 60,33 |
| 2019 | 1.336.486.956.790,42 | 2.654.691.198.906,71 | 50,34 |

Kebijakan Belanja Daerah diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah, terutama dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 khususnya untuk pemulihan di bidang ekonomi, sehingga perlu dialokasikan anggaran yang memadai guna mendukung pemulihan ekonomi dengan arah kebijakan memperhatikan hal-hal berikut.

1. Efektivitas dan efisiensi belanja daerah melalui pemanfaatan sesuai prioritas daerah;

2. Pengelolaan belanja daerah berbasis kinerja, sehingga setiap belanja akan bermuara untuk mendukung capaian indikator kinerja utama tahun 2021;
3. Mengalokasikan kebutuhan belanja tetap, belanja rutin, dan belanja variabel secara terukur dan terarah; dan
4. Belanja daerah dalam rangka *recovery* dan penanganan dampak atas pandemi COVID-19 pada semua bidang, dengan prediksi pandemi COVID-19 belum berakhir sampai akhir tahun 2020, maka alokasi pendanaan untuk program prioritas maupun non prioritas yang telah direncanakan, dapat dilakukan *refocusing* dan realokasi untuk penanganan pandemi COVID-19 yang mana penggunaan, pengelolaan dan pertanggungjawabannya sebagaimana ketentuan yang berlaku.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Secara umum perekonomian daerah mempunyai interdependensi dengan perekonomian nasional, artinya perekonomian daerah berpengaruh terhadap perekonomian Regional dan Nasional. Kondisi ekonomi makro yang stabil sangat diperlukan karena akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat. Kondisi perekonomian daerah yang stabil diharapkan tetap terjaga pada tahun 2021 melalui sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter nasional yang didukung dengan kebijakan fiskal daerah serta penguatan kelembagaan keuangan mikro dan sektor riil.

Gejolak perekonomian global tahun 2020 dengan adanya pandemi COVID-19 akan berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi tahun 2021. Berdasarkan kondisi riil perekonomian Kota Malang, maka perhitungan perencanaan APBD Tahun 2021 dihitung berdasarkan asumsi berikut.

3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN

Gejolak ekonomi global dengan adanya pandemi COVID-19 secara langsung akan mempengaruhi perekonomian secara nasional. Pemerintah melakukan revisi perubahan tema pembangunan menjadi “Mempercepat Pemulihan Ketahanan Ekonomi dan Kehidupan Masyarakat, dengan Fokus pada Industri, Pariwisata, Investasi, dan Penguatan Sistem Kesehatan Nasional”. Fokus pembangunan ini diharapkan mampu menghidupkan kembali mesin ekonomi nasional yang sedang berada dalam momentum pertumbuhan. Tema pembangunan tahun 2021 perlu *adaptif* dan *responsif* terhadap adanya wabah COVID-19 dan proses pemulihannya pada sektor industri, pariwisata dan investasi serta reformasi Sistem Kesehatan Nasional, Sistem Jaringan Pengaman Sosial dan Sistem Ketahanan Bencana dengan cara memberikan penekanan terhadap agenda pembangunan tertentu yang relevan terhadap situasi yang dihadapi dan intervensi yang akan dihadapi pada tahun 2021.

Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2021 dan dengan mempertimbangkan potensi, kesempatan, dan risiko yang terjadi hingga tahun 2021, asumsi indikator ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2021 adalah pertumbuhan ekonomi dikisaran 4,5% -5,5%. Asumsi tersebut lebih rendah dari kerangka ekonomi makro 2020 yang berkisar antara 5,3%-5,6%. Laju Inflasi diproyeksi pada kisaran 2% - 4% (yoy), Tingkat Suku Bunga (SBN) 10 Tahun di kisaran 6,67%-9,56% dan nilai tukar rupiah berkisar antara Rp.14.900-Rp.15.300 per dollar AS. Sementara itu, harga minyak mentah Indonesia dikisaran 40US\$ - 50US\$ per barel, *lifting*

minyak bumi 677.000-737.000 barel per hari dan *lifting* gas bumi 1.085-1.173 ribu barel setara minyak per hari.

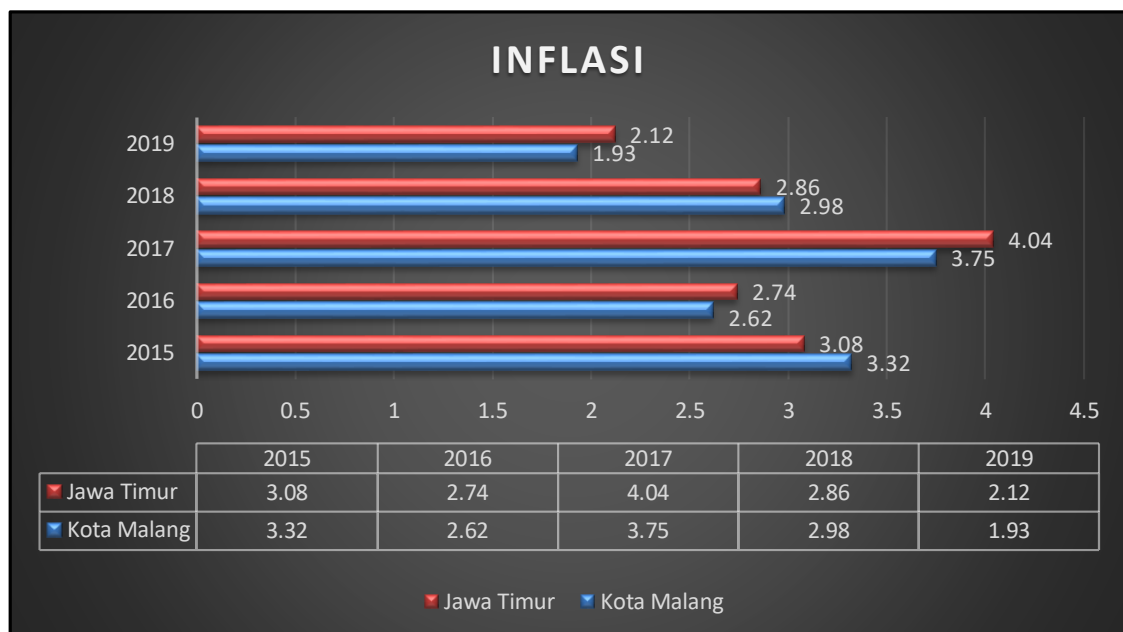
Tabel 3.1 Asumsi Ekonomi Makro Nasional Tahun 2021

| No | Indikator Ekonomi Makro | Kisaran |
|----|--------------------------------------|-------------------|
| 1 | Pertumbuhan Ekonomi (%) | 4,5 – 5,5 |
| 2 | Inflasi (%) | 3,00 ± 1,0 (yoy) |
| 3 | Tingkat Suku Bunga SBN 10 Tahun (%) | 6,67 – 9,56 |
| 4 | Nilai Tukar Rupiah Per Dollar AS | 14.900 – 15.300 |
| 5 | Harga Minyak Mentah (US\$ per Barel) | 40 US\$ – 50 US\$ |
| 6 | Lifting Minyak Bumi (Barel per hari) | 677.000 – 737.000 |
| 7 | Lifting Gas Bumi (Ribu Barel) | 1.085 – 1.173 |

3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD

3.2.1 Laju Inflasi

Inflasi merupakan informasi tentang dinamika perkembangan harga barang dan harga jasa yang dikonsumsi masyarakat dan berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Laju inflasi Kota Malang dari tahun ke tahun berfluktuasi nilainya, karena sangat bergantung pada kondisi perekonomian regional maupun nasional. Apabila dibandingkan dengan laju inflasi Provinsi Jawa Timur dan Nasional, rata-rata inflasi Kota Malang dalam 3 tahun terakhir memiliki tren lebih rendah dibandingkan dengan inflasi Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Trend penurunannya cukup dapat menggambarkan bahwa penurunan harga barang di Kota Malang dapat menggambarkan penurunan harga secara Regional dan Nasional sebagaimana Gambar 3.1 berikut.



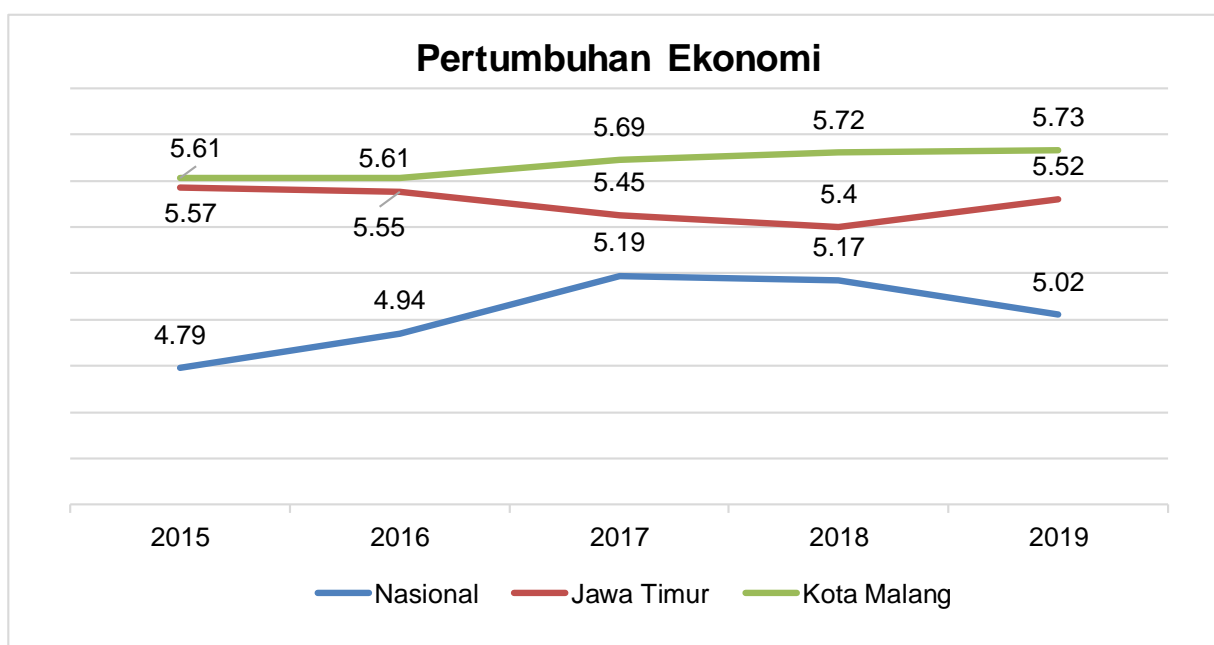
Gambar 3.1 Perkembangan Laju Inflasi di Kota Malang dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2019 (Sumber: BPS Kota Malang)

Sejalan dengan asumsi ekonomi makro Nasional, laju inflasi Kota Malang tahun 2021 diproyeksikan berada pada kisaran 1,06% - 1,11%. Proyeksi ini turun 0,82% – 0,87% jika dibandingkan dengan Laju inflasi Tahun 2019.

Berdasarkan proyeksi Inflasi Tahun 2020 yang dilakukan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang bahwa Laju Inflasi pada masa pandemi COVID-19 berada pada kisaran 2,86% - 2,91%. Proyeksi Laju Inflasi Tahun 2021 turun sebesar 1,8% jika dibandingkan dengan Proyeksi Tahun 2020. Hal ini mengindikasikan adanya pergerakan ekonomi yang semakin menjauh dengan adanya perbaikan kemampuan daya beli masyarakat dibandingkan dengan kondisi tahun 2020. Kondisi ini sangat wajar mengingat selama Pandemi COVID-19 tahun 2020 daya beli masyarakat serta perputaran ekonomi dari berbagai sektor berjalan sangat lambat sehingga pada tahun 2021 perlu adanya pemulihan ekonomi secara nasional.

3.2.2 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kota Malang menunjukkan tren berada di atas pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dan pertumbuhan ekonomi Nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir. Pada tahun 2015 pertumbuhan ekonomi Kota Malang tercatat di angka 5.61% dan terus meningkat setiap tahunnya hingga di tahun 2019 ekonomi Kota Malang tumbuh 5.73%. Dalam pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur dan Nasional, Kota Malang memiliki kontribusi positif dimana angka pertumbuhan ekonomi berada di atas angka pertumbuhan Jawa Timur sebesar 5.52% dan pertumbuhan ekonomi Nasional sebesar 5.02% pada tahun 2019 sebagaimana Gambar 3.2 berikut.



Gambar 3.2 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Malang dengan Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2015-2019 (Sumber: BPS Kota Malang)

Memperhatikan proyeksi dinamika perekonomian pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi di Kota Malang sangat tergantung oleh penyebaran dan penanganan COVID-19. Berdasarkan hasil kajian proyeksi ekonomi makro Tahun 2021 oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang, Skenario proyeksi pertumbuhan ekonomi hingga akhir tahun 2020 dan tahun 2021 terbagi 3 skenario, yaitu Tanpa COVID-19, Skala Berat dan Skala

Sangat Berat. Proyeksi pertumbuhan Ekonomi tahun 2020 diproyeksikan sebagaimana Tabel 3.2 berikut.

Tabel 3.2 Skenario Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi tahun 2020

| NO | Uraian | Tanpa Covid | Skala Berat | Skala Sangat Berat |
|----|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| 1 | Kota Malang | 5,43 - 5,83 | 2,61 – 3,01 | 0,64 – 1,04 |
| 2 | Jawa Timur | 5,28 – 5,68 | 2,48 – 2,88 | 0,50 – 0,90 |
| 3 | Nasional | 5,10 – 5,50 | 2,10 – 2,50 | -0,2 – (-0,6) |

Sebelum pandemi COVID-19, proyeksi pertumbuhan Ekonomi Kota Malang tahun 2020 diproyeksi pada kisaran 5,43% sampai dengan 5,83% atau lebih tinggi daripada proyeksi pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur yang berada pada kisaran 5,28% sampai dengan 5,68%, sedangkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Nasional berapa pada kisaran 5,10% sampai dengan 5,50%. Dalam skala pandemi berat hingga Juni 2020, proyeksi pertumbuhan Ekonomi Kota Malang melambat signifikan pada kisaran 2,61% sampai dengan 3,01%. Hal ini sebagai dampak menurunnya daya beli masyarakat dari berbagai sektor karena adanya pandemi COVID-19. Dalam skala Pandemi COVID-19 sangat berat, proyeksi pertumbuhan ekonomi Kota Malang berada pada kisaran angka 0,64% sampai dengan 1,04% atau minus sebesar 4% dari proyeksi semula yakni 5,43% sampai dengan 5,8%. Proyeksi pertumbuhan ekonomi Kota Malang tahun 2020 dalam segala kondisi masih diatas pertumbuhan ekonomi regional dan nasional.

Melihat dampak ekonomi yang ditimbulkan Pandemi COVID-19, pemerintah telah telah melakukan beberapa langkah *extraordinary* untuk melindungi masyarakat dan perekonomian ditengah wabah COVID-19. Sejalan dengan kondisi perekonomian yang melambat pada tahun 2020, pemerintah pusat melakukan beberapa kebijakan diantaranya melakukan penghematan, *refocusing* kegiatan serta realokasi anggaran baik tingkat pusat dan daerah. Dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2021, tema pembangunan berfokus pada mempercepat pemulihan ketahanan ekonomi dan kehidupan masyarakat dengan fokus pada industri, pariwisata, investasi dan penguatan sistem kesehatan nasional. Skenario proyeksi pertumbuhan Ekonomi Kota Malang tahun 2021 sebagai berikut.

Tabel 3.3 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi tahun 2021

| NO | Wilayah | Tanpa Covid | Skala Berat | Skala Sangat Berat |
|----|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| 1 | Kota Malang | 5,40 – 5,80 | 5,86 – 6,36 | 6,60 – 7,00 |
| 2 | Jawa Timur | 4,98 – 5,48 | 5,87 – 6,37 | 6,50 – 6,90 |
| 3 | Nasional | 4,90 – 5,40 | 5,60 – 5,40 | 6,40 – 6,80 |

Proyeksi pertumbuhan Ekonomi Kota Malang tahun 2021 sebelum COVID-19 berada pada kisaran 5,40% sampai dengan 5,83% atau turun 0,03% dibandingkan tahun 2020 pada kondisi normal. Seiring dengan pandemi COVID-19, proyeksi pertumbuhan Ekonomi dalam skala berat berada pada kisaran 5,86% sampai dengan 6,36%, sedangkan dalam skala sangat berat pertumbuhan ekonomi diproyeksi bergerak dalam kisaran 6,60% sampai dengan 7,00%.

Sektor paling berat yang terdampak pada Kota Malang pada Tahun 2020 yaitu Hotel, Restoran, Pengolah Makanan, Perdagangan Besar dan Eceran, Konsutruksi serta jasa-jasa lain. Dari sektor yang terdampak tersebut, terdapat 4 sektor yang diprediksi mengalami pertumbuhan negatif yaitu pedagang eceran, industri pengolahan dan restoran/hotel. Oleh sebab itu, berdasarkan asumsi proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2021, perlu peningkatan terhadap sektor-sektor tersebut dalam rangka pemulihan kondisi ekonomi di Kota Malang.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2021

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas dan efektifitas program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan PAD sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
2. Pendapatan Transfer;
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Dengan melihat performa pendapatan daerah dalam 5 tahun terakhir (2015 - 2019), diharapkan Pendapatan daerah dapat lebih meningkat pada masa yang akan datang dengan diikuti beberapa upaya dan kebijakan untuk dapat mencapainya. Untuk itu, dirumuskan beberapa arah kebijakan Pendapatan Daerah sebagai berikut.

4.1.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2021

Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

1. Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Ketentuan tentang Pajak Daerah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2015

- tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
3. Obyek Pajak yang dipungut sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah meliputi :
 - a. Pajak Restoran;
 - b. Pajak Hotel;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Parkir;
 - g. Pajak Air Tanah;
 - h. Pajak Bumi dan Bangunan; dan
 - i. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
 4. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan asumsi makro seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2021 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
 5. Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah daerah melakukan kegiatan pemungutan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besaran pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya dengan berbasis teknologi.
 6. Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pemerintah daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing Daerah untuk pendanaan program Jaminan Kesehatan Nasional.
 7. Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sebagaimana diamanatkan dalam ayat (3) Pasal 56 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan ayat (2) Pasal 44 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16

Tahun 2010 tentang Pajak Daerah bahwa hasil penerimaan pajak penerangan jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.

8. Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan;
9. Pemerintah daerah dapat memberikan insentif berupa pengurangan Pajak Reklame bagi koperasi dan UMKM untuk mendukung pengembangan usaha koperasi dan pemberdayaan UMKM.
10. Pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Larangan pemerintah daerah melakukan pungutan:
 - a. Menyebabkan ekonomi biaya tinggi;
 - b. Menghambat mobilitas penduduk;
 - c. Lalu lintas barang dan jasa antar daerah; dan
 - d. Kegiatan impor/ekspor yang merupakan program strategis nasional.

2) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1. Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2021 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:
 - a. Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa dividen, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
 - b. Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
 - c. Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
 - d. Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
 - e. Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah;sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Ketentuan tentang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan diatur dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah. BUMD milik Pemerintah Kota Malang adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tugu Tirta, PD. Rumah Pemotongan Hewan dan PT. BPR Tugu Artha Sejahtera (Perseroda).

3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

1. Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek, yang terdiri atas:
 - a. Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b. Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - c. Hasil kerja sama daerah;
 - d. Jasa giro;
 - e. Hasil pengelolaan dana bergulir;
 - f. Pendapatan bunga;
 - g. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
 - h. Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
 - i. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - j. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - k. Pendapatan denda pajak daerah;
 - l. Pendapatan denda retribusi daerah;
 - m. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
 - n. Pendapatan dari pengembalian;
 - o. Pendapatan dari BLUD; dan
 - p. Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan kerjasama penyediaan infrastruktur

(KSPI) sesuai peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

4.1.2 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Transfer

Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer terdiri dari transfer dari Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1) Dana Bagi Hasil Pajak

1. Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPH) yang terdiri dari DBH-PPH Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2021 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2021 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan padarealisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2017. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2021 ditetapkan dan/atau terdapat perubahanatau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuanganyang dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.
2. Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2021. Apabila Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2021 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun

terakhir yaitu Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2017. Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2021 telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

2) Dana Bagi Hasil Bukan Pajak

1. Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA) terdiri dari:
 - a. DBH-Kehutanan;
 - b. DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara;
 - c. DBH-Pertambangan Minyak Bumi;
 - d. DBH-Pertambangan Gas Bumi;
 - e. DBH-Pengusahaan Panas Bumi; dan
 - f. DBH-Perikanan;

dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2021 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2021 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan padarealisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2017.

2. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 mengenai Alokasi DBH-SDA atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan alokasi DBH-SDA atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuanganyang dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-SDA dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD

- Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.
3. Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA Tahun Anggaran 2021 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan Tahun Anggaran 2020, pendapatan lebih tersebut dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.
 4. Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2021 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2021 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
 5. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2021 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2021 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi tersebut didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2017.
 6. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2021 tersebut ditetapkan, atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan, setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

3) Dana Alokasi Umum (DAU)

1. DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2021 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2020.
2. Apabila Peraturan Presiden ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan, setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

4) Dana Alokasi Khusus (DAK)

1. Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN yang dialokasikan pada pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan/sub kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan dana transfer khusus tersebut, yang diuraikan:

(a) DAK Fisik; dan

(b) DAK Non Fisik.

Pendapatan Dana Transfer Khusus dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2021 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati kepala daerah bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2021 ditetapkan atau informasi resmi

mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Transfer Khusus langsung dituangkan dalam rancangan Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2021.

2. Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2021 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menganggarkan Dana Transfer Khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

5) Dana Insentif Daerah (DID)

1. Dana Insentif Daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu. Penganggaran Dana Insentif Daerah dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2021 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2021 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
2. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi Dana Insentif Daerah dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

3. Pendapatan pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang bersumber dari Dana Insentif Daerah, penggunaannya berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Insentif Daerah.

Sedangkan kebijakan perencanaan Pendapatan Transfer yang bersumber dari Transfer Antar Daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1) Pendapatan Bagi Hasil

1. Pendapatan bagi hasil merupakan danayang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada pemerintah daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2021. Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2021 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2021, penganggarannya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2020 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2019.
2. Dalam hal terdapat bagian pemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh Pemerintah Provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2020, dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

2) Pendapatan Bantuan Keuangan

1. Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari pemerintah daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya. Pendapatan bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum maupun bersifat khusus dan dianggarkan dalam APBD penerima bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:
 - (a) Bantuan keuangan umum dari daerah provinsi;
 - (b) Bantuan keuangan khusus dari daerah provinsi;
 - (c) Bantuan keuangan umum dari daerah kabupaten/kota; dan
 - (d) Bantuan keuangan khusus dari daerah kabupaten/kota.

2. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum dimaksud diterima setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.
3. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

4.1.3 Kebijakan Perencanaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Sah

Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1) Pendapatan Hibah

Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi. Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah.

2) Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Penganggaran lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun

Anggaran 2021 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah.

4.2 Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pendapatan Daerah Kota Malang Tahun 2021 diproyeksikan sebesar Rp. 1.874.052.406.685,30 turun sebesar Rp. 415.269.685.331,79 atau sebesar 18,13% jika dibandingkan dengan target pendapatan Tahun 2020 pada APBD Murni sebesar Rp. 2.289.322.092.017,09. Tabel Proyeksi Pendapatan Kota Malang Tahun 2021 disajikan pada Tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1 Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021

| Kode. | Uraian | Pagu Murni 2020 (Rp.) | Target 2021 (Rp.) | Penurunan/ Penambahan (Rp.) |
|-------------|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 4. | PENDAPATAN DAERAH | | | |
| 4.1. | Pendapatan Asli Daerah | 731.100.229.507,00 | 641.411.037.175,21 | (89.689.192.331,79) |
| 4.1.01. | Pajak daerah | 621.053.137.049,00 | 511.310.472.903,11 | (109.742.664.145,89) |
| 4.1.02. | Retribusi daerah | 45.724.817.200,00 | 45.566.084.400,00 | (158.732.800,00) |
| 4.1.03. | Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan | 30.130.277.258,00 | 36.611.744.952,10 | 6.481.467.694,10 |
| 4.1.04. | Lain-lain PAD yang sah | 34.191.998.000,00 | 47.922.734.920,00 | 13.730.736.920,00 |
| 4.2. | Pendapatan Transfer | 1.461.475.262.510,09 | 1.139.472.609.510,09 | (322.002.653.000,00) |
| 4.2.01 | Transfer Pemerintah Pusat | 1.275.092.137.000,00 | 956.547.843.000,00 | (318.544.294.000,00) |
| 4.2.01.01 | Dana Perimbangan | 1.224.050.117.000,00 | 956.547.843.000,00 | (318.544.294.000,00) |
| 4.2.01.02 | Dana Insentif Daerah | 51.042.020.000,00 | 0,00 | (51.042.020.000,00) |
| 4.2.02. | Transfer Antar Daerah | 186.383.125.510,09 | 182.924.766.510,09 | (3.458.359.000,00) |
| 4.2.02.01 | Pendapatan Bagi Hasil | 182.924.766.510,09 | 182.924.766.510,09 | 0,00 |
| 4.2.02.02 | Bantuan Keuangan | 3.458.359.000,00 | 0,00 | (3.458.359.000,00) |
| 4.3. | Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah | 96.746.600.000,00 | 93.168.760.000,00 | (3.577.840.000,00) |
| 4.3.01 | Pendapatan Hibah | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.02 | Dana Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.03 | Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan | 96.746.600.000,00 | 93.168.760.000,00 | (3.577.840.000,00) |
| | | | | 0,00 |
| | JUMLAH PENDAPATAN DAERAH | 2.289.322.092.017,09 | 1.874.052.406.685,30 | (415.269.685.331,79) |

Adanya penurunan proyeksi atas target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 dibanding dengan Pendapatan Daerah yang dianggarkan pada APBD Murni Tahun Anggaran 2020 lebih diakibatkan karena situasi global dan nasional karena adanya Pandemi COVID-19 sehingga mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah, terutama pendapatan yang berasal dari pajak dan retribusi daerah. Target pendapatan Pajak Daerah Tahun 2021 turun Rp. 109.742.664.145,89 atau sebesar 17,67%. Sedangkan Retribusi Daerah diproyeksikan turun sebesar Rp. 158.732.800,00 atau sebesar 0,35%.

Sedangkan untuk pendapatan transfer tahun 2021 turun sebesar Rp. 89.689.192.331,79 atau sebesar 22,03% jika dibandingkan dengan target pendapatan APBD Murni Tahun 2020. Pendapatan transfer berupa Dana Alokasi Khusus dan Dana Insentif Daerah (DID) tidak diproyeksi sementara waktu sampai adanya kejelasan plafon anggaran yang diterbitkan oleh portal dari Kementerian Keuangan atau ditetapkannya pagu anggaran ke daerah pada Peraturan Presiden terkait Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) pada APBN Tahun Anggaran 2021. Pencantuman Plafon atas akun pada Pendapatan Transfer masih dapat memungkinkan setelah proses kesepakatan KUA dana PPAS melalui mekanisme pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021. Transfer antar daerah berupa Pendapatan Bagi Hasil Provinsi diproyeksikan sama dengan target pendapatan pada APBD Induk Tahun 2020, sedangkan Jenis Pendapatan berupa Bantuan Keuangan provinsi diasumsikan Nihil sampai dengan terbitnya Peraturan Gubernur tentang Bantuan Keuangan Provinsi untuk Kabupaten/Kota dan akan dilakukan perubahan Penjabaran APBD TA. 2021.

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2021 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan memiliki dasar hukum yang melandasinya serta untuk pengendalian dan pemulihan pasca pandemi COVID-19. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Belanja Daerah memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Kebijakan Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2021 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi. Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan. Kebijakan Belanja Daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah. Kebijakan Daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, klasifikasi belanja daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. *Kebijakan Perencanaan Belanja Operasional memperhatikan hal-hal sebagai berikut.*

1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota

DPRD, serta Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya penganggaran belanja pegawai memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya;
- b. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai Tahun 2021;
- c. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2.5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;
- d. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN/PNS Daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2021 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
- e. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi ASN dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Sedangkan penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya. Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, kepala daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. Berkaitan dengan itu, dalam hal kepala daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri Dalam Negeri. Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.

- g. Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- h. Honorarium digunakan untuk menganggarkan pemberian honorarium kepada ASN dalam rangka pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan daerah, meliputi honorarium penanggungjawab pengelola keuangan, honorarium pengadaan barang dan jasa, honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2019 tentang Standar Harga Satuan Regional.

2) Belanja Barang Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang

tercantum dalam RPJMD pada Perangkat Daerah terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan. Kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Penganggaran honorarium bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Pemberian honorarium bagi ASN dan Non ASN dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan ASN dan Non ASN dalam kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan kegiatan dimaksud;
- c. Penganggaran jasa narasumber/tenaga ahli besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage* (UHC), Pemerintah Daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan;
- e. Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa *medical check up*, kepada:
 1. Kepala daerah/wakil kepala daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak) dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. Pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- f. Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi:
1. Pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah;
 2. Pimpinan dan Anggota DPRD; serta
 3. Unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prioritas pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi;

- g. Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Sewa kendaraan dalam kotadibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk Walikota/Wakil Walikota, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.
 2. Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
 3. Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
 4. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum;
 5. Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum;
 6. Biaya pemeriksaan kesehatan COVID-19 (*rapid test/PCR test/swab test*) sesuai dengan biaya riil (sepanjang dalam masa pandemi COVID-19);
 7. Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- l. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan;
 - m. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - n. Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat dianggarkan dalam rangka:
 1. Pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;
 2. Penghargaan atas suatu prestasi;
 3. Beasiswa kepada masyarakat;
 4. Penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

5. TKDD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Belanja Hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:

1. Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
2. Bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
3. Tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - a. Kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
5. Memenuhi persyaratan penerima hibah.

Selanjutnya, penganggaran belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Penjelasan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah. Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

4) Belanja Bantuan Sosial

1. Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
2. Alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2021 berdasarkan hasil evaluasi Kepala perangkat daerah atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Penganggaran Hibah dan Bantuan Sosial mempedomani Peraturan Walikota Malang Nomor 105 tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Kebijakan Perencanaan Belanja Modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

- 1) Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2021 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah;
- 2) Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:

a. Belanja Modal Tanah

Belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

b. Belanja Modal Peralatan Dan Mesin

Belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantoran dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

c. Belanja Modal Bangunan Dan Gedung

Belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

d. Belanja Modal Jalan, Irigasi, Dan Jaringan

Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

e. Belanja Aset Tetap Lainnya

Belanja aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

f. Belanja Aset Lainnya

Belanja aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

- 3) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri. Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi Perangkat Daerah dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan itu, standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, standar satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan satuan biaya pemeliharaan sarana kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Kebijakan Perencanaan Belanja Tak Terduga memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

- 1) Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2021 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali pemerintah daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian

yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan;

- 2) Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- 3) Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
- 4) Pengeluaran untuk mendanai:
 - a. Keadaan darurat di luar kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa, digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Keperluan mendesak; dan/atau
 - c. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya;

yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD.

- 5) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, menggunakan:
 - a. Dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. Memanfaatkan kas yang tersedia.

Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA-SKPD dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer Dan Belanja Tidak Terduga

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah dikelompokkan menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Proyeksi Rencana Belanja Tahun Anggaran Tahun 2021 jika dibandingkan dengan APBD Induk Tahun 2020 sebagaimana Tabel 5.1 Berikut.

Tabel 5.1 Proyeksi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

| Kode | Uraian | Pagu Murni 2020 (Rp.) | Target 2021 (Rp.) | Penurunan/ Penambahan (Rp.) |
|------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | Belanja Operasi | 2.102.126.259.134,44 | 1.334.418.231.883,66 | (767.708.027.250,78) |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 947.081.464.452,54 | 826.899.525.883,66 | (120.181.938.568,88) |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.027.082.568.681,90 | 389.539.056.000,00 | (637.543.512.681,90) |
| 5.1.03 | Belanja Bunga | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.04 | Belanja Subsidi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.05 | Belanja Hibah | 115.142.466.000,00 | 104.522.290.000,00 | (10.620.176.000,00) |
| 5.1.06 | Belanja Bantuan Sosial | 12.819.760.000,00 | 13.457.360.000,00 | 637.600.000,00 |
| 5.2 | Belanja Modal | 628.037.295.081,50 | 580.053.561.000,00 | (47.983.734.081,50) |
| 5.3 | Belanja Tidak Terduga | 2.639.022.846,15 | 37.580.664.282,44 | 34.941.641.436,29 |
| 5.4 | Belanja Transfer | 1.307.146.951,60 | 0,00 | (1.307.146.951,60) |
| 5.4.01 | Belanja Bagi Hasil | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.4.02 | Belanja Bantuan Keuangan | 1.307.146.951,60 | 0,00 | (1.307.146.951,60) |
| | | | | |
| | JUMLAH BELANJA DAERAH | 2.734.109.724.013,69 | 1.952.052.457.166,10 | (782.057.266.847,59) |

Anggaran Belanja Operasi tahun 2021 turun sebesar Rp. 767.708.027.250,78 jika dibandingkan dengan Anggaran Belanja Operasi APBD Murni Tahun 2020 atau sebesar 36,52%. Penurunan belanja operasi bersumber dari belanja pegawai sebesar Rp. 120.181.938.568,88 atau turun 12,69%, Belanja Barang dan Jasa turun sebesar Rp. 637.543.512.681,90 atau 62,07%, Belanja Hibah turun sebesar Rp. 10.620.176.000,00 atau 9,22% dan Belanja Bantuan Sosial turun sebesar Rp. 637.600.000,00 atau 4,97%. Anggaran Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp. 580.053.561.000,00, turun sebesar Rp. 47.983.734.081,50 atau 7,64% jika dibandingkan dengan anggaran Belanja Modal pada APBD Murni tahun 2020 yang dianggarkan sebesar Rp. 628.037.295.081,50. Sedangkan Alokasi Belanja Tak Terduga diproyeksikan naik sebesar 1324,04% dari Rp. 2.639.022.846,15 menjadi Rp. 37.580.664.282,44.

BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Kondisi Pembiayaan daerah di Kota Malang dapat diketahui bahwa penerimaan pembiayaan selalu lebih besar dari pengeluaran pembiayaan. Penerimaan masih didominasi oleh SiLPA tahun sebelumnya yang selalu mengalami kenaikan dalam 5 (lima) tahun terakhir. Sedangkan pengeluaran pembiayaan didominasi pada komponen penyertaan modal untuk memperkuat kemampuan operasional perusahaan daerah. Proyeksi pembiayaan tahun anggaran 2021 sebagaimana Tabel 6.1 berikut.

Tabel 6.1 Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021

| Kode | Uraian | Pagu Murni 2020 (Rp.) | Target 2021 (Rp.) | Penurunan/ Penambahan (Rp.) |
|------------|---|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 6 | PEMBIAYAAN DAERAH | | | |
| 6.1 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 484.625.295.873,60 | 103.000.050.480,80 | 381.625.245.392,80 |
| 6.1.1 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya | 484.625.295.873,60 | 103.000.050.480,80 | 381.625.245.392,80 |
| 6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.4 | Penerimaan Pinjaman Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.5 | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.6 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 39.837.663.877,00 | 25.000.000.000,00 | 14.837.663.877,00 |
| 6.2.1 | Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Daerah | 39.837.663.877,00 | 25.000.000.000,00 | |
| 6.2.3 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.3 | Pemberian Pinjaman Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.4 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 444.787.631.996,60 | 78.000.050.480,80 | (366.787.581.515,80) |

Struktur pembiayaan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terbagi dalam Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Adapun kebijakan atas pembiayaan daerah sebagai berikut.

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

1. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2020 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun

Anggaran 2021 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

2. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan akan diarahkan untuk meningkatkan akurasi pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan pembiayaan lainnya.
3. SiLPA tahun 2018-2023 diproyeksikan tumbuh rata-rata per tahun sebesar 8,56% dengan tahun dasar 2017, namun demikian tahun-tahun mendatang proses perencanaan dan penganggaran diharapkan akan menjadi lebih baik dan sistem pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sudah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau dengan asumsi bahwa SiLPA harus mampu menutup defisit anggaran yaitu maksimal 7% - 8% dari total APBD.
4. Terkait dengan pinjaman daerah, Pemerintah Pusat telah membuka kesempatan bagi pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan, untuk melakukan pinjaman sebagai salah satu instrumen pendanaan pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, mengingat adanya konsekuensi kewajiban yang harus dibayar atas pelaksanaan pinjaman pemerintah daerah dimaksud, seperti angsuran pokok, biaya bunga, denda, dan biaya lainnya, pemerintah daerah akan terus mengedepankan prinsip kehati-hatian (*prudential management*), profesional, dan tepat guna dalam penggunaan potensi pinjaman daerah tersebut agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi keuangan daerah.
5. Selain itu juga dibuka peluang bagi pemerintah daerah untuk menggalang dana pinjaman pemerintah daerah yang bersumber dari masyarakat sebagai salah satu sumber pendanaan daerah. Sumber pendanaan tersebut adalah obligasi daerah untuk mendanai investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pada aspek pengeluaran pembiayaan, kebijakan pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk penyertaan modal BUMD disertai dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD dan pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan.

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Sasaran dan prioritas pembangunan merupakan fokus pembangunan pemerintah daerah Kota Malang untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berfungsi sebagai *milestone* pembangunan di Kota Malang. Prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2021 juga harus disinergikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan Nasional serta prioritas dan sasaran pembangunan Jawa Timur guna untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan dari pusat hingga level daerah sehingga perlu dukungan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memadai. Oleh sebab itu dibutuhkan strategi pencapaian dan langkah-langkah kongkrit dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

Adapun langkah-langkah dan strategi yang dilakukan dalam upaya mencapai target pendapatan Asli Daerah Tahun 2021 sebagai berikut.

1. Mengembangkan peran dan fungsi Perangkat Daerah Penghasil dan BUMD dalam pelayanan dan pendapatan;
2. Mengembangkan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi;
3. Mengembangkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah;
4. Mengembangkan pengelolaan aset dan keuangan daerah;
5. Mengembangkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah;
6. Mengembangkan kinerja pelayanan masyarakat melalui penataan organisasi dan tata kerja, pengembangan sumber daya pegawai yang profesional dan bermoral, serta pengembangan sarana dan fasilitas pelayanan prima dan melaksanakan terobosan untuk peningkatan pelayanan masyarakat.

Sedangkan upaya yang dilakukan dalam rangka optimalisasi pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan memperhatikan:

1. Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain, seperti pemerintah pusat atau daerah otonom lain dalam rangka perimbangan keuangan, sehingga Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban pelaporan atas penggunaan pada beberapa sumber pendanaan yang berasal dari pendapatan transfer;
2. Sumber pendanaan dari pendapatan transfer memiliki spesifikasi dalam penggunaannya sesuai ketentuan atau perundang-undangan yang menyertainya, seperti DBHCHT, DAU tambahan, Dana Bagi Pajak Provinsi dan Bantuan Keuangan Provinsi;

3. Sumber pendanaan, seperti DAK, DID dan DAU tambahan, tergantung atas proses verifikasi dan penilaian atas beberapa kriteria daerah oleh Pemerintah Pusat, sehingga belum dapat dianggarkan sementara, menyesuaikan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau informasi resmi mengenai alokasi Tahun Anggaran 2021 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan;
4. Sumber pendanaan Bantuan Keuangan Provinsi, tergantung atas proses verifikasi dan penilaian atas beberapa kriteria daerah oleh Pemerintah Provinsi, sehingga belum dapat dianggarkan sementara, menyesuaikan Peraturan Gubernur mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021;
5. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, memiliki porsi alokasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sedangkan strategi pencapaian pembangunan melalui program dan kegiatan, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan. Dalam rangka mengatur penggunaan anggaran belanja daerah agar tetap terarah, efisien dan efektif, maka arah kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2021 sesuai dengan sasaran pembangunan tahun 2021 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2018-2023, sebagai berikut :

1. Kebijakan belanja daerah mengacu dengan RPJMD Tahun 2018-2023 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dapat dimaknai bahwa Belanja Langsung merupakan Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal pada Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga Belanja Langsung yang dimaksud menjadi Program/Kegiatan pada Perangkat Daerah;
2. Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (*performance based*) untuk mendukung capaian target kinerja utama pada tahun 2021 dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja dan sasaran pembangunan tahun 2021, yaitu: peningkatan aksesibilitas pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, layanan dasar), infrastruktur, perlindungan sosial dan industri kreatif masyarakat;

3. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kota Malang yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
4. Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji PNS, belanja bagi hasil kepada Kota/kota, dan belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif.

BAB VIII PENUTUP

Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Malang Tahun Anggaran 2021 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Walikota Malang Nomor 24 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021.

KUA yang telah disepakati menjadi dasar dalam menyusun Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang tahun anggaran 2021 antara Pemerintah Kota Malang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang yang kemudian Nota Kesepakatan tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD (PPAS-APBD) Tahun 2021 dan Ranperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2021. Dokumen KUA ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dengan harapan masyarakat Kota Malang dapat merasakan manfaatnya secara optimal dari pembangunan yang telah direncanakan.

Malang, 11 September 2020





**PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN 2021**

**MALANG
TAHUN 2020**

DAFTAR ISI

| | | |
|-------------------------|--|-----------|
| COVER | | |
| DAFTAR ISI | | i |
| BAB I | PENDAHULUAN | 1 |
| | 1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah | 1 |
| | 1.2 Tujuan Penyusunan PPAS | 2 |
| | 1.3 Dasar Hukum Penyusunan PPAS..... | 2 |
| BAB II | RENCANA PENERIMAAN DAERAH | 4 |
| BAB III | PRIORITAS BELANJA DAERAH | 5 |
| BAB IV | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN | 22 |
| | 4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | 22 |
| | 4.2 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga..... | 23 |
| BAB V | RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH | 25 |
| BAB VI | PENUTUPAN | 26 |

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 24 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021.

Sesuai ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Sebagai proses awal dalam penyusunan dokumen APBD, penyusunan dokumen PPAS merupakan tahapan penting karena secara substansi, dokumen PPAS tahun anggaran 2021 memuat program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah. PPAS sebagai salah satu tahap proses penyusunan APBD memiliki fungsi sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah dan sebagai acuan dalam evaluasi dan pengujian kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Walikota tentang penjabaran APBD. Struktur anggaran yang optimal dapat dicapai apabila seluruh komponen pendapatan daerah dan belanja daerah diukur dalam sebuah proyeksi kinerja pemerintah secara menyeluruh. Pencapaian kinerja yang dimaksud adalah pengukuran tingkat output dari satu program dan atau kegiatan. Optimalisasi anggaran juga memerlukan dukungan politik (*political will*) dari pimpinan dalam hal ini Pengambil kebijakan dan Perangkat Daerah, yang akan berimplikasi pada produktifitas dan kinerja aparatur pemerintah yang berwibawa, bertanggung jawab, efisien, akuntabel dan transparan.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) memuat komponen-komponen prioritas dan plafon untuk pencapaian kinerja yang diharapkan pada setiap bidang kewenangan pemerintah daerah yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran dimana komponen prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik disusun berdasarkan klasifikasi fungsi yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Format penyusunan PPAS disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyusunan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 yang memuat Rencana Penerimaan Daerah, Prioritas Belanja Daerah, Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan serta Rencana Pembiayaan Daerah.

Setelah dokumen PPAS tahun anggaran 2021 tersusun maka sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 bahwa Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan Rancangan APBD tahun anggaran berikutnya.

1.2 Tujuan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Memperhatikan kondisi dan kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2021, penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2021 bertujuan:

1. Sebagai rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD;
2. Menyusun prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun anggaran 2021 menurut Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah, penanggung jawab, indikator dan target kinerja serta plafon indikatif untuk setiap program dan kegiatan.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Penyusunan Prioritas Plafon dan Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2021 berpedoman pada peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

- tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
 12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 43 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021;
 13. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Malang Tahun 2005-2025;
 14. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang Tahun 2018-2023;
 15. Peraturan Walikota Malang Nomor 24 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2021.

BAB II RENCANA PENERIMAAN DAERAH

Sesuai dengan kondisi perekonomian dan kebijakan pendapatan daerah dalam Rancangan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2021, maka target Pendapatan Daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah maupun sumber Penerimaan Pembiayaan Daerah yang meliputi SiLPA dan pinjaman daerah sebagaimana Tabel 2.1 berikut.

**Tabel 2.1 Rencana Penerimaan Daerah
Tahun Anggaran 2021**

| Kode | Penerimaan Daerah | Alokasi Anggaran | Dasar Hukum |
|-------------|---|-----------------------------|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 4. | PENDAPATAN DAERAH | | |
| 4.1. | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 641.411.037.175,21 | |
| 4.1.01. | Pajak Daerah | 511.310.472.903,11 | <ul style="list-style-type: none"> ❖ UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah ❖ PERDA Kota Malang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah |
| 4.1.02. | Retribusi Daerah | 45.566.084.400,00 | <ul style="list-style-type: none"> ❖ UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah ❖ Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum ❖ Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha ❖ Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Tertentu |
| 4.1.03. | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 36.611.744.952,10 | <ul style="list-style-type: none"> ❖ PMDN Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah. ❖ PERDA Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah |
| 4.1.04. | Lain-lain PAD yang sah | 47.922.734.920,00 | - |
| 4.2. | Pendapatan Transfer | 1.139.472.609.510,09 | |
| 4.2.01. | Transfer Pemerintah Pusat | 956.547.843.000,00 | ❖ PMK Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) |
| 4.2.02. | Transfer Antar Daerah | 182.924.766.510,09 | - |
| 4.3. | Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah | 93.168.760.000,00 | |
| 4.3.01. | Pendapatan Hibah | 0,00 | |
| 4.3.02. | Dana Darurat | 0,00 | |
| 4.3.03. | Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan | 93.168.760.000,00 | |
| | JUMLAH PENDAPATAN DAERAH | 1.874.052.406.685,30 | |
| 6.1 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | | |
| 6.1.1 | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Sebelumnya | 103.000.050.480,80 | |
| | JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 103.000.050.480,80 | |
| | JUMLAH PENERIMAAN DAERAH | 1.977.052.457.166,10 | |

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

Prioritas pembangunan Pemerintah Kota Malang pada Tahun 2021 merupakan prioritas pembangunan pada tahun ke-tiga RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023 yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Prioritas pembangunan ini dirumuskan dengan memperhatikan kondisi, dinamika dan kebutuhan masyarakat Kota Malang (dalam bentuk permasalahan dan isu strategis yang teridentifikasi) dan harus disinergikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan Nasional serta prioritas dan sasaran pembangunan Jawa Timur guna menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan dari pusat hingga level daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 bahwa sinergitas antara kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah juga harus memperhatikan arah kebijakan fiskal Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Pusat dengan tema Percepatan Pemulihan Sosial Ekonomi dan Penguatan Reformasi untuk keluar dari *Middle Income Trap*, dengan *Recovery* dan Reformasi Belanja antara lain peningkatan kualitas SDM, ICT, Litbang dan infrastruktur pendidikan menuju *industry 4.0 (knowledge economy)* pada bidang pendidikan, pemulihan dan penguatan sistem kesehatan pada bidang kesehatan, pemulihan dan penguatan program bantuan sosial serta berfokus pada program prioritas yang berorientasi hasil, efektif dan antisipatif.

Program prioritas sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021, Prioritas Belanja Pemerintah Kota Malang yang tertuang dalam Prioritas Plafon dan Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2021 memuat:

1. Sinergitas Program Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional;
2. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi; dan
3. Prioritas masing-masing daerah yang tercantum pada RKPD Tahun 2021.

Adapun sinergitas program dimaksud sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 sebagai berikut.

Tabel 3.1 Sinergitas Program Pemerintah Kota Malang Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

| NO | PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL | PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | SKPD PELAKSANA | KET |
|----|--|--|--|---------------------------------|-----|
| 1. | MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI UNTUK PERTUMBUHAN YANG BERKUALITAS DAN BERKEADILAN | 1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | Persentase Destinasi Wisata yang dibina | DISPORAPAR | - |
| | | 2. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif | Persentase Pemasaran Pariwisata | DISPORAPAR | - |
| | | 3. Program Pengembangan UMKM | Persentase Pertumbuhan Unit Usaha Mikro yang naik menjadi usaha kecil | DISKOPINDAG | - |
| | | 4. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri | Persentase peningkatan Jumlah IKM | DISKOPINDAG | - |
| | | 5. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan | Persentase Penetapan Pasar Rakyat Sebagai Pasar Halal | DISKOPINDAG | - |
| | | 6. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja | Persentase Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi | DISNAKER PMPTSP | - |
| 2. | MENGEMBANGKAN WILAYAH UNTUK MENGURANGI KESENJANGAN DAN MENJAMIN PEMERATAAN | - | - | - | - |
| 3. | MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING | 1. Program Pengembangan Kurikulum | a. Persentase APK PAUD, SD dan SMP b. Persentase APM PAUD, SD dan SMP c. Rata-rata Capaian Peningkatan Karakter Jenjang PAUD, SD dan SMP d. Rata-rata Capaian Peningkatan Karakter PNF | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | - |
| | | 2. Program Pengelolaan pendidikan | a. Persentase Guru tersertifikasi b. Presentase Guru dengan Nilai Uji Kompetensi Guru (UKG) Minimal 75 c. Rasio profesionalitas dan keahlian Teknis Tenaga Pendidikan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | - |
| | | 3. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | a. % unit pelayanan kesehatan yang memenuhi SPM b. Cakupan penduduk yang terjamin asuransi | Dinas Kesehatan | - |
| | | 4. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | a. Persentase puskesmas yang telah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) b. NDR (New Death Rate) c. BOR (Bed Occupancy Rate) RSUD d. Persentase Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif e. Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi, Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat, Tuberculosis (TB), Resiko Terinfeksi HIV f. Presentase Kelurahan UCI g. Angka Kematian Bayi h. Persentase Bayi Stunting | Dinas Kesehatan | - |
| | | 5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan | a. Persentase Tenaga Medis yang berkompeten b. Persentase ketersediaan alat kesehatan dan obat-obatan sesuai standar | Dinas Kesehatan | - |
| | | 6. Program Pengendalian Penduduk | a. TFR per WUS (15 s/d 49 tahun) b. Cakupan peserta KB Aktif c. Prosentase keluarga kelompok kegiatan Tribina aktif d. Persentase kelompok UPPKS Aktif | Dinas Sosial P3AP2KB | - |
| | | 7. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen | Persentase pertumbuhan UKM | DISKOPINDAG | - |

| NO | PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL | PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | SKPD PELAKSANA | KET | | |
|----|--------------------------------|--|---|---|--|-----------------------------------|---|
| | | 8. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting | - | | | | |
| | | 9. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan | - | | | | |
| | | 10. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri | - | | | | |
| | | 11. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan | - | | | | |
| | | 12. Program Pengembangan Ekspor | - | | | | |
| | | 13. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat | - | | | | |
| | | 14. Program Penanganan Kerawanan Pangan | Persentase Peningkatan Ketersediaan Pangan Utama | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | - | | |
| | | 15. Program Pengawasan Keamanan Pangan | - | | | | |
| | | 16. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya | - | | | | |
| | | 17. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan | - | | | | |
| | | 18. Program Penempatan Tenaga Kerja (UP Bidang Kelautan dan Perikanan) | - | DISNAKER PMPTSP | - | | |
| | | 19. Program Hubungan Industrial | - | | | | |
| | | 20. Program Rehabilitasi Sosial | Persentase (%) PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial | Dinas Sosial P3AP2KB | - | | |
| | | 21. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial | - | | | | |
| | | 22. Program Pemberdayaan Sosial | - | | | | |
| | | 23. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan | - | | | | |
| | | 24. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak | a. Persentase Organisasi Perempuan Yang Aktif b. Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan Anggaran Responsif Gender (ARG) | | | | |
| | | 25. Program peningkatan kualitas keluarga | - | | | | |
| | | 26. Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan | - | | | | |
| | | 27. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) | - | | | | |
| | | 28. Program Perlindungan Perempuan | - | | | | |
| | | 29. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak | - | | | | |
| | | 30. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | a. Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif b. Rasio Linmas per RT | Kecamatan | - | | |
| | | 31. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | - | | | | |
| | | 32. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | - | | | | |
| | | 33. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | - | | | | |
| | | 4. | REVOLUSI MENTAL DAN PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN | 1. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan | a. Persentase peningkatan pemahaman 7ana man, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa b. Persentase penyelesaian kejadian gangguan disintegrasi bangsa yang disebabkan kondisi ekonomi, 7ana m, budaya dan agama | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | - |
| | | | | 2. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial | Persentase Penyelesaian Kejadian Gangguan Disintegrasi Bangsa Yang Disebabkan Konflik Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya Dan Pertahanan Keamanan | | |
| | | | | 3. Program Pengembangan Kebudayaan | Persentase kelestarian keanekaragaman dan kekayaan budaya yang dibina | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | - |
| | | | | 4. Program Pengelolaan Permuseuman | - | | |
| | | | | 5. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya | - | | |

| NO | PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL | PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | SKPD PELAKSANA | KET |
|----|---|--|--|----------------------------------|-----|
| 5. | MEMPERKUAT INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PENGEMBANGAN EKONOMI DAN PELAYANAN DASAR | 1. Program pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase | a. Persentase Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik b. Persentase Jembatan Kota Dalam Kondisi Baik c. Persentase Fasilitas Penerangan Jalan d. Persentase Drainase Kota Dalam Kondisi Baik e. Persentase Irigasi Kota Dalam Kondisi Baik | DPUPR PERKIM | - |
| | | 2. Program Penyelenggaraan Jalan | Persentase drainase kota dalam kondisi baik | | |
| | | 3. Program Pengelolaan Sumber Daya Air | a. Persentase irigasi Kota dalam kondisi baik b. Persentase jalan yang memiliki jalur pejalan kaki | | |
| | | 4. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) | Persentase layanan rumah layak huni yang terjangkau | | |
| | | 5. Program Pengembangan Perumahan | Persentase lingkungan yang sehat 8ana man yang didukung dengan PSU | | |
| | | 6. Program kawasan permukiman serta 7. Permukiman kumuh | Persentase Rumah Tidak Layak Huni | | |
| | | 8. Program Penyelenggaraan Jalan | Persentase Bangunan Gedung Yang Memenuhi Syarat Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | | |
| | | 9. Program Penataan Bangunan Gedung | Persentase Pembangunan Kawasan Pioritas Sesuai Rt/bl | | |
| | | 10. Program Pengembangan Jasa Konstruksi | Persentase Rumah Tinggal Berakses Air Bersih | | |
| | | 11. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya | - | | |
| | | 12. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | - | | |
| | | 13. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) | a. Persentase Penurunan Titik Kemacetan b. Persentase layanan Angkutan Darat (Jumlah Angkutan Darat/Jumlah Penumpang Angkutan Darat) c. Persentase kepemilikan KIR Angkutan Umum | | |
| | | 14. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | a. Persentase Pelaksanaan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kewilayahan b. Persentase Usulan Masyarakat Untk Sarana Prasarana Di Wilayah Yang Diakomodir | Kecamatan | - |
| | | 15. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang | Persentase Jumlah Pelanggaran Tata Ruang yang tertangani | DPUPR PERKIM | - |
| | | 16. Program penyelesaian sengketa tanah Garapan | Persentase pemanfaatan SIPR dalam pemanfaatan ruang | | |
| | | 17. Program Informasi Dan Komunikasi Publik | a. Persentase informasi yang terlayani dan terpublikasi b. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti | Dinas Komunikasi dan Informatika | - |
| | | 18. Program Aplikasi Informatika | Persentase aplikasi informasi yang terintegrasi | | |

| NO | PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL | PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | SKPD PELAKSANA | KET |
|----|--|--|--|------------------------|-----|
| 6. | MEMBANGUN LINGKUNGAN HIDUP, MENINGKATKAN KETAHANAN BENCANA, DAN PERUBAHAN IKLIM | 1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup | Persentase dokumen perencanaan Lingkungan Hidup yang tersusun dan sesuai standart | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | - |
| | | 2. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) | - | | |
| | | 3. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | - | | |
| | | 4. Program Pengelolaan Persampahan | a. Persentase Pengurangan Sampah yang berkurang di masyarakat dan Sektor Informal (Merupakan nilai kumulatif) b. Persentase Penanganan Sampah | | |
| | | 5. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) | - | | |
| | | 6. Program Penanggulangan Bencana | a. Persentase Kejadian Bencana Pada Titik Pantau b. Persentase masyarakat tangguh bencana | BPBD | - |
| | | 7. Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum | a. Rasio Linmas per RT b. Persentase kejadian kebakaran yang ditangani | SATPOL-PP | - |
| 7. | MEMPERKUAT STABILITAS POLHUKHANKAM DAN TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK | 1. Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum | Persentase Penanganan Pelanggaran PERDA | SATPOL-PP | - |
| | | 2. Program Pelayanan Penanaman Modal | a. Persentase Penerbitan Ijin Dan Non Izin Ekonomi, Pariwisata Dan Sosial Budaya b. Persentase Penerbitan Ijin Dan Non Ijin Pekerjaan Umum | DISNAKER PMPTSP | - |
| | | 3. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) | a. Kontribusi retribusi pelayanan parkir terhadap PAD b. Kontribusi retribusi pelayanan parkir terhadap PAD | DINAS PERHUBUNGAN | - |
| | | 4. Program Pendaftaran Penduduk | Persentase Penduduk Yang Memiliki Dokumen Administrasi Kependudukan | DISPENDUK CAPIL | - |
| | | 5. Program Pencatatan Sipil | Persentase Penduduk Yang Memiliki Dokumen Administrasi Pencatatan Sipil | | |
| | | 6. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD. | BAPPEDA | - |
| | | 7. Program Perencanaan Perekonomian Dan Sumber Daya Alam | Persentase Penyusunan Renstra & Renja perangkat daerah mitra bidang pembangunan ekonomi dan sumberdaya alam yang sesuai dengan tahapan dan tata cara | | |
| | | 8. Program Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | a. Persentase Penyusunan Renstra & Renja perangkat daerah mitra Program Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang sesuai dengan tahapan dan tata cara b. Persentase Jumlah kajian/ analisa/ studi / rencana induk/ grand design sektor Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang ditindaklanjuti | | |
| | | 9. Program Perencanaan Infrastruktur dan Wilayah | a. Persentase Penyusunan Renstra & Renja perangkat daerah mitra bidang Infrastruktur dan pengembangan wilayah yang sesuai dengan tahapan dan tata cara kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW b. Persentase Jumlah kajian/ analisa/ studi / rencana induk/ grand design sektor Infrastruktur dan kewilayahan yang mendukung perencanaan | BAPPEDA | - |

| NO | PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL | PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | SKPD PELAKSANA | KET |
|----|--------------------------------|--|--|--------------------|-----|
| | | 10. Program Pengelolaan Keuangan Daerah | Persentase BTL APBD \leq 50% | BKAD | - |
| | | 11. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah | Kontribusi Pemanfaatan Aset terhadap PAD | | |
| | | 12. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah | a. Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah b. Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD | BAPENDA | - |
| | | 13. Program Perekonomian dan Pembangunan | a. Persentase Proses Pengadaan Barang/Jasa Sesuai Ketentuan b. Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan Dan Pelaporan Yang Disusun Tepat Waktu | Sekretariat Daerah | - |
| | | 14. Program Administrasi Umum | a. Nilai kapasitas organisasi b. Persentase Standar Kompetensi Perangkat Daerah Yang Ditetapkan | Bagian Organisasi | - |
| | | 15. Program Penyelenggaraan Pengawasan | a. Persentase Dokumen Perencanaan Dan Penganggaran Dilakukan Reviu b. Persentase Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Dilakukan Reviu | Inspektorat | - |
| | | 16. Program Kepegawaian Daerah | a. Persentase Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu b. Persentase Terisnya Jabatan Struktural Dan Pelaksana | BKPSDM | - |
| | | 17. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia | a. Persentase ASN Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Formal b. Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural | | |

Tabel 3.2 Sinergitas Program Pemerintah Kota Malang Terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Timur

| NO | PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR | PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | SKPD PELAKSANA | KET |
|----|--|--|--|---------------------------------|-----|
| 1. | PEMBANGUNAN EKONOMI KERAKYATAN MELALUI PENINGKATAN NILAI TAMBAH EKONOMI DAN PARIWISATA | 1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | Persentase Destinasi Wisata yang dibina | DISPORAPAR | - |
| | | 2. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif | Persentase Pemasaran Pariwisata | DISPORAPAR | - |
| | | 3. Program Pengembangan UMKM | Persentase Pertumbuhan Unit Usaha Mikro yang naik menjadi usaha kecil | DISKOPINDAG | - |
| | | 4. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri | Persentase peningkatan Jumlah IKM | DISKOPINDAG | - |
| | | 5. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan | Persentase Penetapan Pasar Rakyat Sebagai Pasar Halal | DISKOPINDAG | - |
| | | 6. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja | Persentase Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi | DISNAKER PMPTSP | - |
| 2. | - | - | - | - | - |
| 3. | PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN, KESEHATAN, PRODUKTIVITAS DAN DAYA SAING KETENAGAKERJAAN, PERLUASAN KESEMPATAN KERJA SERTA PENGENTASAN KEMISKINIAN DENGAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN PEMANFAATAN ARTIFICIAL INTELEGENCE (AI) | 1. Program Pengembangan Kurikulum | a. Persentase APK PAUD, SD dan SMP b. Persentase APM PAUD, SD dan SMP c. Rata-rata Capaian Peningkatan Karakter Jenjang PAUD, SD dan SMP d. Rata-rata Capaian Peningkatan Karakter PNF | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | - |
| | | 2. Program Pengelolaan pendidikan | a. Persentase Guru tersertifikasi b. Presentase Guru dengan Nilai Uji Kompetensi Guru (UKG) Minimal 75 c. Rasio profesionalitas dan keahlian Teknis Tenaga Pendidikan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | - |
| | | 3. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | a. % unit pelayanan kesehatan yang memenuhi SPM b. Cakupan penduduk yang terjamin asuransi | Dinas Kesehatan | - |
| | | 4. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | a. Persentase puskesmas yang telah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) b. NDR (New Death Rate) c. BOR (Bed Occupancy Rate) RSUD d. Persentase Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif e. Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi, Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat, Tuberculosis (TB), Resiko Terinfeksi HIV f. Prosentase Kelurahan UCI g. Angka Kematian Bayi h. Persentase Bayi Stunting | Dinas Kesehatan | - |
| | | 5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan | a. Persentase Tenaga Medis yang berkompeten b. ketersediaan alat kesehatan dan obat-obatan sesuai standar | Dinas Kesehatan | - |
| | | 6. Program Pengendalian Penduduk | a. TFR per WUS (15 s/d 49 tahun) b. Cakupan peserta KB Aktif c. Prosentase keluarga kelompok kegiatan Tribina aktif d. Persentase kelompok UPPKS Aktif | Dinas Sosial P3AP2KB | - |
| | | 7. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen | Persentase pertumbuhan UKM | DISKOPINDAG | - |
| | | 8. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting | - | | |
| | | 9. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan | - | | |
| | | 10. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri | - | | |

| NO | PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR | PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | SKPD PELAKSANA | KET |
|----|---|---|--|--------------------------------------|-----|
| | | 11. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan | - | | |
| | | 12. Program Pengembangan Ekspor | - | | |
| | | 13. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat | | | |
| | | 14. Program Penanganan Kerawanan Pangan | Persentase Peningkatan Ketersediaan Pangan Utama | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | - |
| | | 15. Program Pengawasan Keamanan Pangan | - | | |
| | | 16. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya | - | | |
| | | 17. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan | - | | |
| | | 18. Program Penempatan Tenaga Kerja (UP Bidang Kelautan dan Perikanan) | - | DISNAKER PMPTSP | - |
| | | 19. Program Hubungan Industrial | - | | |
| | | 20. Program Rehabilitasi Sosial | Persentase (%) PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial | | |
| | | 21. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial | - | | |
| | | 22. Program Pemberdayaan Sosial | - | | |
| | | 23. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan | - | | |
| | | 24. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak | a. Persentase Organisasi Perempuan Yang Aktif b. Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan Anggaran Responsif Gender (ARG) | Dinas Sosial P3AP2KB | - |
| | | 25. Program peningkatan kualitas keluarga | - | | |
| | | 26. Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan | - | | |
| | | 27. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) | - | | |
| | | 28. Program Perlindungan Perempuan | - | | |
| | | 29. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak | - | | |
| | | 30. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | a. Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif b. Rasio Linmas per RT | | |
| | | 31. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | - | Kecamatan | - |
| | | 32. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | - | | |
| | | 33. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | - | | |
| 4. | MENINGKATKAN KEPEDULIAN SOSIAL DAN PELESTARIAN NILAI-NILAI BUDAYA LOKAL | 1. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan | a. Persentase peningkatan pemahaman 12ana man, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa b. Persentase penyelesaian kejadian gangguan disintegrasi bangsa yang disebabkan kondisi ekonomi, 12ana m, budaya dan agama | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | - |
| | | 2. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial | Persentase Penyelesaian Kejadian Gangguan Disintegrasi Bangsa Yang Disebabkan Konflik Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya Dan Pertahanan Keamanan | | |
| | | 3. Program Pengembangan Kebudayaan | Persentase kelestarian keanekaragaman dan kekayaan budaya yang dibina | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | - |
| | | 4. Program Pengelolaan Permuseuman | - | | |
| | | 5. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya | - | | |
| 5. | PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN DAN PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN | 1. Program pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase | a. Persentase Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik b. Persentase Jembatan Kota Dalam Kondisi Baik c. Persentase Fasilitas Penerangan Jalan d. Persentase Drainase Kota Dalam Kondisi Baik e. Persentase Irigasi Kota Dalam Kondisi Baik | DPUPR PERKIM | - |

| NO | PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR | PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | SKPD PELAKSANA | KET | | |
|---|--|--|--|--|---|------------------------|---|
| | | 2. Program Penyelenggaraan Jalan | Persentase drainase kota dalam kondisi baik | | | | |
| | | 3. Program Pengelolaan Sumber Daya Air | a. Persentase irigasi Kota dalam kondisi baik b. Persentase jalan yang memiliki jalur pekalangan kaki | | | | |
| | | 4. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) | Persentase layanan rumah layak huni yang terjangkau | | | | |
| | | 5. Program Pengembangan Perumahan | Persentase lingkungan yang sehat 13ana man yang didukung dengan PSU | | | | |
| | | 6. Program kawasan permukiman serta 7. Permukiman kumuh | Persentase Rumah Tidak Layak Huni | | | | |
| | | 8. Program Penyelenggaraan Jalan | Persentase Bangunan Gedung Yang Memenuhi Syarat Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | | | | |
| | | 9. Program Penataan Bangunan Gedung | Persentase Pembangunan Kawasan Pioritas Sesuai Rt/bl | | | | |
| | | 10. Program Pengembangan Jasa Konstruksi | Persentase Rumah Tinggal Berakses Air Bersih | | | | |
| | | 11. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya | - | | | | |
| | | 12. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | - | | | | |
| | | 13. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) | a. Persentase Penurunan Titik Kemacetan b. Persentase layanan Angkutan Darat (Jumlah Angkutan Darat/Jumlah Penumpang Angkutan Darat) c. Persentase kepemilikan KIR Angkutan Umum | | | Dinas Perhubungan | - |
| | | 14. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | a. Persentase Pelaksanaan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kewilayahan b. Persentase Usulan Masyarakat Untk Sarana Prasarana Di Wilayah Yang Diakomodir | Kecamatan | - | | |
| | | 15. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang | Persentase Jumlah Pelanggaran Tata Ruang yang tertangani | DPUPR PERKIM | - | | |
| | | 16. Program penyelesaian sengketa tanah Garapan | Persentase pemanfaatan SIPR dalam pemanfaatan ruang | Dinas Komunikasi dan Informatika | - | | |
| | | 17. Program Informasi Dan Komunikasi Publik | a. Persentase informasi yang terlayani dan terpublikasi b. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti | | | | |
| | | 18. Program Aplikasi Informatika | Persentase aplikasi informasi yang terintegrasi | | | | |
| | | 6. | PENINGKATAN KETAHANAN BENCANA DAN LINGKUNGAN HIDUP MELALUI PENGARUSTAMAAN UPAYA ADAPTASI DAN MITIGASI PERUBAHAN IKLIM | 1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup | Persentase dokumen perencanaan Lingkungan Hidup yang tersusun dan sesuai standart | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | - |
| | | | | 2. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) | - | | |
| 3. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | - | | | | | | |
| 4. Program Pengelolaan Persampahan | a. Persentase Pengurangan Sampah yang berkurang di masyarakat dan Sektor Informal (Merupakan nilai kumulatif) b. Persentase Penanganan Sampah | | | | | | |
| 5. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) | - | | | | | | |
| 6. Program Penanggulangan Bencana | a. Persentase Kejadian Bencana Pada Titik Pantau b. Persentase masyarakat tangguh bencana | | | BPBD | - | | |
| 7. Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum | a. Rasio Linmas per RT a. Persentase kejadian kebakaran yang ditangani | | | SATPOL-PP | - | | |

| NO | PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR | PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | SKPD PELAKSANA | KET |
|----|--|--|--|--------------------|-----|
| 7. | PENINGKATAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK BAGI MASYARAKAT DI JAWA TIMUR | 1. Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum | Persentase Penanganan Pelanggaran PERDA | SATPOL-PP | - |
| | | 2. Program Pelayanan Penanaman Modal | a. Persentase Penerbitan Ijin Dan Non Ijin Ekonomi, Pariwisata Dan Sosial Budaya b. Persentase Penerbitan Ijin Dan Non Ijin Pekerjaan Umum | DISNAKER PMPTSP | - |
| | | 3. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) | a. Kontribusi retribusi pelayanan parkir terhadap PAD b. Kontribusi retribusi pelayanan parkir terhadap PAD | DINAS PERHUBUNGAN | - |
| | | 4. Program Pendaftaran Penduduk | Persentase Penduduk Yang Memiliki Dokumen Administrasi Kependudukan | DISPENDUK CAPIL | - |
| | | 5. Program Pencatatan Sipil | Persentase Penduduk Yang Memiliki Dokumen Administrasi Pencatatan Sipil | | |
| | | 6. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD. | BAPPEDA | - |
| | | 7. Program Perencanaan Perekonomian Dan Sumber Daya Alam | Persentase Penyusunan Renstra & Renja perangkat daerah mitra bidang pembangunan ekonomi dan sumberdaya alam yang sesuai dengan tahapan dan tata cara | | |
| | | 8. Program Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | a. Persentase Penyusunan Renstra & Renja perangkat daerah mitra Program Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang sesuai dengan tahapan dan tata cara b. Persentase Jumlah kajian/ analisa/ studi / rencana induk/ grand design sektor Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang ditindaklanjuti | | |
| | | 9. Program Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan | a. Persentase Penyusunan Renstra & Renja perangkat daerah mitra bidang Infrastruktur dan pengembangan wilayah yang sesuai dengan tahapan dan tata cara kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW b. Persentase Jumlah kajian/ analisa/ studi / rencana induk/ grand design sektor Infrastruktur dan kewilayahan yang mendukung perencanaan | BAPPEDA | - |
| | | 10. Program Pengelolaan Keuangan Daerah | Persentase BTL APBD \leq 50% | BKAD | - |
| | | 11. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah | Kontribusi Pemanfaatan Aset terhadap PAD | | |
| | | 12. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah | a. Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah b. Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD | BAPENDA | - |
| | | 13. Program Perekonomian dan Pembangunan | a. Persentase Proses Pengadaan Barang/Jasa Sesuai Ketentuan b. Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan Dan Pelaporan Yang Disusun Tepat Waktu | Sekretariat Daerah | - |
| | | 14. Program Administrasi Umum | a. Nilai kapasitas organisasi b. Persentase Standar Kompetensi Perangkat Daerah Yang Ditetapkan | Bagian Organisasi | - |
| | | 15. Program Penyelenggaraan Pengawasan | a. Persentase Dokumen Perencanaan Dan Penganggaran Dilakukan Reviu b. Persentase Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Dilakukan Reviu | Inspektorat | - |
| | | 16. Program Kepegawaian Daerah | a. Persentase Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu | BKPSDM | - |

| NO | PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR | PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | SKPD PELAKSANA | KET |
|----|--|--|--|-------------------|-----|
| | | | b. Persentase Terisinya Jabatan Struktural Dan Pelaksana | | |
| | | 17. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia | a. Persentase ASN Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Formal b. Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural | | |

Tabel 3.3 Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

| NO | PRIORITAS KOTA MALANG | SASARAN PRIORITAS | PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | SKPD PELAKSANA | JUMLAH |
|----|--|-------------------|--|--|---------------------------------|--------|
| 1. | MENDORONG AKTIVITAS INDUSTRY KREATIF DAN PENGEMBANGAN PARIWISATA UNTUK PEMBANGUNAN EKONOMI KREATIF | | 1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | Persentase Destinasi Wisata yang dibina | DISPORAPAR | - |
| | | | 2. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif | Persentase Pemasaran Pariwisata | DISPORAPAR | - |
| | | | 3. Program Pengembangan UMKM | Persentase Pertumbuhan Unit Usaha Mikro yang naik menjadi usaha kecil | DISKOPINDAG | - |
| | | | 4. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri | Persentase peningkatan Jumlah IKM | DISKOPINDAG | - |
| | | | 5. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan | Persentase Penetapan Pasar Rakyat Sebagai Pasar Halal | DISKOPINDAG | - |
| | | | 6. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja | Persentase Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi | DISNAKER PMPTSP | - |
| 2. | MENGEMBANGKAN WILAYAH UNTUK MENGURANGI KESENJANGAN DAN MENJAMIN PEMERATAAN | | - | - | - | - |
| 3. | PENINGKATAN KUALITAS SDMYANG TERDIDIK, BERKARAKTER, SEHAT, BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA | | 1. Program Pengembangan Kurikulum | a. Persentase APK PAUD, SD dan SMP b. Persentase APM PAUD, SD dan SMP c. Rata-rata Capaian Peningkatan Karakter Jenjang PAUD, SD dan SMP d. Rata-rata Capaian Peningkatan Karakter PNF | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | - |
| | | | 2. Program Pengelolaan pendidikan | a. Persentase Guru tersertifikasi b. Presentase Guru dengan Nilai Uji Kompetensi Guru (UKG) Minimal 75 c. Rasio profesionalitas dan keahlian Teknis Tenaga Pendidikan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | - |
| | | | 3. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | a. % unit pelayanan kesehatan yang memenuhi SPM b. Cakupan penduduk yang terjamin asuransi | Dinas Kesehatan | - |
| | | | 4. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | a. Persentase puskesmas yang telah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) b. NDR (New Death Rate) c. BOR (Bed Occupancy Rate) RSUD d. Persentase Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif e. Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi, Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat, Tuberculosis (TB), Resiko Terinfeksi HIV f. Prosentase Kelurahan UCI g. Angka Kematian Bayi h. Persentase Bayi Stunting | Dinas Kesehatan | - |

| NO | PRIORITAS KOTA MALANG | SASARAN PRIORITAS | PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | SKPD PELAKSANA | JUMLAH |
|----|-----------------------|-------------------|--|---|--------------------------------------|--------|
| | | | 5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan | a. Persentase Tenaga Medis yang berkompoten b. Persentase ketersediaan alat kesehatan dan obat-obatan sesuai standar | Dinas Kesehatan | - |
| | | | 6. Program Pengendalian Penduduk | a. TFR per WUS (15 s/d 49 tahun) b. Cakupan peserta KB Aktif c. Prosentase keluarga kelompok kegiatan Tribina aktif d. Persentase kelompok UPPKS Aktif | Dinas Sosial P3AP2KB | - |
| | | | 7. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen | Persentase pertumbuhan UKM | DISKOPINDAG | - |
| | | | 8. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting | - | | |
| | | | 9. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan | - | | |
| | | | 10. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri | - | | |
| | | | 11. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan | - | | |
| | | | 12. Program Pengembangan Ekspor | - | | |
| | | | 13. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat | | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | - |
| | | | 14. Program Penanganan Kerawanan Pangan | Persentase Peningkatan Ketersediaan Pangan Utama | | |
| | | | 15. Program Pengawasan Keamanan Pangan | - | | |
| | | | 16. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya | - | | |
| | | | 17. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan | - | DISNAKER PMPTSP | - |
| | | | 18. Program Penempatan Tenaga Kerja (UP Bidang Kelautan dan Perikanan) | - | | |
| | | | 19. Program Hubungan Industrial | - | Dinas Sosial P3AP2KB | - |
| | | | 20. Program Rehabilitasi Sosial | Persentase (%) PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial | | |
| | | | 21. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial | - | | |
| | | | 22. Program Pemberdayaan Sosial | - | | |
| | | | 23. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan | - | | |
| | | | 24. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak | a. Persentase Organisasi Perempuan Yang Aktif b. Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan Anggaran Responsif Gender (ARG) | | |
| | | | 25. Program peningkatan kualitas keluarga | - | | |
| | | | 26. Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan | - | | |
| | | | 27. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) | - | | |
| | | | 28. Program Perlindungan Perempuan | - | | |
| | | | 29. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak | - | | |

| NO | PRIORITAS KOTA MALANG | SASARAN PRIORITAS | PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | SKPD PELAKSANA | JUMLAH |
|----|--|-------------------|--|--|-----------------------------------|--------|
| | | | 30. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | c. Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif d. Rasio Linmas per RT | Kecamatan | - |
| | | | 31. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | - | | |
| | | | 32. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | - | | |
| | | | 33. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | - | | |
| 4. | MENDORONG REVOLUSI MENTAL DAN PEMBANGUNAN BUDAYA MASYARAKAT | | 1. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan | a. Persentase peningkatan pemahaman 18ana man, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa b. Persentase penyelesaian kejadian gangguan disintegrasi bangsa yang disebabkan kondisi ekonomi, 18ana m, budaya dan agama | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | - |
| | | | 2. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial | Persentase Penyelesaian Kejadian Gangguan Disintegrasi Bangsa Yang Disebabkan Konflik Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya Dan Pertahanan Keamanan | | |
| | | | 3. Program Pengembangan Kebudayaan | Persentase kelestarian keanekaragaman dan kekayaan budaya yang dibina | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | - |
| | | | 4. Program Pengelolaan Permuseuman | - | | |
| | | | 5. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya | - | | |
| 5. | PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENUNJANG PEREKONOMIAN YANG BERIRISAN DENGAN PRIORITAS NASIONAL DAN PENYELESAIAN MASALAH PRIORITAS KOTA | | 1. Program pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase | a. Persentase Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik b. Persentase Jembatan Kota Dalam Kondisi Baik c. Persentase Fasilitas Penerangan Jalan d. Persentase Drainase Kota Dalam Kondisi Baik e. Persentase Irigasi Kota Dalam Kondisi Baik | DPUPR PERKIM | - |
| | | | 2. Program Penyelenggaraan Jalan | Persentase drainase kota dalam kondisi baik | | |
| | | | 3. Program Pengelolaan Sumber Daya Air | a. Persentase irigasi Kota dalam kondisi baik b. Persentase jalan yang memiliki jalur pejalan kaki | | |
| | | | 4. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) | Persentase layanan rumah layak huni yang terjangkau | | |
| | | | 5. Program Pengembangan Perumahan | Persentase lingkungan yang sehat 18ana man yang didukung dengan PSU | | |
| | | | 6. Program kawasan permukiman serta | Persentase Rumah Tidak Layak Huni | | |
| | | | 7. Permukiman kumuh | | | |

| NO | PRIORITAS KOTA MALANG | SASARAN PRIORITAS | PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | SKPD PELAKSANA | JUMLAH |
|----|---|-------------------|--|--|----------------------------------|--------|
| | | | 8. Program Penyelenggaraan Jalan | Persentase Bangunan Gedung Yang Memenuhi Syarat Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | | |
| | | | 9. Program Penataan Bangunan Gedung | Persentase Pembangunan Kawasan Pioritas Sesuai Rtbl | | |
| | | | 10. Program Pengembangan Jasa Konstruksi | Persentase Rumah Tinggal Berakses Air Bersih | | |
| | | | 11. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya | - | | |
| | | | 12. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | - | | |
| | | | 13. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) | a. Persentase Penurunan Titik Kemacetan b. Persentase layanan Angkutan Darat (Jumlah Angkutan Darat/Jumlah Penumpang Angkutan Darat) c. Persentase kepemilikan KIR Angkutan Umum | Dinas Perhubungan | - |
| | | | 14. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | a. Persentase Pelaksanaan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kewilayahan b. Persentase Usulan Masyarakat Untk Sarana Prasarana Di Wilayah Yang Diakomodir | Kecamatan | - |
| | | | 15. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang | Persentase Jumlah Pelanggaran Tata Ruang yang tertangani | DPUPR PERKIM | - |
| | | | 16. Program penyelesaian sengketa tanah Garapan | Persentase pemanfaatan SIPR dalam pemanfaatan ruang | | |
| | | | 17. Program Informasi Dan Komunikasi Publik | a. Persentase informasi yang terlayani dan terpublikasi b. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti | Dinas Komunikasi dan Informatika | - |
| | | | 18. Program Aplikasi Informatika | Persentase aplikasi informasi yang terintegrasi | | |
| 6. | PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANAN BENCANA | | 1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup | Persentase dokumen perencanaan Lingkungan Hidup yang tersusun dan sesuai standart | | |
| | | | 2. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) | - | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | - |
| | | | 3. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | - | | |
| | | | 4. Program Pengelolaan Persampahan | a. Persentase Pengurangan Sampah yang berkurang di masyarakat dan Sektor Informal (Merupakan nilai kumulatif) b. Persentase Penanganan Sampah | | |
| | | | 5. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) | - | | |
| | | | 6. Program Penanggulangan Bencana | c. Persentase Kejadian Bencana Pada | BPBD | - |

| NO | PRIORITAS KOTA MALANG | SASARAN PRIORITAS | PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | SKPD PELAKSANA | JUMLAH | |
|----|---|-------------------|--|--|--|---------|---|
| | | | | Titik Pantau d. Persentase masyarakat tangguh bencana | | | |
| | | | 7. Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum | a. Rasio Linmas per RT b. Persentase kejadian kebakaran yang ditangani | SATPOL-PP | - | |
| 7. | PENYEDERHANAAN PERIZINAN, FLEKSIBILITAS BIROKRASI DAN PENGUATAN INVESTASI UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH | | 1. Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum | Persentase Penanganan Pelanggaran PERDA | SATPOL-PP | - | |
| | | | 2. Program Pelayanan Penanaman Modal | a. Persentase Penerbitan Ijin Dan Non Ijin Ekonomi, Pariwisata Dan Sosial Budaya b. Persentase Penerbitan Ijin Dan Non Ijin Pekerjaan Umum | DISNAKER PMPTSP | - | |
| | | | 3. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) | a. Kontribusi retribusi pelayanan parkir terhadap PAD b. Kontribusi retribusi pelayanan parkir terhadap PAD | DINAS PERHUBUNGAN | | |
| | | | 4. Program Pendaftaran Penduduk | Persentase Penduduk Yang Memiliki Dokumen Administrasi Kependudukan | DISPENDUK CAPIL | | |
| | | | 5. Program Pencatatan Sipil | Persentase Penduduk Yang Memiliki Dokumen Administrasi Pencatatan Sipil | | | |
| | | | 6. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPd. | BAPPEDA | | |
| | | | 7. Program Perencanaan Perekonomian Dan Sumber Daya Alam | Persentase Penyusunan Renstra & Renja perangkat daerah mitra bidang pembangunan ekonomi dan sumberdaya alam yang sesuai dengan tahapan dan tata cara | | | |
| | | | 8. Program Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | a. Persentase Penyusunan Renstra & Renja perangkat daerah mitra Program Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang sesuai dengan tahapan dan tata cara b. Persentase Jumlah kajian/ analisa/ studi / rencana induk/ grand design sektor Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang ditindaklanjuti | | | |
| | | | | 9. Program Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan | a. Persentase Penyusunan Renstra & Renja perangkat daerah mitra bidang Infrastruktur dan pengembangan wilayah yang sesuai dengan tahapan dan tata cara kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW b. Persentase Jumlah kajian/ analisa/ studi / rencana induk/ grand design sektor Infrastruktur dan kewilayahan yang mendukung perencanaan | BAPPEDA | - |
| | | | | 10. Program Pengelolaan Keuangan Daerah | Persentase BTL APBD ≤ 50% | BKAD | - |

| NO | PRIORITAS KOTA MALANG | SASARAN PRIORITAS | PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | SKPD PELAKSANA | JUMLAH |
|----|-----------------------|-------------------|--|--|--------------------|--------|
| | | | 11. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah | Kontribusi Pemanfaatan Aset terhadap PAD | | |
| | | | 12. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah | a. Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah b. Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD | BAPENDA | - |
| | | | 13. Program Perekonomian dan Pembangunan | a. Persentase Proses Pengadaan Barang/Jasa Sesuai Ketentuan b. Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan Dan Pelaporan Yang Disusun Tepat Waktu | Sekretariat Daerah | - |
| | | | 14. Program Administrasi Umum | a. Nilai kapasitas organisasi b. Persentase Standar Kompetensi Perangkat Daerah Yang Ditetapkan | Bagian Organisasi | - |
| | | | 15. Program Penyelenggaraan Pengawasan | a. Persentase Dokumen Perencanaan Dan Penganggaran Dilakukan Reviu b. Persentase Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Dilakukan Reviu | Inspektorat | - |
| | | | 16. Program Kepegawaian Daerah | a. Persentase Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu b. Persentase Terisinya Jabatan Struktural Dan Pelaksana | BKPSDM | - |
| | | | 17. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia | a. Persentase ASN Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Formal b. Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural | | |

Sedangkan Tabel Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja sebagaimana Lampiran I.

BAB IV

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, belanja daerah dialokasikan dengan memprioritaskan urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar. Urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar adalah dalam rangka memenuhi Standart Pelayanan Minimal, sedangkan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Adapun urusan pemerintahan pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah.

Pada proses perencanaan tahun 2020, Pemerintah Perangkat Daerah diberikan kewenangan untuk menentukan kegiatan dan anggaran sesuai kebutuhan dengan tetap memperhatikan azas efektif, efisien, kepatutan, kewajaran dan akuntabel serta tanggung jawab yang dituangkan dalam Renja RKPD tahun anggaran 2021. Penentuan jumlah alokasi plafon setiap Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan penentuan skala prioritas kegiatan. Prioritas dan kegiatan strategis yang telah disusun dalam RKPD tahun anggaran 2019. Adapun prosesnya dilakukan dengan cara diskusi intensif secara iteratif antara Perangkat Daerah dan TAPD secara detail, sehingga diperoleh kegiatan tahun 2021 yang benar-benar akuntabel dan sesuai dengan kebutuhan. Hasil dari proses tersebut, ditetapkan menjadi PPAS sebagaimana yang diamanatkan pada Pasal 310 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi kepala daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPD dan diajukan kepada DPRD untuk dibahas bersama.

Selanjutnya penjelasan plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintahan dan program/kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut.

4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2021 sebagaimana Lampiran II.

4.2 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyusunan APBD Tahun 2021 bahwa Struktur APBD berdasarkan kelompok belanja terdiri atas Belanja Operasional, Belanja Modal, Belanja Tak terduga, Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan. Belanja Operasional mempunyai rincian jenis Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. Sedangkan Belanja Modal terinci dalam Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan dan Belanja Aset Tetap Lainnya. Adapun Plafon Anggaran Sementara atas struktur Belanja APBD Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut.

Tabel 4.2 Plafon Anggaran Sementara Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Modal, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga

| NO | URAIAN | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) |
|-----|--|--------------------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 1 | Belanja Pegawai | 826.899.525.883,66 |
| 2 | Belanja Barang-Jasa | 389.539.056.000,00 |
| 3 | Belanja Bunga | 0,00 |
| 4 | Belanja Subsidi | 0,00 |
| 5 | Belanja Hibah | 104.522.290.000,00 |
| 6 | Belanja Bantuan Sosial | 13.457.360.000,00 |
| 7 | Belanja Modal | 580.053.561.000,00 |
| | a. Belanja Modal Tanah | |
| | b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin | |
| | c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan | |
| | d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan | |
| | e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | |
| | f. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud | |
| 8 | Belanja Tak Terduga | 37.580.664.282,44 |
| 9 | Belanja Bagi Hasil | 0,00 |
| 10 | Belanja Bantuan Keuangan | 0,00 |
| | TOTAL | 1.952.052.457.166,10 |

Plafon Anggaran Sementara Belanja Pegawai dialokasikan sebesar Rp. 826.899.525.883,66 untuk belanja gaji dan tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN, gaji dan tunjangan DPRD, gaji dan tunjangan KDH/WKDH serta belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD dan KDH/WKDH. Plafon Anggaran Sementara Belanja Hibah dialokasikan sebesar Rp. 104.522.290.000,00 kepada lembaga pendidikan dan lembaga kemasyarakatan. Sedangkan belanja Bantuan Sosial dialokasikan sebesar

Rp. 13.457.350.000,00. Adapun belanja untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2021 dialokasikan sebesar Rp. 969.592.617.000,00 berupa belanja barang jasa dan belanja modal.

BAB V
RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud, terdiri dari Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Rincian Pembiayaan Daerah secara terinci dapat dilihat pada Tabel 5.1 berikut.

Tabel 5.1 Rincian Palfon Anggaran Pembiayaan
Tahun Anggaran 2021

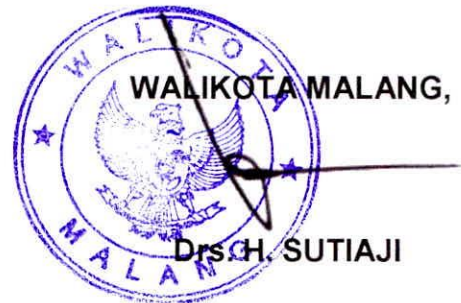
| NO | URAIAN | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) |
|------------|---|-----------------------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| | PEMBIAYAAN | |
| 6.1 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | |
| 6.1.01. | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya | 103.000.050.480,80 |
| 6.1.02. | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 |
| 6.1.03. | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan | 0,00 |
| 6.1.04. | Penerimaan Pinjaman Daerah | 0,00 |
| 6.1.05. | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah | 0,00 |
| 6.1.06. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 0,00 |
| | Jumlah Penerimaan Pembiayaan | 103.000.050.480,80 |
| | | |
| 6.2 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN | |
| 6.2.01 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 |
| 6.2.02 | Penyertaan Modal Daerah | 25.000.000.000,00 |
| 6.2.03 | Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo | 0,00 |
| 6.2.04 | Pemberian Pinjaman Daerah | 0,00 |
| 6.2.05 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 0,00 |
| | Jumlah Pengeluaran Pembiayaan | 25.000.000.000,00 |
| | | |
| | Pembiayaan Netto | 78.000.050.480,80 |

BAB VI PENUTUP

Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Malang telah disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 serta Peraturan Walikota Malang Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2021.

Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati menjadi dasar dalam menyusun Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 antara Pemerintah Kota Malang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang dan menjadi pedoman dalam rangka penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah yang selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021.

Malang, 11 September 2020



LAMPIRAN I. Tabel Prioritas Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Indikator Kinerja

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUBKEGIATAN | | | KET | | |
|----|--|----------------------|--------------------------------------|--|-------------------|----------------|---|-----------------------|----------------|-----|---------------------|--|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | 1. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | |
| | 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | | | | | | | | | |
| | 1.01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Guru, Siswa, Lembaga | 74.449 siswa, 222 lembaga,guru | 1.01.01.02.001 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | | | 1.01.01.02.001.008 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas | | | - | - | |
| | | | | | | | 1.01.01.02.001.014 Pengadaan Mebeluer Sekolah | | | - | - | |
| | | | | | | | 1.01.01.02.001.017 Pengadaan Perlengkapan Siswa | | | - | - | |
| | | | | | | | 1.01.01.02.001.021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar | | | - | - | |
| | | | | | | | 1.01.01.02.001.023 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik | | | - | - | |
| | | | | | | | 1.01.01.02.001.025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | - | - | |
| | | | | | | | 1.01.01.02.001.027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | | | - | - | |
| | | | | | | | 1.01.01.02.001.028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | | | - | - | |
| | | | | 1.01.01.02.002 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | | | 1.01.01.02.002.001 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) | | | - | - | |
| | | | | | | | 1.01.01.02.002.025 Pengadaan Mebeluer Sekolah | | | - | - | |
| | | | | | | | 1.01.01.02.002.028 Pengadaan Perlengkapan Siswa | | | - | - | |
| | | | | | | | 1.01.01.02.002.032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama | | | - | - | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUBKEGIATAN | | | KET | | |
|----|---------|-------------------|----------------|---|-------------------|----------------|--|--|--|-----------------------|-----------------------|--|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | | | 1.01.01.02.003 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | | | 1.01.01.02.002.036 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 1.01.01.02.002.038 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 1.01.01.02.002.040 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 1.01.01.02.002.041 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 1.01.01.02.003.002 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 1.01.01.02.003.004 Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 1.01.01.02.003.013 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD 1.01.01.02.003.016 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD 1.01.01.02.003.017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD | Jumlah pengajuan sarana prasarana PAUD PNF Jumlah lembaga PAUD dan PNF yang memperoleh bantuan Rehab sesuai SPM Menuju SNP Jumlah lembaga yang mendapat BOP Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan kelembagaan PAUD | 5 lembaga 1 Lembaga 4 lembaga 686 lembaga | - - - - - | - - - - - | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUBKEGIATAN | | | KET | | |
|----|---|--|----------------------------|---|-------------------|--|---|---|----------------|-------------|---------------------|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | | | 1.01.01.02.004 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | | | 1.01.01.02.004.003 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Jumlah unit bangunan PNF yang dibangun/direhabilitasi Jumlah pengajuan sarana prasarana Sekolah Non Formal/Kesetaraan Jumlah dokumen proses belajar non formal yang dihasilkan Jumlah lembaga Non Formal yang mendapatkan pembinaan | 1 lembaga | - | - | |
| | | | | | | | 1.01.01.02.004.006 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan | Jumlah dokumen proses belajar non formal yang dihasilkan Jumlah lembaga Non Formal yang mendapatkan pembinaan | 1 lembaga | - | - | |
| | | | | | | | 1.01.01.02.004.012 Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan | Jumlah lembaga Non Formal yang mendapatkan pembinaan | 3 dokumen | - | - | |
| | | | | | | | 1.01.01.02.004.016 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan | Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian SD | 50 lembaga | - | - | |
| | 1.01.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM | Satuan Pendidikan PAUD, Pendidikan dasar dan PNF | Harapan Lama Sekolah 15,97 | 1.01.01.03.001 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar | s | s | 1.01.01.03.001.004 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar | Jumlah lembaga yang menerima pembinaan muatan kurikulum dan penilaian | 425 lembaga | - | - | |
| | | | | 1.01.01.03.002 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal | | Jumlah dokumen muatan lokal PAUD PNF yang ditetapkan | 1.01.01.03.002.001 Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal | Jumlah lembaga yang menerima pembinaan muatan kurikulum dan penilaian | 2 dokumen | 100 lembaga | - | - |
| | 1.01.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 2.642 guru | 1.01.01.04.001 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | | | 1.01.01.04.001.001 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | | | - | - | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUBKEGIATAN | | | KET | |
|----|---|-------------------|----------------|--|---|----------------|--|----------------------------------|----------------|-----|---------------------|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 1.01.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Siswa | 757 siswa | 1.01.02.02.002 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | | | 1.01.01.04.001.002 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | | | - | - |
| | 1.01.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Siswa | 1089 siswa | 1.01.03.02.002 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Biaya Operasional Sekolah | 1065 Siswa | 1.01.02.02.002.032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | 757 | - | - |
| | 1.01.04.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Siswa | 830 Siswa | 1.01.04.02.002 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | output yang baik | 1045800000 | 1.01.03.02.002.032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama | | | - | - |
| | 1.01.05.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Siswa | 891 Siswa | 1.01.05.02.002 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah peserta didik yang mengikuti kegiatan belajar mengajar | 891 siswa | 1.01.04.02.002.032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama | | | - | - |
| | 1.01.06.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Siswa | 863 Siswa | 1.01.06.02.002 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | | | 1.01.05.02.002.032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama | | | - | - |
| | 1.01.07.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Siswa | 770 Siswa | 1.01.07.02.002 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | | | 1.01.06.02.002.032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama | | | - | - |
| | 1.01.08.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Siswa | 797 Siswa | 1.01.08.02.002 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | | | 1.01.07.02.002.032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama | | | - | - |
| | 1.01.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Siswa | 793 Siswa | 1.01.09.02.002 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | | | 1.01.08.02.002.032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama | | | - | - |
| | 1.01.10.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Siswa | 794 Siswa | 1.01.10.02.002 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | 794 | 1.01.09.02.002.032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama | siswa penerima bosda | 999.180.00 | - | - |
| | | | | | | | 1.01.10.02.002.032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | 794 | - | - |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUBKEGIATAN | | | KET | |
|----|---|-------------------|----------------|--|---|----------------|---|---|----------------|-----|---------------------|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 1.01.11.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Siswa | 903 Siswa | 1.01.11.02.002 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah siswa yang mendapat bosda SMPN 10 Malang | 903 | 1.01.11.02.002.032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA SMPN 10 Malang | 903 | - | - |
| | 1.01.12.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Siswa | 784 Siswa | 1.01.12.02.002 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah peserta didik yang mengikuti kegiatan belajar mengajar | 784 | 1.01.12.02.002.032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama | Jumlah peserta didik yang mengikuti kegiatan belajar mengajar | 784 | - | - |
| | 1.01.13.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Siswa | 721 Siswa | 1.01.13.02.002 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | | | 1.01.13.02.002.032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama | | | - | - |
| | 1.01.14.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Siswa | 820 Siswa | 1.01.14.02.002 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Siswa Yang Mendapat BOSDA SMPN 13 | 820 | 1.01.14.02.002.032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama | | | - | - |
| | 1.01.15.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Siswa | 805 Siswa | 1.01.15.02.002 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | 803 | 1.01.15.02.002.032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama | | | - | - |
| | 1.01.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Siswa | 857 Siswa | 1.01.16.02.002 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | | | 1.01.16.02.002.032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama | | | - | - |
| | 1.01.17.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Siswa | 771 Siswa | 1.01.17.02.002 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | | | 1.01.17.02.002.032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama | | | - | - |
| | 1.01.18.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Siswa | 881 Siswa | 1.01.18.02.002 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | | | 1.01.18.02.002.032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Siswa Yang Mendapat BOSDA | 881 Siswa | - | - |
| | 1.01.19.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Siswa | 838 Siswa | 1.01.19.02.002 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah siswa yang mendapat BOSDA | 842 | 1.01.19.02.002.032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama | | | - | - |
| | 1.01.20.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Siswa | 905 Siswa | 1.01.20.02.002 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | ABPD Tahun 2021 | 905 siswa | 1.01.20.02.002.032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama | | | - | - |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUBKEGIATAN | | | KET | |
|----|--|---|----------------|--|---|----------------|---|---|----------------|-----|---------------------|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 1.01.21.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Siswa | 870 Siswa | 1.01.21.02.002 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | | | 1.01.21.02.002.032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama | | | - | - |
| | 1.01.22.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Siswa | 817 Siswa | 1.01.22.02.002 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | | | 1.01.22.02.002.032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama | | | - | - |
| | 1.01.23.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Siswa | 621 Siswa | 1.01.23.02.002 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah peserta didik yang mengikuti kegiatan belajar mengajar | 621 siswa | 1.01.23.02.002.032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Peserta Didik yang mengikuti kegiatan belajar mengajar | 621 siswa | - | - |
| | 1.01.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Siswa | 693 Siswa | 1.01.24.02.002 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah siswa yang mendapatkan BOSDA | 693 | 1.01.24.02.002.032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama | | | - | - |
| | 1.01.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Siswa | 687 Siswa | 1.01.25.02.002 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | | | 1.01.25.02.002.032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama | | | - | - |
| | 1.01.26.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Siswa | 585 Siswa | 1.01.26.02.002 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | | | 1.01.26.02.002.032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama | | | - | - |
| | 1.01.27.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Siswa | 420 Siswa | 1.01.27.02.002 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Siswa yang mendapat BOSDA | Siswa | 1.01.27.02.002.032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Siswa yang Mendapatkan BOSDA | Siswa | - | - |
| | 1.01.28.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Siswa | 384 Siswa | 1.01.28.02.002 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | | | 1.01.28.02.002.032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama | | | - | - |
| | 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | | | | | | | |
| | 1.02.01.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan | 100% | 1.02.01.02.001 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota | | | 1.02.01.02.001.016 Pengadaan Obat, Vaksin | | | - | - |
| | | | | | | | 1.02.01.02.001.017 Pengadaan Bahan Habis Pakai | | | - | - |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUBKEGIATAN | | | KET | | |
|----|---------|-------------------|----------------|---|-------------------|----------------|--|-----------------------|----------------|-----|---------------------|--|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | | | 1.02.01.02.002 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 1.02.01.02.001.020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 1.02.01.02.002.001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 1.02.01.02.002.002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 1.02.01.02.002.003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 1.02.01.02.002.004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 1.02.01.02.002.006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 1.02.01.02.002.007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 1.02.01.02.002.008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 1.02.01.02.002.009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 1.02.01.02.002.011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 1.02.01.02.002.012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV 1.02.01.02.002.015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUBKEGIATAN | | | KET | |
|----|---------|-------------------|----------------|--|-------------------|----------------|--|-----------------------|----------------|-----|---------------------|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | 1.02.01.02.002.016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | - | - |
| | | | | | | | 1.02.01.02.002.017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | - | - |
| | | | | | | | 1.02.01.02.002.018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | | - | - |
| | | | | | | | 1.02.01.02.002.019 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya | | | - | - |
| | | | | | | | 1.02.01.02.002.022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | | | - | - |
| | | | | | | | 1.02.01.02.002.024 Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan | | | - | - |
| | | | | | | | 1.02.01.02.002.025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | - | - |
| | | | | | | | 1.02.01.02.002.026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | | | - | - |
| | | | | | | | 1.02.01.02.002.029 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat | | | - | - |
| | | | | | | | 1.02.01.02.002.034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | - | - |
| | | | | | | | 1.02.01.02.002.035 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota | | | - | - |
| | | | | | | | 1.02.01.02.002.037 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah | | | - | - |
| | | | | 1.02.01.02.003 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi | | | 1.02.01.02.003.001 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan | | | - | - |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUBKEGIATAN | | | KET | |
|----|--|---|----------------|---|-------------------|----------------|--|-----------------------|----------------|-----|---------------------|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 1.02.01.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan | 100% | 1.02.01.02.004 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota 1.02.01.03.002 Pembinaan Teknis, Pengawasan Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota 1.02.01.03.004 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 1.02.01.02.004.001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C dan D 1.02.01.02.004.002 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.02.01.03.002.003 Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 1.02.01.03.004.001 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan | | | - | - |
| | 1.02.01.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan | 100% | 1.02.01.04.001 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 1.02.01.04.003 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | | | 1.02.01.04.001.001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 1.02.01.04.003.001 Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | | | - | - |
| | 1.02.01.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | Meningkatnya status kesehatan masyarakat | | 1.02.01.05.001 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota | | | 1.02.01.05.001.001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | | | - | - |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUBKEGIATAN | | | KET | |
|----|--|---|----------------|--|---|----------------|--|-----------------------|----------------|-----|---------------------|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 1.02.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan | 100% | 1.02.01.05.003 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.02.02.02.001 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota | NDR | <2% | 1.02.01.05.003.001 Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1.02.02.02.001.012 Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan 1.02.02.02.001.014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | NDR (Net Death rate) | <2% | - | - |
| | 1.02.03.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan | 100% | 1.02.02.02.002 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | NDR (Net Death rate) | <2% | 1.02.02.02.002.032 Operasional Pelayanan Rumah Sakit | NDR (Net Death rate) | <2% | - | - |
| | 1.02.04.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan | 100% | 1.02.03.02.002 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 1.02.03.02.002.033 Operasional Pelayanan Puskesmas | | | - | - |
| | 1.02.05.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan | 100% | 1.02.04.02.002 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Operasional Puskesmas dan Operasional Puskesmas BLUD Untuk Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat Di Puskesmas | 100% | 1.02.04.02.002.033 Operasional Pelayanan Puskesmas 1.02.05.02.002.033 Operasional Pelayanan Puskesmas | | | - | - |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUBKEGIATAN | | | KET | |
|----|--|---|----------------|---|---|----------------|--|---|----------------|-----|---------------------|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 1.02.06.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan | 100% | 1.02.06.02.002 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 1.02.06.02.002.033 Operasional Pelayanan Puskesmas | | | - | - |
| | 1.02.07.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan | 100% | 1.02.07.02.002 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 1.02.07.02.002.033 Operasional Pelayanan Puskesmas | | | - | - |
| | 1.02.08.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan | 100% | 1.02.08.02.002 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Operasional Puskesmas untuk Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat Puskesmas | 12 | 1.02.08.02.002.033 Operasional Pelayanan Puskesmas | Operasional Puskesmas untuk Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat Puskesmas | 12 | - | - |
| | 1.02.09.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan | 100% | 1.02.09.02.002 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 1.02.09.02.002.033 Operasional Pelayanan Puskesmas | | | - | - |
| | 1.02.10.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan | 100% | 1.02.10.02.002 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 1.02.10.02.002.033 Operasional Pelayanan Puskesmas | | | - | - |
| | 1.02.11.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan | 100% | 1.02.11.02.002 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 1.02.11.02.002.033 Operasional Pelayanan Puskesmas | | | - | - |
| | 1.02.12.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan | 100% | 1.02.12.02.002 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 1.02.12.02.002.033 Operasional Pelayanan Puskesmas | | | - | - |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUBKEGIATAN | | | KET | |
|----|--|---|----------------|---|--|----------------|--|---|----------------|-----|---------------------|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 1.02.13.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan | 100% | 1.02.13.02.002 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 1.02.13.02.002.033 Operasional Pelayanan Puskesmas | | | - | - |
| | 1.02.14.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan | 100% | 1.02.14.02.002 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 1.02.14.02.002.033 Operasional Pelayanan Puskesmas | Operasional puskesmas untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas | 12 Bulan | - | - |
| | 1.02.15.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan | 100% | 1.02.15.02.002 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 1.02.15.02.002.033 Operasional Pelayanan Puskesmas | Terpenuhinya Kebutuhan Operasional Puskesmas untuk Pelayanan kepada Masyarakat di Puskesmas | 12 bulan | - | - |
| | 1.02.16.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan | 100% | 1.02.16.02.002 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Operasional Puskesmas untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Puskesmas | 100 % | 1.02.16.02.002.033 Operasional Pelayanan Puskesmas | | | - | - |
| | 1.02.17.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan | 100% | 1.02.17.02.002 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 1.02.17.02.002.033 Operasional Pelayanan Puskesmas | | | - | - |
| | 1.02.18.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan | 100% | 1.02.18.02.002 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 1.02.18.02.002.033 Operasional Pelayanan Puskesmas | | | - | - |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUBKEGIATAN | | | KET | |
|----|---|--|----------------|--|--|----------------|--|--|----------------|-----|---------------------|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | | | | | | | | | |
| | 1.03.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | Meningkatnya kualitas dan pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana kota | 3.95 | 1.03.01.02.001 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | 1.03.01.02.001.001 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya | jumlah dokumen | | - | - |
| | | | | | | | 1.03.01.02.001.006 Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya | Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang dibangun | | - | - |
| | | | | 1.03.01.02.002 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Lokasi Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Irigasi Lainnya | 2 lokasi | 1.03.01.02.002.021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | Jumlah Lokasi Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Irigasi Lainnya | 2 lokasi | - | - |
| | 1.03.01.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | Meningkatnya kualitas dan pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana kota | 3.95 | 1.03.01.03.001 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | | | 1.03.01.03.001.003 Pembangunan SPAM di Kawasan Perkotaan | Jumlah SR yang di bangun, dikembangkan dan direhabilitasi | 600 SR | - | - |
| | | | | | | | 1.03.01.03.001.014 Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM | Jumlah peserta pada pelaksanaan pembinaan rutin | 2 kali | - | - |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUBKEGIATAN | | | KET | |
|----|---|--|----------------|--|-------------------|----------------|---|--|----------------|-----|---------------------|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 1.03.01.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | Meningkatnya kualitas dan pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana kota | 3.95 | 1.03.01.05.001 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | 1.03.01.03.001.015 Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan | Jumlah SR yang dipelihara secara rutin | 866 SR | - | - |
| | | | | | | | 1.03.01.05.001.003 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik | Jumlah instalasi Air limbah rumah tinggal yang dibangun | 15 lokasi | - | - |
| | | | | | | | 1.03.01.05.001.004 Rehabilitasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik | Jumlah Instalasi Air Limbah yang dipelihara | 5 lokasi | - | - |
| | | | | | | | 1.03.01.05.001.005 Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik | Jumlah Instalasi Air Limbah yang direhabilitasi/dikembangkan | 6 lokasi | - | - |
| | | | | | | | 1.03.01.05.001.006 Penyediaan Sarana Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik | Jumlah penerimaan dari pelayanan pembuangan lumpur tinja dan air kotor dari tangki ke saluran pembuangan pada IPLT | 3000 kali | - | - |
| | | | | | | | 1.03.01.05.001.008 Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Rangka Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik | Jumlah lokasi sosialisasi air limbah domestik | 50 kali | - | - |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUBKEGIATAN | | | KET | | | | | |
|----|---|--|----------------|---|-------------------|----------------|--|--|--|-----|---------------------|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | |
| | 1.03.01.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | Meningkatnya kualitas dan pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana kota | 3.95 | 1.03.01.06.001 Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | <p>1.03.01.05.001.009 Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik</p> <p>1.03.01.05.001.010 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik</p> <p>1.03.01.06.001.002 Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan</p> <p>1.03.01.06.001.005 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan</p> <p>1.03.01.06.001.006 Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan dan Lingkungan</p> <p>1.03.01.06.001.007 Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan dan Lingkungan</p> | <p>Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan peningkatan kinerja Pengolahan air Minum</p> <p>Jumlah Modular Sewerage System yang terpelihara</p> <p>Jumlah Dokumen Perencanaan Infrastruktur Sumber Daya Air dan Saluran Drainase/ Gorong-gorong</p> <p>Jumlah Titik Genangan air yang tertangani panjang drainase kota dalam kondisi baik</p> <p>panjang drainase kota dalam kondisi baik</p> | <p>1 kali</p> <p>2 lokasi</p> <p>3 Dokumen</p> <p>6 Titik (3 km)</p> <p>5 Km</p> <p>6 Km</p> | - | - | - | - | - | - |

| No | PROGRAM | | KEGIATAN | | | | SUBKEGIATAN | | | KET | |
|----|---|--|----------------|---|---|----------------|---|--|------------------------------------|-----|---------------------|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 1.03.01.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN | Meningkatnya kualitas dan pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana kota | 3.95 | 1.03.01.07.001 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Lokasi Penataan Permukiman | | 1.03.01.07.001.001 Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota | Jumlah Lokasi Penataan Permukiman | 2 Dokumen, 10.00 Km dan 18 Kawasan | - | - |
| | 1.03.01.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN | Meningkatnya kualitas dan pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana kota | 3.95 | 1.03.01.07.001.002 Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota | | | 1.03.01.07.001.002 Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota | Jumlah lokasi permukiman yang terpelihara | 23 Titik | - | - |
| | 1.03.01.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | Meningkatnya kualitas dan pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana kota | 3.95 | 1.03.01.08.001 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | Jumlah Pembangunan/Rehabilitasi Gedung/Bangunan Kantor dan Fasilitas Umum | 14 gedung | 1.03.01.08.001.001 Penyelenggaraan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG | jumlah pelaksanaan pengendalian terhadap kesesuaian konstruksi bangunan gedung | 7 PELAKSANAAN | - | - |
| | 1.03.01.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | Meningkatnya kualitas dan pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana kota | 3.95 | 1.03.01.08.001.002 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan, Rehabilitasi, Renovasi, Ubahsuai, serta Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota | | | 1.03.01.08.001.002 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan, Rehabilitasi, Renovasi, Ubahsuai, serta Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Gedung/bangunan kantor dan fasilitas umum yang dipelihara | 14 GEDUNG | - | - |
| | 1.03.01.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | Meningkatnya kualitas dan pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana kota | 3.95 | 1.03.01.08.001.005 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara daerah Kabupaten/Kota | | | 1.03.01.08.001.005 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Data Bangunan Gedung | 1 DOKUMEN | - | - |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUBKEGIATAN | | | KET | |
|----|--|--|----------------|---|---|----------------|---|--|----------------|-----|---------------------|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 1.03.01.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA | Meningkatnya kualitas dan pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana kota | 3.95 | 1.03.01.09.001 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota | Luasan Kawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan | 200 m2 | 1.03.01.09.001.001 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Perencanaan PBL | 2 dokumen | - | - |
| | 1.03.01.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA | Meningkatnya kualitas dan pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana kota | 3.95 | 1.03.01.09.003 Penataan Bangunan dan Lingkungan | Luasan kawasan penataan bangunan | 200 m2 | 1.03.01.09.001.003 Penataan Bangunan dan Lingkungan | Jumlah dokumen Perencanaan Infrastruktur jalan dan jembatan dalam kondisi baik | 11 Dokumen | - | - |
| | 1.03.01.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | Meningkatnya kualitas dan pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana kota | 3.95 | 1.03.01.10.001 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | Panjang Jalan dalam Kondisi Baik | | 1.03.01.10.001.001 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengembangan Jalan | Jumlah Lokasi Pembangunan Pedestrian | 2 Lokasi | - | - |
| | 1.03.01.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | Meningkatnya kualitas dan pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana kota | 3.95 | 1.03.01.10.001 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | Panjang Jalan dalam Kondisi Baik | | 1.03.01.10.001.005 Pembangunan Jalan | Panjang Jalan yang dibangun/direhabilitasi dan dikembangkan | 25 Km | - | - |
| | 1.03.01.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | Meningkatnya kualitas dan pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana kota | 3.95 | 1.03.01.10.001 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | Panjang Jalan dalam Kondisi Baik | | 1.03.01.10.001.009 Rehabilitasi Jalan | Jumlah Pelayanan Laboratorium Pengujian Konstruksi | 80 kali | - | - |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUBKEGIATAN | | | KET | |
|----|---|--|----------------|---|---|----------------|---|--|---|------------------------------|------------------------------|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 1.03.01.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | Meningkatnya kualitas dan pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana kota | 3.95 | 1.03.01.11.001 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi | Jumlah Tenaga Terampil Konstruksi yang tersertifikasi | 60 Orang | 1.03.01.10.001.011 Pemeliharaan Rutin Jalan 1.03.01.10.001.012 Pembangunan Jembatan 1.03.01.10.001.019 Pemeliharaan Rutin Jembatan 1.03.01.10.001.020 Pemeliharaan Berkala Jembatan 1.03.01.11.001.004 Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi | Panjang Jalan yang dibangun/direhabilitasi dan dikembangkan jumlah lokasi jembatan yang direhabilitasi/dilakukan pembangunan Jumlah Jembatan yang dilakukan Pemeliharaan Jumlah lokasi Insidental Jembatan Jumlah Tenaga Terampil Konstruksi yang tersertifikasi | 30 km 2 Lokasi 15 Lokasi 10 Lokasi 60 Orang | - - - - | - - - - |
| | | | | 1.03.01.11.002 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen HSPK | 3 dokumen | 1.03.01.11.002.001 Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi 1.03.01.11.002.002 Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi | Jumlah data Badan Usaha Yang terfasilitasi Jumlah Dokumen HSPK | 25 badan usaha 3 DOKUMEN | - - | - - |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUBKEGIATAN | | | KET | |
|----|---|--|----------------|---|--|-----------------------------|---|--|----------------|-----|---------------------|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 1.03.01.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan dan penataan ruang terhadap rencana tata ruang | 30.72% | 1.03.01.11.003 Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil) | JUmlah Pelaksanaan Pemberdayaan Jasa Konstruksi | 200 orang | 1.03.01.11.003.003 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi | Jumlah Peserta Pelaksanaan Pemberdayaan Jasa Konstruksi | 200 orang | - | - |
| | | | | 1.03.01.12.001 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota | Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang dan Sosialisasi | 1 Dokumen dan 3 Sosialisasi | 1.03.01.12.001.001 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang | 1 Dokumen | - | - |
| | | | | 1.03.01.12.001.004 Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang- undangan Bidang Penataan Ruang | | | | Jumlah Sosialisasi | 3 Sosialisasi | - | - |
| | | | | 1.03.01.12.002 Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Penelitian dan Kajian Penataan Ruang dan Reviu Peta Kota Malana | 4 Dokumen | 1.03.01.12.002.002 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Penelitian dan Kajian Penataan Ruang dan Reviu Peta Kota Malana | 4 Dokumen | - | - |
| | | | | 1.03.01.12.003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | jumlah dokumen pemanfaatan ruang yang disinkronisasi | | 1.03.01.12.003.001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah | Jumlah penyusunan Dokumen TKPRD | 100% | - | - |
| | | | | 1.03.01.12.003.002 Sistem Informasi Penataan Ruang | | | | Jumlah Aplikasi sistem Informasi tata Ruang | 1 aplikasi | - | - |
| | | | | 1.03.01.12.004 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | jumlah dokumen pengawasan dan pengendalian yang tertanqani | | 1.03.01.12.004.004 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang | Jumlah Lokasi Identifikasi | 6 lokasi | - | - |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUBKEGIATAN | | | KET | |
|----|--|--|----------------|--|---|----------------|---|----------------------------------|----------------|-----|---------------------|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | | | | | | | | | | |
| | 1.04.01.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | Meningkatnya kualitas dan pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana kota | 3.95 | 1.04.01.02.001 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | | | 1.04.01.02.001.001 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota | | | - | - |
| | | | | 1.04.01.02.002 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | | | 1.04.01.02.002.001 Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana | | | - | - |
| | | | | 1.04.01.02.005 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus | jumlah penyediaan pemukiman yang layak bagi MBR dan disabilitas | 294 hunian | 1.04.01.02.005.002 Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus | Jumlah Unit Hunian yang ter huni | 288 Hunian | - | - |
| | 1.04.01.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERMUKIMAN KUMUH | Meningkatnya kualitas dan pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana kota | 3.95 | 1.04.01.03.001 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman | Luas penanganan kawasan kumuh | | 1.04.01.03.001.002 Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh | Luas penanganan kawasan kumuh | 1 Dokumen | - | - |
| | | | | | | | 1.04.01.03.001.003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh | Luas penanganan kawasan kumuh | 1 Kawasan | - | - |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUBKEGIATAN | | | KET | |
|----|--|--|----------------|--|------------------------------------|----------------|---|---|----------------|-----|---------------------|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 1.04.01.04 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | Meningkatnya kualitas dan pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana kota | 3.95 | 1.04.01.04.001 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan | Jumlah PSU yang di serah terimakan | | 1.04.01.04.001.002 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | Jumlah PSU yang di serah terimakan | 4 PSU | - | - |
| | 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | | | | | | 1.04.01.04.001.003 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan | | | - | - |
| | 1.05.01.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentrangan masyarakat dalam sehari | 100% | 1.05.01.02.001 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | 1.05.01.02.001.001 Pencegahan Gangguan Ketentrangan dan Ketertiban Umum | Jumlah patroli siaga ketertiban umum dan lingkungan | 3 | - | - |
| | | | | | | | 1.05.01.02.001.002 Penindakan atas Gangguan Ketentrangan dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada | Jumlah penertiban dengan jajaran keamanan lainnya | 80% | - | - |
| | | | | | | | 1.05.01.02.001.004 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentrangan dan Ketertiban Umum | Jumlah pengerahan satuan linmas | 30 | - | - |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUBKEGIATAN | | | KET | |
|----|---|-----------------------------------|----------------|---|--|----------------|---|---|--|-----|---------------------|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 1.05.01.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | Indeks Risiko Bencana Kota Malang | 100 | 1.05.01.03.001 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota | Persentase masyarakat di wilayah rawan bencana yang mendapat informasi rawan bencana | 100% | 1.05.01.02.001.005 Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia 1.05.01.02.002.001 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota 1.05.01.02.002.003 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota 1.05.01.03.001.001 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota 1.05.01.03.001.002 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) | Jumlah satlinmas yang dibina Jumlah orang yang diberikan pembinaan / penyuluhan / pengawasan Jumlah penindakan pelataran proyustisi Kajian Risiko Bencana (Kelurahan) Jumlah masyarakat yang memperoleh informasi/sosialisasi rawan bencana | 3100 1750 300 1 jenis dokumen 50.000 orang | - | - |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUBKEGIATAN | | | KET | |
|----|---------|-------------------|----------------|--|--|----------------|---|--|----------------------------|-----|---------------------|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | 1.05.01.03.002 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Persentase masyarakat di wilayah rawan bencana yang mendapat pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | 100% | 1.05.01.03.002.001 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota | Tersusunnya Rencana Penanggulangan Bencana di Kota Malang | 1 jenis dokumen | - | - |
| | | | | | | | 1.05.01.03.002.002 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah masyarakat yang mengikuti pelatihan mitigasi bencana | 600 orang | - | - |
| | | | | | | | 1.05.01.03.002.003 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah masyarakat yang mendapat layanan Pusdalops penanggulangan bencana | 10.000 orang | - | - |
| | | | | | | | 1.05.01.03.002.004 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana | Jumlah Peralatan kebencanaan | 4 jenis | - | - |
| | | | | | | | 1.05.01.03.002.007 Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota | Dokumen Jitupasna, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat | 1 jenis dokumen dan 100 KK | - | - |
| | | | | | | | 1.05.01.03.002.008 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah peserta pelatihan penanggulangan bencana | 50 orang | - | - |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUBKEGIATAN | | | KET | |
|----|--|-------------------|----------------|---|-------------------|----------------|--|-----------------------|----------------|-----|---------------------|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 1.06.01.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | - | - | 1.06.01.02.003 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota | | | 1.06.01.02.003.004 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | | | - | - |
| | 1.06.01.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | - | - | 1.06.01.04.001 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | | | 1.06.01.04.001.005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | | | - | - |
| | | | | | | | 1.06.01.04.001.010 Pemberian Layanan Kedaruratan | | | - | - |
| | | | | | | | 1.06.01.04.001.012 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | | | - | - |
| | | | | 1.06.01.04.002 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial | | | 1.06.01.04.002.003 Penyediaan Permakanan | | | - | - |
| | | | | | | | 1.06.01.04.002.007 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | | | - | - |
| | | | | | | | 1.06.01.04.002.008 Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | | | - | - |
| | | | | | | | 1.06.01.04.002.010 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | | | - | - |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUBKEGIATAN | | | KET | |
|----|--|------------------------------------|----------------|--|--|----------------|---|--|----------------|-----|---------------------|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2 | 1.06.01.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | - | - | 1.06.01.05.002 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | | | 1.06.01.04.002.014 Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota 1.06.01.05.002.002 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | | | - | - |
| | 1.06.01.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA | - | - | 1.06.01.06.001 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota 1.06.01.06.002 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota | | | 1.06.01.06.001.001 Penyediaan Makanan 1.06.01.06.002.002 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana | | | - | - |
| | 1.06.01.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN | - | - | 1.06.01.07.001 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | | | 1.06.01.07.001.001 Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 1.06.01.07.001.002 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | | | - | - |
| | 2. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA | | | | | | | | | | |
| | 2.07.01.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | Meningkatnya kualitas tenaga kerja | 30% | 2.07.01.03.001 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi | Jumlah lulusan pelatihan yang mendapat sertifikat kompetensi | 42 orang | 2.07.01.03.001.001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi | Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan peningkatan keterampilan dan produktivitas | 140 orang | - | - |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUBKEGIATAN | | | KET | |
|----|--|--|----------------|--|--|----------------|---|--|------------------------|-----|---------------------|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 2.07.01.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | Meningkatnya penempatan kerja dan perluasan kesempatan kerja | 76% | 2.07.01.04.001 Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah layanan antar kerja | 1 kegiatan | 2.07.01.04.001.003 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja | Jumlah peserta Pembinaan Bursa Kerja Khusus | 50 orang | - | - |
| | 2.07.01.04.003 | | | 2.07.01.04.003 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja | Jumlah informasi pasar kerja | 1 kegiatan | 2.07.01.04.003.003 Job Fair/Bursa Kerja | Jumlah perusahaan peserta Job Market Fair | 60 perusahaan | - | - |
| | 2.07.01.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | Meningkatnya kondisi hubungan industrial yang kondusif | 65% | 2.07.01.05.002 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah bentuk Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan IndustrialKabupaten/Kota | 3 kegiatan | 2.07.01.05.002.001 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen Usulan UMK dan Jumlah peserta Pembinaan | 1 dokumen dan 50 orang | - | - |
| | 2.07.01.05.002.004 | | | | | | 2.07.01.05.002.004 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen hasil LKS Tripartit, Pemantauan UMK, THR, dan Penanganan Mayday | 6 dokumen | - | - |
| | 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | | | 2.08.01.02.001 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 2.08.01.02.001.004 Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termssuk PPRG | | | - | - |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUBKEGIATAN | | | KET | |
|----|---|-------------------|----------------|---|-------------------|----------------|--|-----------------------|----------------|-----|---------------------|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 2.08.01.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | | | 2.08.01.02.002 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 2.08.01.02.002.001 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi | | | - | - |
| | | | | | | | 2.08.01.02.002.002 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi | | | - | - |
| | | | | 2.08.01.02.003 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 2.08.01.02.003.002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | - | - |
| | | | | | | | 2.08.01.02.003.003 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | - | - |
| | | | | 2.08.01.03.001 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | | | 2.08.01.03.001.001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | | | - | - |
| | | | | | | | 2.08.01.03.001.002 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | - | - |
| | | | | 2.08.01.03.003 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 2.08.01.03.003.004 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | - | - |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUBKEGIATAN | | | KET | |
|----|--|-------------------|----------------|---|-------------------|----------------|--|-----------------------|----------------|-----|---------------------|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 2.08.01.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA | - | - | 2.08.01.04.002 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | 2.08.01.04.002.003 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | - | - |
| | 2.08.01.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK | - | - | 2.08.01.05.001 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota | | | 2.08.01.05.001.001 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota | | | - | - |
| | | | | | | | 2.08.01.05.001.002 Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota | | | - | - |
| | 2.08.01.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | - | - | 2.08.01.06.002 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 2.08.01.06.002.002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | - | - |
| | | | | | | | 2.08.01.06.002.003 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | - | - |
| | 2.08.01.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | - | - | 2.08.01.07.001 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | | | 2.08.01.07.001.002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | | | - | - |
| | | | | 2.08.01.07.002 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 2.08.01.07.002.001 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | - | - |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUBKEGIATAN | | | KET | |
|----|--|--|----------------|---|---|---------------------|---|--|---------------------------------------|-----|---------------------|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 2.10.01.08 PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG | Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan dan penataan ruang terhadap rencana tata ruang | 30,72% | 2.10.01.08.002 Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong | Jumlah laporan inventarisasi pemanfaatan tanah kosong | 1 dokumen | 2.10.01.08.002.001 Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong | Jumlah Dokumen Laporan Incentarisasi pemanfaatan tanah kosong | 1 dokumen | - | - |
| | 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | | | | | | | | | | |
| | 2.11.01.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP | Tersusunnya Perencanaan Lingkungan Hidup | 100% | 2.11.01.02.002 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Streategis (KLHS) Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen Perencanaan Lingkungan | 3 dokumen | 2.11.01.02.002.002 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD | Jumlah Kajian Perencanaan Lingkungan | 3 Dokumen | - | - |
| | 2.11.01.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | Pengendalian terhadap kualitas lingkungan hidup | 70% | 2.11.01.03.001 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | Jumlah Kegiatan pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup | 75 kegiatan / Usaha | 2.11.01.03.001.001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut | Jumlah hasil pemantauan kualitas lingkungan hidup, Jumlah Laporan Hasil Uji (LHU), Jumlah Sarana Prasarana Laboratorium, Jumlah parameter penauian | 1 Dokumen, 75 LHU, 7 jenis, 2 Dokumen | - | - |
| | 2.11.01.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | Terkelolanya keanekaragaman hayati | 4,18% | 2.11.01.04.001 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota | Jumlah Keankaragaman Hayati yang Terkelola | 797 lokasi | 2.11.01.04.001.001 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati | Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan keanekaragaman hayati tersusun | 6 Dokumen | - | - |
| | | | | | | | 2.11.01.04.001.004 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | Jumlah Lokasi RTH yang terjaga dan terpelihara ; Jumlah Pemakaman Umum yang dikelola | 767 Lokasi RTH ; 9 TPU | - | - |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUBKEGIATAN | | | KET | |
|----|--|---|----------------|---|---|---|---|--|----------------------------|-----|---------------------|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 2.11.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) | Pelaku usaha yang memiliki izin tempat penyimpanan sementara limbah B3 | 6% | 2.11.01.05.001 Penyimpanan Sementara Limbah B3 | Jumlah pelaku usaha yang mempunyai izin penyimpanan sementara limbah B3 | 360 Kegiatan dan/atau Usaha | 2.11.01.04.001.005 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya 2.11.01.05.001.001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Jumlah taman aktif dan kebun pembibitan yang terkelola | 11 Lokasi | - | - |
| | 2.11.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | Terlaksananya pembinaan dan pengawasan izin lingkungan hidup | 91,80% | 2.11.01.06.001 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah kegiatan usaha yang mempunyai izin lingkungan izin PPLH | 280 pelaku usaha dan/atau kegiatan dan masyarakat | 2.11.01.06.001.001 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH | Jumlah kegiatan usaha yang mempunyai izin lingkungan izin PPLH | 200 dokumen | - | - |
| | | | | | | | 2.11.01.06.001.003 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Pengawasan dan penegakan lingkungan hidup | 80 kali | - | - |
| | | | | | | | 2.11.01.06.001.004 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH | Jumlah pelanggaran yang ditangani | 25 kegiatan dan atau usaha | - | - |
| | 2.11.01.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | Terlaksananya peningkatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup di sekolah, masyarakat, RW dan Mitra | 29,03% | 2.11.01.08.001 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup | 54 masyarakat, sekolah, RW, dan komunitas/mitra | 2.11.01.08.001.001 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah RW yang melaksanakan pengelolaan Lingkungan Hidup | 180 RW | - | - |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUBKEGIATAN | | | KET | |
|----|--|--|----------------|--|------------------------------------|----------------------|--|---|------------------------------------|-----|---------------------|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 2.11.01.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP | Terlaksananya penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) | 66,67% | 2.11.01.10.001 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota | Jumlah pengaduan yang terselesai | 20 pengaduan | 2.11.01.08.001.002 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup 2.11.01.10.001.001 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota | Jumlah Edukasi Lingkungan Hidup ; Jumlah Kerjasama yang dilakukan DLH ; 5 Mitra | 2 dokumen | - | - |
| | 2.11.01.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | Terkelolanya Sampah | 98% | 2.11.01.11.001 Pengelolaan Sampah | Jumlah volume sampah yang dikelola | 241.178,21 ton/tahun | 2.11.01.11.001.001 Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota 2.11.01.11.001.002 Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali | Jumlah Kendaraan/Peralatan Dinas/Operasional Persampahan yang terpantau pemeliharaannya Jumlah Sampah yang berkurang | 35 unit 55.476,18 ton/tahun | - | - |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUBKEGIATAN | | | KET | |
|----|---|---|----------------|--|-----------------------------|----------------|---|---|---|-----|---------------------|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | Meningkatnya tertib administrasi Kependuduka n dan Pencatatan Sipil | 95,50% | 2.12.01.02.001 Pelayanan Pendaftaran Penduduk | Dokumen Kependuduka n | 1 Tahun | 2.11.01.11.001.003 Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | Jumlah sampah jalan dan TPS yang terlayani, Jumlah Sampah yang tertangani, Jumlah sampah tertampung, Jumlah Penanganan Sampah, Jumlah Kendaraan Sampah | 185.068t on/tahun, 183.068 ton/tahun , 178.200 ton/tahun , 183.068 ton/tahun , 2 unit | - | - |
| | 2.12.01.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | | | | | | 2.11.01.11.001.004 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan | Jumlah data wajib retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan | 165.000 wajib retribusi | - | - |
| | | | | | | | 2.11.01.11.001.005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan | Jumlah Sarana Prasarana Kebersihan yang tersedia | 12 jenis | - | - |
| | | | | | | | 2.12.01.02.001.001 Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan | | | - | - |
| | | | | | | | 2.12.01.02.001.004 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk | | | - | - |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUBKEGIATAN | | | KET | |
|----|---|-------------------|----------------|--|-------------------|----------------|---|-----------------------|----------------|-----|---------------------|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 2.14.01.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | - | - | 2.14.01.02.002 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota | | | 2.14.01.02.002.001 Perumusan Parameter Kependudukan | | | - | - |
| | | | | | | | 2.14.01.02.002.002 Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan | | | - | - |
| | | | | | | | 2.14.01.02.002.003 Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga | | | - | - |
| | | | | | | | 2.14.01.02.002.014 Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK | | | - | - |
| | 2.14.01.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | - | - | 2.14.01.03.002 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) | | | 2.14.01.03.002.004 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) | | | - | - |
| | | | | 2.14.01.03.004 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | | | 2.14.01.03.004.001 Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | | | - | - |
| | 2.14.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | - | - | 2.14.01.04.001 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | | | 2.14.01.04.001.003 Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | | | - | - |
| | | | | | | | 2.14.01.04.001.008 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan Serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) | | | - | - |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUBKEGIATAN | | | KET | |
|----|--|-----------------------------------|----------------|---|--------------------|----------------|--|--|----------------|-----|---------------------|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN | | | 2.14.01.04.002 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | | | 2.14.01.04.002.001 Penguatan Kebijakan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya Dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi K | | | - | - |
| | 2.15.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | Meningkatnya kinerja transportasi | 26.78% | 2.15.01.02.002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Perlengkapan jalan | 10 | 2.14.01.04.002.003 Pelaksanakan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | | | - | - |
| | | | | | | | 2.15.01.02.002.001 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Pengadaan dan pemasangan Traffic Light Adaptif | 3 | - | - |
| | | | | | | | 2.15.01.02.002.002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Belanja modal pengadaan kelengkapan jalan dan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pe mbelian Bangunan Lainnya | 10 | - | - |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUBKEGIATAN | | | KET | |
|----|---------|-------------------|----------------|---|---|----------------|---|--|----------------|-----|---------------------|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | 2.15.01.02.004 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir | Karcis Parkir, Kendaraan operasional, Gembok mobil, Seragam Jukir | 4 | 2.15.01.02.004.001 Fasilitas pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Karcis Parkir, Kendaraan Operasional, Gembok Ban Kendaraan | 3 | - | - |
| | | | | 2.15.01.02.004.002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 2.15.01.02.004.002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | Seragam Petugas Parkir | 1000 | - | - |
| | | | | 2.15.01.02.005 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Kendaraan yang terlayani uji kir | 17000 | 2.15.01.02.005.001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Kendaraan yang terlayani uji kir | 17000 | - | - |
| | | | | 2.15.01.02.005.007 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | | | 2.15.01.02.005.007 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Perawatan alat uji kendaraan bermotor | 1 | - | - |
| | | | | 2.15.01.02.006 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | Dokumen Monev, Pengawasan CFD, Pemeliharaan fasilitas Lalin, dan Pemantauan dan Pengendalian Arus Lalin | 4 | 2.15.01.02.006.001 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi | Belanja Listrik APILL, Belanja Jasa Konsultan, Honor TPOK | 12 | - | - |
| | | | | | | | 2.15.01.02.006.002 Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas | Insidentil Fasilitas Lalu Lintas | 1 Paket | - | - |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUBKEGIATAN | | | KET | |
|----|---------|-------------------|----------------|---|---|----------------|--|---|----------------|-----|---------------------|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | 2.15.01.02.007 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah Kegiatan Koordinasi Penilaian Andalalin | 12 | 2.15.01.02.007.003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin | Pengawasan Ketertiban kegiatan Car Free Day dan Pemantauan dan Pengendalian Arus Lalulintas | 2 | - | - |
| | | | | 2.15.01.02.008 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan | Operasi Penertiban Laik Jalan Kendaraan Angkutan Umum dan Angkutan Khusus dan Monitoring dan Evaluasi Angkutan Umum | 2 | 2.15.01.02.008.004 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota | Peningkatan keamanan dan kelancaran Lalu Lintas | 1 | - | - |
| | | | | 2.15.01.02.009 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Penyelenggaraan Angkutan Lebaran dan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan | 2 | 2.15.01.02.009.001 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Kegiatan Penyelenggaraan angkutan lebaran | 1 | - | - |
| | | | | | | | 2.15.01.02.009.002 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | Kegiatan Forum lalulintas | 1 | - | - |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUBKEGIATAN | | | KET | |
|----|--|---|----------------|--|--|----------------|--|--|------------------------|-----|---------------------|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | 2.15.01.02.010 Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Koordinasi Penyelenggaraan Natal dan Tahun Baru | 1 | 2.15.01.02.010.002 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | Kegiatan penyelenggaraan angkutan Natal dan Tahun Baru | 1 | - | - |
| | | | | 2.15.01.02.011 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/jurumudi untuk peningkatan keselamatan | 1 | 2.15.01.02.011.002 Penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah peserta penyuluhan peningkatan keselamatan berlalulintas | 200 | - | - |
| | | | | 2.15.01.02.014 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | laporan Kegiatan monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Angkutan Umum | 12 | 2.15.01.02.014.002 Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota | laporan Kegiatan monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Angkutan Umum | 12 | - | - |
| | 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | | | | | | | | | |
| | 2.16.01.02 PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | Meningkatnya Tata Kelola dan Layanan Pemerintah Berbasis Elektronik | | 2.16.01.02.001 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | 2.16.01.02.001.002 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik | Jumlah dokumen yang diolah | 12 dokumen | - | - |
| | | | | | | | 2.16.01.02.001.003 Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah | Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi | 3 kali | - | - |
| | | | | | | | 2.16.01.02.001.004 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik | Jumlah konten website yang diposting dan lomba website | 1035 posting web/tahun | - | - |
| | | | | | | | 2.16.01.02.001.005 Pengelolaan Media Komunikasi Publik | | | - | - |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUBKEGIATAN | | | KET | |
|----|---|---|----------------|---|--|----------------|--|--|--|-----------------------|-----------------------|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 2.16.01.03 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA | Persentase Aplikasi Informasi Yang Terintegrasi | 17,31 % | 2.16.01.03.001 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Persentase peningkatan sarana prasarana TIK dan pemeliharaan | 80% | 2.16.01.02.001.006 Pelayanan Informasi Publik 2.16.01.02.001.010 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik 2.16.01.03.001.003 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah | Jumlah informasi publik yang tersampaikan kepada masyarakat Jumlah dokumen penyusunan regulasi, analisis pelaksanaan fungsi PPID Jumlah Sarana Prasarana TIK dan Pemeliharaan | 55.56 1 dokumen 10 perangkat dan 286 koneksi akses data | - - - | - - - |
| | | | | 2.16.01.03.002 Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen pelaksanaan implementasi SPBE | 9 dokumen | 2.16.01.03.002.001 Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi 2.16.01.03.002.007 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik 2.16.01.03.002.008 Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah 2.16.01.03.002.009 Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas 2.16.01.03.002.010 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | Jumlah Monitoring dan Evaluasi Jumlah Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Jumlah pemeliharaan sarana prasarana Jumlah Aplikasi penunjang smart city Jumlah peserta pelatihan teknologi informasi dan komunikasi | 600 dokumen 3 Aplikasi 4 menara dan 93 CCTV 2 Aplikasi 420 orang | - - - - - | - - - - - |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUBKEGIATAN | | | KET | | |
|----|---|-------------------|----------------|--|-------------------|----------------|--|------------------------------|----------------|-----|---------------------|--|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | | | | | | | | | | | |
| | 2.17.01.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | | | 2.17.01.03.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota | | | 2.17.01.03.01.002 Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | - | - | |
| | 2.17.01.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI | | | 2.17.01.04.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | 2.17.01.04.01.001 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | | | - | - | |
| | 2.17.01.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | | | 2.17.01.05.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota | | | 2.17.01.05.01.001 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | | | - | - | |
| | 2.17.01.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI | | | 2.17.01.06.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota | | | 2.17.01.06.01.001 Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Provinsi | | | - | - | |
| | 2.17.01.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | | | 2.17.01.07.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | | | 2.17.01.07.01.001 Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | Jumlah database Usaha Mikrro | 1 Aplikasi | - | - | |
| | | | | | | | 2.17.01.07.01.002 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro | | | - | - | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUBKEGIATAN | | | KET | |
|----|---|------------------------------------|----------------|--|--|----------------|--|--|----------------|-----|---------------------|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | 2.17.01.07.01.003 Fasilitas Kemudahan Perizinan Usaha Mikro | Jumlah Usaha Mikro yang mengikuti sosialisasi perlindungan usaha | 40 Usaha Mikro | - | - |
| | | | | | | | 2.17.01.07.01.004 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | Jumlah Usaha Mikro yang di fasilitasi dengan Pendampingan Klinik | 1320 UM | - | - |
| | | | | | | | 2.17.01.07.01.005 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro | Jumlah stakeholder yang mengikuti forum komunikasi | 78 UM | - | - |
| | 2.17.01.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | | | 2.17.01.08.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil | | | 2.17.01.08.01.001 Fasilitas Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi | Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan ketrampilan kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat (Usaha Mikro) | 140 orang | - | - |
| | 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL | | | | | | 2.18.01.02.001.001 Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | Jumlah Ranperwal yang tersusun | 1 dokumen | - | - |
| | 2.18.01.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | Meningkatnya nilai penanaman modal | | 2.18.01.02.001 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Fasilitas Penanaman Modal | 1 Dokumen | 2.18.01.02.001.002 Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | Jumlah pelaku usaha yang terfasilitasi | 1 pelaku usaha | - | - |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUBKEGIATAN | | | KET | |
|----|--|--|----------------|---|---|----------------|--|---|---------------------------|-----|---------------------|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 2.18.01.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | Meningkatnya jumlah investor | 10% | 2.18.01.03.001 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah Keikutsertaan promosi investasi | 2 kali | 2.18.01.03.001.002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | Keikutsertaan dalam gelar pameran investasi | 1 kali | - | - |
| | 2.18.01.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal | 88,75 | 2.18.01.04.001 Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | Persentase Penerbitan Izin dan Non Izin | 90% | 2.18.01.04.001.001 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Jumlah layanan perizinan dan nonperizinan | 126 jenis izin | - | - |
| | 2.18.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | Meningkatnya ketaatan pelaku investasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan | 60% | 2.18.01.05.001 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah lapoan Monitoring dan Evaluasi Penanaman Modal | 10 Laporan | 2.18.01.05.001.002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal | Jumlah bahan penyuluhan perizinan | 2 jenis | - | - |
| | 2.18.01.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL | Meningkatnya ketersediaan data dan informasi Perizinan, Non Perizinan, Penanaman Modal dan Ketenagakerjaan | 80% | 2.18.01.06.001 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Data dan informasi yang tersedia | 3 Jenis | 2.18.01.05.001.003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal | Jumlah jenis perizinan, non perizinan, dan perusahaan yang dimonitoring | 126 izin dan nonperizinan | - | - |
| | 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | | | | | | 2.18.01.06.001.001 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Jumlah data yang dikelola | 1 aplikasi | - | - |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUBKEGIATAN | | | KET | |
|----|---|--|----------------|---|---|----------------|--|---|----------------|-----|---------------------|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 2.19.01.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | Prosentase partisipasi pemuda dalam kepeloporan pemuda | 1 % | 2.19.01.02.001 Penyeadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota | Jumlah pemuda yang mengikuti Penyeadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kota | 606 pemuda | 2.19.01.02.001.001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor | Jumlah pemuda yang mengikuti Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor | 12 Pemuda | - | - |
| | | | | | | | 2.19.01.02.001.002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Pemula | Jumlah Pemuda yang mengikuti Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas daya saing, wirausaha pemula | 110 Pemuda | - | - |
| | | | | | | | 2.19.01.02.001.004 Pemenuhan Hak Setiap Pemuda yang Meliputi: Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda Dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Progr | Jumlah Pemuda yang mengikuti hak perlindungan pemuda dan pengembangan diri | 100 Pemuda | - | - |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUBKEGIATAN | | | KET | |
|----|---|--|----------------|---|-------------------|----------------|---|--|--|-----|---------------------|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 2.19.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | Peringkat kota Malang pada event olahraga tingkat provinsi | III | 2.19.01.03.002 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 2.19.01.02.001.007 Pemberian Penghargaan Pemuda dan organisasi pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi | Jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan Pemberian Penghargaan Pemuda dan organisasi pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi | 300 Pemuda | - | - |
| | | | | 2.19.01.03.003 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi | | | 2.19.01.02.001.008 Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda | Jumlah Pemuda yang mengikuti kegiatan peningkatan kepemimpinan dan kesukarelawanan | 78 Pemuda kegiatan Peningkatan Kepemimpinan, 6 pemuda kegiatan Peningkatan Kesukarelawanan | - | - |
| | | | | 2.19.01.03.005 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi | | | 2.19.01.03.002.002 Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kab/Kota | | | - | - |
| | | | | | | | 2.19.01.03.002.003 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan | | | - | - |
| | | | | | | | 2.19.01.03.003.005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga | | | - | - |
| | | | | | | | 2.19.01.03.005.004 Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi | | | - | - |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUBKEGIATAN | | | KET | |
|----|--|--|----------------|--|-------------------|----------------|--|---|----------------|-----|---------------------|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK | | | | | | 2.19.01.03.005.006 Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat | | | - | - |
| | 2.20.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | Meningkatnya Pelayanan Masyarakat Berbasis Elektronika | 100% | 2.20.01.02.001 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | | | 2.20.01.02.001.001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral | Jumlah Dokumen tervalidasi, Teranalisisnya Data dan Informasi Statistik | 3 Dokumen | - | - |
| | | | | | | | 2.20.01.02.001.002 Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi | Jumlah Peserta Pembinaan | 100 Orang | - | - |
| | | | | | | | 2.20.01.02.001.003 Membangun Metadata Statistik Sektoral | Jumlah Dokumen Metadata | 1 dokumen | - | - |
| | | | | | | | 2.20.01.02.001.004 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral | Jumlah kegiatan pembinaan kelembagaan, monitoring serta survey | 3 kegiatan | - | - |
| | | | | | | | 2.20.01.02.001.005 Pengembangan Infrastruktur | Jumlah ketersediaan peralatan infrastruktur | 1 paket | - | - |
| | 2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN | | | | | | 2.21.01.02.001.002 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Pengkajian Data | 1 Kegiatan | - | - |
| | 2.21.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | Meningkatnya Pelayanan Masyarakat Berbasis Elektronika | 6% | 2.21.01.02.001 Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | 2.21.01.02.001.003 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | Jumlah Dokumen Sandi Yang Diamankan | 630 Dokumen | - | - |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUBKEGIATAN | | | KET | |
|----|--|-----------------------|----------------------------|---|--|----------------|--------------------|--|----------------|-----|---------------------|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | | | 2.21.01.02.001 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | 2.21.01.02.001.004 | Jumlah Peserta Sosialisasi | 100 Orang | - | - |
| | | | | 2.21.01.02.002 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 2.21.01.02.002.001 | Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana | 2 paket | - | - |
| | 2.22.01.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | Seniman dan budayawan | Indeks Pemajuan Kebudayaan | 2.22.01.02.001 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | 2.22.01.02.001.001 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan | | - | - |
| | | | | 2.22.01.02.001.002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan | | | 2.22.01.02.001.002 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya | | - | - |
| | | | | 2.22.01.02.002 Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | 2.22.01.02.002.001 | Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan | | - | - |
| | 2.22.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL | SenimanKota Malang | Karya Seni di Kota Malang | ..01.. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal | Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal PAUD yang ditetapkan | 1 dokumen | 2.22.01.03.001.003 | Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional | | - | - |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUBKEGIATAN | | | KET | |
|----|---|--|--|---|---|----------------------------|---|---|---|-----|---------------------|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 2.22.01.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH | budayawan dan pelaku tradisi | tradisi yang ada di kota malang | 2.22.01.04.001 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | 2.22.01.04.001.001 Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota 2.22.01.04.001.003 Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah | | | - | - |
| | 2.22.01.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA | Cagar Budaya di Kota Malang | Jumlah Cagar Budaya yang terpelihara | 2.22.01.05.001 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota | | | 2.22.01.05.001.003 Peningkatan Potensi Nilai, Informasi, dan Promosi Cagar Budaya Serta Pemanfaatannya | | | - | - |
| | 2.22.01.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN | Jumlah Pengunjung yang memanfaatkan Museum | Museum Mpu Purwa dan Museum Pendidikan | 2.22.01.06.001 Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota | | | 2.22.01.06.001.003 Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Museum 2.22.01.06.001.004 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum | | | - | - |
| | 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN | | | | | | | | | | |
| | 2.23.01.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | Meningkatnya Layanan Budaya Baca | 2,2% | 2.23.01.02.001 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah tambahan judul koleksi & laporan pengunjung perpustakaan | 1.392 judul dan 12 laporan | 2.23.01.02.001.002 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2.23.01.02.001.008 Pengembangan Bahan Pustaka 2.23.01.02.001.009 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka | Jumlah laporan pengunjung perpustakaan umum JUmlah tambahan judul koleksi Jumlah Koleksi Perpustakaan yang Dipreservasi dan Jumlah Bahan Perpustakaan yang diolah | 12 laporan 1.392 judul 10.000 eksemplar dan 2.000 eksemplar | - | - |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUBKEGIATAN | | | KET | |
|----|--|---|----------------|---|---|----------------|--|--|---|-----|---------------------|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 3.25.01.05 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | Prosentase Peningkatan Produksi Perikanan | 5% | 3.25.01.03.004 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan 3.25.01.05.002 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil | JUmlah Peserta Sosialisasi dan Pelatihan | 140 peserta | 3.25.01.03.004.002 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 3.25.01.05.002.001 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil | Jumlah sarana dan prasarana pembenihan ikan Jumlah Peserta Sosialisasi dan Pelatihan | 6 jenis sarana dan prasarana pembenihan ikan 140 peserta | - | - |
| | 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | | | | | | | | | | |
| | 3.26.01.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | Jumlah kunjungan wisata | 7.915.512 | 3.26.01.02.003 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah destinasi pariwisata yang dikelola | 3 kegiatan | 3.26.01.02.003.003 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 3.26.01.02.003.006 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah pedagang wisata belanja tugu dan pedagang night market yang dibina Jumlah pelaku yang mendapatkan pelatihan | 600 pedagang | - | - |
| | 3.26.01.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | Jumlah kunjungan wisata | 7.915.512 | 3.26.01.02.004 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota ..01.. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi | Jumlah pelaku usaha yang berpartisipasi dalam sosialisasi | 75 peserta | 3.26.01.02.003.007 Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 3.26.01.02.004.003 Pengelolaan Investasi Pariwisata | Jumlah Peserta sosialisasi dan peserta bazar & Jumlah pelaku wisata heritage yang mengikuti event Jumlah pelaku usaha yang paham aturan setelah sosialisasi | 155 peserta & 10 komunitas | - | - |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUBKEGIATAN | | | KET | |
|----|--|--|----------------|--|-----------------------------------|-----------------------------|---|--|--|-----|---------------------|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 3.26.01.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | Pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif | 309 | 3.26.01.03.001 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 3.26.01.05.001 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif | 7 subsektor ekonomi kreatif | 3.26.01.03.001.002 Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten/Kota 3.26.01.05.001.002 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata 3.26.01.05.001.005 Fasilitas Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konsevasi Ekonomi Kreatif 3.26.01.05.001.006 Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif | jumlah industri pariwisata dan ekraf yg berpartisipasi Jumlah paket wisata dan promosi ekraf, jumlah peserta pelaku ekraf (fashion) yg dibina dan jumlah duta wisata yg dilihat dan diberdayakan Jumlah peserta pelaku ekraf yg dibina dan Jumlah pelaku ekraf yg terwadahi dan terbina, dipromosi dan eksebisi Jumlah peserta pelaku ekraf yang dibina | 28 pelaku 2 event, 75 peserta dan 20 duta wisata 6 kelompok dan 85 orang dari 5 co-working space 50 orang | - | - |
| | 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | | | | | | | | | | |
| | 3.27.01.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | Persentase peningkatan produksi sektor pertanian | 2% | 3.27.01.02.001 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | Jumlah jenis alat mesin pertanian | 2 Jenis Alat | 3.27.01.02.001.001 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 3.27.01.02.001.002 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | Jumlah jenis alat pertanian Jumlah jenis benih pertanian | 2 Jenis Alat 1 Jenis | - | - |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUBKEGIATAN | | | KET | |
|----|---|-------------------|----------------|--|-------------------|----------------|---|---|----------------|-----|---------------------|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 3.30.01.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR | | | 3.30.01.05.001 Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | 3.30.01.04.002.003 Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | Jumlah bahan pokok yang dijual berdasarkan HET | | - | - |
| | 3.30.01.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | | | 3.30.01.06.001 Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan | | | 3.30.01.05.001.001 Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota | | | - | - |
| | 3.30.01.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI | | | 3.30.01.07.001 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri | | | 3.30.01.06.001.001 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang | Jumlah peserta penyuluhan | 300 peserta | - | - |
| | 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN | | | | | | 3.30.01.06.001.002 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal | Jumlah pengawasan barang yang kena cukai ilegal | | - | - |
| | 3.31.01.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | | | 3.31.01.02.001 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | | | 3.30.01.07.001.002 Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah UKM yang di data | 500 data | - | - |
| | | | | | | | 3.30.01.07.001.003 Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan | | | - | - |
| | | | | | | | 3.31.01.02.001.003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri | | | - | - |
| | | | | | | | 3.31.01.02.001.004 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | | | - | - |
| | | | | | | | 3.31.01.02.001.005 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | | | - | - |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUBKEGIATAN | | | KET | |
|----|--|--|----------------|---|-------------------|----------------|--|---|----------------|-----|---------------------|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4 | 3.31.01.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA | | | 3.31.01.03.001 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan IUI Menengah | | | 3.31.01.02.001.006 Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri | | | - | - |
| | | | | | | | 3.31.01.03.001.002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan (IUI) Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Memenuhi Ketentuan Perizinan | | | - | - |
| | | | | | | | 3.31.01.03.001.003 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Pengamanan dan Penyelamatan Industri | | | - | - |
| | 3.31.01.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL | | | 3.31.01.04.001 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 3.31.01.04.001.001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) | | | - | - |
| | | | | | | | 3.31.01.04.001.002 Diseminasi dan Publikasi Data Informasi Industri Kabupaten/Kota | | | - | - |
| | 3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI | | | | | | | | | | |
| | 4. UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | | | | | |
| | 4.01 SEKRETARIAT DAERAH | | | | | | | | | | |
| | 4.01.0301.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Meningkatnya prosentase kesesuaian data EKPPD yang disajikan | 70% | 4.01.0301.02.001 Administrasi Tata Pemerintahan | | | 4.01.0301.02.001.001 Penataan Administrasi Pemerintahan | Jumlah dokumen administrasi walikota, wakil walikota, pimpinan dan anggota DPRD yang difasilitasi serta dokumen hari jadi yang difasilitasi | 7 dokumen | - | - |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUBKEGIATAN | | | KET | |
|----|--|---|----------------|---|--|----------------|---|--|--------------------------------------|-------------|---------------------|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 4.01.0302.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Tersusunnya pengembangan kebijakan bidang hukum | 70% | 4.01.0301.02.004 Fasilitasi Kerjasama Daerah 4.01.0302.02.003 Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah | Jumlah dokumen kebijakan daerah | 16 dokumen | 4.01.0301.02.001.002 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 4.01.0301.02.001.003 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 4.01.0301.02.004.001 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri 4.01.0302.02.003.001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah 4.01.0302.02.003.002 Fasilitasi Bantuan Hukum 4.01.0302.02.003.003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum | xxx Jumlah dokumen LKPJ, LPPD, Pembinaan dan Pengawasan Penerapan SPM, Penyelenggaraan dan Pengembangan Otonomi Daerah Jumlah dokumen kerjasama | xxx 6 dokumen 20 dokumen | - - - | - - - |
| | 4.01.0303.04 PROGRAM ADMINISTRASI UMUM | Nilai Kapasitas Organisasi | 3,2 | 4.01.0303.04.002 Penataan Organisasi | Jumlah dokumen kebijakan penataan organisasi | 18 dokumen | 4.01.0303.04.002.001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 4.01.0303.04.002.002 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 4.01.0303.04.002.003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | Jumlah dokumen pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan Jumlah dokumen bidang ketatalaksanaan dan yanblik Jumlah dokumen kinerja dan reformasi birokrasi | 4 dokumen 10 dokumen 4 dokumen | - - - | - - - |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUBKEGIATAN | | | KET | |
|----|---|--|----------------|---|--|----------------|--|--|----------------|-----|---------------------|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 4.01.0304.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | - | - | 4.01.0304.03.003 Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah layanan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan secara elektronik | 100% | 4.01.0304.03.003.001 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah dokumen hasil proses pengadaan barang / jasa | 250 dokumen | - | - |
| | 4.01.0304.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | | | 4.01.0304.03.003.002 Pengadaan Secara Elektronik | | | 4.01.0304.03.003.002 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik | Jumlah User Aplikasi yang terlayani | 100% | - | - |
| | 4.01.0304.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | | | 4.01.0304.03.003.003 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | | | 4.01.0304.03.003.003 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah layanan pengadaan barang/jasa yang difasilitasi | 100% | - | - |
| | 4.01.0305.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan | 100% | 4.01.0305.03.001 Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian | jumlah dokumen bidang perekonomian yang difasilitasi | 3 dokumen | 4.01.0305.03.001.001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | | | - | - |
| | 4.01.0305.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | | | 4.01.0305.03.001.002 Administrasi Pembangunan | Jumlah dokumen pemantauan evaluasi dan penyusunan rumusan kebijakan pelaksanaan program PI yang difasilitasi | 1 dokumen | 4.01.0305.03.001.002 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | | | - | - |
| | 4.01.0305.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | | | 4.01.0305.03.002 Administrasi Pembangunan | | | 4.01.0305.03.002.002 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | Jumlah dokumen pemantauan evaluasi dan penyusunan rumusan kebijakan pelaksanaan program PI yang difasilitasi | 1 dokumen | - | - |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUBKEGIATAN | | | KET | |
|----|--|--|----------------|--|---|-----------------|---|--|-----------------|-----|---------------------|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 4.01.0306.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Tersusunnya dokumen pengembang an kebijakan bidang kesejahteraan dan kemasyarakatan yang ditindaklanjuti | 3 | 4.01.0305.03.004 Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam | jumlah Dokumen pemantauan evaluasi dan penyusunan | 1 dokumen | 4.01.0305.03.004.002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup | Jumlah dokumen pemantauan, evaluasi dan penyusunan rumusan kebijakan pelaksanaan program SDA yang difasilitasi | 1 dokumen | - | - |
| | | | | 4.01.0306.02.002 Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | | | 4.01.0306.02.002.001 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | 6 | - | - |
| | | | | | | | 4.01.0306.02.002.002 Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial | Jumlah dokumen evaluasi dan kebijakan Kesejahteraan masyarakat | 5 | - | - |
| | | | | | | | 4.01.0306.02.002.003 Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat | Jumlah dokumen evaluasi dan kebijakan Kesejahteraan masyarakat | 6 | - | - |
| | 4.01.0307.04 PROGRAM ADMINISTRASI UMUM | | 100% | 4.01.0307.04.003 Protokol dan Komunikasi Pimpinan | Jumlah layanan informasi dan komunikasi pimpinan | 3 jenis layanan | 4.01.0307.04.003.001 Fasilitasi Keprotokolan | Jumlah layanan informasi dan komunikasi pimpinan | 3 jenis layanan | - | - |
| | | | | | | | 4.01.0307.04.003.002 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | Jumlah layanan informasi dan komunikasi pimpinan | 2 jenis layanan | - | - |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUBKEGIATAN | | | KET | |
|----|--|---|--|--|---|----------------|--|---|-------------------------------------|-----|---------------------|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 4.01.0308.04 PROGRAM ADMINISTRASI UMUM | Meningkatnya kinerja pelayanan sekretariat daerah | 90,75 | 4.01.0308.04.001 Pelaksanaan Administrasi Umum | Jumlah kegiatan pejabat dan pimpinan yang difasilitasi | 200 kegiatan | 4.01.0307.04.003.003 Pendokumentasian Tugas Pimpinan 4.01.0308.04.001.001 Fasilitasi Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian | Jumlah layanan informasi dan komunikasi pimpinan Jumlah fasilitasi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan keluar daerah untuk pimpinan yang dilakukan | 4 jenis dokumentasi 250 kali | - | - |
| | 4.02 SEKRETARIAT DPRD | Meningkatnya Kinerja DPRD dalam melaksanakan fungsi, Pengawasan dan Legislasi | Prosentase ketepatan waktu persetujuan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan | 4.01.0308.04.004 Perencanaan dan Keuangan | Terkelolanya keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah | 12 bulan | 4.01.0308.04.001.003 Pengelolaan Rumah Tangga 4.01.0308.04.004.002 Pengelolaan Keuangan | Jumlah pengelolaan urusan rumah tangga kepala daerah dan wakil kepala daerah Pengelolaan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah | 12 bulan 12 bulan | - | - |
| | 4.02.01.02 PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN | | | 4.02.01.02.001 Layanan Administrasi DPRD | | | 4.02.01.02.001.002 Fasilitasi Rapat DPRD | | | - | - |
| | | | | 4.02.01.02.002 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | | | 4.02.01.02.001.003 Penyediaan Fasilitasi Fraksi DPRD 4.02.01.02.002.001 Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD | | | - | - |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUBKEGIATAN | | | KET | | | | |
|----|---|---|---|--|-------------------|----------------|---|-----------------------|----------------|-----|---------------------|--|--|--|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | | | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | |
| | 4.02.01.03 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | Meningkatnya Fasilitasi Fungsi pembentukan peraturan Daerah | Prosentase Promperda yang menjadi perda | 4.02.01.03.001 Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD | | | 4.02.01.02.002.002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD 4.02.01.02.002.003 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD 4.02.01.03.001.001 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 4.02.01.03.001.002 Pembahasan Rancangan Perda 4.02.01.03.001.003 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan 4.02.01.03.001.004 Fasilitasi penyusunan Naskah Akademik 4.02.01.03.002.001 pembahasan KUA dan PPAS 4.02.01.03.002.002 pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan 4.02.01.03.002.003 Pembahasan APBD 4.02.01.03.002.004 Pembahasan APBD Perubahan 4.02.01.03.002.005 Pembahasan Laporan Semester 4.02.01.03.002.006 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 4.02.01.03.003.001 Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum 4.02.01.03.003.002 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur | | | | | | | |
| | | | | 4.02.01.03.002 Pembahasan Kebijakan Anggaran | | | | | | | | | | |
| | | | | 4.02.01.03.003 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | | | | | | | | | | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUBKEGIATAN | | | KET | |
|----|--|-------------------|----------------|--|-------------------|----------------|---|-----------------------|----------------|-----|---------------------|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5 | 5. UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 5.01 PERENCANAAN | | | 4.02.01.03.004 Peningkatan Kapasitas DPRD 4.02.01.03.005 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 4.02.01.03.006 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD 4.02.01.03.008 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD | | | 4.02.01.03.003.003 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat 4.02.01.03.003.004 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian 4.02.01.03.004.002 Bimbingan Teknis DPRD 4.02.01.03.004.003 Publikasi dan Dokumentasi Dewan 4.02.01.03.004.004 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli 4.02.01.03.004.005 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi 4.02.01.03.004.006 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat 4.02.01.03.004.007 Penyusunan Program Kerja DPRD 4.02.01.03.005.001 Kunjungan Kerja dalam Daerah 4.02.01.03.005.002 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD 4.02.01.03.005.003 Pelaksanaan Reses 4.02.01.03.006.001 Penyusunan Kode Etik DPRD 4.02.01.03.008.001 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 4.02.01.03.008.002 Penyusunan Laporan Kinerja Pimpinan DPRD 4.02.01.03.008.003 Pelaksanaan Undang-undang DPRD | | | | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUBKEGIATAN | | | KET | |
|----|--|--|----------------|--|-------------------|----------------|--|--|---|-----|---------------------|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 5.01.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah | | 5.01.01.02.001 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah | | | 5.01.01.02.001.001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen RKPD dan RPJMD | 2 dokumen RKPD (RKPD 2022 dan RKPD Perubahan 2021) dan 1 Dokumen RPJMD | - | - |
| | | | | 5.01.01.02.002 Perencanaan Pendanaan Pembangunan Daerah | | | 5.01.01.02.001.007 Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah | Jumlah tahapan pemantauan/pemutakhiran data dan informasi perencanaan | 4 tahapan (perencanaan, pengumpulan, pengisian, Profil pembangunan daerah) | - | - |
| | | | | 5.01.01.02.003 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah | | | 5.01.01.02.002.003 Analisa dan Pengkajian Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah | Jumlah dokumen Analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah | 2 dokumen (Analisa Pagu Indikatif Daerah dan, Studi Teknokratik Kebijakan Pembangunan Daerah) | - | - |
| | | | | | | | 5.01.01.02.003.003 Evaluasi Capaian Program/Kegiatan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen evaluasi capaian program/kegiatan | 32 Dokumen | - | - |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUBKEGIATAN | | | KET | |
|----|---|--|----------------|---|-------------------|----------------|---|---|-----------------------|-----|---------------------|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 5.01.01.03 PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA | Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah | | 5.01.01.03.001 Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan | | | 5.01.01.03.001.002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan | Jumlah dokumen perangkat daerah mitra Subbidang Perencanaan Pemerintahan yang dilakukan pendampingan penyusunan renstra/renja | 20 Dokumen | - | - |
| | | | | 5.01.01.03.002 Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia | | | 5.01.01.03.002.002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia | Jumlah dokumen perangkat daerah mitra pada Subbidang Perencanaan Pembangunan Manusia yang dilakukan pendampingan penyusunan renstra/renja | 8 Dokumen | - | - |
| | | | | | | | 5.01.01.03.002.003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia | Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi sektor perencanaan Pembangunan Manusia | 1 Dokumen (monev KLA) | - | - |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUBKEGIATAN | | | KET | |
|----|---------|-------------------|----------------|--|-------------------|----------------|---|---|---|-----|---------------------|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | 5.01.01.03.003 Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kesejahteraan Masyarakat | | | 5.01.01.03.003.001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat | Jumlah pelaksanaan musrenbang/Rapat Koordinasi Teknis sesuai tema | 4 musrenbang tematik (perempuan, lansia, difabel, anak) dan 2 kali Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) bidang kesehatan dan sosial dan bidang Trantib dan linmas | - | |
| | | | | | | | 5.01.01.03.003.002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat | Jumlah dokumen perangkat mitra pada Subbidang Perencanaan Kesejahteraan Rakyat yang dilakukan pendampingan penyusunan Renstra/Renja | 24 Dokumen | - | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUBKEGIATAN | | | KET | |
|----|--|--|----------------|---|-------------------|----------------|--|---|---|-----|---------------------|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 5.01.01.04 PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah | | 5.01.01.04.001 Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian | | | 5.01.01.03.003.003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat | Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi sektor Perencanaan Kesejahteraan Rakyat | 2 Dokumen (Monev capaian SPKD dan Capaian RAD SDGs) | - | - |
| | | | | | | | 5.01.01.04.001.001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian | Jumlah pelaksanaan musrenbang/Rapat Koordinasi Teknis sesuai tema | 2 (Musrenbang tematik CSR dan Rakortek ekonomi) | - | - |
| | | | | | | | 5.01.01.04.001.002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian | Jumlah dokumen perangkat daerah mitra pada subbidang perencanaan ekonomi dan keuangan yang dilakukan pendampingan penyusunan rentra/renja | 12 Dokumen | - | - |
| | | | | 5.01.01.04.002 Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Ekonomi Kreatif | | | 5.01.01.04.002.001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Ekonomi Kreatif | Jumlah pelaksanaan musrenbang/Rapat Koordinasi Teknis sesuai tema | 1 (musrenbang pemuda) | - | - |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUBKEGIATAN | | | KET | |
|----|---------|-------------------|----------------|--|-------------------|----------------|---|--|----------------------------|-----|---------------------|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | 5.01.01.04.002.002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Ekonomi Kreatif | Jumlah dokumen perangkat daerah mitra pada subbidang Perencanaan penanaman modal dan pariwisata yang dilakukan pendampingan penyusunan renstra/renja | 8 Dokumen | - | - |
| | | | | | | | 5.01.01.04.002.003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Ekonomi Kreatif | Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi pembangunan sektor perencanaan ekonomi kreatif | 1 Dokumen | - | - |
| | | | | 5.01.01.04.003 Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Alam | | | 5.01.01.04.003.001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam | Jumlah pelaksanaan musrenbang/Rapat Koordinasi Teknis sesuai tema | 1 Rakortek Sumberdaya Alam | - | - |
| | | | | | | | 5.01.01.04.003.002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam | Jumlah dokumen perangkat daerah mitra pada subbidang perencanaan sumberdaya alam yang dilakukan pendampingan penyusunan renstra/renja | 8 Dokumen | - | - |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUBKEGIATAN | | | KET | | |
|----|--|--|----------------|--|-------------------|----------------|--|---|---|-----|---------------------|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | 5.01.01.05 PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN | Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah | | 5.01.01.05.001 Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup | | | <p>5.01.01.04.003.003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam</p> <p>5.01.01.05.001.001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup</p> <p>5.01.01.05.001.002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup</p> <p>5.01.01.05.001.003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup</p> | <p>Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi pembangunan Sektor perencanaan sumber daya alam</p> <p>Jumlah pelaksanaan musrenbang/Rapat Koordinasi Teknis sesuai tema</p> <p>Jumlah dokumen perangkat daerah mitra pada sub-bidang perencanaan Infrastruktur yang dilakukan pendampingan penyusunan Renstra/Renja</p> <p>Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi pembangunan sektor perencanaan infrastruktur (sumberdaya air dan lingkungan hidup)</p> | <p>2 Dokumen (Monev target pencapaian RAD PG API dan PPRKD)</p> <p>1 Rakortek infrastruktur</p> <p>6 dokumen</p> <p>7 Dokumen (monev pembangunan infrastruktur)</p> | - | - | - |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUBKEGIATAN | | | KET | |
|----|---------|-------------------|----------------|---|-------------------|----------------|--|---|---------------------------------------|-----|---------------------|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | 5.01.01.05.002 Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan | | | 5.01.01.05.002.001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan | Jumlah pelaksanaan musrenbang/Rapat Koordinasi Teknis sesuai tema | 1 Rakortek perhubungan dan komunikasi | - | - |
| | | | | | | | 5.01.01.05.002.002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan | Jumlah dokumen perangkat daerah mitra pada sub. bidang Perencanaan kewilayahan yang dilakukan pendampingan penyusunan Renstra/Renja | 12 dokumen | - | - |
| | | | | 5.01.01.05.003 Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Keciaptakaryaan dan Kewilayahan | | | 5.01.01.05.003.001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Keciaptakaryaan dan Kewilayahan | Jumlah pelaksanaan musrenbang/Rapat Koordinasi Teknis sesuai tema | 1 Rakortek kewilayahan | - | - |
| | | | | | | | 5.01.01.05.003.002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Keciaptakaryaan dan Kewilayahan | Jumlah dokumen perangkat daerah mitra pada sub. bidang perencanaan Infrastruktur yang dilakukan pendampingan penyusunan Renstra/Renja | 30 dokumen | - | - |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUBKEGIATAN | | | KET | |
|----|--|--|---|--|-------------------|----------------|--|---|-------------------------------|-----|---------------------|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 5.02 KEUANGAN | Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah mendukung Opini BPK | Persentase Laporan Keuangan SKPD Bebas Salah saji Material mendukung opini BPK 100% | 5.02.0101.02.001 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | | | 5.01.01.05.003.003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPDP) Keciptakaryaan dan Kewilayahan | Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi pembangunan sektor perencanaan kewilayahan | 23 perangkat daerah 3 dokumen | - | - |
| | 5.02.0101.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | | | | | | 5.02.0101.02.001.001 Penyusunan KUA dan PPAS | Jumlah dokumen yang tersusun | 2 | - | - |
| | | | | | | | 5.02.0101.02.001.002 Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | Jumlah dokumen yang tersusun | 2 | - | - |
| | | | | | | | 5.02.0101.02.001.003 Penyusunan dan Review RKA SKPD/Perubahan RKA SKPD | Jumlah entitas yang mendapatkan asistensi | 132 | - | - |
| | | | | | | | 5.02.0101.02.001.005 Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD | Jumlah Ranperda dan Ranperwal yang tersusun | 2 | - | - |
| | | | | | | | 5.02.0101.02.001.006 Penyusunan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD | Jumlah Ranperda dan Ranperwal yang tersusun | 2 | - | - |
| | | | | | | | 5.02.0101.02.001.007 Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Teknis Penyusunan Anggaran SKPD | Jumlah Ranperwal yang tersusun | 1 | - | - |
| | | | | | | | 5.02.0101.02.001.008 Penyusunan Regulasi Bidang Anggaran | Jumlah Ranperwal yang tersusun | 2 | - | - |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUBKEGIATAN | | | KET | |
|----|--|---|----------------|---|-------------------|----------------|---|---|----------------|-----|---------------------|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | 5.02.0101.02.002 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | | | 5.02.0101.02.002.001 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | Jumlah dokumen laporan hasil penatausahaan kas daerah yang tersusun | 1584 | - | - |
| | | | | | | | 5.02.0101.02.002.004 Pemrosesan, Penerbitan dan Pendistribusian Lembar SP2D | Jumlah SP2D yang terbit | 39000 | - | - |
| | | | | | | | 5.02.0101.02.002.009 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban (SPJ) | Jumlah Ranperwal yang tersusun | 1 | - | - |
| | | | | 5.02.0101.02.003 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | | | 5.02.0101.02.003.004 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota | Jumlah Ranperda dan Ranperwal yang tersusun | 2 | - | - |
| | | | | | | | 5.02.0101.02.003.005 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA | Jumlah dokumen laporan yang tersusun | 7 | - | - |
| | | | | | | | 5.02.0101.02.003.006 Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | Jumlah dokumen LHP yang ditindaklanjuti | 4 | - | - |
| | 5.02.0101.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | Kontribusi Pemanfaatan Aset Daerah Terhadap PAD | 2.703.000.000 | 5.02.0101.03.001 Pengelolaan Barang Milik Daerah | | | 5.02.0101.03.001.001 Koordinasi dan Penyusunan Standar Harga Berdasarkan Jenis dan Tipe Barang | Jumlah Ranperwal yang tersusun | 2 Ranperwal | - | - |
| | | | | | | | 5.02.0101.03.001.002 Koordinasi dan Penyusunan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah | Jumlah Ranperwal yang tersusun | 2 Ranperwal | - | - |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUBKEGIATAN | | | KET | |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|-------------------|----------------|--|--|----------------|-----|---------------------|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | 5.02.0101.03.001.003 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah | Jumlah Ranperwal yang tersusun | 2 Ranperwal | - | - |
| | | | | | | | 5.02.0101.03.001.005 Penatausahaan Barang Milik Daerah | Jumlah dokumen laporan Barang Milik Daerah | 12 dokumen | - | - |
| | | | | | | | 5.02.0101.03.001.006 Inventarisasi Barang Milik Daerah | Jumlah obyek barang milik daerah yang terinventarisasi | 1000 obyek | - | - |
| | | | | | | | 5.02.0101.03.001.007 Koordinasi Pelaksanaan Pengamanan Fisik, Administrasi dan Hukum Barang Milik Daerah | Jumlah Aset Milik Daerah yang diamankan | 8203 bidang | - | - |
| | | | | | | | 5.02.0101.03.001.008 Koordinasi Hasil Penilaian Barang Milik Daerah | Jumlah dokumen yang tersusun | 9 dokumen | - | - |
| | | | | | | | 5.02.0101.03.001.009 Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah | Jumlah Ijin Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang diterbitkan | 150 ijin | - | - |
| | | | | | | | 5.02.0101.03.001.010 Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Pemindahtanganan Barang Milik Daerah | jumlah dokumen laporan yang tersusun | 5 dokumen | - | - |
| | | | | | | | 5.02.0101.03.001.012 Konsolidasi Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah dari SKPD | Jumlah entitas pelaporan Barang Milik Daerah | 132 entitas | - | - |
| | | | | | | | 5.02.0101.03.001.013 Koordinasi dan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah | Jumlah entitas yang mendapat pembinaan | 132 entitas | - | - |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUBKEGIATAN | | | KET | | |
|----|--|--------------------------------------|----------------|---|--|----------------|---|--|---|-----|---------------------|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | 5.02.03.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | % Peningkatan Pendapatan Asli Daerah | 18.96% | 5.02.03.04.002 Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah | Jumlah dokumen hasil analisa pengembangan potensi Pendapatan Asli Daerah | 34 | 5.02.03.04.002.001 Penyusunan Kebijakan Teknis Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah 5.02.03.04.002.004 Penyusunan dan Evaluasi Kebijakan Tentang Sistem Administrasi Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 5.02.03.04.002.007 Konsultasi dan Pendampingan Wajib Pajak dan Retribusi 5.02.03.04.002.008 Penyelenggaraan Sistem Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 5.02.03.04.002.009 Pemeliharaan dan Pemutakhiran Basis Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Jumlah dokumen Penyusunan Kebijakan Teknis Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah Jumlah dokumen Penyusunan dan Evaluasi Kebijakan Tentang Sistem Administrasi Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jumlah wp yg mendapat pendampingan dan sosialisasi kesadaran membayar pajak Jumlah sistem manajemen pendapatan asli daerah yang terintegrasi dan terpelihara Jumlah data Obyek yang dimutakhirkan | 3 dokumen 18 dokumen 80900 4 sistem 7000 data PBB | - | - | - |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUBKEGIATAN | | | KET | | |
|----|---------------------------------------|-------------------|----------------|---|---|----------------|--|---|----------------|-----|---------------------|--|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | 5.03 KEPEGAWAIAN | | | | | | | | | | | |
| | 5.03.01.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | | | 5.03.01.02.001 Pengelolaan Data dan Informasi ASN | Jumlah Buku Informasi Pegawai di lingkungan Pemkot Malang | 4 jenis buku | 5.03.01.02.001.004 Pengelolaan Data Kepegawaian | Jumlah Buku Informasi Pegawai di lingkungan Pemkot Malang | 4 jenis buku | - | - | |
| | | | | 5.03.01.02.002 Administrasi Kepegawaian | Jumlah Pelaksanaan mutasi jabatan | 500 spmt | 5.03.01.02.002.001 Penyusunan Analisis Kebutuhan, Formasi, dan Pelaksanaan Pengadaan ASN | Jumlah Formasi ASN | 345 org | - | - | |
| | | | | | | | 5.03.01.02.002.002 Penataan dan Mutasi Jabatan | Jumlah Pelaksanaan mutasi jabatan | 507 SPMT | - | - | |
| | | | | | | | 5.03.01.02.002.004 Penyelesaian Pemberhentian dan Pemberian Pensiun | Jumlah Pensiun dan MPP | 473 org | - | - | |
| | | | | | | | 5.03.01.02.002.010 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | Jumlah kenaikan pangkat tepat waktu | 1100 org | - | - | |
| | | | | 5.03.01.02.003 Peningkatan Kapasitas ASN | Jml ASN yg terverifikasi kinerjanya | 2520 org | 5.03.01.02.003.001 Peningkatan Kapasitas ASN | Jumlah peserta yang mengikuti workshop IP ASN | 120 org | - | - | |
| | | | | | | | 5.03.01.02.003.002 Pengembangan Penilaian Kinerja ASN | Jumlah ASN yang melaporkan kinerjanya | 7000 org | - | - | |
| | | | | | | | 5.03.01.02.003.005 Fasilitasi Profesi ASN | Jumlah ASN yang terfasilitasi profesi | 1780 org | - | - | |
| | | | | | | | 5.03.01.02.003.009 Pengelolaan Karir dalam Jabatan Fungsional | Jumlah pejabat fungsional yang dinilai | 250 org | - | - | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUBKEGIATAN | | | KET | | | | |
|----|--|--|----------------|---|-------------------|--|---|--|---|---------------------|--|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | | | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | |
| 6 | 5.05.01.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah | | 5.05.01.02.001 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | | | 5.05.01.02.001.001 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah | Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan untuk percepatan pembangunan daerah | 5 dokumen | - | - | | | |
| | | | | 5.05.01.02.004 Pengembangan Inovasi dan Teknologi | | | 5.05.01.02.004.001 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi | Jumlah peserta lomba inovasi | 90 proposal | - | - | | | |
| | | | | | | | 5.05.01.02.004.003 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif | Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan bidang inovasi | 1 Dokumen (monev implementasi SIDA) | - | - | | | |
| | 5.06 PENGHUBUNG 5.07 PENGELOAAN PERBATASAN 6. UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 6.01 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | | | | | | | 5.05.01.02.004.004 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan | Jumlah dokumen publikasi/ sosialisasi/ fasilitasi/ pendampingan hasil penelitian dan pengembangan | 2 jurnal penelitian | - | - | | |
| | | | | | | | | 6.01.01.02.001 Penyelenggaraan Pengawasan Internal | | | 6.01.01.02.001.001 Audit Kinerja dan Keuangan | | - | - |
| | | | | | | | | 6.01.01.02.002 Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | | | 6.01.01.02.001.002 Review Kinerja dan Keuangan 6.01.01.02.001.004 Evaluasi Kinerja dan Keuangan | | - | - |
| | | | | | | 6.01.01.02.002.001 Audit Kinerja dan Keuangan | | - | - | | | | | |
| | | | | | | 6.01.01.02.002.002 Review Kinerja dan Keuangan | | - | - | | | | | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUBKEGIATAN | | | KET | |
|----|--|---|----------------|---|---------------------------------------|----------------|--|--|------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 7 | 6.01.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | | | 6.01.01.03.001 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan | | | 6.01.01.02.002.003 Pemantauan Kinerja dan Keuangan 6.01.01.02.002.004 Evaluasi Kinerja dan Keuangan 6.01.01.03.001.001 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan 6.01.01.03.001.002 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan 6.01.01.03.002.002 Asistensi dan Pendampingan | | | - - - - - | - - - - - |
| | 7. UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN | | | 6.01.01.03.002 Asistensi dan Pendampingan | | | | | | | |
| | 7.01.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah | 81,50 | 7.01.01.02.001 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah kegiatan penyelenggaraan PATEN | 17 layanan | 7.01.01.02.001.002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah kegiatan penyelenggaraan PATEN | 17 layanan | - | - |
| | 7.01.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif | 80% | 7.01.01.02.002 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | Jumlah dokumen | 3 dokumen | 7.01.01.02.002.001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan | Jumlah dokumen | 3 dokumen | - | - |
| | | | | 7.01.01.03.002 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Jumlah kegiatan | 5 kegiatan | 7.01.01.03.002.001 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan | Jumlah dokumen hasil Musrenbang Kecamatan | 1 dokumen | - | - |
| | | | | | | | 7.01.01.03.002.003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah kegiatan dan Lembaga Masyarakat yang difasilitasi | 3 kegiatan, 4 LK | - | - |

| No | PROGRAM | | KEGIATAN | | | | SUBKEGIATAN | | | KET | |
|----|--|---|----------------|---|---|----------------|--|---|-----------------------|-----|---------------------|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 7.01.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Rasio Linmas per RT | 0,75 | 7.01.01.04.001 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah sosialisasi/pembinaan | 1 kegiatan | 7.01.01.03.002.004 Evaluasi Kelurahan | Jumlah monev pembangunan prasarana dan sarana di wilayah kecamatan & dokumen database kondisi sarpras | 2 kegiatan, 2 dokumen | - | - |
| | 7.01.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah | 81,50 | 7.01.01.05.001 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan sesuai Penugasan Kepala Daerah | Jumlah patroli dan koordinasi | 20 kali | 7.01.01.04.001.001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan | Jumlah sosialisasi/pembinaan | 1 kegiatan | - | - |
| | 7.01.0101.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah | 81,50 | 7.01.0101.02.001 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Kegiatan Mendukung Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan | 28 Kegiatan | 7.01.01.05.001.008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Jumlah Patroli dan koordinasi | 20 kegiatan | - | - |
| | 7.01.0101.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah | 81,50 | 7.01.0101.02.001 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Kegiatan Mendukung Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan | 28 Kegiatan | 7.01.0101.02.001.002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Kegiatan mendukung Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan | 28 Kegiatan | - | - |
| | 7.01.0101.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah | 81,50 | 7.01.0101.02.002 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | Tersusunnya dokumen monografi dan profil kelurahan | 3 dokumen | 7.01.0101.02.002.001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan | Jumlah dokumen monografi dan profil | 3 dokumen | - | - |
| | 7.01.0101.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persententase Lembaga Masyarakat yang aktif | 80% | 7.01.0101.02.002 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | Jumlah Kegiatan | 10 Kegiatan | 7.01.0101.03.002.001 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan | Jumlah Hasil Musrenbang | 1 Dokumen | - | - |
| | 7.01.0101.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persententase Lembaga Masyarakat yang aktif | 80% | 7.01.0101.03.002 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Jumlah Kegiatan | 10 Kegiatan | 7.01.0101.03.002.002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Kegiatan | 8 Kegiatan | - | - |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUBKEGIATAN | | | KET | |
|----|--|--|----------------|---|--|----------------|---|--|--------------------------|-----|---------------------|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 7.01.0101.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Rasio Linmas Per RT | 0,75 | 7.01.0101.04.001 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Sosialisasi/Pembinaan | 1 Kegiatan | 7.01.0101.03.002.003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 7.01.0101.04.001.001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan | 8 Kegiatan | - | - |
| | 7.01.0102.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah | 81,50 | 7.01.0102.02.001 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | jumlah kegiatan yang mendukung peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan | 23 kegiatan | 7.01.0102.02.001.002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah kegiatan yang mendukung penyelenggaraan kegiatan pemerintahan | 23 kegiatan | - | - |
| | 7.01.0102.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif | 80% | 7.01.0102.02.002 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | Jumlah dokumen | 3 dokumen | 7.01.0102.02.002.001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan | Jumlah dokumen | 3 dokumen | - | - |
| | 7.01.0102.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Rasio Linmas per RT | 0,76 | 7.01.0102.03.002 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Jumlah kegiatan | 10 kegiatan | 7.01.0102.03.002.001 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan 7.01.0102.03.002.002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 7.01.0102.03.002.003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah dokumen hasil Musrenbang Kelurahan Jumlah kegiatan | 1 dokumen 17 kegiatan | - | - |
| | 7.01.0102.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Rasio Linmas per RT | 0,76 | 7.01.0102.04.001 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah sosialisasi pembinaan | 1 kegiatan | 7.01.0102.04.001.001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan | Jumlah kegiatan mendukung keamanan, ketenteraman dan ketertiban lingkungan kelurahan | 1 kegiatan | - | - |

| No | PROGRAM | | KEGIATAN | | | | SUBKEGIATAN | | | KET | |
|----|--|--|----------------|---|---|--------------------------|--|--|--------------------------------|-----|---------------------|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 7.01.0103.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah | 81,50 | 7.01.0103.02.001 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah kegiatan mendukung peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan | 28 Jenis Kegiatan | 7.01.0103.02.001.002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah kegiatan mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi kelurahan dan jumlah patroli | 28 Jenis Kegiatan | - | - |
| | 7.01.0103.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif | 80 % | 7.01.0103.02.002 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 7.01.0103.03.002 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Jumlah dokumen Jumlah kegiatan pemberdayaan | 3 dokumen 10 kegiatan | 7.01.0103.02.002.001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan 7.01.0103.03.002.001 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan | Jumlah dokumen Jumlah dokumen hasil Musrenbang | 3 dokumen 1 dokumen | - | - |
| | 7.01.0103.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Rasio Linmas Per RT | 0,75 | 7.01.0103.04.001 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah sosialisasi/pe mbinaan | 1 kegiatan | 7.01.0103.03.002.002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 7.01.0103.03.002.003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 7.01.0103.04.001.001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan | Jumlah kegiatan Jumlah kegiatan | 4 kegiatan 8 kegiatan | - | - |
| | 7.01.0104.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Kepuasan Masyarakat ((IPM) Perangkat Daerah | 81,50 | 7.01.0104.02.001 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 7.01.0104.02.002 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | Jumlah kegiatan mendukung peningkatan kualitas dan efektifitas pemerintahan Jumlah Dokumen | 27 Kegiatan 2 Dokumen | 7.01.0104.02.001.002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 7.01.0104.02.002.001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan | jumlah kegiatan pendukung efektifitas pemerintahan jumlah dokumen profil dan monografi | 25 jenis kegiatan 3 dokumen | - | - |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUBKEGIATAN | | | | KET |
|----|--|---|----------------|---|---|-------------------|---|--|-------------------|---------------------|-----|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 7.01.0104.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif | 80% | 7.01.0104.03.002 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | jumlah kegiatan pemberdayaan | 10 Kegiatan | 7.01.0104.03.002.001 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan 7.01.0104.03.002.002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 7.01.0104.03.002.003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | jumlah dokumen hasil musrenbang | 3 Dokumen | - | - |
| | 7.01.0104.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Rasio Linmas per RT | 0,75 | 7.01.0104.04.001 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Sosialisasi / pembinaan Linmas | 2 Kegiatan | 7.01.0104.04.001.001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan | Jumlah sosialisasi / Pembinaan Linmas | 2 Kegiatan | - | - |
| | 7.01.0105.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah | 81,50 | 7.01.0105.02.001 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah kegiatan mendukung penyelenggaraan kegiatan pemerintahan | 28 jenis kegiatan | 7.01.0105.02.001.002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah kegiatan mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi kelurahan dan jumlah patroli | 28 Jenis Kegiatan | - | - |
| | | | | 7.01.0105.02.002 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | Jumlah dokumen | 3 dokumen | 7.01.0105.02.002.001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan | Jumlah dokumen | 3 dokumen | - | - |
| | 7.01.0105.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif | 80% | 7.01.0105.03.002 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Jumlah kegiatan pemberdayaan | 10 kegiatan | 7.01.0105.03.002.001 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan 7.01.0105.03.002.002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 7.01.0105.03.002.003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah dokumen hasil Musrenbang | 1 dokumen | - | - |
| | | | | | | | | Jumlah kegiatan | 7 kegiatan | - | - |
| | | | | | | | | Jumlah kegiatan | 18 kegiatan | - | - |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUBKEGIATAN | | | KET | |
|----|--|---|----------------|---|---|--------------------------|---|---|---------------------------|-----|---------------------|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 7.01.0105.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Rasio linmas per RT | 0,75 | 7.01.0105.04.001 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah sosialisasi/pe mbinaan | 1 kegiatan | 7.01.0105.04.001.001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan | Jumlah sosialisasi/pe mbinaan linmas | 1 kegiatan | - | - |
| | 7.01.0106.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | 7.01.0106.02.001 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 7.01.0106.02.002 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | | | 7.01.0106.02.001.002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 7.01.0106.02.002.001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan | | | - | - |
| | 7.01.0106.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | 7.01.0106.03.002 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Jumlah kegiatan pemberdayaa n masyarakat | 24 | 7.01.0106.03.002.001 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan 7.01.0106.03.002.002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 7.01.0106.03.002.003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 7.01.0106.04.001.001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan | | | - | - |
| | 7.01.0106.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | 7.01.0106.04.001 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | | | - | - |
| | 7.01.0107.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah | 81,5 | 7.01.0107.02.001 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 7.01.0107.02.002 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | Jumlah kegiatan mendukung peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan Jumlah Dokumen | 25 kegiatan 3 Dokumen | 7.01.0107.02.001.002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 7.01.0107.02.002.001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan | Jumlah Kegiatan yang mendukung penyelenggar aan kegiatan pemerintahan Jumlah Dokumen | 25 kegiatan 3 Dokume n | - | - |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUBKEGIATAN | | | KET | |
|----|--|--|----------------|---|--|----------------|--|--|----------------|-----|---------------------|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 7.01.0107.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif | 80% | 7.01.0107.03.002 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | 7.01.0107.03.002.001 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan | Jumlah Dokumen Hasil Musrenbangkel | 1 dokumen | - | - |
| | | | | | | | 7.01.0107.03.002.002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Kegiatan | 10 Kegiatan | - | - |
| | | | | | | | 7.01.0107.03.002.003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Kegiatan | 8 Kegiatan | - | - |
| | 7.01.0107.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Rasio Linmas per RT | 0,75 | 7.01.0107.04.001 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | 7.01.0107.04.001.001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan | Jumlah Sosialisasi / pembinaan Linmas | 2 Kegiatan | - | - |
| | 7.01.0108.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) OPD | 81,50 | 7.01.0108.02.001 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah kegiatan yang mendukung efektifitas kegiatan pemerintahan | 21 kegiatan | 7.01.0108.02.001.002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah kegiatan yang mendukung peningkatan kualitas administrasi kelurahan | 21 kegiatan | - | - |
| | | | | 7.01.0108.02.002 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | Jumlah dokumen | 3 dokumen | 7.01.0108.02.002.001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan | Jumlah dokumen | 3 dokumen | - | - |
| | 7.01.0108.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif | 80% | 7.01.0108.03.002 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Jumlah kegiatan Pemberdayaan masyarakat kelurahan | 10 kegiatan | 7.01.0108.03.002.001 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan | Jumlah dokumen hasil Musrenbang Kelurahan | 1 dokumen | - | - |
| | | | | | | | 7.01.0108.03.002.002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah kegiatan | 5 kegiatan | - | - |
| | | | | | | | 7.01.0108.03.002.003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah kegiatan | 8 kegiatan | - | - |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUBKEGIATAN | | | KET | |
|----|--|-----------------------------------|----------------|---|---|----------------|--|---|----------------|-----|---------------------|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 7.01.0108.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Rasio Linmas per RT | 0,75 | 7.01.0108.04.001 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah sosialisasi/ pembinaan | 2 kegiatan | 7.01.0108.04.001.001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan | Jumlah kegiatan yang mendukung keamanan, ketenteraman dan ketertiban lingkungan kelurahan | 2 kegiatan | - | - |
| | 7.01.0109.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Kepuasan Masyarakat | 81,50 | 7.01.0109.02.001 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah kegiatan mendukung peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan | 24 kegiatan | 7.01.0109.02.001.002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah kegiatan mendukung peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan | 25 Kegiatan | - | - |
| | | | | 7.01.0109.02.002 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | Jumlah dokumen | 3 dokumen | 7.01.0109.02.002.001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan | Jumlah dokumen | 3 dokumen | - | - |
| | 7.01.0109.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase lembaga kemasyarakatan | 80 % | 7.01.0109.03.002 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Jumlah Kegiatan Pemberdayaa n | 10 kegiatan | 7.01.0109.03.002.001 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan | Jumlah Dokumen hasil Musrenbang | 1 dokumen | - | - |
| | | | | | | | 7.01.0109.03.002.002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah kegiatan | 10 kegiatan | - | - |
| | | | | | | | 7.01.0109.03.002.003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah kegiatan | 8 kegiatan | - | - |
| | 7.01.0109.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Rasio Linmas Per RT | 0,75 | 7.01.0109.04.001 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah sosialisasi / Pembinaan Linmas | 2 kegiatan | 7.01.0109.04.001.001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan | | | - | - |

| No | PROGRAM | | KEGIATAN | | | | SUBKEGIATAN | | | KET | |
|----|--|---|----------------|---|--|-------------------|--|---|-------------------|-----|---------------------|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 7.01.0110.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah | 81,5 | 7.01.0110.02.001 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah kegiatan yang mendukung peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan | 25 Jenis Kegiatan | 7.01.0110.02.001.002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah kegiatan mendukung penyelenggaraan kegiatan pemerintahan | 25 jenis kegiatan | - | - |
| | | | | 7.01.0110.02.002 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | Jumlah Dokumen | 3 dokumen | 7.01.0110.02.002.001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan | Jumlah dokumen | 3 dokumen | - | - |
| | 7.01.0110.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase lembaga | 80% | 7.01.0110.03.002 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Jumlah kegiatan pemberdayaan | 10 kegiatan | 7.01.0110.03.002.001 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan | Jumlah dokumen hasil musrenbang | 1 dokumen | - | - |
| | | | | | | | 7.01.0110.03.002.002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah kegiatan pembangunan prasarana dan sarana kelurahan | 5 kegiatan | - | - |
| | | | | | | | 7.01.0110.03.002.003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah kegiatan pemberdayaan | 10 kegiatan | - | - |
| | 7.01.0110.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Rasio Linmas per RT | 0,75 | 7.01.0110.04.001 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah sosialisasi / pembinaan linmas | 1 kegiatan | 7.01.0110.04.001.001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan | Jumlah sosialisasi / pembinaan linmas | 1 kegiatan | - | - |
| | 7.01.0111.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah | 81,50 | 7.01.0111.02.001 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah kegiatan mendukung peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan | 23 Kegiatan | 7.01.0111.02.001.002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah kegiatan mendukung penyelenggaraan kegiatan pemerintahan | 22 kegiatan | - | - |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUBKEGIATAN | | | KET | |
|----|--|--|----------------|---|---|-----------------------------|---|--|---|---------------------|---------------------|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 7.01.0111.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif | 80% | 7.01.0111.02.002 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 7.01.0111.03.002 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Jumlah Dokumen Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 3 Dokumen 3 kegiatan | 7.01.0111.02.002.001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan 7.01.0111.03.002.001 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan 7.01.0111.03.002.002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 7.01.0111.03.002.003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumah Dokumen Jumlah dokumen hasil Musrenbang Jumlah Kegiatan Jumlah Kegiatan | 3 Dokumen 1 dokumen 11 Kegiatan 8 kegiatan | - - - | - - - |
| | 7.01.0111.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Rasio Linmas Per RT | 0,75 | 7.01.0111.04.001 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah sosialisasi/pe mbinaan Linmas | 2 kegiatan | 7.01.0111.04.001.001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan | Jumlah sosialisasi/pe mbinaan Linmas | 2 kegiatan | - | - |
| | 7.01.02.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | IKM Perangkat Daerah | 80,20 | 7.01.02.02.001 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 7.01.02.02.002 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan PATEN | - | 7.01.02.02.001.002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 7.01.02.02.002.001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan | - | - | - | - |
| | 7.01.02.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Prosentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif | 4,26 | 7.01.02.03.002 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | APBD | 100% | 7.01.02.03.002.001 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan 7.01.02.03.002.003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 7.01.02.03.002.004 Evaluasi Kelurahan | - | - | - | - |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUBKEGIATAN | | | KET | |
|----|--|---|----------------|---|--|----------------------------------|---|-----------------------|----------------|-----|---------------------|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 7.01.02.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) Kecamatan | 4,29 | 7.01.02.04.001 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | 7.01.02.04.001.001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan | | | - | - |
| | 7.01.02.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Forum atau Koordinasi Tingkat Kecamatan | 48 | 7.01.02.05.001 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan sesuai Penugasan Kepala Daerah | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Jumlah Patroli yang dilaksanakan | 7.01.02.05.001.008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | - | - |
| | 7.01.0201.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Nilai Sakip | 81 | 7.01.0201.02.001 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 7.01.0201.02.002 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | | | 7.01.0201.02.001.002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 7.01.0201.02.002.001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan | | | - | - |
| | 7.01.0201.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) | 4,29 | 7.01.0201.03.002 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | 7.01.0201.03.002.001 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan 7.01.0201.03.002.002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 7.01.0201.03.002.003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | - | - |
| | 7.01.0201.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Pemeliharaan Keamanan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Wilayah (rasio jumlah limnas) | 100% | 7.01.0201.04.001 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | 7.01.0201.04.001.001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan | | | - | - |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUBKEGIATAN | | | KET | |
|----|--|--|----------------|---|--------------------------|----------------|---|-----------------------|----------------|-----|---------------------|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 7.01.0202.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | IKM Kelurahan Polowijen | 80 | 7.01.0202.02.001 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 7.01.0202.02.002 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | | | 7.01.0202.02.001.002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 7.01.0202.02.002.001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan | | | - | - |
| | 7.01.0202.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) | 4,29 | 7.01.0202.03.002 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | 7.01.0202.03.002.001 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan 7.01.0202.03.002.002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 7.01.0202.03.002.003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | - | - |
| | 7.01.0202.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Pemeliharaan Kamtramtibmas Wilayah (Rasio Jumlah Linmas) | 1 | 7.01.0202.04.001 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | 7.01.0202.04.001.001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan | | | - | - |
| | 7.01.0203.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Nilai SAKIP | 80,24 | 7.01.0203.02.001 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 7.01.0203.02.002 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | Jumlah Dokumen Monografi | 1 dokumen | 7.01.0203.02.001.001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 7.01.0203.02.002.001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan | | | - | - |
| | 7.01.0203.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) Kelurahan | 4,29 | 7.01.0203.03.002 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | 7.01.0203.03.002.001 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan | | | - | - |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUBKEGIATAN | | | KET | |
|----|--|---|----------------|---|---|--------------------------------|--|-----------------------|----------------|-----|---------------------|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 7.01.0203.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) Kelurahan | 4,29 | 7.01.0203.04.001 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | 7.01.0203.03.002.002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 7.01.0203.03.002.003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 7.01.0203.04.001.001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan | | | - | - |
| | 7.01.0204.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | 7.01.0204.02.001 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan wilayah kelurahan purwodadi | 144 | 7.01.0204.02.001.001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | | | - | - |
| | 7.01.0204.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | 7.01.0204.02.002 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | | | 7.01.0204.02.002.002 Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | | | - | - |
| | | | | 7.01.0204.03.002 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | masyarakat kelurahan purwodadi | masyarakat kelurahan purwodadi | 7.01.0204.03.002.001 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan 7.01.0204.03.002.002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 7.01.0204.03.002.003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | - | - |
| | 7.01.0205.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Masyarakat wilayah kelurahan Pandanwangi | 95% | 7.01.0205.02.001 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Peningkatan pelayanan kepada masyarakat | 100 | 7.01.0205.02.001.002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | - | - |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUBKEGIATAN | | | KET | |
|----|--|-------------------------------------|--|---|---|----------------|--|--|-------------------|-----|---------------------|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 7.01.0205.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Masyarakat di Kelurahan Pandanwangi | 95% | 7.01.0205.02.002 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 7.01.0205.03.002 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | 7.01.0205.02.002.001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan 7.01.0205.03.002.002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 7.01.0205.03.002.003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 7.01.0205.04.001.001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan | | | - | - |
| | 7.01.0205.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | jumlah patroli | 144 | 7.01.0205.04.001 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | | | - | - |
| | 7.01.0206.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | RT/RW di Wilayah Kelurahan Purwanto | IKLI meningkat | 7.01.0206.02.001 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 7.01.0206.02.002 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | Jumlah kegiatan mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi kelurahan | 12 Bulan | 7.01.0206.02.001.002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 7.01.0206.02.002.001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan | Jumlah kegiatan mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi kelurahan survey kuesioner DDK dan data Potensi Kelurahan | 12 Bulan | - | - |
| | 7.01.0206.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Masyarakat Kelurahan Purwanto | Meningkatnya Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) | 7.01.0206.03.002 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | 7.01.0206.03.002.001 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan 7.01.0206.03.002.002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah dokumen hasil musrenbangkel IKLI meningkat | 2 kegiatan 3,9 | - | - |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUBKEGIATAN | | | KET | |
|----|--|--|------------------|---|--|----------------|---|---|----------------|-----|---------------------|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 7.01.0206.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Babinsa, Bhabinmas Kelurahan Purwantoro | Patroli 144 kali | 7.01.0206.04.001 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan kelurahan | 12 bulan | 7.01.0206.03.002.003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 7.01.0206.04.001.001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan | Prosentase lembaga kemasyarakatan dan ormas di wilayah kecamatan dan kelurahan yang aktif | 75% | - | - |
| | 7.01.0207.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah | 78 | 7.01.0207.02.001 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah kegiatan mendukung peningkatan pelayanan administrasi kelurahan | 12 bulan | 7.01.0207.02.001.002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | jumlah kegiatan | 2 kegiatan | - | - |
| | 7.01.0207.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Komunitas | 4,290 | 7.01.0207.02.002 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | jumlah dokumen | | 7.01.0207.02.002.001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan | Jumlah kegiatan mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi kelurahan | 12 bulan | - | - |
| | | | | 7.01.0207.03.002 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Jumlah Kegiatan | 100% | 7.01.0207.03.002.001 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan | jumlah dokumen | | - | - |
| | | | | | | | 7.01.0207.03.002.002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah yang hadir dalam kegiatan musrenbang | 100% | - | - |
| | | | | | | | | Jumlah kegiatan peningkatan sarana dan prasarana lingkungan kelurahan | 21 RW | - | - |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUBKEGIATAN | | | KET | |
|----|--|--|---|--|---|----------------|---|---|----------------|-----|---------------------|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 7.01.0207.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah Kelurahan Jumlah | 100% | 7.01.0207.04.001 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah kegiatan mendukung keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan kelurahan | 1 kegiatan | 7.01.0207.03.002.003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 7.01.0207.04.001.001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan | Jumlah lembaga kemasyarakatan sosial yang terfasilitasi Jumlah kegiatan mendukung keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan kelurahan | 100% | - | - |
| | 7.01.0208.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Pendukung Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah | 7.01.0208.02.001 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Nilai SKM Kelurahan | 5.000 Surat | 7.01.0208.02.001.002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Nilai SKM Kelurahan | 85% | - | - |
| | 7.01.0208.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | 7.01.0208.03.002 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Jumlah Peserta Musrenbangkel | 95% | 7.01.0208.03.002.001 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan 7.01.0208.03.002.002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 7.01.0208.03.002.003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Dokumen Musrenbangkel Jumlah Kegiatan Peningkatan Prasarana dan sarana Publik Lingkungan Kelurahan Jumlah kegiatan Ketrampilan, PKK, Honor RT/RW, Guru Ngaji, Modin dan Penjaga TI | 95% | - | - |
| | | | | | | | | | 12 Lokasi | - | - |
| | | | | | | | | | 6 kegiatan | - | - |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUBKEGIATAN | | | KET | |
|----|--|--|----------------|---|--|----------------|--|--|----------------|-----|---------------------|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 7.01.0208.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Jumlah Kegiatan Pendukung Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Indeks | 90% | 7.01.0208.04.001 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah kegiatan Babinsa dan Babinkamtip mas | 144 kali | 7.01.0208.04.001.001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan | Jumlah Kegiatan Pendukung Keamanan Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan | 144 | - | - |
| | 7.01.0209.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | keouasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah | - | 7.01.0209.02.001 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | 7.01.0209.02.001.002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | - | - |
| | 7.01.0209.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | 7.01.0209.02.002 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | | | 7.01.0209.02.002.001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan | | | - | - |
| | 7.01.0209.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif | - | 7.01.0209.03.002 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | 7.01.0209.03.002.001 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan | | | - | - |
| | 7.01.0209.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | | | | 7.01.0209.03.002.002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | - | - |
| | 7.01.0209.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | | | | 7.01.0209.03.002.003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | - | - |
| | 7.01.0209.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | 7.01.0209.04.001 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | 7.01.0209.04.001.001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan | | | - | - |
| | 7.01.0210.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Meningkatnya Kinerja Pelayanan (Nilai SAKIP) | 80 | 7.01.0210.02.001 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah kegiatan yang mendukung peningkatan kualitas administrasi kelurahan | 100 | 7.01.0210.02.001.002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah kegiatan mendukung peningkatan kualitas pelayanan adminitrasi kelurahan | 100 | - | - |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUBKEGIATAN | | | KET | |
|----|--|--|---|---|--|----------------------|--|---|---------------------------------|------------|---------------------|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 7.01.0210.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Meningkatnya Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) | 4,29 | 7.01.0210.02.002 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 7.01.0210.03.002 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Jumlah Kegiatan Jumlah Kegiatan | 2 kegiatan 80 | 7.01.0210.02.002.001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan 7.01.0210.03.002.001 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan | Jumlah Kegiatan Jumlah dokumen hasil musrenbangkel Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana publik lingkungan kelurahan | 2 dokumen 100% 80 | - - | - - |
| | 7.01.0210.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) | 4,29 | 7.01.0210.04.001 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Patroli | 144 | 7.01.0210.03.002.002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 7.01.0210.03.002.003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 7.01.0210.04.001.001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan | Jumlah kegiatan peningkatan pelayanan administrasi Kelurahan Jumlah Patroli | 1 tahun 144 | - - | - - |
| | 7.01.0211.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Wilayah Kelurahan Balearjosari | Meningkatkan Sarana dan Prasarana di Wilayah Kelurahan Balearjosari | 7.01.0211.02.001 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 7.01.0211.02.002 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | Jumlah kegiatan mendukung peningkatan pelayanan administrasi Kelurahan jumlah dokumen | 12 bulan | 7.01.0211.02.001.001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 7.01.0211.02.002.001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan | - - | - - | - - | - - |
| | 7.01.0211.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Masyarakat Kelurahan Balearjosari | Meningkatnya Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) | 7.01.0211.03.002 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Jumlah kegiatan | | 7.01.0211.03.002.001 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan | - | - | - | - |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUBKEGIATAN | | | KET | |
|----|--|--|----------------------------------|---|---|----------------|--|---|----------------|-----|---------------------|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 7.01.0211.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Babinkamtibmas | Meningkatkan keamanan lingkungan | 7.01.0211.04.001 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | 7.01.0211.03.002.002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 7.01.0211.03.002.003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 7.01.0211.04.001.001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan | | | - | - |
| | 7.01.03.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Sarpas Kota Secara Terpadu | 0,40 | 7.01.03.02.001 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah kegiatan penyelenggaraan PATEN | 1 kegiatan | 7.01.03.02.001.002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan PATEN | 1 kegiatan | - | - |
| | 7.01.03.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Sarpas Kota Secara Terpadu | 0,40 | 7.01.03.02.002 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | Jumlah Dokumen perencanaan (Monografi, Profil, Updating data base pembangunan) | 3 dokumen | 7.01.03.02.002.001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan | Jumlah dokumen perencanaan | 3 dokumen | - | - |
| | 7.01.03.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Komunitas | 80,02 | 7.01.03.03.002 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | jumlah lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi | 8 lembaga | 7.01.03.03.002.001 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan | jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan | 1 dokumen | - | - |
| | 7.01.03.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Komunitas | 80,02 | 7.01.03.03.002 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | jumlah lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi | 8 lembaga | 7.01.03.03.002.003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah kegiatan pembinaan pemberdayaan masyarakat | 2 kegiatan | - | - |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUBKEGIATAN | | | KET | |
|----|--|--|---|---|---------------------------------------|----------------|---|--|--------------------------------|------------|---------------------|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 7.01.03.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Meningkatnya indeks rasa aman di wilayah Kecamatan | 1,00 | 7.01.03.04.001 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah monitoring peningkatan trantib | 12 kelurahan | 7.01.03.03.002.004 Evaluasi Kelurahan 7.01.03.04.001.001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan | Jumlah kegiatan evaluasi Jumlah monitoring peningkatan keamanan, ketenteraman dan ketertiban lingkungan kecamatan | 2 kegiatan 12 kelurahan | - - | - - |
| | 7.01.03.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah | 80,02 | 7.01.03.05.001 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan sesuai Penugasan Kepala Daerah | Jumlah Patroli yang dilaksanakan | 2 kali | 7.01.03.05.001.008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | JUmlah Patroli yang dilaksanakan | 2 kali | - | - |
| | 7.01.0301.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Kinerja Aparat Kelurahan Kedungkandang | Nilai SAKIP Kelurahan Kedungkandang | 7.01.0301.02.001 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 7.01.0301.02.002 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | | | 7.01.0301.02.001.002 Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 7.01.0301.02.002.001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan | x | x | - | - |
| | 7.01.0301.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Masyarakat Kelurahan Kedungkandang | Indeks Pembangunan Masyarakat Kelurahan Kedungkandang | 7.01.0301.03.002 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | 7.01.0301.03.002.001 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan 7.01.0301.03.002.002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 7.01.0301.03.002.003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | - | - |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUBKEGIATAN | | | KET | |
|----|--|--|----------------|---|---|----------------|---|---|----------------|-----|---------------------|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 7.01.0302.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah | 85% | 7.01.0302.02.001 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Terselenggaranya kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 85% | 7.01.0302.02.001.002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan | 85% | - | - |
| | | | | 7.01.0302.02.002 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | Terselenggaranya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan | | 7.01.0302.02.002.001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan | Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada masyarakat di Kecamatan | 85% | - | - |
| | 7.01.0302.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Komunitas | 85% | 7.01.0302.03.002 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Meningkatnya tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kotalama | 3 | 7.01.0302.03.002.001 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan | Terselenggaranya Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan | 85% | - | - |
| | | | | | | | 7.01.0302.03.002.002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 85% | - | - |
| | | | | | | | 7.01.0302.03.002.003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 85% | - | - |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUBKEGIATAN | | | KET | |
|----|--|---|----------------|---|--|----------------|--|---|----------------|-----|---------------------|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 7.01.0302.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Anggota SatLinmas Kelurahan Kotalama | 80% | 7.01.0302.04.001 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | 7.01.0302.04.001.001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan | 85% | - | - |
| | 7.01.0303.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah | 80% | 7.01.0303.02.001 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Terselenggaranya koordinasi Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan | 80% | 7.01.0303.02.001.002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Terselenggaranya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 80% | - | - |
| | | | | 7.01.0303.02.002 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | Terlaksananya penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | 80% | 7.01.0303.02.002.001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan | Terselenggaranya Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan | 80% | - | - |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUBKEGIATAN | | | KET | |
|----|--|--|----------------|---|---|----------------|--|--|----------------|-----|---------------------|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 7.01.0303.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Komunitas | 80% | 7.01.0303.03.002 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Terselenggara nya Kegiatan Pemberdayaa n Kelurahan | 80% | 7.01.0303.03.002.001 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan | Terselenggara nya Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Terselenggara nya | 80% | - | - |
| | | | | | | | 7.01.0303.03.002.002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 80% | - | - |
| | | | | | | | 7.01.0303.03.002.003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Terselenggara nya Pemberdayaa n Masyarakat di Kelurahan | 80% | - | - |
| | 7.01.0303.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Anggota Satuan Linmas Kelurahan Mergosono | 80% | 7.01.0303.04.001 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 80% | 7.01.0303.04.001.001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan | Terselenggara nya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan | 80% | - | - |
| | 7.01.0304.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | - | - | 7.01.0304.02.002 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | Jumlah dokumen monografi | 1 dokumen | 7.01.0304.02.002.001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan | Jumlah dokumen monografi dan Profil Kelurahan | 2 dokumen | - | - |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUBKEGIATAN | | | KET | |
|----|--|---|----------------|--|--|----------------|--|--|----------------|-----|---------------------|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 7.01.0304.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | - | - | 7.01.0304.03.002 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Jumlah kegiatan | 4 kegiatan | 7.01.0304.02.002.003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah kegiatan mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi kelurahan | 4 kegiatan | - | - |
| | 7.01.0304.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | - | - | 7.01.0304.04.001 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Kegiatan Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan (Monitoring/Patrol/Koordinasi) | 1 kegiatan | 7.01.0304.03.002.002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana publik lingkungan kelurahan | 1 kegiatan | - | - |
| | 7.01.0305.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Sarpras Kota secara Terpadu | 70% | 7.01.0305.02.001 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah kegiatan yang mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi kelurahan | 12 bulan | 7.01.0304.03.002.003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan | 85 % | - | - |
| | | | | | | | 7.01.0304.04.001.001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan | Jumlah Kegiatan Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan (Monitoring/Patrol/Koordinasi) | 1 kegiatan | - | - |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUBKEGIATAN | | | KET | |
|----|---|--|----------------|--|--|-----------------------------|--|--|----------------|-----|---------------------|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 7.01.0305.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Komunitas | 80% | 7.01.0305.02.004 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 7.01.0305.03.001 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Jumlah kegiatan yang mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi kelurahan | 12 bulan | 7.01.0305.02.004.003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah kegiatan yang mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi kelurahan | 12 bulan | - | - |
| | | | | 7.01.0305.03.002 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif | Jumlah Kegiatan dan Dokumen | 7.01.0305.03.002.001 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan | Jumlah dokumen hasil musrenbangkel | 1 dokumen | - | - |
| | | | | | | | 7.01.0305.03.002.002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana publik lingkungan kelurahan | 5 lokasi | - | - |
| | | | | | | | 7.01.0305.03.002.003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah kegiatan | 11 kegiatan | - | - |
| | 7.01.0305.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Meningkatnya Kapasitas Linmas Kelurahan | 80% | 7.01.0305.04.001 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah kegiatan peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan kecamatan (monitoring/patrol/koordinasi) | 12 bulan | 7.01.0305.04.001.001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan | Jumlah kegiatan peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan kecamatan (monitoring/patrol/koordinasi) | 12 bulan | - | - |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUBKEGIATAN | | | KET | |
|----|--|---|--|---|-------------------|----------------|---|--|----------------|-----|---------------------|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 7.01.0305.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah | 80% | 7.01.0305.04.002 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada 7.01.0305.05.001 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | 7.01.0305.04.001.002 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Jumlah kegiatan koordinasi dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat | 4 kegiatan | - | - |
| | 7.01.0306.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | kinerja aparat kelurahan buring | nilai sakisip | 7.01.0306.02.001 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 000 | 0 | 7.01.0306.02.001.002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 0 | 0 | - | - |
| | 7.01.0306.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | masyarakat kelurahan buring | indek pembangunan masyarakat kelurahan buring | 7.01.0306.03.002 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 0 | 0 | 7.01.0306.03.002.001 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan 7.01.0306.03.002.002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 7.01.0306.03.002.003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 0 | 0 | - | - |
| | 7.01.0306.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | masyarakat kelurahan buring | indek pembangunan masyqarakat kelurahan buring | 7.01.0306.04.001 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 0 | 0 | 7.01.0306.04.001.001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan | 0 | 0 | - | - |
| | 7.01.0307.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | IKM | 85 | 7.01.0307.02.001 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | 7.01.0307.02.001.002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Kegiatan yang mendukung Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan | 12 | - | - |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUBKEGIATAN | | | KET | |
|----|--|--|----------------|---|--|----------------|---|--|--------------------------------|---------------------|---------------------|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 7.01.0307.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Presentase Lembaga Masyarakat yang aktif | 85 | 7.01.0307.02.002 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 7.01.0307.03.002 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | 7.01.0307.02.002.001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan 7.01.0307.03.002.001 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan 7.01.0307.03.002.002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 7.01.0307.03.002.003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Tersedianya Dokumen Monografi dan Profil Jumlah Dokumen Hasil Musrenbang Jumlah Kegiatan Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang terfasilitasi | 2 1 11 12 | - - - | - - - |
| | 7.01.0307.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Meningkatnya Indeks Pembangunan Masyarakat IPmas Kecamatan | 85 | 7.01.0307.04.001 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | 7.01.0307.04.001.001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan | Jumlah Kegiatan Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan | 12 | - | - |
| | 7.01.0308.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | IKM | 85 | 7.01.0308.02.001 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 7.01.0308.02.002 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | Jumlah Kegiatan yang mendukung Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan | 12 | 7.01.0308.02.001.002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 7.01.0308.02.002.001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan | Jumlah Kegiatan yang mendukung peningiatan pelayanan administrasi kelurahan Dokumen Monografi dan Dokumen Profil | 12 2 | - - | - - |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUBKEGIATAN | | | KET | |
|----|--|--|--|---|---|----------------|---|---|----------------|-----|---------------------|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 7.01.0308.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Presentase Lembaga Masyarakat yang aktif | 85 | 7.01.0308.03.002 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Jumlah RT RW yang terfasilitasi | 136 | 7.01.0308.03.002.001 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan | Jumlah Dokumen Hasil Musrenbang | 1 | - | - |
| | 7.01.0308.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Meningkatnya Indeks Pembangunan Masyarakat IPmas Kecamatan | 85 | 7.01.0308.04.001 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Kegiatan Peningkatan Keamanan dan Ketentraman Lingkungan | 12 | 7.01.0308.03.002.002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Kegiatan Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan | 17 | - | - |
| | 7.01.0309.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Kinerja Aparat Kelurahan Madyopuro | Nilai SAKIP | 7.01.0309.02.001 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | XXX | 325983500 | 7.01.0309.02.001.002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah kegiatan mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi kelurahan | 80 % | - | - |
| | 7.01.0309.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Masyarakat Kelurahan Madyopuro | Index Pembangunan Masyarakat Kelurahan Madyopuro | 7.01.0309.02.002 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | XXXX | III | 7.01.0309.02.002.001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan | jumlah dokumen monografi dan profil | 2 dokumen | - | - |
| | 7.01.0309.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Masyarakat Kelurahan Madyopuro | Index Pembangunan Masyarakat Kelurahan Madyopuro | 7.01.0309.03.002 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | CCC | | 7.01.0309.03.002.001 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan | Jumlah dokumen hasil Musrenbang | 2 dokumen | - | - |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUBKEGIATAN | | | KET | |
|----|--|---|---|---|-------------------|----------------|--|--|--------------------------------|---------------------|---------------------|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 7.01.0309.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Masyarakat Kelurahan Madyopuro | Index Pembangunan Masyarakat Kelurahan Madyopuro | 7.01.0309.04.001 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | jumlah | 12 bulan | 7.01.0309.03.002.002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 7.01.0309.03.002.003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 7.01.0309.04.001.001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan | Jumlah kegiatan Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik di wilayah Kelurahan Jumlah lembaga yang terfasilitasi Jumlah Kegiatan Peningkatan Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan(Monitoring/Patroli /Kordinasi) | 15 titik 95 % 12 | - - - | - - - |
| | 7.01.0310.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Kinerja Aparat Kelurahan Cemorokandang. | Nilai SAKIP | 7.01.0310.02.001 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 7.01.0310.02.002 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | APBD Tahun 2021 | 348493700 | 7.01.0310.02.001.002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 7.01.0310.02.002.001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan | - - | - - | - - | - - |
| | 7.01.0310.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Masyarakat Kelurahan Cemorokandang | Indeks Pembangunan Masyarakat Kelurahan Cemorokandang | 7.01.0310.03.002 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | 7.01.0310.03.002.001 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan 7.01.0310.03.002.002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 7.01.0310.03.002.003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | - - - | - - - | - - - | - - - |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUBKEGIATAN | | | KET | |
|----|--|---|---|---|-------------------|----------------|--|-----------------------|----------------|-----|---------------------|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 7.01.0310.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Masyarakat Kelurahan Cemorokandang | Indeks Pembangunan Masyarakat Kelurahan Cemorokandang | 7.01.0310.04.001 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | 7.01.0310.04.001.001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan | | | - | - |
| | 7.01.0311.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kelurahan Arjowinangun | 75% | 7.01.0311.02.001 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | 7.01.0311.02.001.002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | - | - |
| | 7.01.0311.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kelurahan Arjowinangun | 75% | 7.01.0311.02.002 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | | | 7.01.0311.02.002.001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan | | | - | - |
| | 7.01.0311.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Arjowinangun | 75% | 7.01.0311.03.002 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | 7.01.0311.03.002.002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | - | - |
| | 7.01.0311.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Arjowinangun | 75% | 7.01.0311.03.002 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | 7.01.0311.03.002.003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | - | - |
| | 7.01.0311.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kelurahan Arjowinangun | 75% | 7.01.0311.04.001 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | 7.01.0311.04.001.001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan | | | - | - |
| | 7.01.0312.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Masyarakat Kelurahan Tlogowaru | 80% | 7.01.0312.02.001 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | 7.01.0312.02.001.002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | - | - |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUBKEGIATAN | | | KET | |
|----|---|--------------------------------|----------------|---|--|----------------|---|---|----------------|-----|---------------------|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 7.01.0312.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Masyarakat Kelurahan Tlogowaru | 80% | 7.01.0312.02.002 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | Terselenggara anya penyelenggar aan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | 85% | 7.01.0312.02.002.001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan | Terselenggara nya Penyelenggar aan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | | - | - |
| | | | | 7.01.0312.03.002 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Terselenggara anya Kegiatan Pemberdayaa n Kelurahan | 80% | 7.01.0312.03.002.001 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan | Terselenggara nya penyelenggar aan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | 85% | - | - |
| | | | | | | | 7.01.0312.03.002.002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Terselenggara nya Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | 85% | - | - |
| | | | | | | | 7.01.0312.03.002.003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Terselenggara nya Pemberdayaa n Masyarakat di Kelurahan | 80% | - | - |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUBKEGIATAN | | | KET | |
|----|--|--|-------------------------------------|---|--|----------------|---|--|----------------|-------------|---------------------|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 7.01.0312.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Masyarakat Kelurahan Tlogowaru | 80% | 7.01.0312.04.001 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Terselenggaranya kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 80 % | 7.01.0312.04.001.002 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | | | - | - |
| | 7.01.04.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah | Kecamatan Lowokwaru dan OPD terakit | 7.01.04.02.001 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 7.01.04.02.002 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | | | 7.01.04.02.001.002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 7.01.04.02.002.001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan | | | - | - |
| | 7.01.04.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Komunitas | Kecamatan Lowokwaru dan OPD terakit | 7.01.04.03.002 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | 7.01.04.03.002.001 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan 7.01.04.03.002.003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 7.01.04.03.002.004 Evaluasi Kelurahan | Jumlah lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi Jumlah lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi Jumlah Monev Pembangunan Prasarana dan Sarana di Wilayah Kecamatan | 7 7 4 | - - - | - - - |
| | 7.01.04.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Komunitas | Wilayah Kecamatan Lowokwaru | 7.01.04.04.001 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | 7.01.04.04.001.001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan | Jumlah Monitoring Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kecamatan | 3 | - | - |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUBKEGIATAN | | | KET | |
|----|--|---|-------------------------------------|---|--|----------------|--|---|----------------|-----|---------------------|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 7.01.04.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Komunitas | Kecamatan Lowokwaru dan OPD terkait | 7.01.04.05.001 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Fasilitas Forum/Koordinasi Tingkat Kecamatan | 4 | 7.01.04.05.001.008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | - | - |
| | 7.01.0401.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Kepuasan Masyarakat Kelurahan Lowokwaru | 90 % | 7.01.0401.02.001 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Patroli Wilayah | 144 Kali | 7.01.0401.02.001.002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Patroli Wilayah | 144 Kali | - | - |
| | | | | 7.01.0401.02.002 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | Jumlah Dokumen Monografi Kelurahan | 6 buku | 7.01.0401.02.002.001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan | Jumlah Dokumen Monografi Kelurahan | 6 buku | - | - |
| | 7.01.0401.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan | 80 % | 7.01.0401.03.002 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Jumlah Dokumen Hasil Musrenbangkel | 6 Dokumen | 7.01.0401.03.002.001 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan | Jumlah dokumen hasil musrenbangkel | 6 Dokumen | - | - |
| | | | | | | | 7.01.0401.03.002.002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Kegiatan Peningkatan Prasarana dan sarana Publik Lingkungan Kelurahan | 15 RW | - | - |
| | | | | | | | 7.01.0401.03.002.003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | - | - |
| | 7.01.0401.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Jumlah Kegiatan mendukung Keamanan, ketentraman dan ketertiban di Wilayah Kelurahan | 12 bulan | 7.01.0401.04.001 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban di Lingkungan Kelurahan (Monitoring/Patroli/Koordinasi) | 1 Kegiatan | 7.01.0401.04.001.001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan | Jumlah Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan (Monitoring/Patroli/Koordinasi) | 1 Kegiatan | - | - |

| No | PROGRAM | | KEGIATAN | | | | SUBKEGIATAN | | | KET | |
|----|--|--|----------------|---|-------------------|----------------|---|---|----------------|-----|---------------------|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 7.01.0402.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Masyarakat Kelurahan Dinoyo dan Pemerintah Kota Malang | 100% | 7.01.0402.02.002 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | | | 7.01.0402.02.002.001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan | Jumlag Dokumen Profil & Monografi | 2 Dokumen | - | - |
| | | | | | | | 7.01.0402.02.002.003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Kegiatan Yang Mendukung Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 12 Bulan | - | - |
| | 7.01.0402.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Masyarakat Kelurahan Dinoyo | 100% | 7.01.0402.03.002 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | APBD tahun 2021 | 100 | 7.01.0402.03.002.001 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan | Jumlah Dokumen Hasil Musrenbang kelurahan Jumlah Kegiatan | 1 Dokumen | - | - |
| | | | | | | | 7.01.0402.03.002.002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Peningkatan Sarana dan Prasarana Publik di Kelurahan | 1 Kegiatan | - | - |
| | | | | | | | 7.01.0402.03.002.003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Kegiatan Yang Mendukung Pemberdayaa n Masyarakat di Kelurahan | 12 Bulan | - | - |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUBKEGIATAN | | | KET | |
|----|--|--|----------------|---|-------------------|----------------|---|---|----------------|-----|---------------------|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 7.01.0402.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Keamanan di wilayah Kelurahan Dinoyo | 100% | 7.01.0402.04.001 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | 7.01.0402.04.001.001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan | Jumlah Kegiatan Peningkatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 1 Kali | - | - |
| | 7.01.0403.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks kepuasan masyarakat kelurahan Sumpsi | 80 | 7.01.0403.02.001 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 7.01.0403.02.002 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | | | 7.01.0403.02.001.002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 7.01.0403.02.002.001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan | | | - | - |
| | 7.01.0403.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan | 90% | 7.01.0403.03.002 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | 7.01.0403.03.002.001 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan 7.01.0403.03.002.002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 7.01.0403.03.002.003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | - | - |
| | 7.01.0403.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Jumlah Kegiatan mendukung keamanan, ketenteraman dan ketertiban lingkungan kelurahan | 12 bulan | 7.01.0403.04.001 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | 7.01.0403.04.001.001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan | | | - | - |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUBKEGIATAN | | | KET | |
|----|---|---|----------------|---|---|----------------|--|-----------------------|----------------|-----|---------------------|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 7.01.0404.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Kepuasan Masyarakat Kelurahan Ketawanggede | 80 | 7.01.0404.02.001 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Kegiatan mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi kelurahan | 12 bulan | 7.01.0404.02.001.002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | - | - |
| | 7.01.0404.02.002 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | | | 7.01.0404.02.002 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | | | 7.01.0404.02.002.001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan | | | - | - |
| | 7.01.0404.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Masyarakat Kelurahan Ketawanggede | 80 % | 7.01.0404.03.002 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | 7.01.0404.03.002.001 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan | | | - | - |
| | 7.01.0404.03.002.002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | 7.01.0404.03.002.002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | - | - |
| | 7.01.0404.03.002.003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | 7.01.0404.03.002.003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | - | - |
| | 7.01.0404.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Jumlah Kegiatan dalam mendukung keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan kelurahan | 12 bulan | 7.01.0404.04.001 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | 7.01.0404.04.001.001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan | | | - | - |
| | 7.01.0405.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Kepuasan Masyarakat Kelurahan Jatimulyo | 80 | 7.01.0405.02.001 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | 7.01.0405.02.001.002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | - | - |
| | | | | 7.01.0405.02.002 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | | | 7.01.0405.02.002.001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan | | | - | - |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUBKEGIATAN | | | KET | |
|----|--|--|----------------|---|-------------------|----------------|---|-----------------------|----------------|-------------|---------------------|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 7.01.0405.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Pemberdayaan masyarakat di kelurahan | 80 % | 7.01.0405.03.002 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | 7.01.0405.03.002.001 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan 7.01.0405.03.002.002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 7.01.0405.03.002.003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | - - - | - - - |
| | 7.01.0405.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | jumlah Kegiatan mendukung keamanan, kentraman, dan ketertiban lingkungan kelurahan | 12 bulan | 7.01.0405.04.001 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | 7.01.0405.04.001.001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan | | | - | - |
| | 7.01.0406.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indexs Kepuasan Masyarakat | 80% | 7.01.0406.02.001 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 7.01.0406.02.002 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | | | 7.01.0406.02.001.002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 7.01.0406.02.002.001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan | | | - - | - - |
| | 7.01.0406.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Pemberdayaan Masyarakat di Keurahan | 80% | 7.01.0406.03.002 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | 7.01.0406.03.002.001 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan 7.01.0406.03.002.002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 7.01.0406.03.002.003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | - - - | - - - |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUBKEGIATAN | | | KET | |
|----|--|---|---|---|-------------------|----------------|---|-----------------------|----------------|-----|---------------------|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 7.01.0406.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | jumlah Kegiatan mendukungkeamanan, kentraman, dan ketertiban lingkungan kelurahan | 12 Bulan | 7.01.0406.04.001 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | 7.01.0406.04.001.001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan | | | - | - |
| | 7.01.0407.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Masyarakat Kelurahan | 85% | 7.01.0407.02.001 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 7.01.0407.02.002 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | | | 7.01.0407.02.001.002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 7.01.0407.02.002.001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan | | | - | - |
| | 7.01.0407.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Masyarakat Kelurahan | 85% | 7.01.0407.03.002 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | 7.01.0407.03.002.001 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan 7.01.0407.03.002.002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 7.01.0407.03.002.003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | - | - |
| | 7.01.0407.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM c | MASYARAKAT KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 7.01.0407.04.001 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | 7.01.0407.04.001.001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan | | | - | - |
| | 7.01.0408.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Kepuasan Masyarakat | 80 | 7.01.0408.02.001 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 7.01.0408.02.002 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | | | 7.01.0408.02.001.002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 7.01.0408.02.002.001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan | | | - | - |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUBKEGIATAN | | | KET | |
|----|--|---|----------------|---|-------------------|----------------|---|-----------------------|----------------|-------------|---------------------|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 7.01.0408.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 80% | 7.01.0408.03.002 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | 7.01.0408.03.002.001 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan 7.01.0408.03.002.002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 7.01.0408.03.002.003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | - - - | - - - |
| | 7.01.0408.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Jumlah Kegiatan mendukung Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan | 12 Bulan | 7.01.0408.04.001 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | 7.01.0408.04.001.001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan | | | - | - |
| | 7.01.0409.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Masyarakat Kelurahan Tasikmadu | 100% | 7.01.0409.02.001 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 7.01.0409.02.002 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | | | 7.01.0409.02.001.002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 7.01.0409.02.002.001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan | Jumlah Kegiatan | | - - | - - |
| | 7.01.0409.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Masyarakat Kelurahan Tasikmadu | 100% | 7.01.0409.03.002 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | 7.01.0409.03.002.001 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan 7.01.0409.03.002.002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 7.01.0409.03.002.003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | - - - | - - - |
| | 7.01.0409.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Masyarakat dan Wilayah Kelurahan Tasikmadu | 100 % | 7.01.0409.04.001 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | 7.01.0409.04.001.001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan | | | - | - |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUBKEGIATAN | | | KET | |
|----|--|-------------------|----------------|---|--|----------------|---|---|----------------|-----|---------------------|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 7.01.0410.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | 7.01.0410.02.001 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Meningkatkan kualitas pelayanan Administrasi dan keamanan di Wilayah kelurahan Tunggulwulung | 12 Bulan | 7.01.0410.02.001.002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | - | - |
| | | | | 7.01.0410.02.002 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | Jumlah dokumen | 6 Dokumen | 7.01.0410.02.002.001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan | | | - | - |
| | 7.01.0410.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | 7.01.0410.03.002 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | 7.01.0410.03.002.001 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan | Jumlah dokumen hasil musrenbangkel | 3 dokumen | - | - |
| | | | | | | | 7.01.0410.03.002.002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana di Wilayah Kelurahan Tunggulwulung | 12 Paket | - | - |
| | | | | | | | 7.01.0410.03.002.003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah kegiatan kelembagaan masyarakat di Wilayah Tunggulwulung | 16 Kegiatan | - | - |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUBKEGIATAN | | | KET | |
|----|--|--|----------------|---|---|----------------|--|---|-----------------------------|-----|---------------------|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 7.01.0410.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | 7.01.0410.04.001 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Kegiatan peningkatan keamanan, ketertiban dan ketertraman lingkungan kelurahan | 1 Kegiatan | 7.01.0410.04.001.001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan | Jumlah kegiatan peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan Kelurahan Tunggulwulung | 1 Kegiatan | - | - |
| | 7.01.0411.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Kepuasan Masyarakat Kelurahan Tlogomas | 80 | 7.01.0411.02.001 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | 7.01.0411.02.001.002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah kegiatan mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi kelurahan; b. Jumlah patroli | a. 24; b. 114 kali | - | - |
| | 7.01.0411.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Prosentase Lembaga Kemasyarakatan dan Organisasi Sosial Masyarakat di wilayah kecamatan dan kelurahan yang aktif | 100% | 7.01.0411.02.002 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | | | 7.01.0411.02.002.001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan | 1. Jumlah dokumen data monografi kelurahan sebagai arah pembangunan ; 2. Jumlah dokumen pemuktakiran profil kelurahan | 1. 2 dokumen ; 2. 1 dokumen | - | - |
| | | | | 7.01.0411.03.002 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | 7.01.0411.03.002.001 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan | Jumlah yang hadir dalam kegiatan musrenbang kelurahan | 100 orang | - | - |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUBKEGIATAN | | | KET | |
|----|---|---|----------------|--|---|----------------|--|--|---|---------------------|---------------------|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 7.01.0411.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan menjaga ketentraman dan ketertiban lingkungan di Wilayah | 9 pos kamling | 7.01.0411.04.001 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah kegiatan mendukung keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan | 1 kali | 7.01.0411.03.002.002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 7.01.0411.03.002.003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 7.01.0411.04.001.001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan | Jumlah kegiatan peningkatan sarana dan prasarana lingkungan kelurahan 1. Jumlah lembaga kemasyarakatan tingkat kelurahan yang terfasilitasi; 2. Jumlah kegiatan pelatihan / sosialisasi / pertemuan PKK Kelurahan; 3. Jumlah kegiatan sosial kemasyarakatan di wilayah / tingkat kelurahan yang terfasilitasi; 4. Jumlah kegiatan mendukung keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan kelurahan | 13 paket 1. 5 lembaga; 2. 4 giat; 3. 2 giat; 4. 2 giat; 5. 22 orang; 6. 27 orang; 7. 105 orang; 8. 59 orang; 9. 1 kegiatan | - - - | - - |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUBKEGIATAN | | | KET | |
|----|--|--|----------------|---|-------------------|----------------|---|--|-----------------------------|-----|---------------------|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 7.01.0412.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Kepuasan Masyarakat | 80 % | 7.01.0412.02.001 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | 7.01.0412.02.001.002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | a. Jumlah Kegiatan Mendukung Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan b. Jumlah Patroli | a. 12 Bulan dan b. 144 Kali | - | - |
| | 7.01.0412.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 80 % | 7.01.0412.02.002 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 7.01.0412.03.002 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | 7.01.0412.02.002.001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan 7.01.0412.03.002.001 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan 7.01.0412.03.002.002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 7.01.0412.03.002.003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | - | - |
| | 7.01.0412.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Jumlah Kegiatan Mendukung Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan. | 80 % | 7.01.0412.04.001 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | 7.01.0412.04.001.001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan | | | - | - |
| | 7.01.05.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah | 81 | 7.01.05.02.001 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | 7.01.05.02.001.001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 7.01.05.02.001.002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | - | - |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUBKEGIATAN | | | KET | |
|----|--|--|----------------|--|-------------------|----------------|--|--|----------------|-----|---------------------|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 7.01.05.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan komunitas | 4,72 | 7.01.05.03.002 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | 7.01.05.03.002.001 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan 7.01.05.03.002.003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 7.01.05.03.002.004 Evaluasi Kelurahan | Jumlah perencanaan dan Monev Pembangunan Prasarana dan Sarana di Wilayah Kecamatan | 11 | - | - |
| | 7.01.05.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Komunitas | 4,72 | 7.01.05.04.001 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | 7.01.05.04.001.001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan | | | - | - |
| | 7.01.05.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah | 81 | 7.01.05.05.001 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | 7.01.05.05.001.008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | - | - |
| | 7.01.0501.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | 7.01.0501.02.001 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | 7.01.0501.02.001.001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 7.01.0501.02.001.002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | - | - |
| | 7.01.0501.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | 7.01.0501.03.002 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | 7.01.0501.03.002.001 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Musrenbang | 2 | - | - |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUBKEGIATAN | | | KET | |
|----|--|---------------------------------|----------------|--|-------------------|----------------|---|--|----------------|-----|---------------------|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 7.01.0501.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | 7.01.0501.04.001 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | 7.01.0501.03.002.002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan | 9 | - | - |
| | 7.01.0502.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Masyarakat Kelurahan Ciptomulyo | 97% | 7.01.0502.02.001 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | 7.01.0501.03.002.003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 7.01.0501.04.001.001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan | | | - | - |
| | 7.01.0502.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Masyarakat Kelurahan Ciptomulyo | 90% | 7.01.0502.03.002 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | 7.01.0502.02.001.001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 7.01.0502.02.001.002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 7.01.0502.03.002.001 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan | Jumlah dokumen hasil musrenbang kelurahan Ciptomulyo | 100% | - | - |
| | | | | | | | 7.01.0502.03.002.002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana publik lingkungan kelurahan | | - | - |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUBKEGIATAN | | | KET | |
|----|--|---------------------------------|----------------|--|-------------------|----------------|--|---|----------------|-----|---------------------|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 7.01.0502.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Masyarakat Kelurahan Ciptomulyo | 85% | 7.01.0502.04.001 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | 7.01.0502.03.002.003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah/Tingkat Kelurahan Ciptomulvo | 100% | - | - |
| | 7.01.0503.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | 7.01.0503.02.001 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | 7.01.0502.04.001.001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan | Jumlah kegiatan peningkatan keamanan dan ketertiban lingkungan kelurahan (monitoring/patrol/koordinasi) | 12 bulan | - | - |
| | 7.01.0503.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | 7.01.0503.03.002 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | 7.01.0503.02.001.001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | | | - | - |
| | | | | | | | 7.01.0503.02.001.002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | - | - |
| | | | | | | | 7.01.0503.03.002.001 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan | | | - | - |
| | | | | | | | 7.01.0503.03.002.002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | - | - |
| | | | | | | | 7.01.0503.03.002.003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | - | - |

| No | PROGRAM | | KEGIATAN | | | | SUBKEGIATAN | | | KET | |
|----|--|-------------------|----------------|--|-------------------|----------------|--|--|----------------|-----|---------------------|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 7.01.0503.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | 7.01.0503.04.001 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | 7.01.0503.04.001.001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan | | | - | - |
| | 7.01.0504.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | 7.01.0504.02.001 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | 7.01.0504.02.001.001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | | | - | - |
| | 7.01.0504.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | 7.01.0504.03.002 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | 7.01.0504.02.001.002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 7.01.0504.03.002.001 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan 7.01.0504.03.002.002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 7.01.0504.03.002.003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | - | - |
| | 7.01.0504.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | 7.01.0504.04.001 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | 7.01.0504.04.001.001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan | Jumlah kegiatan monitoring keamanan, ketenteraman dan ketertiban lingkungan tim pengamanan wilayah | 12 bulan | - | - |
| | 7.01.0505.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | 7.01.0505.02.001 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | 7.01.0505.02.001.001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | | | - | - |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUBKEGIATAN | | | KET | | |
|----|--|-------------------|----------------|--|-------------------|----------------|--|-----------------------|----------------|-----|---------------------|--|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | 7.01.0505.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | 7.01.0505.03.002 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | 7.01.0505.02.001.002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 7.01.0505.03.002.001 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan 7.01.0505.03.002.002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 7.01.0505.03.002.003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | - | - | |
| | 7.01.0505.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | 7.01.0505.04.001 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | 7.01.0505.04.001.001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan | | | - | - | |
| | 7.01.0506.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | 7.01.0506.02.001 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | 7.01.0506.02.001.001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 7.01.0506.02.001.002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | - | - | |
| | 7.01.0506.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | 7.01.0506.03.002 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | 7.01.0506.03.002.001 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan 7.01.0506.03.002.002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 7.01.0506.03.002.003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | - | - | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUBKEGIATAN | | | KET | |
|----|--|-------------------|----------------|--|-------------------|----------------|--|---|----------------------------|-----|---------------------|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 7.01.0506.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | 7.01.0506.04.001 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | 7.01.0506.04.001.001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan | Jumlah kegiatan rapat koordinasi peningkatan keamanan dan ketertiban di kelurahan Tanjungrejo | 1 kali kegiatan koordinasi | - | - |
| | 7.01.0507.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | 7.01.0507.02.001 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | 7.01.0507.02.001.001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | | | - | - |
| | 7.01.0507.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | 7.01.0507.03.002 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | 7.01.0507.02.001.002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 7.01.0507.03.002.001 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan 7.01.0507.03.002.002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 7.01.0507.03.002.003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | - | - |
| | 7.01.0507.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | 7.01.0507.04.001 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | 7.01.0507.04.001.001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan | | | - | - |
| | 7.01.0508.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | 7.01.0508.02.001 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | 7.01.0508.02.001.001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | jumlah dokumen | 3 dokumen | - | - |

| No | PROGRAM | | KEGIATAN | | | | SUBKEGIATAN | | | KET | |
|----|--|-------------------------------|----------------|--|-------------------|----------------|--|--|----------------|-----|---------------------|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 7.01.0508.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | 7.01.0508.03.002 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | 7.01.0508.02.001.002 Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 7.01.0508.03.002.001 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan | Jumlah Dokumen Hasil Musrenbangkel | 1 Dokumen | - | - |
| | 7.01.0508.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | 7.01.0508.04.001 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | 7.01.0508.03.002.002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 7.01.0508.03.002.003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 7.01.0508.04.001.001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan | jumlah lokasi yang diperbaiki | 4 RW | - | - |
| | 7.01.0509.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Masyarakat Kelurahan Bandulan | 98% | 7.01.0509.02.001 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | 7.01.0509.02.001.001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah kegiatan peningkatan keamanan ketenteraman dan ketertiban lingkungan kelurahan (monitoring/patrol/koordinasi) | 12 bulan | - | - |
| | 7.01.0509.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Masyarakat Kelurahan Bandulan | 95% | 7.01.0509.03.002 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | 7.01.0509.02.001.002 Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 7.01.0509.03.002.001 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan | Jumlah kegiatan mendukung efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan Jumlah dokumen hasil musrenbangkel | 12 100 | - | - |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUBKEGIATAN | | | KET | |
|----|--|-------------------------------|----------------|--|-------------------|----------------|--|--|----------------|-----|---------------------|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | 7.01.0509.03.002.002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana publik lingkungan kelurahan | | - | - |
| | | | | | | | 7.01.0509.03.002.003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah pembinaan dan fasilitasi kegiatan lembaga kemasyarakatan di wilayah/tingkat Kelurahan Bandulan | 100 % | - | - |
| | 7.01.0509.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Masyarakat Kelurahan Bandulan | 98% | 7.01.0509.04.001 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | 7.01.0509.04.001.001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan | Jumlah kegiatan peningkatan keamanan ketenteraman dan ketertiban lingkungan kelurahan (monitoring/patrol/koordinasi) | 12 bln | - | - |
| | 7.01.0510.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | 7.01.0510.02.001 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | 7.01.0510.02.001.001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | | | - | - |
| | 7.01.0510.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | 7.01.0510.03.002 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | 7.01.0510.02.001.002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 7.01.0510.03.002.001 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan | | | - | - |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUBKEGIATAN | | | KET | |
|----|---|--|----------------|--|-------------------|----------------|---|-----------------------|----------------|-----|---------------------|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 8 | 7.01.0510.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 7.01.0511.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 7.01.0511.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 7.01.0511.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 8. UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah | 80 | 7.01.0510.04.001 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 7.01.0511.02.001 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 7.01.0511.03.002 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.0511.04.001 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | 7.01.0510.03.002.002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 7.01.0510.03.002.003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 7.01.0510.04.001.001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan 7.01.0511.02.001.001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 7.01.0511.02.001.002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 7.01.0511.03.002.001 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan 7.01.0511.03.002.002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 7.01.0511.03.002.003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 7.01.0511.04.001.001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan | | | - | - |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUBKEGIATAN | | | KET | |
|----|---|--|----------------|--|-------------------|----------------|--|----------------------------------|----------------|-----|---------------------|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 8.01.01.02 PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Meningkatnya penyelesaian gangguan disintegrasi bangsa dan meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pembangunan | 70% | 8.01.01.02.001 Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | | | 8.01.01.02.001.003 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | jumlah peserta pertemuan | 1125 orang | - | - |
| | 8.01.01.03 PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik | Meningkatnya penyelesaian gangguan disintegrasi bangsa dan meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pembangunan | 42,5% | 8.01.01.03.001 Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, sert | | | 8.01.01.03.001.004 Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | jumlah parpol yang terverifikasi | 16 parpol | - | - |
| | 8.01.01.04 PROGRAM Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | Meningkatnya penyelesaian gangguan disintegrasi bangsa dan meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pembangunan | 42,5% | 8.01.01.04.001 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | | | 8.01.01.04.001.003 Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | jumlah ormas yg terdata | 70 ormas | - | - |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUBKEGIATAN | | | KET | |
|----|---|--|----------------|---|-------------------|----------------|--|--|----------------|-----|---------------------|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 8.01.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA | Meningkatnya penyelesaian gangguan disintegrasi bangsa dan meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pembangunan | 70% | 8.01.01.05.001 Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya | | | 8.01.01.05.001.004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | jumlah peserta pertemuan | 75 orang | - | - |
| | 8.01.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | Terwujudnya kewaspadaan Nasional dan penanganan konflik | 67,5 | 8.01.01.06.001 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | | | 8.01.01.06.001.004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Terlaksananya kegiatan penanganan gangguan konflik sosial di Kota Malang | 4 giat | - | - |
| 9 | X. URUSAN UMUM X.XX UMUM X.XX.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAH | | | X.XX.01.01.001 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | X.XX.01.01.001.001 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | | | - | - |
| | | | | X.XX.01.01.002 Administrasi Keuangan | | | X.XX.01.01.002.006 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.002.007 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran | | | - | - |
| | | | | X.XX.01.01.003 Administrasi Umum | | | X.XX.01.01.003.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | - | - |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUBKEGIATAN | | | KET | |
|----|---|---|--|---|-------------------|----------------|--|-----------------------|----------------|-----|---------------------|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | | | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | | | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | | | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor | | | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.011 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.016 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.017 Penyediaan Makanan dan Minuman | | | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.018 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | | | - | - |
| | | | | X.XX.01.01.004 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | X.XX.01.01.004.009 Pendidikan dan Pelatihan Formal | | | - | - |
| | X.XX.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Meningkatnya kinerja DPRD dalam melaksanakan fungsi, pengawasan dan legislasi | Prosentase ketepatan waktu persetujuan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan | X.XX.01.01.001 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | X.XX.01.01.001.001 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | | | - | - |
| | | | | X.XX.01.01.002 Administrasi Keuangan | | | X.XX.01.01.002.005 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | | | - | - |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUBKEGIATAN | | | KET | | |
|----|--|---|----------------|--|-------------------|----------------|---|--|----------------|-----|---------------------|--|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | X.XX.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAH | Peningkatan / Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 100% | X.XX.01.01.001 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | X.XX.01.01.003.030 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional X.XX.01.01.003.034 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor X.XX.01.01.003.035 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur X.XX.01.01.003.038 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor X.XX.01.01.003.039 Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan X.XX.01.01.003.040 Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional X.XX.01.01.004.009 Pendidikan dan Pelatihan Formal X.XX.01.01.004.010 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan | | | - | - | |
| | | | | X.XX.01.01.002 Administrasi Keuangan | | | X.XX.01.01.001.001 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah X.XX.01.01.001.002 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | Jumlah dokumen renja / renstra RKT Jumlah dokumen RKA/PRKA dan DPA/DPPA dan profile | 10 15 | - | - | |
| | | | | | | | X.XX.01.01.002.006 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kerja | 5 | - | - | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUBKEGIATAN | | | KET | |
|----|---------|-------------------|----------------|----------------------------------|-------------------|----------------|--|--|----------------|-----|---------------------|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | X.XX.01.01.003 Administrasi Umum | | | X.XX.01.01.002.007 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran | Jumlah laporan keuangan | 12 eksemplar | - | - |
| | | | | X.XX.01.01.003 Administrasi Umum | | | X.XX.01.01.003.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah surat yang teradministrasi dengan baik | 2400 | - | - |
| | | | | X.XX.01.01.003 Administrasi Umum | | | X.XX.01.01.003.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah bulan pembayaran belanja telpon, air dan listrik | 12 | - | - |
| | | | | X.XX.01.01.003 Administrasi Umum | | | X.XX.01.01.003.008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Luasan ruangan yang dibersihkan | 500 | - | - |
| | | | | X.XX.01.01.003 Administrasi Umum | | | X.XX.01.01.003.009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor | 8 | - | - |
| | | | | X.XX.01.01.003 Administrasi Umum | | | X.XX.01.01.003.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah alat tulis kantor | 40 | - | - |
| | | | | X.XX.01.01.003 Administrasi Umum | | | X.XX.01.01.003.011 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah barang cetakan dan penggandaan | 4 | - | - |
| | | | | X.XX.01.01.003 Administrasi Umum | | | X.XX.01.01.003.012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah komponen Instalasi listrik / penerangan kantor | 8 | - | - |
| | | | | X.XX.01.01.003 Administrasi Umum | | | X.XX.01.01.003.015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 720 | - | - |
| | | | | X.XX.01.01.003 Administrasi Umum | | | X.XX.01.01.003.016 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah perkiraan kegiatan peringatan / kegiatan isidentil | 2 | - | - |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUBKEGIATAN | | | KET | |
|----|--|-------------------|----------------|--|-------------------|----------------|---|--|-----------------|-----|---------------------|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.017 Penyediaan Makanan dan Minuman | Jumlah makanan dan minuman | 1000 | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.018 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | 12 | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.020 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan dinas atau operasional Luasan | 8 unit | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.024 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | gedung kantor yang dipelihara Luasan | 3 | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | gedung kantor yang dipelihara Luasan | 3 | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.030 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara | 42 | - | - |
| | | | | X.XX.01.01.004 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | X.XX.01.01.004.002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | | | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.004.009 Pendidikan dan Pelatihan Formal | | | - | - |
| | X.XX.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAH | Nilai SAKIP OPD | 80,01 | X.XX.01.01.001 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen | 12 dokumen | X.XX.01.01.001.001 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Renja/RKT dan dokumen Renstra | 3 dokumen | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.001.002 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | Jumlah dokumen RKA/PRKA dan DPA/DPPA | 4 dokumen | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.001.005 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen SKM, SP dan jumlah ZI | 4 dokumen , 80% | - | - |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUBKEGIATAN | | | KET | |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------|---|----------------|--|---|----------------|-----|---------------------|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | X.XX.01.01.002 Administrasi Keuangan | Jumlah dokumen | 11 dokumen | X.XX.01.01.002.006 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja | 7 dokumen | - | - |
| | | | | X.XX.01.01.003 Administrasi Umum | Jumlah kegiatan pendukung administrasi umum | 16 kegiatan | X.XX.01.01.002.007 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran | Jumlah laporan keuangan | 4 dokumen | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah surat yang teradministrasi dengan baik | 1075 surat | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah bulan pembayaran belanja telpon, air, listrik dan internet | 12 bulan | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah perlengkapan gedung kantor (dan sumur injeksi) | 5 Unit | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.005 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | Jumlah petugas pengamanan kantor | 3 orang | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Luasan ruangan yang dibersihkan | 2000 m2 | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara | 30 Unit | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah alat tulis kantor | 42 jenis | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.011 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah barang cetakan dan penggandaan | 6 Jenis | - | - |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUBKEGIATAN | | | KET | |
|----|---------|-------------------|----------------|---|-------------------|----------------|--|---|----------------|-----|---------------------|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 7 Jenis | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 2 jenis | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.016 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah perkiraan kegiatan peringatan/kegiatan insidental | 1 kegiatan | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.017 Penyediaan Makanan dan Minuman | Jumlah makanan dan minuman | 4600 dos | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.018 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | 10 kali | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Luasan gedung kantor yang dipelihara | 2000 m2 | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.030 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara | 11 unit | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.038 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor | Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi | 1 gedung | - | - |
| | | | | X.XX.01.01.004 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Jumla kegiatan | 3 kegiatan | X.XX.01.01.004.009 Pendidikan dan Pelatihan Formal | Jumlah sumber daya aparatur yang dikembangkan/ditingkatkan kapasitasnya | 100 orang | - | - |

| No | PROGRAM | | KEGIATAN | | | SUBKEGIATAN | | | | KET | |
|----|--|---|----------------|--|---|-----------------|---|--|-------------------------|-----|---------------------|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | X.XX.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAH | Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah | 100% | X.XX.01.01.001 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen renstra dan renja | 3 dokumen | X.XX.01.01.001.001 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen renstra dan renja | 3 dokumen | - | - |
| | | | | X.XX.01.01.002 Administrasi Keuangan | Jumlah laporan capaian kinerja dan laporan keuangan | 13 dokumen | X.XX.01.01.002.006 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 12 dokumen | - | - |
| | | | | X.XX.01.01.003 Administrasi Umum | Jumlah sub kegiatan administrasi umum | 15 Sub Kegiatan | X.XX.01.01.002.007 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran | Jumlah dokumen laporan keuangan | 1 dokumen | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah surat keluar selama satu tahun | 1500 | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah bulan pembayaran belanja telepon, air, dan listrik | 12 bulan | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah pengemudi/supir dinas | 2 orang | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Luasan ruangan yang dibersihkan dan jumlah petugas pengamanan kantor | 2.877,62 m2 dan 2 orang | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah alat tulis kantor | 91 jenis | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.011 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah barang cetakan dan penggandaan | 7 jenis | - | - |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUBKEGIATAN | | | KET | |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|-------------------|----------------|--|--|-----------------------|-----|---------------------|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 8 jenis | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.017 Penyediaan Makanan dan Minuman | Jumlah perkiraan kegiatan peringatan/kegiatan insidental, jumlah makanan dan minuman | 1 kali dan 3000 kotak | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.018 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | 15 kali | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.024 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Jumlah peralatan gedung kantor | 13 jenis | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Jumlah gedung kantor yang dipelihara | 1 unit | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.030 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara | 15 unit | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.034 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara | 9 jenis | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.035 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur | Jumlah mebeleur yang dipelihara | 2 jenis | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.038 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor | Jumlah sumur injeksi yang dibuat | 1 unit | - | - |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUBKEGIATAN | | | KET | |
|----|--|-------------------|----------------|--|---|---|---|--|----------------|-----|---------------------|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | X.XX.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAH | - | - | X.XX.01.01.004 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya | 8 kali bimtek dan 48 kali pelaksanaan senam | X.XX.01.01.004.009 Pendidikan dan Pelatihan Formal | Jumlah orang yang mengikuti Bimtek/Diklat dan senam | 56 kali | - | - |
| | | | | X.XX.01.01.001 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | jumlah dokumen evaluasi | 5 dokumen | X.XX.01.01.001.001 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Renstra dan Renja | 2 dokumen | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.001.002 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | jumlah dokumen RKA/PRKA dan DPA/DPPA | 4 dokumen | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.001.003 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | Jumlah dokumen profil perangkat daerah | 30 dokumen | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.001.005 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen hasil survei kepuasan masyarakat | 2 dokumen | - | - |
| | | | | X.XX.01.01.002 Administrasi Keuangan | Jumlah dokumen Surat Permintaan Membayar (SPM) yang diterbitkan | 750 dokumen | X.XX.01.01.002.004 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | Jumlah dokumen pelaporan Barang Milik Daerah | 1 buah | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.002.006 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 2 dokumen | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.002.007 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran | jumlah laporan keuangan | 3 dokumen | - | - |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUBKEGIATAN | | | KET | |
|----|---------|-------------------|----------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------|---|--|-----------------------------|-----|---------------------|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | X.XX.01.01.003 Administrasi Umum | jumlah surat keluar selama 1 tahun | 5000 surat | X.XX.01.01.003.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah surat yang teradministrasi dengan baik | 5000 unit | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah bulan pembayaran belanja telpon, air dan listrik | 12 bulan | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor | 1 unit | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.005 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | Jumlah barang milik daerah yang mendapatkan jasa jaminan barang milik daerah | 4 unit | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | jumlah kendaraan dinas/operasional | 18 unit | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Jumlah dokumen Surat Permintaan Membayar (SPM) yang diterbitkan Luasan | 750 SPM | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | ruangan yang dibersihkan | 25 M2 | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor | jumlah alat tulis kantor | 1555 buah | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.011 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | jumlah barang cetakan dan penggandaan | 509 rim, 280 dos, 1041 7 bh | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | 540 bh | - | - |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUBKEGIATAN | | | KET | |
|----|---------|-------------------|----------------|--|---|----------------|--|---|----------------|-----|---------------------|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.016 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | jumlah perkiraan kegiatan peringatan/kegiatan insidental | 1 kali | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.017 Penyediaan Makanan dan Minuman | jumlah makanan dan minuman | 610 bh | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.018 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | 100 kali | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.020 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan dinas | 7 unit | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.024 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Jumlah peralatan gedung kantor | 31 unit | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Luasan gedung kantor yang dipelihara | 25 M2 | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.030 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara | 18 unit | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.032 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara | 106 bh | - | - |
| | | | | X.XX.01.01.004 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | jumlah kegiatan peningkatan/pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 50 org | X.XX.01.01.004.009 Pendidikan dan Pelatihan Formal | Jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan/dikembangkan kapasitasnya | 50 org | - | - |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUBKEGIATAN | | | KET | |
|----|--|---|----------------|--|---|----------------|---|--|-------------------|-----|---------------------|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | X.XX.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAH | Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah | 82,05 | X.XX.01.01.001 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Renstra | 1 dokumen | X.XX.01.01.001.001 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Renstra | 1 dokumen | - | - |
| | | | | X.XX.01.01.002 Administrasi Keuangan | Jumlah dokumen capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja dan jumlah dok laporan keuangan | 16 dokumen | X.XX.01.01.002.004 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | Jumlah laporan keuangan | 1 dokumen | - | - |
| | | | | X.XX.01.01.003 Administrasi Umum | Jumlah surat masuk dan keluar | 1000 surat | X.XX.01.01.002.006 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja | 15 dokumen | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah surat masuk dan keluar selama 1 tahun | 1000 surat | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | jumlah pembayaran rekening telepon, air, listrik, dan internet | 12 bulan | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | jumlah luasan bangunan dan lahan yg dibersihkan serta yg di jaga keamanannya | 2050 m2 | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | jumlah surat kabar dan jumlah buku peraturan perundang - undangan | 84 exp dan 20 exp | - | - |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUBKEGIATAN | | | KET | |
|----|--|--|----------------|--|-------------------|----------------|---|--|--------------------|-----|---------------------|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.017 Penyediaan Makanan dan Minuman | jumlah mamin yg tersedia | 70 kali | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.018 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | jumlah pelaksanaan perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah | 152 OH | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.024 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | jumlah peralatan yg diadakan | 13 jenis | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.030 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | jumlah kendaraan dinas / operasional yg dipelihara | 13 unit | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.034 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | jumlah item servis / perbaikan peralatan kerja yg rutin | 19 jenis peralatan | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.038 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor | jumlah luasan gedung kantor yg dipelihara | 200 m2 | - | - |
| | | | | X.XX.01.01.004 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | X.XX.01.01.004.011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | | | - | - |
| | X.XX.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAH | Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah | | X.XX.01.01.001 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | X.XX.01.01.001.001 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Renstra dan Renja | 3 Dokumen | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.001.002 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | Jumlah dokumen RKA/PRKA dan DPA/DPPA | 4 Dokumen | - | - |
| | | | | X.XX.01.01.002 Administrasi Keuangan | | | X.XX.01.01.002.004 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | Jumlah laporan keuangan | 5 Dokumen | - | - |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUBKEGIATAN | | | KET | |
|----|---------|-------------------|----------------|----------------------------------|-------------------|----------------|--|---|--|-----|---------------------|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | X.XX.01.01.003 Administrasi Umum | | | X.XX.01.01.002.006 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja | 6 Dokumen | - | - |
| | | | | X.XX.01.01.003 Administrasi Umum | | | X.XX.01.01.003.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah bulan pembayaran belanja telpon, air dan listrik dan Jumlah publikasi dan informasi perencanaan pembangunan | 12 bulan, 225 Kali | - | - |
| | | | | X.XX.01.01.003 Administrasi Umum | | | X.XX.01.01.003.005 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | Jumlah barang milik daerah yang mendapatkan jasa jaminan barang milik daerah | 26 kendaraan dinas | - | - |
| | | | | X.XX.01.01.003 Administrasi Umum | | | X.XX.01.01.003.006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional | 26 kendaraan dinas | - | - |
| | | | | X.XX.01.01.003 Administrasi Umum | | | X.XX.01.01.003.007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Jumlah dokumen Surat Permintaan Membayar (SPM) yang diterbitkan dan Jumlah dokumen laporan Barang Milik Daerah Luasan | 1.250 SPM, 6 dokumen (KIB A - F) dan dokumen penghapusan Barang Milik Daerah | - | - |
| | | | | X.XX.01.01.003 Administrasi Umum | | | X.XX.01.01.003.008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | ruangan yang dibersihkan | 240m2 | - | - |
| | | | | X.XX.01.01.003 Administrasi Umum | | | X.XX.01.01.003.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah alat tulis kantor | 76 jenis ATK | - | - |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUBKEGIATAN | | | KET | |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|-------------------|----------------|--|--|---------------------------|-----|---------------------|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.011 Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan | Jumlah barang cetakan dan peggandaan | 7 jenis barang cetakan | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 5 jenis kompone n listrik | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 12 bulan | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.016 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | jumlah/ volume bbm dan pelumas | 6.961 Liter | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.017 Penyediaan Makanan dan Minuman | Jumlah makanan dan minuman | 7280 kotak | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.018 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | 81 Kali | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.022 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | jumlah peralatan gedung kantor | 26 buah | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | jumlah gedung kantor yang dipelihara dan Jumlah perpindahan kantor | 2 Ruangan , 1 kali pindah | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.030 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara | 26 kendaraa n | - | - |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUBKEGIATAN | | | KET | |
|----|--|---|----------------|--|---|-------------------------------------|---|--|---|---------------------|---------------------|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | X.XX.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAH | Prosentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | 100% | X.XX.01.01.004 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Jumlah Dokumen RENSTRA, Jumlah Dokumen RENJA. | 1 Dokumen RENSTRA, 1 Dokumen RENJA. | X.XX.01.01.003.032 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor X.XX.01.01.004.011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan X.XX.01.01.001.001 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara Jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan/dikembangkan kapasitasnya Jumlah Dokumen RENSTRA, Jumlah Dokumen RENJA | 57 buah 47 Orang 1 Dokumen Renstra, 1 Dokumen Renja | - - - | - - - |
| | | | | X.XX.01.01.001 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | X.XX.01.01.001.005 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Pemerintah Daerah | 1 dokumen | - | - |
| | | | | X.XX.01.01.002 Administrasi Keuangan | Jumlah Laporan Keuangan | 3 Laporan | X.XX.01.01.002.006 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 1 Dokumen | - | - |
| | | | | X.XX.01.01.002.007 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran | | | X.XX.01.01.002.007 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran | JUMLAH LAPORAN KEUANGAN | 3 LAPORAN | - | - |
| | | | | X.XX.01.01.003 Administrasi Umum | Jumlah Dokumen Renstra. | 1 Dokumen. | X.XX.01.01.003.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah surat yang teradministrasi dengan baik | 4500 | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Penunjang urusan pemerintah daerah | 12 bulan | - | - |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUBKEGIATAN | | | KET | |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|-------------------|----------------|---|--|----------------|-----|---------------------|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.006 Penunjang Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 28 | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Pemerintah Daerah | 5 | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 12 bulan | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.011 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 14244 | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor | Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 214 | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan | Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 4 | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.017 Penyediaan Makanan dan Minuman | Penunjang Urusan Pememerintah Daerah | 44632 | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.018 Rapat- Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 127 kali | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.020 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 4 kendaraan | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.022 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Operasional Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 5 | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.024 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 3 | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 1 gedung | - | - |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUBKEGIATAN | | | KET | |
|----|--|---|----------------|--|--|----------------|--|---|-----------------|-----|---------------------|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.030 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Pemerintah Daerah | 28 Kendaraan | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.032 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 6 | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.034 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 7 | - | - |
| | | | | X.XX.01.01.004 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Jumlah Sumber Daya Aparatur yang ditingkatkan/dikembangkan | 2 kegiatan | X.XX.01.01.004.002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Jumlah Pakaian Dinas | 184 | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.004.009 Pendidikan dan Pelatihan Formal | Jumlah Sumber Daya Aparatur yang Ditingkatkan/Dikembangkan Kapasitasnya | 2 kegiatan | - | - |
| | X.XX.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAH | Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah | 82,5 | X.XX.01.01.001 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah ZI | 1 Laporan | X.XX.01.01.001.001 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Renja/RKT | 1 dokumen | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.001.005 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah ZI, Jumlah sertifikasi | 1 dokumen | - | - |
| | | | | X.XX.01.01.002 Administrasi Keuangan | | | X.XX.01.01.002.007 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran | Jumlah laporan keuangan | 2 dokumen | - | - |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUBKEGIATAN | | | KET | |
|----|---------|-------------------|----------------|----------------------------------|--|---|---|--|----------------|-----|---------------------|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | X.XX.01.01.003 Administrasi Umum | luasannya gedung kantor yang dipelihara, jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara, jumlah surat yang teradministrasi dengan baik, jumlah bulan pembayaran belanja telpon, air dan listrik, jumlah peralatan dan perlengkapan kantor, luasan ruangan yang | 2 gedung, 29 kendaraan, 5534 surat, 12 bulan, 60 peralatan, 1050 m2, 85 macam, 409.750 lembar, 50 titik, 47 exemplar, 4200 kotak, Dalam Daerah= 37, Luar daerah = 37, 40 unit | X.XX.01.01.003.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah surat yang teradministrasi dengan baik | 1 | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah bulan pembayaran belanja telpon, air dan listrik | 12 | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Luasan ruangan yang dibersihkan | 1 | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah alat tulis kantor | 1 | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.011 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah barang cetakan dan penggandaan | 1 | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 1 | - | - |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUBKEGIATAN | | | KET | |
|----|--|---|----------------|---|---|----------------|--|---|----------------|-----|---------------------|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor | 60 | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.017 Penyediaan Makanan dan Minuman | Jumlah makanan dan minuman | 1 | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.018 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | 74 | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.024 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Jumlah Perlengkapan gedung kantor | 1 | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Luasan gedung kantor yang dipelihara | 1 | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.030 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara | 1 | - | - |
| | | | | X.XX.01.01.004 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan / dikembangkan kapasitasnya | 148 orang | X.XX.01.01.004.009 Pendidikan dan Pelatihan Formal | Jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan/dikembangkan kapasitasnya | 148 orang | - | - |
| | X.XX.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAH | Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah | | X.XX.01.01.001 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | X.XX.01.01.001.001 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | | | - | - |
| | | | | X.XX.01.01.002 Administrasi Keuangan | | | X.XX.01.01.002.004 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | | | - | - |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUBKEGIATAN | | | KET | |
|----|---------|-------------------|----------------|----------------------------------|-------------------|----------------|--|-----------------------|----------------|-----|---------------------|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | X.XX.01.01.003 Administrasi Umum | | | X.XX.01.01.002.007 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran | | | - | - |
| | | | | X.XX.01.01.003 Administrasi Umum | | | X.XX.01.01.003.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | - | - |
| | | | | X.XX.01.01.003 Administrasi Umum | | | X.XX.01.01.003.005 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | | | - | - |
| | | | | X.XX.01.01.003 Administrasi Umum | | | X.XX.01.01.003.006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | | | - | - |
| | | | | X.XX.01.01.003 Administrasi Umum | | | X.XX.01.01.003.008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | | | - | - |
| | | | | X.XX.01.01.003 Administrasi Umum | | | X.XX.01.01.003.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor | | | - | - |
| | | | | X.XX.01.01.003 Administrasi Umum | | | X.XX.01.01.003.011 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | - | - |
| | | | | X.XX.01.01.003 Administrasi Umum | | | X.XX.01.01.003.012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor | | | - | - |
| | | | | X.XX.01.01.003 Administrasi Umum | | | X.XX.01.01.003.014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | - | - |
| | | | | X.XX.01.01.003 Administrasi Umum | | | X.XX.01.01.003.015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | | - | - |
| | | | | X.XX.01.01.003 Administrasi Umum | | | X.XX.01.01.003.017 Penyediaan Makanan dan Minuman | | | - | - |
| | | | | X.XX.01.01.003 Administrasi Umum | | | X.XX.01.01.003.018 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | | | - | - |
| | | | | X.XX.01.01.003 Administrasi Umum | | | X.XX.01.01.003.022 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | | | - | - |
| | | | | X.XX.01.01.003 Administrasi Umum | | | X.XX.01.01.003.028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | | | - | - |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUBKEGIATAN | | | KET | |
|----|--|-------------------|----------------|--|-------------------|----------------|---|--|----------------|-----|---------------------|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | X.XX.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAH | tghtg | tgtgt | X.XX.01.01.004 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | X.XX.01.01.003.030 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | | | - | - |
| | | | | X.XX.01.01.001 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | X.XX.01.01.003.034 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | | | - | - |
| | | | | X.XX.01.01.002 Administrasi Keuangan | | | X.XX.01.01.004.009 Pendidikan dan Pelatihan Formal | | | - | - |
| | | | | X.XX.01.01.003 Administrasi Umum | | | X.XX.01.01.001.001 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen renja dan renstra | 2 dokumen | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.002.007 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran | Jumlah Laporan Keuangan | 1 dokumen | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah bulan pembayaran belanja telpon, air, dan listrik | 12 bulan | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | luasan ruangan yang dibersihkan | 14 ruangan | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor | jumlah alat tulis kantor yang tersedia | 50 jenis | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | jumlah barang cetakan dan penggandaan | 5 jenis | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor | jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor | 7 jenis | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan | 5 jenis | - | - |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUBKEGIATAN | | | KET | |
|----|---|-------------------|----------------|---|-------------------|----------------|--|---|----------------------|-----|---------------------|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.016 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | jumlah peringatan hari-hari besar/khusus/tertentu | 1 kali keikutsertaan | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.017 Penyediaan Makanan dan Minuman | jumlah makanan dan minuman yang tersedia | 50 kali | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.018 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | 25 kali | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.024 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | jumlah perlengkapan gedung kantor | 14 jenis | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | luas gedung/kantor yang dipelihara | 11 ruangan | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.030 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara | 23 kendaraan | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.032 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang dipelihara | 10 jenis | - | - |
| | | | | X.XX.01.01.004 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | X.XX.01.01.004.009 Pendidikan dan Pelatihan Formal | Jumlah aparatur yang dikembangkan kapasitasnya | 5 kali pelaksanaan | - | - |
| | X.XX.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAH | | | X.XX.01.01.001 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | X.XX.01.01.001.001 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Renstra dan Jumlah dokumen Renja/RKT | 3 dokumen | - | - |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUBKEGIATAN | | | KET | |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------|----------------|--|--|----------------|-----|---------------------|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | X.XX.01.01.002 Administrasi Keuangan | | | X.XX.01.01.001.002 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | Jumlah dokumen RKA/PRKA dan DPA/DPPA | 4 dokumen | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.001.003 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | Jumlah profil pelaku usaha perangkat daerah | 2 dokumen | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.001.005 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Hasil Survey Kepuasan Masyarakat dan Jumlah dokumen standar pelayanan | 4 dokumen | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.002.002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah dokumen Analisa Jabatan | 1 dokumen | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.002.004 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | Jumlah laporan barang milik daerah | 2 dokumen | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.002.006 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja | 6 dokumen | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.002.007 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran | Jumlah Laporan Keuangan | 2 dokumen | - | - |
| | | | | X.XX.01.01.003 Administrasi Umum | | | X.XX.01.01.003.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | - | - |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUBKEGIATAN | | | KET | |
|----|---------|-------------------|----------------|---|-------------------|----------------|--|---|----------------------|-----|---------------------|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | | | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor | | | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.011 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor | 11 jenis | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.016 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.017 Penyediaan Makanan dan Minuman | | | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.018 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | | | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.024 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | | | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | | | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.030 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara | 77 kendaraan | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.032 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | | | - | - |
| | | | | X.XX.01.01.004 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | X.XX.01.01.004.009 Pendidikan dan Pelatihan Formal | Jumlah Sumber Daya Aparatur yang ditingkatkan / dikembangkan kapasitasnya | 82 pweserta autobond | - | - |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUBKEGIATAN | | | | KET |
|----|--|--------------------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|----------------|---------------------|-----|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | X.XX.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAH | Meningkatnya kinerja pelayanan | 83.5 | X.XX.01.01.001 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja | 12 | X.XX.01.01.001.001 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Renja/RKT dan Renstra | 2 Dokumen | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.001.002 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | Jumlah dokumen RKA/PRKA dan DPA/DPPA | 4 dokumen | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.001.003 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | Jumlah dokumen evaluasi yang disusun | 1 dokumen | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.001.005 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Evaluasi | 7 dokumen | - | - |
| | | | | X.XX.01.01.002 Administrasi Keuangan | Jumlah dokumen capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 4 dokumen | X.XX.01.01.002.004 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | Jumlah dokumen laporan keuangan | 2 dokumen | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.002.006 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja | 4 dokumen | - | - |
| | | | | X.XX.01.01.003 Administrasi Umum | terfasilitasinya sarana dan prasarana penunjang kegiatan perkantoran | 12 bulan | X.XX.01.01.003.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah surat yang teradministrasi dengan baik | 10000 surat | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah rekening pembayaran belanja telpon, air dan listrik | 6 rekening | - | - |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUBKEGIATAN | | | KET | |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|-------------------|----------------|--|--|--------------------------|-----|---------------------|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor | 20 jenis | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional | 55 kendaraan | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Luasan Ruang yang dibersihkan | 3880 m2 | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah alat tulis kantor | 43 jenis | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 30 jenis | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.017 Penyediaan Makanan dan Minuman | Jumlah makanan dan minuman | 14.022 kotak dan 697 dos | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.018 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 32 kali | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.030 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara | 30 kendaraan | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.032 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | jumlah taman yang dipelihara | 2 lokasi | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.034 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Jumlah Peralatan gedung kantor yang dipelihara | 16 jenis | - | - |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUBKEGIATAN | | | KET | |
|----|--|----------------------|------------------------|--|--|----------------|---|--|----------------|-----|---------------------|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | X.XX.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAH | Pelayanan Pendidikan | 7 Pelayanan Pendidikan | X.XX.01.01.004 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Jumlah pelaksanaan kegiatan Peningkatan Keterampilan dan Kemampuan Teknis Aparatur | 20 orang | X.XX.01.01.004.009 Pendidikan dan Pelatihan Formal | Jumlah pelaksanaan kegiatan Peningkatan Keterampilan dan Kemampuan Teknis Aparatur | 20 orang | - | - |
| | | | | X.XX.01.01.001 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | X.XX.01.01.001.001 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Renstra dan Renja | 2 Dokumen | - | - |
| | | | | X.XX.01.01.002 Administrasi Keuangan | jumlah laporan keuangan | 2 | X.XX.01.01.001.002 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | | | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.002.002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.002.004 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | jumlah laporan keuangan | 2 | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.002.005 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | jumlah laporan tindak lanjut hasil temuan pengawasan | 3 | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.002.006 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | - | - |
| | | | | X.XX.01.01.003 Administrasi Umum | | | X.XX.01.01.003.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah surat yang teradministrasi dengan baik | 175700 | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.005 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | | | - | - |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUBKEGIATAN | | | KET | |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|-------------------|----------------|--|-----------------------|----------------|-----|---------------------|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | | | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | | | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor | | | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.011 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor | | | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan | | | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.017 Penyediaan Makanan dan Minuman | | | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.018 Rapat- Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | | | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.024 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | | | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | | | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan | | | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.030 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | | | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.034 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | | | - | - |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUBKEGIATAN | | | KET | |
|----|--|---|----------------|--|--|----------------|---|--|----------------|-----|---------------------|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | X.XX.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAH | Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah | 80 | X.XX.01.01.004 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | X.XX.01.01.004.009 Pendidikan dan Pelatihan Formal | | | - | - |
| | | | | X.XX.01.01.001 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dokumen Renja, Renstra, Profil. | 3 | X.XX.01.01.001.001 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | Dokumen Renstra dan Renja | 2 | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.001.002 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | Dokumen RKA/PRKA DPA/DPPA | 4 | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.001.003 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | Dokumen Profil Dinas Perhubungan Kota Malang Dokumen Indek | 1 | - | - |
| | | | | X.XX.01.01.002 Administrasi Keuangan | Dokumen Laporan Keuangan, Capaian Kinerja, Penatausahaan BMD | 3 | X.XX.01.01.002.006 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kepuasan Layanan Infrastruktur Dinas Perhubungan | 1 | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.002.007 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran | Dokumen laporan keuangan | 1 | - | - |
| | | | | X.XX.01.01.003 Administrasi Umum | Kegiatan | 16 | X.XX.01.01.003.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Pengadministrasian surat menyurat | 1 | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Pembayaran Telepon, air dan listrik | 12 bulan | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin | 11 Paket | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.005 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah | 25 | - | - |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUBKEGIATAN | | | KET | |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|-------------------|----------------|--|--|----------------|-----|---------------------|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan | 67 | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Honorarium PNS | 12 bulan | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih | 31 | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor | Belanja alat tulis kantor | 63 | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.011 Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan | Belanja cetak | 21 | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor | Belanja alat listrik dan elektronik | 20 | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Belanja surat kabar/majalah | 528 Paket | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.016 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Belanja jasa dekorasi/dokumentasi | 1 Paket | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.017 Penyediaan Makanan dan Minuman | Belanja Makanan dan Minuman | 3 jenis | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.018 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Belanja Perjalanan Dinas | 1 Tahun | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan | 2 | - | - |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUBKEGIATAN | | | KET | |
|----|--|-------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|----------------|-----|---------------------|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | X.XX.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAH | Nilai SAKIP | A | X.XX.01.01.004 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Pakaian kerja lapangan | 185 | X.XX.01.01.003.030 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor (Belanja Jasa Service, Belanja Penggantian Suku Cadang, Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas) kendaraan dan Genset | 68 | - | - |
| | | | | X.XX.01.01.001 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen profil perangkat daerah | 2 | X.XX.01.01.001.003 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan | Pengadaan Rompi | 185 | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.001.001 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen | 2 | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.001.002 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | Jumlah dokumen | 2 | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.001.003 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | Jumlah dokumen | 1 dokumen | - | - |
| | | | | X.XX.01.01.002 Administrasi Keuangan | Jumlah Dokumen | 1 dokumen | X.XX.01.01.002.006 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar relaisasi kineria | 1 | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.002.007 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran | Jumlah dokumen | 1 dokumen | - | - |
| | | | | X.XX.01.01.003 Administrasi Umum | Nilai kepuasan internal | 78 | X.XX.01.01.003.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah surat teradministrasi dengan baik | 1750 | - | - |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUBKEGIATAN | | | KET | |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|-------------------|----------------|--|--|----------------|-----|---------------------|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah bulan pembayaran belanja telepon, air dan listrik | 12 | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara | 27 | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Jumlah Hari Kerja untuk menjaga kebersihan 7 gedung kantor | 269 hari | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah jenis ATK | 55 Jenis | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 8 jenis | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor | 3 jenis | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 3 | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.017 Penyediaan Makanan dan Minuman | Jumlah makanan dan minuman | 5000 | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.018 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | 155 | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Jumlah Gedung | 2 | - | - |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUBKEGIATAN | | | KET | | |
|----|--|-------------------|----------------|----------|--|---|---|---|--|-----|---------------------|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | X.XX.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAH | | | | | | X.XX.01.01.003.034 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Jumlah jenis perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara | 4 | - | - | |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.038 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor | Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi | 1 gedung (sumur resapan/injeksi) | - | - | |
| | | | | | X.XX.01.01.004 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan/dikembangkan kapasitasnya | 65 | X.XX.01.01.004.009 Pendidikan dan Pelatihan Formal | Jumlah sumberdaya aparatur yang ditingkatkan/dikembangkan kapasitasnya | 2 | - | - |
| | | | | | X.XX.01.01.001 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | X.XX.01.01.001.001 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Renstra, Renja/RKT | 2 | - | - |
| | | | | | | | | X.XX.01.01.001.002 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | Jumlah dokumen RKA/PRKA dan DPA/DPPA | 4 | - | - |
| | | | | | | | | X.XX.01.01.001.005 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen hasil survei kepuasan masyarakat | 2 | - | - |
| | | | | | X.XX.01.01.002 Administrasi Keuangan | | | X.XX.01.01.002.006 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 1 | - | - |
| | | | | | | | | X.XX.01.01.002.007 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran | Jumlah laporan keuangan semesteran | 2 | - | - |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUBKEGIATAN | | | KET | |
|----|--|--|----------------|--|---|----------------|---|--|--|-----|---------------------|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | X.XX.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAH | Terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah dengan baik | 100 % | X.XX.01.01.004 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Jumlah Dokumen Perencanaan Anggaran | 7 dokumen | X.XX.01.01.003.034 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor X.XX.01.01.004.009 Pendidikan dan Pelatihan Formal | Jumlah Dokumen Renja dan Renstra | 3 dokumen | - | - |
| | | | | X.XX.01.01.001 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Kinerja dan Keuangan yang tersusun | 23 Dokumen | X.XX.01.01.001.001 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah X.XX.01.01.001.002 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | Jumlah dokumen RKA PRKA DPA DPPA | 4 dokumen | - | - |
| | | | | X.XX.01.01.002 Administrasi Keuangan | Jumlah kegiatan administrasi umum yang berjalan dengan baik | 17 kegiatan | X.XX.01.01.002.006 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD X.XX.01.01.002.007 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran | Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja | 9 Dokumen | - | - |
| | | | | X.XX.01.01.003 Administrasi Umum | | | X.XX.01.01.003.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan | 14 Dokumen | - | - |
| | | | | | | | | Jumlah Surat yang teradministrasi dengan baik; jumlah sistem informasi dan aplikasi; jumlah dokumen survey kepuasan masyarakat | 8000 Surat; 1 Sistem informasi ; 2 Dokumen | - | - |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUBKEGIATAN | | | KET | |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|-------------------|----------------|--|--|---------------------------|-----|---------------------|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah bulan pembayaran belanja Telpon, Air dan Listrik ; Jumlah informasi, publikasi dan komunikasi Jumlah | 12 bulan ; 100 kali | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | perlengkapan dan peralatan sarana dan prasarana kantor Jumlah dokumen pelaporan | 8 jenis | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.005 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | barang milik daerah ; Jumlah Petugas Pengamanan Kantor Jumlah | 1 dokumen ; 3 orang | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | kendaraan dinas/ operasional; Jumlah Pegemudi/ Sopir Dinas | 290 unit; 2 orang | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Luasan ruangan yang dibersihkan | 162 Ha/Tahu n | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah alat tulis kantor | 75 jenis | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.011 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah barang cetakan dan penggandaan | 11 Jenis | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor | 10 jenis | - | - |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUBKEGIATAN | | | KET | |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|-------------------|----------------|--|---|---------------------------|-----|---------------------|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah peralatan rumah tangga | 17 jenis | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | 200 buku | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.016 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah/ volume bbm dan pelumas | 116.000 Voucher | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.017 Penyediaan Makanan dan Minuman | Jumlah makanan dan minuman ; perkiraan kegiatan peringatan/kegiatan insidental | 47.214 Kotak ; 2 Kegiatan | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.018 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | 90 Kali | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Luasan Gedung Kantor yang dipelihara | 13.500 m2 | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.030 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara | 226 Unit | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.032 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara; Jumlah jaringan telekomunikasi | 6 Jenis ; 3 jaringan | - | - |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUBKEGIATAN | | | KET | |
|----|--|---|----------------|--|--|-----------------|---|---|--|-----|---------------------|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | X.XX.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAH | Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Penanggulangan Bencana | 75 | X.XX.01.01.004 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Jumlah ASN Dinas Lingkungan Hidup yang mendapat pelatihan dan menerima pakaian kerja | 1465 ASN | X.XX.01.01.004.003 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan | Jumlah pakaian kerja lapangan | 1400 stel | - | - |
| | | | | X.XX.01.01.001 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersusunnya dokumen perencanaan, anggaran dan evaluasi kinerja | 7 jenis dokumen | X.XX.01.01.004.009 Pendidikan dan Pelatihan Formal | Jumlah sumberdaya aparatur yang ditingkatkan/ dikembangkan kapasitasnya | 65 ASN | - | - |
| | | | | X.XX.01.01.002 Administrasi Keuangan | Persentase penyerapan anggaran BPBD | 85% | X.XX.01.01.001.001 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | Dokumen Review Renstra dan Renja | 2 jenis dokumen | - | - |
| | | | | X.XX.01.01.003 Administrasi Umum | Penyelenggaraan administrasi perkantoran | 100% | X.XX.01.01.001.003 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | Dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah | 9 jenis dokumen | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.001.004 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah | Survey IKM dan SDM Monev | 1 dokumen SKM dan 1 orang SDM Monev Penanggulangan Bencana | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.002.009 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | Jumlah laporan keuangan | 1 Dokumen | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Alat tulis kantor untuk pelaksanaan kegiatan BPBD | 1 paket | - | - |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUBKEGIATAN | | | KET | |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|-------------------|----------------|--|--|-----------------|-----|---------------------|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Biaya pembayaran telepon, internet, listrik, dan air bersih | 12 bulan | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Belanja BBM dan STNK kendaraan dinas kantor | 1 paket | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Jasa kebersihan dan keamanan kantor | 2 paket | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor | Alat-alat listrik | 5 jenis | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Peralatan kantor | 1 paket | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan | Media bacaan | 2 jenis | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.017 Penyediaan Makanan dan Minuman | Makanan dan Minuman untuk pelaksanaan kegiatan BPBD | 11.900 kotak | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.018 Rapat- Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Biaya perjalanan dinas untuk koordinasi dan menghadiri undangan | 124 kali | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Pemeliharaan kantor BPBD Sawojajar | 1 paket | - | - |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUBKEGIATAN | | | KET | |
|----|--|---|----------------|--|--|----------------|--|--|--|------------------|---------------------|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | X.XX.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAH | Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah | 80,2 | X.XX.01.01.004 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Jumlah aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya | 57 orang | X.XX.01.01.003.030 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional X.XX.01.01.003.034 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor X.XX.01.01.004.002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya X.XX.01.01.004.009 Pendidikan dan Pelatihan Formal | Belanja service kendaraan dan SDM pengemudi kendaraan operasional Biaya service peralatan kantor Pakaian dinas aparatur BPBD Pelatihan dan sertifikasi kompetensi aparatur BPBD | 1 pake dan 2 orang 1 paket 65 stel 37 orang | - - - - | - - - - |
| | | | | X.XX.01.01.001 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi yang disusun | 6 dokumen | X.XX.01.01.001.001 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah X.XX.01.01.001.003 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah X.XX.01.01.001.005 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Renja dan Renstra Jumlah dokumen profil perangkat daerah Jumlah dokumen yang disusun | 3 dokumen 1 dokumen 3 dokumen | - - - | - - - |
| | | | | X.XX.01.01.002 Administrasi Keuangan | Jumlah dokumen laporan keuangan dan laporan kinerja yang disusun | 18 dokumen | X.XX.01.01.002.004 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | Jumlah dokumen pelaporan barang milik daerah | 3 laporan | - | - |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUBKEGIATAN | | | KET | |
|----|---------|-------------------|----------------|----------------------------------|--|----------------|--|---|----------------|-----|---------------------|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | X.XX.01.01.003 Administrasi Umum | Jumlah operasional pendukung administrasi umum | 13 kegiatan | X.XX.01.01.002.006 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja | 10 dokumen | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.002.007 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran | Jumlah laporan keuangan | 5 laporan | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah bahan pustaka dan dokumen arsip | 5000 berkas | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah bulan pembayaran belanja telpon, air dan listrik | 12 bulan | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Luasan ruangan yang dibersihkan | 750 m2 | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah alat tulis kantor | 77 jenis | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.011 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah barang cetakan dan penggandaan | 27 jenis | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 10 jenis | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 120 jenis | - | - |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUBKEGIATAN | | | KET | |
|----|--|-------------------------------------|----------------|---|-------------------------------|----------------|--|---|----------------|-----|---------------------|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.016 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah perkiraan kegiatan peringatan/kegiatan insidental | 0 kali | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.017 Penyediaan Makanan dan Minuman | Jumlah makanan dan minuman | 4173 kotak | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.018 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | 26 kali | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.024 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Jumlah peralatan gedung kantor | 7 jenis | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Luasan gedung kantor yang dipelihara | 500m2 | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.030 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara | 40 unit | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.003.034 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara | 8 peralatan | - | - |
| | | | | X.XX.01.01.004 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Jumlah Aparatur yang disiplin | 100 orang | X.XX.01.01.004.005 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu | Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu | 100 stel | - | - |
| | | | | | | | X.XX.01.01.004.009 Pendidikan dan Pelatihan Formal | Jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan/dikembangkan kapasitasnya | 100 orang | - | - |
| | X.XX.0101.01 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAH | Meningkatnya Kinerja Pelayanan BKAD | Nilai Sakip 84 | X.XX.0101.01.001 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | X.XX.0101.01.001.001 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen yang tersusun | 3 dokumen | - | - |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUBKEGIATAN | | | KET | |
|----|---------|-------------------|----------------|--|-------------------|----------------|---|--|----------------|-----|---------------------|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | X.XX.0101.01.002 Administrasi Keuangan | | | X.XX.0101.01.001.005 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen yang tersusun | 2 dokumen | - | - |
| | | | | X.XX.0101.01.002 Administrasi Keuangan | | | X.XX.0101.01.002.004 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | Jumlah dokumen pelaporan Barang Milik Daerah | 12 dokumen | - | - |
| | | | | X.XX.0101.01.002 Administrasi Keuangan | | | X.XX.0101.01.002.006 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja | 8 dokumen | - | - |
| | | | | X.XX.0101.01.003 Administrasi Umum | | | X.XX.0101.01.003.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah surat yang teradministrasi dengan baik | 39000 | - | - |
| | | | | X.XX.0101.01.003 Administrasi Umum | | | X.XX.0101.01.003.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah bulan pembayaran belanja telepon, air, dan listrik | 36 bulan | - | - |
| | | | | X.XX.0101.01.003 Administrasi Umum | | | X.XX.0101.01.003.003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor | 5 jenis | - | - |
| | | | | X.XX.0101.01.003 Administrasi Umum | | | X.XX.0101.01.003.005 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | Jumlah Barang Milik Daerah yang mendapatkan jasa jaminan barang milik daerah | 8 | - | - |
| | | | | X.XX.0101.01.003 Administrasi Umum | | | X.XX.0101.01.003.006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah Kendaraan Dinas/operasional | 49 unit | - | - |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUBKEGIATAN | | | KET | |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|-------------------|----------------|--|--|----------------|-----|---------------------|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | X.XX.0101.01.003.007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Jumlah dokumen Surat Permintaan Membayar (SPM) yang diterbitkan | 360 | - | - |
| | | | | | | | X.XX.0101.01.003.008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Luasan ruangan yang dibersihkan | 750 m2 | - | - |
| | | | | | | | X.XX.0101.01.003.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah ALat Tulis Kantor | 89 jenis | - | - |
| | | | | | | | X.XX.0101.01.003.011 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan | 10 jenis | - | - |
| | | | | | | | X.XX.0101.01.003.012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 12 jenis | - | - |
| | | | | | | | X.XX.0101.01.003.015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 3 surat kabar | - | - |
| | | | | | | | X.XX.0101.01.003.016 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | jumlah perkiraan kegiatan peringatan/kegiatan insidentil | 1 kali | - | - |
| | | | | | | | X.XX.0101.01.003.017 Penyediaan Makanan dan Minuman | Jumlah Makanan dan minuman | 16000 kotak | - | - |
| | | | | | | | X.XX.0101.01.003.018 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | 120 kali | - | - |
| | | | | | | | X.XX.0101.01.003.024 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Jumlah Peralatan gedung kantor | 8 jenis | - | - |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUBKEGIATAN | | | KET | | |
|----|--|-------------------|----------------|--|-------------------|----------------|--|--|---|---------------------|---|--|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | X.XX.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAH | - | - | X.XX.0101.01.004 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | - | - | X.XX.0101.01.003.030 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional X.XX.0101.01.004.010 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan X.XX.0101.01.004.011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara Jumlah peserta sosialisasi yang diselenggarakan Jumlah peserta Bimbingan Teknis | 28 unit 150 orang 466 orang | - - - | - - - | |
| | | | | X.XX.02.01.001 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | X.XX.02.01.001.001 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah X.XX.02.01.001.002 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan X.XX.02.01.001.005 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah X.XX.02.01.002.006 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD X.XX.02.01.002.007 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran X.XX.02.01.003.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat X.XX.02.01.003.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik X.XX.02.01.003.005 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | | | | - - - - - - - | - - - - - - |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUBKEGIATAN | | | KET | |
|----|---|---|----------------|--|-------------------|----------------|--|--|----------------|-----|---------------------|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | X.XX.02.01.003.006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | | | - | - |
| | | | | | | | X.XX.02.01.003.008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | | | - | - |
| | | | | | | | X.XX.02.01.003.009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | | | - | - |
| | | | | | | | X.XX.02.01.003.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor | | | - | - |
| | | | | | | | X.XX.02.01.003.011 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | - | - |
| | | | | | | | X.XX.02.01.003.012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor | | | - | - |
| | | | | | | | X.XX.02.01.003.015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan | | | - | - |
| | | | | | | | X.XX.02.01.003.016 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | - | - |
| | | | | | | | X.XX.02.01.003.017 Penyediaan Makanan dan Minuman | | | - | - |
| | | | | | | | X.XX.02.01.003.018 Rapat- Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | | | - | - |
| | | | | | | | X.XX.02.01.003.022 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | | | - | - |
| | | | | | | | X.XX.02.01.003.028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | | | - | - |
| | | | | X.XX.02.01.004 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | X.XX.02.01.004.009 Pendidikan dan Pelatihan Formal | | | - | - |
| | X.XX.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAH | Meningkatnya Kinerja pelayanan perangkat daerah | 80,02 | X.XX.03.01.001 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | X.XX.03.01.001.001 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi | 3 dokumen | - | - |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUBKEGIATAN | | | KET | |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------|----------------|---|---|----------------|-----|---------------------|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | X.XX.03.01.002 Administrasi Keuangan | | | X.XX.03.01.001.002 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | Jumlah dokumen RKA/PRKA dan DPA/DPPA | 4 dokumen | - | - |
| | | | | | | | X.XX.03.01.001.005 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja | 2 dokumen | - | - |
| | | | | | | | X.XX.03.01.002.006 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja | 3 dokumen | - | - |
| | | | | | | | X.XX.03.01.002.007 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran | Jumlah laporan keuangan | 2 buku | - | - |
| | | | | X.XX.03.01.003 Administrasi Umum | | | X.XX.03.01.003.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah surat yang teradministrasi dengan baik | 1000 surat | - | - |
| | | | | | | | X.XX.03.01.003.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | jumlah bulan pembayaran belanja telepon, air dan listrik | 12 bulan | - | - |
| | | | | | | | X.XX.03.01.003.003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | jumlah perlengkapan gedung kantor (dan Sumur Injeksi) | 4 jenis | - | - |
| | | | | | | | X.XX.03.01.003.005 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | Jumlah petugas pengamanan kantor | 2 orang | - | - |
| | | | | | | | X.XX.03.01.003.008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | luas ruangan yang dibersihkan | 3400M | - | - |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUBKEGIATAN | | | KET | |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|-------------------|----------------|--|---|----------------|-----|---------------------|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | X.XX.03.01.003.009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara | 4 jenis | - | - |
| | | | | | | | X.XX.03.01.003.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah alat tulis kantor | 50 jenis | - | - |
| | | | | | | | X.XX.03.01.003.011 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah barang cetak dan penggandaan | 5 jenis | - | - |
| | | | | | | | X.XX.03.01.003.012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 5 jenis | - | - |
| | | | | | | | X.XX.03.01.003.015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 2 jenis | - | - |
| | | | | | | | X.XX.03.01.003.016 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah perkiraan kegiatan peringatan/kegiatan insidentil | 1 kegiatan | - | - |
| | | | | | | | X.XX.03.01.003.017 Penyediaan Makanan dan Minuman | Jumlah makanan dan minuman | 12 bulan | - | - |
| | | | | | | | X.XX.03.01.003.018 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | 12 bulan | - | - |
| | | | | | | | X.XX.03.01.003.020 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah pengadaan kendaraan dinas | 1 unit | - | - |
| | | | | | | | X.XX.03.01.003.028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Luasan gedung kantor yang dipelihara | 3400 M | - | - |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUBKEGIATAN | | | KET | |
|----|--|---|----------------|--|-------------------------|----------------|---|--|--------------------------------|-------------|---------------------|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | X.XX.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAH | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu; Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik; Nilai survey kepuasan internal | 100 | X.XX.03.01.004 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | X.XX.03.01.003.030 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional X.XX.03.01.003.038 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor X.XX.03.01.004.009 Pendidikan dan Pelatihan Formal | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara JUmlah gedung kantor yang di rehabilitasi Jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan/dikembangkan kapasitasnya | 5 unit 1 paket 130 orang | - - - | - - - |
| | | | | X.XX.03.01.001 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | X.XX.03.01.001.001 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Renstra & Renja/RKT | 3 dokumen | - | - |
| | | | | X.XX.03.01.002 Administrasi Keuangan | Jumlah laporan keuangan | 161 | X.XX.03.01.001.005 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah X.XX.03.01.002.007 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran | Jumlah laporan keuangan | 161 dokumen | - | - |
| | | | | X.XX.03.01.003 Administrasi Umum | | | X.XX.03.01.003.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat X.XX.03.01.003.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah surat yang teradministrasi dengan baik Jumlah bulan pembayaran belanja telpon, air dan listrik | 5000 surat 12 bulan | - | - |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUBKEGIATAN | | | KET | |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|-------------------|----------------|--|--|----------------|-----|---------------------|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | X.XX.03.01.003.005 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | Jumlah barang milik daerah yang mendapatkan jasa jaminan barang milik daerah | 78 | - | - |
| | | | | | | | X.XX.03.01.003.006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional | 90 | - | - |
| | | | | | | | X.XX.03.01.003.008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Luasan ruangan yang dibersihkan | 850 m2 | - | - |
| | | | | | | | X.XX.03.01.003.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah alat tulis kantor | 125 jenis | - | - |
| | | | | | | | X.XX.03.01.003.011 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah barang cetakan dan penggandaan | 44 jenis | - | - |
| | | | | | | | X.XX.03.01.003.012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 10 | - | - |
| | | | | | | | X.XX.03.01.003.015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 9 jenis | - | - |
| | | | | | | | X.XX.03.01.003.016 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah perkiraan kegiatan peringatan/kegiatan insidental | 1 kali | - | - |
| | | | | | | | X.XX.03.01.003.017 Penyediaan Makanan dan Minuman | Jumlah makanan dan minuman | 13 jenis | - | - |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUBKEGIATAN | | | KET | | |
|----|--|---|----------------|--|-------------------|----------------|--|---|----------------|-----|---------------------|--|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | X.XX.0301.01 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAH | XXX | XX | X.XX.0301.01.002 Administrasi Keuangan | XX | XX | X.XX.03.01.003.018 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah X.XX.03.01.003.024 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor X.XX.03.01.003.030 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional X.XX.03.01.003.034 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor X.XX.03.01.004.009 Pendidikan dan Pelatihan Formal | Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 50 kali Jumlah peralatan gedung kantor 7 jenis Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara 78 Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara 17 jenis Jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan/dikembangkan kapasitasnya 40 orang | | | | |
| | X.XX.0301.01 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAH | Tersusunnya dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan tepat waktu | | X.XX.0301.01.002 Administrasi Keuangan | XX | XX | X.XX.0301.01.002.006 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah dokumen Laporan Kinerja Sekretariat Daerah 1 dokumen | | | | |
| | X.XX.0303.01 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAH | | 100% | X.XX.0303.01.001 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | 2 dokumen | X.XX.0303.01.001.001 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja Setda 2 dokumen | | | | |
| | X.XX.0308.01 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAH | Program penunjang urusan pemerintahan daerah | 90,75 | X.XX.0308.01.002 Administrasi Keuangan | | 1 dokumen | X.XX.0308.01.002.009 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | Jumlah dokumen laporan keuangan dan kinerja yang disusun 1 dokumen | | | | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUBKEGIATAN | | | KET | |
|----|---------|-------------------|----------------|------------------------------------|---|----------------|---|---|----------------|-----|---------------------|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | X.XX.0308.01.003 Administrasi Umum | Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana berdasarkan RKBU | 80% | X.XX.0308.01.003.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah surat-surat kedinasan yang teradministrasi dengan baik | 14500 surat | - | - |
| | | | | | | | X.XX.0308.01.003.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah bulan pembayaran belanja telpon, air dan listrik | 12 bulan | - | - |
| | | | | | | | X.XX.0308.01.003.003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | 500 kegiatan | - | - |
| | | | | | | | X.XX.0308.01.003.006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | jumlah surat kendaraan dinas/operasional | 226 unit | - | - |
| | | | | | | | X.XX.0308.01.003.008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Luasan ruangan yang dibersihkan | 32 ruangan | - | - |
| | | | | | | | X.XX.0308.01.003.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah penyediaan alat tulis kantor | 80 jenis | - | - |
| | | | | | | | X.XX.0308.01.003.011 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah barang cetakan dan penggandaan | | - | - |
| | | | | | | | X.XX.0308.01.003.012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | | - | - |
| | | | | | | | X.XX.0308.01.003.013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | | - | - |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUBKEGIATAN | | | KET | |
|----|---------|-------------------|----------------|---|--|----------------|--|---|-------------------|-----|---------------------|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | X.XX.0308.01.003.014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah peralatan rumah tangga | | - | - |
| | | | | | | | X.XX.0308.01.003.017 Penyediaan Makanan dan Minuman | Jumlah penyediaan makanan dan minuman | 500 kegiatan | - | - |
| | | | | | | | X.XX.0308.01.003.018 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Jumlah rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah | | - | - |
| | | | | | | | X.XX.0308.01.003.021 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas | Jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas | | - | - |
| | | | | | | | X.XX.0308.01.003.026 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan | Jumlah rumah jabatan yang dipelihara | 2 rumah jabatan | - | - |
| | | | | | | | X.XX.0308.01.003.028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Jumlah gedung/bangunan kantor yang dipelihara | 4 gedung/bangunan | - | - |
| | | | | | | | X.XX.0308.01.003.029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan | Jumlah mobil jabatan yang dipelihara | 3 unit | - | - |
| | | | | | | | X.XX.0308.01.003.030 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara | | - | - |
| | | | | | | | X.XX.0308.01.003.032 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara | | - | - |
| | | | | | | | X.XX.0308.01.003.038 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor | Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi | 2 gedung/bangunan | - | - |
| | | | | X.XX.0308.01.004 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya | 7500 buah | X.XX.0308.01.004.002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya | | - | - |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUBKEGIATAN | | | KET | | | |
|----|--|---|-------------------------------------|--|-------------------|----------------|---|--|----------------|---|---|--|--|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| | X.XX.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAH | Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah | Kecamatan lowokwaru dan OPD terkait | X.XX.04.01.001 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah X.XX.04.01.002 Administrasi Keuangan X.XX.04.01.003 Administrasi Umum | | | X.XX.0308.01.004.009 Pendidikan dan Pelatihan Formal X.XX.04.01.001.001 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah X.XX.04.01.001.002 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan X.XX.04.01.001.005 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah X.XX.04.01.002.006 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD X.XX.04.01.002.007 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran X.XX.04.01.003.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat X.XX.04.01.003.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik X.XX.04.01.003.005 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah X.XX.04.01.003.008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor X.XX.04.01.003.009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja X.XX.04.01.003.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor X.XX.04.01.003.011 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan/dikembangkan kapasitasnya 100 orang | | - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - | | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUBKEGIATAN | | | KET | | |
|----|--|---|----------------|--|-------------------|----------------|---|-----------------------|----------------|-----|---------------------|--|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | | | | | | X.XX.04.01.003.012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor X.XX.04.01.003.015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan X.XX.04.01.003.016 Penyediaan Bahan Logistik Kantor X.XX.04.01.003.017 Penyediaan Makanan dan Minuman X.XX.04.01.003.018 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah X.XX.04.01.003.022 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor X.XX.04.01.003.024 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor X.XX.04.01.003.028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor X.XX.04.01.003.030 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional X.XX.04.01.003.038 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor X.XX.04.01.004.009 Pendidikan dan Pelatihan Formal | | | | | |
| | X.XX.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAH | Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah | 81 | X.XX.04.01.004 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur X.XX.05.01.001 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | X.XX.05.01.001.001 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah X.XX.05.01.001.002 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | | | | | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUBKEGIATAN | | | KET | | | |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------|----------------|---|-----------------------|----------------|-----|---------------------|--|--|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| | | | | X.XX.05.01.002 Administrasi Keuangan | | | X.XX.05.01.001.003 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah X.XX.05.01.002.006 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD X.XX.05.01.002.007 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran X.XX.05.01.003.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat X.XX.05.01.003.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik X.XX.05.01.003.008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor X.XX.05.01.003.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor X.XX.05.01.003.011 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan X.XX.05.01.003.012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor X.XX.05.01.003.015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan X.XX.05.01.003.017 Penyediaan Makanan dan Minuman X.XX.05.01.003.018 Rapat- Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah X.XX.05.01.003.028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor X.XX.05.01.003.030 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | | | | | | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUBKEGIATAN | | | KET | |
|----|---------|-------------------|----------------|--|-------------------|----------------|--|-----------------------|----------------|-----|---------------------|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | X.XX.05.01.004 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | X.XX.05.01.003.038 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor | | | - | - |



LAMPIRAN II. TABEL PLAFON ANGGARAN SEMENTARA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran Sementara | Ket |
|---|--|---------------------------|-----|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | |
| 1.01 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | 447.289.174.786,03 | |
| 1.01.2.22.0.00.02.00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 447.289.174.786,03 | |
| 1.01.2.22.0.00.02.00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 333.061.942.786,03 | |
| 1.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | 217.055.602.235,03 | |
| 1.01.01.2.01 | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 62.200.000,00 | |
| 1.01.01.2.01.01 | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | 40.000.000,00 | |
| 1.01.01.2.01.02 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | 7.200.000,00 | |
| 1.01.01.2.01.03 | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | 5.000.000,00 | |
| 1.01.01.2.01.05 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 10.000.000,00 | |
| 1.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan | 215.727.678.786,03 | |
| 1.01.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 215.605.408.786,03 | |
| 1.01.01.2.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 7.200.000,00 | |
| 1.01.01.2.02.04 | Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | 102.870.000,00 | |
| 1.01.01.2.02.05 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | 5.000.000,00 | |
| 1.01.01.2.02.06 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 7.200.000,00 | |
| 1.01.01.2.03 | Administrasi Umum | 1.203.280.000,00 | |
| 1.01.01.2.03.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 2.500.000,00 | |
| 1.01.01.2.03.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 355.000.000,00 | |
| 1.01.01.2.03.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 500.000,00 | |
| 1.01.01.2.03.05 | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | 25.000.000,00 | |
| 1.01.01.2.03.06 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | 65.000.000,00 | |
| 1.01.01.2.03.08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 75.000.000,00 | |
| 1.01.01.2.03.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 50.000.000,00 | |
| 1.01.01.2.03.11 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 10.000.000,00 | |
| 1.01.01.2.03.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 2.000.000,00 | |
| 1.01.01.2.03.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | 5.000.000,00 | |
| 1.01.01.2.03.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | 213.000.000,00 | |
| 1.01.01.2.03.18 | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 50.000.000,00 | |
| 1.01.01.2.03.19 | Pengadaan Mobil Jabatan | 35.280.000,00 | |
| 1.01.01.2.03.22 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | 164.000.000,00 | |
| 1.01.01.2.03.28 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 1.000.000,00 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran Sementara | Ket |
|---|---|---------------------------|-----|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1.01.01.2.03.29 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan | 100.000.000,00 | |
| 1.01.01.2.03.30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 20.000.000,00 | |
| 1.01.01.2.03.34 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | 30.000.000,00 | |
| 1.01.01.2.04 | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 62.443.449,00 | |
| 1.01.01.2.04.09 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | 5.243.449,00 | |
| 1.01.01.2.04.11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | 57.200.000,00 | |
| 1.01.02 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | 115.913.340.551,00 | |
| 1.01.02.2.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | 115.452.796.000,00 | |
| 1.01.02.2.01.08 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas | 12.500.000,00 | |
| 1.01.02.2.01.16 | Pengadaan Perlengkapan Sekolah | 20.000.000,00 | |
| 1.01.02.2.01.17 | Pengadaan Perlengkapan Siswa | 10.000.000,00 | |
| 1.01.02.2.01.21 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar | 114.859.476.000,00 | |
| 1.01.02.2.01.23 | Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik | 271.000.000,00 | |
| 1.01.02.2.01.24 | Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar | 7.200.000,00 | |
| 1.01.02.2.01.25 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | 52.420.000,00 | |
| 1.01.02.2.01.27 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | 117.200.000,00 | |
| 1.01.02.2.01.28 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | 103.000.000,00 | |
| 1.01.02.2.03 | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | 342.002.063,00 | |
| 1.01.02.2.03.02 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | 20.000.000,00 | |
| 1.01.02.2.03.03 | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD | 258.750.000,00 | |
| 1.01.02.2.03.13 | Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD | 16.252.063,00 | |
| 1.01.02.2.03.16 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD | 15.000.000,00 | |
| 1.01.02.2.03.17 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD | 32.000.000,00 | |
| 1.01.02.2.04 | Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | 118.542.488,00 | |
| 1.01.02.2.04.10 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan | 18.511.374,00 | |
| 1.01.02.2.04.12 | Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan | 58.031.114,00 | |
| 1.01.02.2.04.16 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan | 42.000.000,00 | |
| 1.01.03 | PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM | 63.000.000,00 | |
| 1.01.03.2.01 | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar | 21.000.000,00 | |
| 1.01.03.2.01.04 | Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar | 21.000.000,00 | |
| 1.01.03.2.02 | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal | 42.000.000,00 | |
| 1.01.03.2.02.01 | Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal | 42.000.000,00 | |
| 1.01.04 | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 30.000.000,00 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran Sementara | Ket |
|---|---|---------------------------|-----|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1.01.04.2.01 | Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | 30.000.000,00 | |
| 1.01.04.2.01.01 | Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | 30.000.000,00 | |
| 1.01.2.22.0.00.02.01 | SMP NEGERI 01 MALANG | 953.820.000,00 | |
| 1.01.02 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | 953.820.000,00 | |
| 1.01.02.2.02 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | 953.820.000,00 | |
| 1.01.02.2.02.32 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama | 953.820.000,00 | |
| 1.01.2.22.0.00.02.03 | SMP NEGERI 03 MALANG | 1.045.800.000,00 | |
| 1.01.02 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | 1.045.800.000,00 | |
| 1.01.02.2.02 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | 1.045.800.000,00 | |
| 1.01.02.2.02.32 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama | 1.045.800.000,00 | |
| 1.01.2.22.0.00.02.04 | SMP NEGERI 04 MALANG | 1.122.660.000,00 | |
| 1.01.02 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | 1.122.660.000,00 | |
| 1.01.02.2.02 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | 1.122.660.000,00 | |
| 1.01.02.2.02.32 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama | 1.122.660.000,00 | |
| 1.01.2.22.0.00.02.05 | SMP NEGERI 05 MALANG | 1.087.380.000,00 | |
| 1.01.02 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | 1.087.380.000,00 | |
| 1.01.02.2.02 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | 1.087.380.000,00 | |
| 1.01.02.2.02.32 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama | 1.087.380.000,00 | |
| 1.01.2.22.0.00.02.06 | SMP NEGERI 06 MALANG | 970.200.000,00 | |
| 1.01.02 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | 970.200.000,00 | |
| 1.01.02.2.02 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | 970.200.000,00 | |
| 1.01.02.2.02.32 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama | 970.200.000,00 | |
| 1.01.2.22.0.00.02.07 | SMP NEGERI 07 MALANG | 1.004.220.000,00 | |
| 1.01.02 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | 1.004.220.000,00 | |
| 1.01.02.2.02 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | 1.004.220.000,00 | |
| 1.01.02.2.02.32 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama | 1.004.220.000,00 | |
| 1.01.2.22.0.00.02.08 | SMP NEGERI 08 MALANG | 999.180.000,00 | |
| 1.01.02 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | 999.180.000,00 | |
| 1.01.02.2.02 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | 999.180.000,00 | |
| 1.01.02.2.02.32 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama | 999.180.000,00 | |
| 1.01.2.22.0.00.02.09 | SMP NEGERI 09 MALANG | 1.000.440.000,00 | |
| 1.01.02 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | 1.000.440.000,00 | |
| 1.01.02.2.02 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | 1.000.440.000,00 | |
| 1.01.02.2.02.32 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama | 1.000.440.000,00 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran Sementara | Ket |
|---|--|---------------------------|-----|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1.01.2.22.0.00.02.10 | SMP NEGERI 10 MALANG | 1.137.780.000,00 | |
| 1.01.02 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | 1.137.780.000,00 | |
| 1.01.02.2.02 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | 1.137.780.000,00 | |
| 1.01.02.2.02.32 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama | 1.137.780.000,00 | |
| 1.01.2.22.0.00.02.11 | SMP NEGERI 11 MALANG | 987.840.000,00 | |
| 1.01.02 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | 987.840.000,00 | |
| 1.01.02.2.02 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | 987.840.000,00 | |
| 1.01.02.2.02.32 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama | 987.840.000,00 | |
| 1.01.2.22.0.00.02.12 | SMP NEGERI 12 MALANG | 908.460.000,00 | |
| 1.01.02 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | 908.460.000,00 | |
| 1.01.02.2.02 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | 908.460.000,00 | |
| 1.01.02.2.02.32 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama | 908.460.000,00 | |
| 1.01.2.22.0.00.02.13 | SMP NEGERI 13 MALANG | 1.025.640.000,00 | |
| 1.01.02 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | 1.025.640.000,00 | |
| 1.01.02.2.02 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | 1.025.640.000,00 | |
| 1.01.02.2.02.32 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama | 1.025.640.000,00 | |
| 1.01.2.22.0.00.02.14 | SMP NEGERI 14 MALANG | 1.014.300.000,00 | |
| 1.01.02 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | 1.014.300.000,00 | |
| 1.01.02.2.02 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | 1.014.300.000,00 | |
| 1.01.02.2.02.32 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama | 1.014.300.000,00 | |
| 1.01.2.22.0.00.02.15 | SMP NEGERI 15 MALANG | 1.079.820.000,00 | |
| 1.01.02 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | 1.079.820.000,00 | |
| 1.01.02.2.02 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | 1.079.820.000,00 | |
| 1.01.02.2.02.32 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama | 1.079.820.000,00 | |
| 1.01.2.22.0.00.02.16 | SMP NEGERI 16 MALANG | 971.460.000,00 | |
| 1.01.02 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | 971.460.000,00 | |
| 1.01.02.2.02 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | 971.460.000,00 | |
| 1.01.02.2.02.32 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama | 971.460.000,00 | |
| 1.01.2.22.0.00.02.17 | SMP NEGERI 17 MALANG | 1.110.060.000,00 | |
| 1.01.02 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | 1.110.060.000,00 | |
| 1.01.02.2.02 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | 1.110.060.000,00 | |
| 1.01.02.2.02.32 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama | 1.110.060.000,00 | |
| 1.01.2.22.0.00.02.18 | SMP NEGERI 18 MALANG | 1.055.880.000,00 | |
| 1.01.02 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | 1.055.880.000,00 | |
| 1.01.02.2.02 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | 1.055.880.000,00 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran Sementara | Ket |
|---|--|---------------------------|-----|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1.01.02.2.02.32 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama | 1.055.880.000,00 | |
| 1.01.2.22.0.00.02.19 | SMP NEGERI 19 MALANG | 1.140.300.000,00 | |
| 1.01.02 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | 1.140.300.000,00 | |
| 1.01.02.2.02 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | 1.140.300.000,00 | |
| 1.01.02.2.02.32 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama | 1.140.300.000,00 | |
| 1.01.2.22.0.00.02.20 | SMP NEGERI 20 MALANG | 1.096.200.000,00 | |
| 1.01.02 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | 1.096.200.000,00 | |
| 1.01.02.2.02 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | 1.096.200.000,00 | |
| 1.01.02.2.02.32 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama | 1.096.200.000,00 | |
| 1.01.2.22.0.00.02.21 | SMP NEGERI 21 MALANG | 1.029.420.000,00 | |
| 1.01.02 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | 1.029.420.000,00 | |
| 1.01.02.2.02 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | 1.029.420.000,00 | |
| 1.01.02.2.02.32 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama | 1.029.420.000,00 | |
| 1.01.2.22.0.00.02.22 | SMP NEGERI 22 MALANG | 782.460.000,00 | |
| 1.01.02 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | 782.460.000,00 | |
| 1.01.02.2.02 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | 782.460.000,00 | |
| 1.01.02.2.02.32 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama | 782.460.000,00 | |
| 1.01.2.22.0.00.02.23 | SMP NEGERI 23 MALANG | 873.180.000,00 | |
| 1.01.02 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | 873.180.000,00 | |
| 1.01.02.2.02 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | 873.180.000,00 | |
| 1.01.02.2.02.32 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama | 873.180.000,00 | |
| 1.01.2.22.0.00.02.24 | SMP NEGERI 24 MALANG | 865.620.000,00 | |
| 1.01.02 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | 865.620.000,00 | |
| 1.01.02.2.02 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | 865.620.000,00 | |
| 1.01.02.2.02.32 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama | 865.620.000,00 | |
| 1.01.2.22.0.00.02.25 | SMP NEGERI SATU ATAP MERJOSARI | 483.840.000,00 | |
| 1.01.02 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | 483.840.000,00 | |
| 1.01.02.2.02 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | 483.840.000,00 | |
| 1.01.02.2.02.32 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama | 483.840.000,00 | |
| 1.01.2.22.0.00.02.26 | SMP NEGERI 26 MALANG | 737.100.000,00 | |
| 1.01.02 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | 737.100.000,00 | |
| 1.01.02.2.02 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | 737.100.000,00 | |
| 1.01.02.2.02.32 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama | 737.100.000,00 | |
| 1.01.2.22.0.00.02.27 | SMP NEGERI 27 MALANG | 529.200.000,00 | |
| 1.01.02 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | 529.200.000,00 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran Sementara | Ket |
|---|--|---------------------------|-----|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1.01.02.2.02 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | 529.200.000,00 | |
| 1.01.02.2.02.32 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama | 529.200.000,00 | |
| 1.01.2.22.0.00.02.28 | SMP NEGERI 02 MALANG | 1.372.140.000,00 | |
| 1.01.02 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | 1.372.140.000,00 | |
| 1.01.02.2.02 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | 1.372.140.000,00 | |
| 1.01.02.2.02.32 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama | 1.372.140.000,00 | |
| 1.02 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | 262.793.401.693,16 | |
| 1.02.0.00.0.00.01.00 | DINAS KESEHATAN | 262.793.401.693,16 | |
| 1.02.0.00.0.00.01.00 | DINAS KESEHATAN | 203.222.206.443,16 | |
| 1.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | 84.681.543.143,16 | |
| 1.02.01.2.01 | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 53.750.000,00 | |
| 1.02.01.2.01.01 | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | 53.750.000,00 | |
| 1.02.01.2.02 | Administrasi Keuangan | 80.455.609.693,16 | |
| 1.02.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 79.883.649.693,16 | |
| 1.02.01.2.02.04 | Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | 293.000.000,00 | |
| 1.02.01.2.02.07 | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran | 278.960.000,00 | |
| 1.02.01.2.03 | Administrasi Umum | 4.051.763.450,00 | |
| 1.02.01.2.03.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 330.000.000,00 | |
| 1.02.01.2.03.05 | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | 15.000.000,00 | |
| 1.02.01.2.03.06 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | 66.000.000,00 | |
| 1.02.01.2.03.08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 419.710.000,00 | |
| 1.02.01.2.03.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 337.928.400,00 | |
| 1.02.01.2.03.11 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 468.906.050,00 | |
| 1.02.01.2.03.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 23.000.000,00 | |
| 1.02.01.2.03.14 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 28.684.000,00 | |
| 1.02.01.2.03.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | 5.000.000,00 | |
| 1.02.01.2.03.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | 449.249.000,00 | |
| 1.02.01.2.03.18 | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 1.147.782.000,00 | |
| 1.02.01.2.03.22 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | 30.900.000,00 | |
| 1.02.01.2.03.28 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 299.700.000,00 | |
| 1.02.01.2.03.30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 351.404.000,00 | |
| 1.02.01.2.03.34 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | 78.500.000,00 | |
| 1.02.01.2.04 | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 120.420.000,00 | |
| 1.02.01.2.04.09 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | 120.420.000,00 | |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 117.592.433.300,00 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran Sementara | Ket |
|---|--|---------------------------|-----|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1.02.02.2.01 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota | 2.503.968.000,00 | |
| 1.02.02.2.01.16 | Pengadaan Obat, Vaksin | 2.033.033.000,00 | |
| 1.02.02.2.01.20 | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | 470.935.000,00 | |
| 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 114.711.097.300,00 | |
| 1.02.02.2.02.01 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 185.190.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.02 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | 39.390.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.03 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | 22.995.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.04 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | 66.250.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.06 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | 107.320.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.07 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | 87.995.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.08 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | 121.560.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.09 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | 113.770.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.11 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | 210.950.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.12 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV | 181.110.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.15 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 9.292.702.300,00 | |
| 1.02.02.2.02.16 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | 203.895.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.17 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 101.260.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.18 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 182.580.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.19 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya | 33.540.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.22 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | 129.380.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.24 | Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan | 1.427.980.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.25 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 284.240.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.26 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | 100.976.120.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.29 | Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat | 50.760.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.34 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 650.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.35 | Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota | 22.280.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.37 | Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah | 219.830.000,00 | |
| 1.02.02.2.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi | 68.876.000,00 | |
| 1.02.02.2.03.01 | Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan | 68.876.000,00 | |
| 1.02.02.2.04 | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 308.492.000,00 | |
| 1.02.02.2.04.01 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C dan D | 177.582.000,00 | |
| 1.02.02.2.04.02 | Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 130.910.000,00 | |
| 1.02.03 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | 408.420.000,00 | |
| 1.02.03.2.02 | Pembinaan Teknis, Pengawasan Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota | 100.380.000,00 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran Sementara | Ket |
|---|---|---------------------------|-----|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1.02.03.2.02.03 | Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan | 100.380.000,00 | |
| 1.02.03.2.05 | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 308.040.000,00 | |
| 1.02.03.2.05.01 | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | 308.040.000,00 | |
| 1.02.04 | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | 423.230.000,00 | |
| 1.02.04.2.01 | Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | 182.080.000,00 | |
| 1.02.04.2.01.01 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | 182.080.000,00 | |
| 1.02.04.2.03 | Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | 241.150.000,00 | |
| 1.02.04.2.03.01 | Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | 241.150.000,00 | |
| 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 116.580.000,00 | |
| 1.02.05.2.01 | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota | 18.200.000,00 | |
| 1.02.05.2.01.01 | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | 18.200.000,00 | |
| 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 98.380.000,00 | |
| 1.02.05.2.03.01 | Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 98.380.000,00 | |
| 1.02.0.00.0.00.01.02 | Rumah Sakit Umum Daerah | 31.628.708.000,00 | |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 31.628.708.000,00 | |
| 1.02.02.2.01 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota | 6.250.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.01.13 | Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan | 6.250.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 23.971.300.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.32 | Operasional Pelayanan Rumah Sakit | 23.971.300.000,00 | |
| 1.02.02.2.04 | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota | 1.407.408.000,00 | |
| 1.02.02.2.04.02 | Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 1.407.408.000,00 | |
| 1.02.0.00.0.00.01.03 | Puskesmas Janti | 2.268.000.000,00 | |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 2.268.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 2.268.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | 2.268.000.000,00 | |
| 1.02.0.00.0.00.01.04 | Puskesmas Dinoyo | 2.376.000.000,00 | |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 2.376.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 2.376.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | 2.376.000.000,00 | |
| 1.02.0.00.0.00.01.05 | Puskesmas Mojolangu | 1.194.299.000,00 | |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 1.194.299.000,00 | |
| 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 1.194.299.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | 1.194.299.000,00 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran Sementara | Ket |
|---|--|---------------------------|-----|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1.02.0.00.0.00.01.06 | Puskesmas Kendalsari | 1.927.148.900,00 | |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 1.927.148.900,00 | |
| 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 1.927.148.900,00 | |
| 1.02.02.2.02.33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | 1.927.148.900,00 | |
| 1.02.0.00.0.00.01.07 | Puskesmas Arjuno | 1.340.000.000,00 | |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 1.340.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 1.340.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | 1.340.000.000,00 | |
| 1.02.0.00.0.00.01.08 | Puskesmas Rampal Celaket | 1.007.124.000,00 | |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 1.007.124.000,00 | |
| 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 1.007.124.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | 1.007.124.000,00 | |
| 1.02.0.00.0.00.01.09 | Puskesmas Bareng | 1.292.716.000,00 | |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 1.292.716.000,00 | |
| 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 1.292.716.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | 1.292.716.000,00 | |
| 1.02.0.00.0.00.01.10 | Puskesmas Kedungkandang | 2.591.000.000,00 | |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 2.591.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 2.591.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | 2.591.000.000,00 | |
| 1.02.0.00.0.00.01.11 | Puskesmas Gribig | 1.222.669.800,00 | |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 1.222.669.800,00 | |
| 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 1.222.669.800,00 | |
| 1.02.02.2.02.33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | 1.222.669.800,00 | |
| 1.02.0.00.0.00.01.12 | Puskesmas Arjowinangun | 1.937.120.900,00 | |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 1.937.120.900,00 | |
| 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 1.937.120.900,00 | |
| 1.02.02.2.02.33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | 1.937.120.900,00 | |
| 1.02.0.00.0.00.01.13 | Puskesmas Mulyorejo | 1.847.349.000,00 | |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 1.847.349.000,00 | |
| 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 1.847.349.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | 1.847.349.000,00 | |
| 1.02.0.00.0.00.01.14 | Puskesmas Ciptomulyo | 1.589.662.000,00 | |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 1.589.662.000,00 | |
| 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 1.589.662.000,00 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran Sementara | Ket |
|---|---|---------------------------|-----|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1.02.02.2.02.33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | 1.589.662.000,00 | |
| 1.02.0.00.0.00.01.15 | Puskesmas Kedalkerep | 2.102.138.100,00 | |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 2.102.138.100,00 | |
| 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 2.102.138.100,00 | |
| 1.02.02.2.02.33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | 2.102.138.100,00 | |
| 1.02.0.00.0.00.01.16 | Puskesmas Pandanwangi | 1.682.111.550,00 | |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 1.682.111.550,00 | |
| 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 1.682.111.550,00 | |
| 1.02.02.2.02.33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | 1.682.111.550,00 | |
| 1.02.0.00.0.00.01.17 | Puskesmas Polowijen | 1.573.000.000,00 | |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 1.573.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 1.573.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | 1.573.000.000,00 | |
| 1.02.0.00.0.00.01.18 | Puskesmas Cisadea | 1.192.148.000,00 | |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 1.192.148.000,00 | |
| 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 1.192.148.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | 1.192.148.000,00 | |
| 1.03 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 218.559.111.822,10 | |
| 1.03.1.04.2.10.10.00 | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman | 218.559.111.822,10 | |
| 1.03.1.04.2.10.10.00 | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman | 218.559.111.822,10 | |
| 1.03.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | 37.381.681.022,10 | |
| 1.03.01.2.01 | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 837.261.000,00 | |
| 1.03.01.2.01.01 | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | 257.950.000,00 | |
| 1.03.01.2.01.02 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | 69.760.000,00 | |
| 1.03.01.2.01.03 | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | 99.810.000,00 | |
| 1.03.01.2.01.05 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 409.741.000,00 | |
| 1.03.01.2.02 | Administrasi Keuangan | 28.637.836.822,10 | |
| 1.03.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 27.833.346.822,10 | |
| 1.03.01.2.02.04 | Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | 156.060.000,00 | |
| 1.03.01.2.02.06 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 248.430.000,00 | |
| 1.03.01.2.02.07 | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran | 400.000.000,00 | |
| 1.03.01.2.03 | Administrasi Umum | 7.656.883.200,00 | |
| 1.03.01.2.03.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 550.000.000,00 | |
| 1.03.01.2.03.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 1.423.290.000,00 | |
| 1.03.01.2.03.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 684.370.000,00 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran Sementara | Ket |
|---|--|---------------------------|-----|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1.03.01.2.03.06 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | 243.450.000,00 | |
| 1.03.01.2.03.08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 484.293.200,00 | |
| 1.03.01.2.03.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 198.000.000,00 | |
| 1.03.01.2.03.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 117.150.000,00 | |
| 1.03.01.2.03.16 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 25.000.000,00 | |
| 1.03.01.2.03.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | 418.400.000,00 | |
| 1.03.01.2.03.18 | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 546.260.000,00 | |
| 1.03.01.2.03.28 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 490.000.000,00 | |
| 1.03.01.2.03.30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 1.174.900.000,00 | |
| 1.03.01.2.03.34 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | 1.301.770.000,00 | |
| 1.03.01.2.04 | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 249.700.000,00 | |
| 1.03.01.2.04.09 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | 249.700.000,00 | |
| 1.03.02 | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | 2.944.080.000,00 | |
| 1.03.02.2.02 | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 2.944.080.000,00 | |
| 1.03.02.2.02.21 | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | 2.944.080.000,00 | |
| 1.03.03 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | 6.003.830.000,00 | |
| 1.03.03.2.01 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | 6.003.830.000,00 | |
| 1.03.03.2.01.01 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM | 208.080.000,00 | |
| 1.03.03.2.01.05 | Peningkatan SPAM di Kawasan Perkotaan | 3.548.700.000,00 | |
| 1.03.03.2.01.14 | Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM | 2.247.050.000,00 | |
| 1.03.05 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | 12.978.520.000,00 | |
| 1.03.05.2.01 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | 12.978.520.000,00 | |
| 1.03.05.2.01.01 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | 166.460.000,00 | |
| 1.03.05.2.01.03 | Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik | 6.052.390.000,00 | |
| 1.03.05.2.01.04 | Rehabilitasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik | 1.123.650.000,00 | |
| 1.03.05.2.01.05 | Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik | 1.392.580.000,00 | |
| 1.03.05.2.01.06 | Penyediaan Sarana Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik | 2.454.180.000,00 | |
| 1.03.05.2.01.08 | Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Rangka Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik | 200.000.000,00 | |
| 1.03.05.2.01.09 | Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik | 200.000.000,00 | |
| 1.03.05.2.01.10 | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik | 1.389.260.000,00 | |
| 1.03.06 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | 20.904.230.000,00 | |
| 1.03.06.2.01 | Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota | 20.904.230.000,00 | |
| 1.03.06.2.01.01 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan | 691.040.000,00 | |
| 1.03.06.2.01.05 | Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan | 4.411.370.000,00 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran Sementara | Ket |
|---|--|---------------------------|-----|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1.03.06.2.01.06 | Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan dan Lingkungan | 7.947.890.000,00 | |
| 1.03.06.2.01.07 | Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan dan Lingkungan | 7.853.930.000,00 | |
| 1.03.07 | PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN | 6.042.530.000,00 | |
| 1.03.07.2.01 | Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Daerah Kabupaten/Kota | 6.042.530.000,00 | |
| 1.03.07.2.01.01 | Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota | 2.805.610.000,00 | |
| 1.03.07.2.01.02 | Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota | 3.236.920.000,00 | |
| 1.03.08 | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | 11.146.525.000,00 | |
| 1.03.08.2.01 | Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | 11.146.525.000,00 | |
| 1.03.08.2.01.01 | Penyelenggaraan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG | 422.056.000,00 | |
| 1.03.08.2.01.02 | Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan, Rehabilitasi, Renovasi, Ubahsuai, serta Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota | 10.514.469.000,00 | |
| 1.03.08.2.01.05 | Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara daerah Kabupaten/Kota | 210.000.000,00 | |
| 1.03.09 | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA | 1.216.680.000,00 | |
| 1.03.09.2.01 | Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota | 1.216.680.000,00 | |
| 1.03.09.2.01.01 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota | 709.730.000,00 | |
| 1.03.09.2.01.03 | Penataan Bangunan dan Lingkungan | 506.950.000,00 | |
| 1.03.10 | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | 116.849.124.000,00 | |
| 1.03.10.2.01 | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | 116.849.124.000,00 | |
| 1.03.10.2.01.01 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengembangan Jalan | 1.055.960.000,00 | |
| 1.03.10.2.01.05 | Pembangunan Jalan | 46.146.507.000,00 | |
| 1.03.10.2.01.09 | Rehabilitasi Jalan | 17.995.497.000,00 | |
| 1.03.10.2.01.10 | Pemeliharaan Berkala Jalan | 567.640.000,00 | |
| 1.03.10.2.01.11 | Pemeliharaan Rutin Jalan | 44.434.860.000,00 | |
| 1.03.10.2.01.18 | Rehabilitasi Jembatan | 3.000.000.000,00 | |
| 1.03.10.2.01.19 | Pemeliharaan Rutin Jembatan | 2.148.660.000,00 | |
| 1.03.10.2.01.20 | Pemeliharaan Berkala Jembatan | 1.500.000.000,00 | |
| 1.03.11 | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | 914.445.000,00 | |
| 1.03.11.2.01 | Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi | 342.335.000,00 | |
| 1.03.11.2.01.04 | Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi | 342.335.000,00 | |
| 1.03.11.2.02 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | 436.270.000,00 | |
| 1.03.11.2.02.01 | Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi | 186.270.000,00 | |
| 1.03.11.2.02.02 | Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi | 250.000.000,00 | |
| 1.03.11.2.04 | Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi | 135.840.000,00 | |
| 1.03.11.2.04.02 | Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi | 135.840.000,00 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran Sementara | Ket |
|---|--|---------------------------|-----|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1.03.12 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | 2.177.466.800,00 | |
| 1.03.12.2.01 | Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota | 120.000.000,00 | |
| 1.03.12.2.01.02 | Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota | 120.000.000,00 | |
| 1.03.12.2.02 | Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota | 750.526.800,00 | |
| 1.03.12.2.02.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota | 542.930.000,00 | |
| 1.03.12.2.02.03 | Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang | 207.596.800,00 | |
| 1.03.12.2.03 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | 647.510.000,00 | |
| 1.03.12.2.03.01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah | 150.000.000,00 | |
| 1.03.12.2.03.02 | Sistem Informasi Penataan Ruang | 497.510.000,00 | |
| 1.03.12.2.04 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | 659.430.000,00 | |
| 1.03.12.2.04.04 | Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang | 659.430.000,00 | |
| 1.04 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 6.399.420.000,00 | |
| 1.03.1.04.2.10.10.00 | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman | 6.399.420.000,00 | |
| 1.03.1.04.2.10.10.00 | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman | 6.399.420.000,00 | |
| 1.04.02 | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | 2.812.600.000,00 | |
| 1.04.02.2.05 | Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus | 2.812.600.000,00 | |
| 1.04.02.2.05.01 | Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun | 2.812.600.000,00 | |
| 1.04.03 | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERMUKIMAN KUMUH | 2.808.590.000,00 | |
| 1.04.03.2.01 | Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman | 2.808.590.000,00 | |
| 1.04.03.2.01.02 | Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh | 156.700.000,00 | |
| 1.04.03.2.01.03 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh | 2.651.890.000,00 | |
| 1.04.04 | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | 778.230.000,00 | |
| 1.04.04.2.01 | Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan | 778.230.000,00 | |
| 1.04.04.2.01.02 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | 778.230.000,00 | |
| 1.05 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | 37.830.797.811,70 | |
| 1.05.0.00.0.00.01.00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 28.553.756.727,58 | |
| 1.05.0.00.0.00.01.00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 28.553.756.727,58 | |
| 1.05.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | 19.446.211.727,58 | |
| 1.05.01.2.01 | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 78.600.000,00 | |
| 1.05.01.2.01.01 | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | 57.100.000,00 | |
| 1.05.01.2.01.02 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | 1.500.000,00 | |
| 1.05.01.2.01.03 | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | 15.000.000,00 | |
| 1.05.01.2.01.05 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 5.000.000,00 | |
| 1.05.01.2.02 | Administrasi Keuangan | 16.515.452.727,58 | |
| 1.05.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 16.395.472.727,58 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran Sementara | Ket |
|---|--|---------------------------|-----|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1.05.01.2.02.06 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 40.000.000,00 | |
| 1.05.01.2.02.07 | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran | 79.980.000,00 | |
| 1.05.01.2.03 | Administrasi Umum | 2.199.696.600,00 | |
| 1.05.01.2.03.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 186.696.600,00 | |
| 1.05.01.2.03.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 20.000.000,00 | |
| 1.05.01.2.03.08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 35.000.000,00 | |
| 1.05.01.2.03.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 125.000.000,00 | |
| 1.05.01.2.03.11 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 100.000.000,00 | |
| 1.05.01.2.03.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 5.000.000,00 | |
| 1.05.01.2.03.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | 8.000.000,00 | |
| 1.05.01.2.03.16 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 25.000.000,00 | |
| 1.05.01.2.03.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | 195.000.000,00 | |
| 1.05.01.2.03.18 | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 300.000.000,00 | |
| 1.05.01.2.03.20 | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | 100.000.000,00 | |
| 1.05.01.2.03.22 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | 100.000.000,00 | |
| 1.05.01.2.03.28 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 100.000.000,00 | |
| 1.05.01.2.03.30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 900.000.000,00 | |
| 1.05.01.2.04 | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 652.462.400,00 | |
| 1.05.01.2.04.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | 432.462.400,00 | |
| 1.05.01.2.04.09 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | 220.000.000,00 | |
| 1.05.02 | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 7.811.720.000,00 | |
| 1.05.02.2.01 | Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 7.118.640.000,00 | |
| 1.05.02.2.01.01 | Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 3.268.640.000,00 | |
| 1.05.02.2.01.04 | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 350.000.000,00 | |
| 1.05.02.2.01.05 | Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia | 3.500.000.000,00 | |
| 1.05.02.2.02 | Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota | 693.080.000,00 | |
| 1.05.02.2.02.01 | Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota | 562.760.000,00 | |
| 1.05.02.2.02.03 | Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota | 130.320.000,00 | |
| 1.05.04 | PROGRAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN | 1.295.825.000,00 | |
| 1.05.04.2.01 | Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | 1.245.825.000,00 | |
| 1.05.04.2.01.01 | Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | 250.000.000,00 | |
| 1.05.04.2.01.02 | Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | 995.825.000,00 | |
| 1.05.04.2.04 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran | 50.000.000,00 | |
| 1.05.04.2.04.01 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat | 50.000.000,00 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran Sementara | Ket |
|---|---|---------------------------|-----|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1.05.0.00.0.00.04.00 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 9.277.041.084,12 | |
| 1.05.0.00.0.00.04.00 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 9.277.041.084,12 | |
| 1.05.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | 6.277.041.084,12 | |
| 1.05.01.2.01 | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 185.755.000,00 | |
| 1.05.01.2.01.01 | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | 103.755.000,00 | |
| 1.05.01.2.01.05 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 82.000.000,00 | |
| 1.05.01.2.02 | Administrasi Keuangan | 4.470.559.084,12 | |
| 1.05.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 4.211.409.084,12 | |
| 1.05.01.2.02.04 | Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | 132.340.000,00 | |
| 1.05.01.2.02.06 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 61.700.000,00 | |
| 1.05.01.2.02.09 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | 65.110.000,00 | |
| 1.05.01.2.03 | Administrasi Umum | 1.438.527.000,00 | |
| 1.05.01.2.03.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 159.627.000,00 | |
| 1.05.01.2.03.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 72.000.000,00 | |
| 1.05.01.2.03.06 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | 122.800.000,00 | |
| 1.05.01.2.03.08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 195.000.000,00 | |
| 1.05.01.2.03.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 5.000.000,00 | |
| 1.05.01.2.03.13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 15.550.000,00 | |
| 1.05.01.2.03.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | 6.000.000,00 | |
| 1.05.01.2.03.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | 307.450.000,00 | |
| 1.05.01.2.03.18 | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 272.800.000,00 | |
| 1.05.01.2.03.20 | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | 190.500.000,00 | |
| 1.05.01.2.03.28 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 81.300.000,00 | |
| 1.05.01.2.03.34 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | 10.500.000,00 | |
| 1.05.01.2.04 | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 182.200.000,00 | |
| 1.05.01.2.04.09 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | 182.200.000,00 | |
| 1.05.03 | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | 3.000.000.000,00 | |
| 1.05.03.2.01 | Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota | 544.935.000,00 | |
| 1.05.03.2.01.01 | Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota | 427.400.000,00 | |
| 1.05.03.2.01.02 | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) | 117.535.000,00 | |
| 1.05.03.2.02 | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | 1.514.835.000,00 | |
| 1.05.03.2.02.02 | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota | 693.270.000,00 | |
| 1.05.03.2.02.03 | Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota | 321.565.000,00 | |
| 1.05.03.2.02.07 | Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota | 500.000.000,00 | |
| 1.05.03.2.03 | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | 866.980.000,00 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran Sementara | Ket |
|---|--|---------------------------|-----|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1.05.03.2.03.02 | Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota | 102.650.000,00 | |
| 1.05.03.2.03.03 | Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | 591.000.000,00 | |
| 1.05.03.2.03.04 | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | 173.330.000,00 | |
| 1.05.03.2.04 | Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana | 73.250.000,00 | |
| 1.05.03.2.04.03 | Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota | 73.250.000,00 | |
| 1.06 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | 49.797.310.619,67 | |
| 1.06.2.08.2.14.06.00 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 49.797.310.619,67 | |
| 1.06.2.08.2.14.06.00 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 49.797.310.619,67 | |
| 1.06.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | 30.569.756.319,67 | |
| 1.06.01.2.01 | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 143.000.000,00 | |
| 1.06.01.2.01.01 | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | 135.000.000,00 | |
| 1.06.01.2.01.02 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | 5.000.000,00 | |
| 1.06.01.2.01.05 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 3.000.000,00 | |
| 1.06.01.2.02 | Administrasi Keuangan | 21.679.891.119,67 | |
| 1.06.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 21.594.555.119,67 | |
| 1.06.01.2.02.06 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4.000.000,00 | |
| 1.06.01.2.02.07 | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran | 81.336.000,00 | |
| 1.06.01.2.03 | Administrasi Umum | 8.496.865.200,00 | |
| 1.06.01.2.03.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 121.100.000,00 | |
| 1.06.01.2.03.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 338.040.000,00 | |
| 1.06.01.2.03.05 | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | 557.290.000,00 | |
| 1.06.01.2.03.06 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | 305.860.000,00 | |
| 1.06.01.2.03.08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 542.170.000,00 | |
| 1.06.01.2.03.09 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | 70.000.000,00 | |
| 1.06.01.2.03.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 193.278.700,00 | |
| 1.06.01.2.03.11 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 33.215.000,00 | |
| 1.06.01.2.03.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 36.510.000,00 | |
| 1.06.01.2.03.13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 99.800.000,00 | |
| 1.06.01.2.03.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | 8.000.000,00 | |
| 1.06.01.2.03.16 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 33.000.000,00 | |
| 1.06.01.2.03.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | 4.156.449.500,00 | |
| 1.06.01.2.03.18 | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 680.000.000,00 | |
| 1.06.01.2.03.28 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 486.300.000,00 | |
| 1.06.01.2.03.30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 835.852.000,00 | |
| 1.06.01.2.04 | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 250.000.000,00 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran Sementara | Ket |
|---|---|---------------------------|-----|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1.06.01.2.04.09 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | 250.000.000,00 | |
| 1.06.02 | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | 1.494.764.400,00 | |
| 1.06.02.2.03 | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota | 1.494.764.400,00 | |
| 1.06.02.2.03.04 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | 1.025.000.000,00 | |
| 1.06.02.2.03.05 | Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) | 469.764.400,00 | |
| 1.06.04 | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | 11.049.692.000,00 | |
| 1.06.04.2.01 | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | 235.190.000,00 | |
| 1.06.04.2.01.04 | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | 25.500.000,00 | |
| 1.06.04.2.01.05 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | 209.690.000,00 | |
| 1.06.04.2.02 | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial | 14.640.102.000,00 | |
| 1.06.04.2.02.02 | Pemberian Layanan Kedaruratan | 607.500.000,00 | |
| 1.06.04.2.02.03 | Penyediaan Pemakanan | 9.131.760.000,00 | |
| 1.06.04.2.02.07 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | 376.492.000,00 | |
| 1.06.04.2.02.08 | Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | 618.270.000,00 | |
| 1.06.04.2.02.10 | Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | 3.825.600.000,00 | |
| 1.06.04.2.02.14 | Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota | 80.480.000,00 | |
| 1.06.05 | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | 1.458.100.000,00 | |
| 1.06.05.2.02 | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | 1.458.100.000,00 | |
| 1.06.05.2.02.01 | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | 1.108.100.000,00 | |
| 1.06.05.2.02.02 | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | 350.000.000,00 | |
| 1.06.06 | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | 268.577.900,00 | |
| 1.06.06.2.01 | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota | 99.567.900,00 | |
| 1.06.06.2.01.01 | Penyediaan Makanan | 99.567.900,00 | |
| 1.06.06.2.02 | Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota | 169.010.000,00 | |
| 1.06.06.2.02.02 | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana | 169.010.000,00 | |
| 1.06.07 | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN | 655.820.000,00 | |
| 1.06.07.2.01 | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | 655.820.000,00 | |
| 1.06.07.2.01.01 | Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | 255.820.000,00 | |
| 1.06.07.2.01.02 | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | 400.000.000,00 | |
| 2 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | |
| 2.07 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA | 16.972.245.225,82 | |
| 2.07.2.18.0.00.02.00 | Dinas Tenaga Kerja dan Penanaman Modal | 16.972.245.225,82 | |
| 2.07.2.18.0.00.02.00 | Dinas Tenaga Kerja dan Penanaman Modal | 16.972.245.225,82 | |
| 2.07.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | 16.012.295.225,82 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran Sementara | Ket |
|---|--|---------------------------|-----|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 2.07.01.2.01 | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 13.795.744.725,82 | |
| 2.07.01.2.01.01 | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | 151.640.000,00 | |
| 2.07.01.2.01.03 | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | 25.000.000,00 | |
| 2.07.01.2.01.05 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 125.850.000,00 | |
| 2.07.01.2.02 | Administrasi Keuangan | 13.622.354.725,82 | |
| 2.07.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 13.493.254.725,82 | |
| 2.07.01.2.02.04 | Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | 2.600.000,00 | |
| 2.07.01.2.02.06 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 6.500.000,00 | |
| 2.07.01.2.02.07 | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran | 120.000.000,00 | |
| 2.07.01.2.03 | Administrasi Umum | 1.830.300.500,00 | |
| 2.07.01.2.03.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 26.250.000,00 | |
| 2.07.01.2.03.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 171.600.000,00 | |
| 2.07.01.2.03.08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 173.765.000,00 | |
| 2.07.01.2.03.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 199.550.000,00 | |
| 2.07.01.2.03.11 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 149.415.000,00 | |
| 2.07.01.2.03.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 8.015.800,00 | |
| 2.07.01.2.03.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | 100.000.000,00 | |
| 2.07.01.2.03.16 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 32.720.000,00 | |
| 2.07.01.2.03.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | 194.735.000,00 | |
| 2.07.01.2.03.18 | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 312.950.000,00 | |
| 2.07.01.2.03.22 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | 58.450.000,00 | |
| 2.07.01.2.03.28 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 25.000.000,00 | |
| 2.07.01.2.03.30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 303.849.700,00 | |
| 2.07.01.2.03.32 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | 74.000.000,00 | |
| 2.07.01.2.04 | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 257.150.000,00 | |
| 2.07.01.2.04.05 | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu | 60.000.000,00 | |
| 2.07.01.2.04.09 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | 197.150.000,00 | |
| 2.07.03 | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | 450.000.000,00 | |
| 2.07.03.2.01 | Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi | 450.000.000,00 | |
| 2.07.03.2.01.01 | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi | 450.000.000,00 | |
| 2.07.04 | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | 282.100.000,00 | |
| 2.07.04.2.01 | Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota | 32.100.000,00 | |
| 2.07.04.2.01.03 | Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja | 32.100.000,00 | |
| 2.07.04.2.03 | Pengelolaan Informasi Pasar Kerja | 250.000.000,00 | |
| 2.07.04.2.03.03 | Job Fair/Bursa Kerja | 250.000.000,00 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran Sementara | Ket |
|---|---|---------------------------|-----|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 2.07.05 | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | 227.850.000,00 | |
| 2.07.05.2.02 | Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota | 227.850.000,00 | |
| 2.07.05.2.02.01 | Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 157.200.000,00 | |
| 2.07.05.2.02.04 | Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota | 70.650.000,00 | |
| 2.08 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 2.105.835.500,00 | |
| 1.06.2.08.2.14.06.00 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 2.105.835.500,00 | |
| 1.06.2.08.2.14.06.00 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 2.105.835.500,00 | |
| 2.08.02 | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | 728.214.000,00 | |
| 2.08.02.2.01 | Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota | 75.000.000,00 | |
| 2.08.02.2.01.04 | Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG | 75.000.000,00 | |
| 2.08.02.2.02 | Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | 175.000.000,00 | |
| 2.08.02.2.02.01 | Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi | 175.000.000,00 | |
| 2.08.02.2.03 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | 478.214.000,00 | |
| 2.08.02.2.03.02 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | 100.000.000,00 | |
| 2.08.02.2.03.03 | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | 378.214.000,00 | |
| 2.08.03 | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | 321.496.000,00 | |
| 2.08.03.2.01 | Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | 169.126.000,00 | |
| 2.08.03.2.01.01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | 107.155.000,00 | |
| 2.08.03.2.01.02 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | 61.971.000,00 | |
| 2.08.03.2.03 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 152.370.000,00 | |
| 2.08.03.2.03.04 | Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | 152.370.000,00 | |
| 2.08.04 | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA | 325.000.000,00 | |
| 2.08.04.2.02 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | 325.000.000,00 | |
| 2.08.04.2.02.03 | Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 325.000.000,00 | |
| 2.08.05 | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK | 114.850.500,00 | |
| 2.08.05.2.01 | Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota | 114.850.500,00 | |
| 2.08.05.2.01.01 | Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota | 55.000.000,00 | |
| 2.08.05.2.01.02 | Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota | 59.850.500,00 | |
| 2.08.07 | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | 616.275.000,00 | |
| 2.08.07.2.01 | Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | 53.540.000,00 | |
| 2.08.07.2.01.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | 53.540.000,00 | |
| 2.08.07.2.02 | Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 562.735.000,00 | |
| 2.08.07.2.02.01 | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 140.545.000,00 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran Sementara | Ket |
|---|---|---------------------------|-----|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 2.08.07.2.02.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota | 212.760.000,00 | |
| 2.08.07.2.02.03 | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota | 155.890.000,00 | |
| 2.08.07.2.02.04 | Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota | 53.540.000,00 | |
| 2.09 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN | 14.283.345.927,67 | |
| 2.09.3.27.0.00.02.00 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | 14.283.345.927,67 | |
| 2.09.3.27.0.00.02.00 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | 14.283.345.927,67 | |
| 2.09.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | 13.554.907.027,67 | |
| 2.09.01.2.01 | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 166.104.000,00 | |
| 2.09.01.2.01.01 | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | 107.100.000,00 | |
| 2.09.01.2.01.02 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | 5.150.000,00 | |
| 2.09.01.2.01.03 | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | 53.854.000,00 | |
| 2.09.01.2.02 | Administrasi Keuangan | 11.516.251.927,67 | |
| 2.09.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 11.434.281.927,67 | |
| 2.09.01.2.02.06 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 9.550.000,00 | |
| 2.09.01.2.02.07 | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran | 72.420.000,00 | |
| 2.09.01.2.03 | Administrasi Umum | 1.827.351.100,00 | |
| 2.09.01.2.03.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 371.630.000,00 | |
| 2.09.01.2.03.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 214.299.100,00 | |
| 2.09.01.2.03.08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 264.064.400,00 | |
| 2.09.01.2.03.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 152.093.600,00 | |
| 2.09.01.2.03.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 8.667.000,00 | |
| 2.09.01.2.03.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | 4.800.000,00 | |
| 2.09.01.2.03.16 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 28.900.000,00 | |
| 2.09.01.2.03.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | 176.275.000,00 | |
| 2.09.01.2.03.18 | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 283.102.000,00 | |
| 2.09.01.2.03.22 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | 58.300.000,00 | |
| 2.09.01.2.03.28 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 227.950.000,00 | |
| 2.09.01.2.03.32 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | 27.270.000,00 | |
| 2.09.01.2.03.38 | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor | 10.000.000,00 | |
| 2.09.01.2.04 | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 45.200.000,00 | |
| 2.09.01.2.04.09 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | 45.200.000,00 | |
| 2.09.03 | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | 637.390.000,00 | |
| 2.09.03.2.01 | Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | 257.790.000,00 | |
| 2.09.03.2.01.03 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya | 231.320.000,00 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran Sementara | Ket |
|---|--|---------------------------|-----|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 2.09.03.2.01.06 | Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia | 26.470.000,00 | |
| 2.09.03.2.04 | Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi | 379.600.000,00 | |
| 2.09.03.2.04.02 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | 379.600.000,00 | |
| 2.09.05 | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | 91.048.900,00 | |
| 2.09.05.2.01 | Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota | 91.048.900,00 | |
| 2.09.05.2.01.05 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | 91.048.900,00 | |
| 2.10 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN | 100.000.000,00 | |
| 1.03.1.04.2.10.10.00 | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman | 100.000.000,00 | |
| 1.03.1.04.2.10.10.00 | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman | 100.000.000,00 | |
| 2.10.04 | PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN | 100.000.000,00 | |
| 2.10.04.2.01 | Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota. | 100.000.000,00 | |
| 2.10.04.2.01.01 | Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota. | 100.000.000,00 | |
| 2.11 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | 136.135.873.159,79 | |
| 2.11.0.00.0.00.01.00 | Dinas Lingkungan Hidup | 136.135.873.159,79 | |
| 2.11.0.00.0.00.01.00 | Dinas Lingkungan Hidup | 136.135.873.159,79 | |
| 2.11.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | 107.125.177.609,79 | |
| 2.11.01.2.01 | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 101.500.000,00 | |
| 2.11.01.2.01.01 | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | 101.000.000,00 | |
| 2.11.01.2.01.02 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | 500.000,00 | |
| 2.11.01.2.02 | Administrasi Keuangan | 85.757.645.159,79 | |
| 2.11.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 85.409.545.159,79 | |
| 2.11.01.2.02.06 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 82.960.000,00 | |
| 2.11.01.2.02.07 | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran | 265.140.000,00 | |
| 2.11.01.2.03 | Administrasi Umum | 20.280.649.950,00 | |
| 2.11.01.2.03.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 174.860.000,00 | |
| 2.11.01.2.03.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 5.419.683.550,00 | |
| 2.11.01.2.03.05 | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | 177.930.000,00 | |
| 2.11.01.2.03.06 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | 984.500.000,00 | |
| 2.11.01.2.03.08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 159.030.840,00 | |
| 2.11.01.2.03.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 375.000.000,00 | |
| 2.11.01.2.03.11 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 273.675.000,00 | |
| 2.11.01.2.03.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 76.900.000,00 | |
| 2.11.01.2.03.13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 140.110.000,00 | |
| 2.11.01.2.03.14 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 15.606.000,00 | |
| 2.11.01.2.03.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | 27.439.600,00 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran Sementara | Ket |
|---|--|---------------------------|-----|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 2.11.01.2.03.16 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 7.205.536.000,00 | |
| 2.11.01.2.03.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | 1.473.889.500,00 | |
| 2.11.01.2.03.18 | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 365.800.000,00 | |
| 2.11.01.2.03.28 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 200.000.000,00 | |
| 2.11.01.2.03.30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 3.108.077.800,00 | |
| 2.11.01.2.03.32 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | 102.611.660,00 | |
| 2.11.01.2.04 | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 985.382.500,00 | |
| 2.11.01.2.04.03 | Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan | 835.382.500,00 | |
| 2.11.01.2.04.09 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | 150.000.000,00 | |
| 2.11.02 | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP | 311.540.000,00 | |
| 2.11.02.2.02 | Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Streategis (KLHS) Kabupaten/Kota | 311.540.000,00 | |
| 2.11.02.2.02.02 | Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD | 311.540.000,00 | |
| 2.11.03 | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | 1.216.946.650,00 | |
| 2.11.03.2.01 | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | 1.216.946.650,00 | |
| 2.11.03.2.01.01 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut | 1.216.946.650,00 | |
| 2.11.04 | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | 10.868.387.100,00 | |
| 2.11.04.2.01 | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota | 10.868.387.100,00 | |
| 2.11.04.2.01.01 | Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati | 1.824.980.000,00 | |
| 2.11.04.2.01.04 | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | 6.270.330.300,00 | |
| 2.11.04.2.01.05 | Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya | 2.773.076.800,00 | |
| 2.11.05 | PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) | 54.740.000,00 | |
| 2.11.05.2.01 | Penyimpanan Sementara Limbah B3 | 54.740.000,00 | |
| 2.11.05.2.01.01 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | 54.740.000,00 | |
| 2.11.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | 779.420.000,00 | |
| 2.11.06.2.01 | Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 779.420.000,00 | |
| 2.11.06.2.01.01 | Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH | 140.000.000,00 | |
| 2.11.06.2.01.03 | Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 490.070.000,00 | |
| 2.11.06.2.01.04 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH | 149.350.000,00 | |
| 2.11.08 | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | 659.108.800,00 | |
| 2.11.08.2.01 | Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 659.108.800,00 | |
| 2.11.08.2.01.01 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan | 307.595.000,00 | |
| 2.11.08.2.01.02 | Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup | 351.513.800,00 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran Sementara | Ket |
|---|---|---------------------------|-----|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 2.11.10 | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP | 42.280.000,00 | |
| 2.11.10.2.01 | Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota | 42.280.000,00 | |
| 2.11.10.2.01.01 | Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota | 42.280.000,00 | |
| 2.11.11 | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | 14.928.273.000,00 | |
| 2.11.11.2.01 | Pengelolaan Sampah | 14.928.273.000,00 | |
| 2.11.11.2.01.01 | Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota | 50.000.000,00 | |
| 2.11.11.2.01.02 | Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali | 202.017.000,00 | |
| 2.11.11.2.01.03 | Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | 14.081.436.000,00 | |
| 2.11.11.2.01.04 | Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan | 52.620.000,00 | |
| 2.11.11.2.01.05 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan | 542.200.000,00 | |
| 2.12 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 14.346.296.947,27 | |
| 2.12.0.00.0.00.01.00 | Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 14.346.296.947,27 | |
| 2.12.0.00.0.00.01.00 | Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 14.346.296.947,27 | |
| 2.12.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | 11.329.787.947,27 | |
| 2.12.01.2.01 | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 150.000.000,00 | |
| 2.12.01.2.01.01 | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | 80.000.000,00 | |
| 2.12.01.2.01.05 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 70.000.000,00 | |
| 2.12.01.2.02 | Administrasi Keuangan | 9.012.131.947,27 | |
| 2.12.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 8.878.691.947,27 | |
| 2.12.01.2.02.07 | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran | 133.440.000,00 | |
| 2.12.01.2.03 | Administrasi Umum | 1.929.636.000,00 | |
| 2.12.01.2.03.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 175.700.000,00 | |
| 2.12.01.2.03.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 3.600.000,00 | |
| 2.12.01.2.03.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 113.521.000,00 | |
| 2.12.01.2.03.08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 178.545.000,00 | |
| 2.12.01.2.03.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 300.000.000,00 | |
| 2.12.01.2.03.11 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 102.990.000,00 | |
| 2.12.01.2.03.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 24.000.000,00 | |
| 2.12.01.2.03.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | 3.600.000,00 | |
| 2.12.01.2.03.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | 90.010.000,00 | |
| 2.12.01.2.03.18 | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 250.000.000,00 | |
| 2.12.01.2.03.22 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | 440.000.000,00 | |
| 2.12.01.2.03.28 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 35.000.000,00 | |
| 2.12.01.2.03.30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 212.670.000,00 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran Sementara | Ket |
|---|--|---------------------------|-----|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 2.12.01.2.04 | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 238.020.000,00 | |
| 2.12.01.2.04.09 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | 238.020.000,00 | |
| 2.12.02 | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | 1.114.860.000,00 | |
| 2.12.02.2.01 | Pelayanan Pendaftaran Penduduk | 1.114.860.000,00 | |
| 2.12.02.2.01.01 | Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan | 122.020.000,00 | |
| 2.12.02.2.01.04 | Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk | 992.840.000,00 | |
| 2.12.03 | PROGRAM PENCATATAN SIPIL | 1.604.290.000,00 | |
| 2.12.03.2.01 | Pelayanan Pencatatan Sipil | 1.604.290.000,00 | |
| 2.12.03.2.01.01 | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting | 1.542.650.000,00 | |
| 2.12.03.2.01.02 | Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil | 61.640.000,00 | |
| 2.12.04 | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | 242.359.000,00 | |
| 2.12.04.2.01 | Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan | 227.359.000,00 | |
| 2.12.04.2.01.04 | Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan | 227.359.000,00 | |
| 2.12.04.2.03 | Penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan | 15.000.000,00 | |
| 2.12.04.2.03.10 | Komunikasi, Informasi, Dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan Dan Masyarakat | 15.000.000,00 | |
| 2.12.05 | PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN | 55.000.000,00 | |
| 2.12.05.2.01 | Penyusunan Profil Kependudukan | 55.000.000,00 | |
| 2.12.05.2.01.02 | Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain | 55.000.000,00 | |
| 2.14 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 2.000.983.000,00 | |
| 1.06.2.08.2.14.06.00 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 2.000.983.000,00 | |
| 1.06.2.08.2.14.06.00 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 2.000.983.000,00 | |
| 2.14.02 | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | 260.831.500,00 | |
| 2.14.02.2.02 | Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota | 260.831.500,00 | |
| 2.14.02.2.02.01 | Perumusan Parameter Kependudukan | 65.255.000,00 | |
| 2.14.02.2.02.02 | Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan | 71.930.000,00 | |
| 2.14.02.2.02.03 | Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga | 52.000.000,00 | |
| 2.14.02.2.02.14 | Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK | 71.646.500,00 | |
| 2.14.03 | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | 368.973.500,00 | |
| 2.14.03.2.02 | Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) | 198.623.500,00 | |
| 2.14.03.2.02.04 | Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) | 198.623.500,00 | |
| 2.14.03.2.04 | Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | 170.350.000,00 | |
| 2.14.03.2.04.01 | Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | 170.350.000,00 | |
| 2.14.04 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | 1.371.178.000,00 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran Sementara | Ket |
|---|---|---------------------------|-----|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 2.14.04.2.01 | Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | 371.134.000,00 | |
| 2.14.04.2.01.03 | Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | 160.000.000,00 | |
| 2.14.04.2.01.08 | Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan Serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) | 211.134.000,00 | |
| 2.14.04.2.02 | Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | 1.000.044.000,00 | |
| 2.14.04.2.02.01 | Penguatan Kebijakan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya Dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | 482.202.000,00 | |
| 2.14.04.2.02.03 | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | 517.842.000,00 | |
| 2.15 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN | 34.782.903.941,89 | |
| 2.15.0.00.0.00.01.00 | Dinas Perhubungan | 34.782.903.941,89 | |
| 2.15.0.00.0.00.01.00 | Dinas Perhubungan | 34.782.903.941,89 | |
| 2.15.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | 22.490.453.941,89 | |
| 2.15.01.2.01 | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 204.260.000,00 | |
| 2.15.01.2.01.01 | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | 147.640.000,00 | |
| 2.15.01.2.01.03 | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | 56.620.000,00 | |
| 2.15.01.2.02 | Administrasi Keuangan | 18.080.417.941,89 | |
| 2.15.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 17.998.047.941,89 | |
| 2.15.01.2.02.04 | Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | 35.000.000,00 | |
| 2.15.01.2.02.06 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 34.020.000,00 | |
| 2.15.01.2.02.07 | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran | 13.350.000,00 | |
| 2.15.01.2.03 | Administrasi Umum | 4.146.056.000,00 | |
| 2.15.01.2.03.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 11.470.000,00 | |
| 2.15.01.2.03.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 218.130.000,00 | |
| 2.15.01.2.03.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 192.120.000,00 | |
| 2.15.01.2.03.05 | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | 50.000.000,00 | |
| 2.15.01.2.03.06 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | 47.100.000,00 | |
| 2.15.01.2.03.07 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | 107.880.000,00 | |
| 2.15.01.2.03.08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 192.915.000,00 | |
| 2.15.01.2.03.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 135.141.000,00 | |
| 2.15.01.2.03.11 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 226.010.000,00 | |
| 2.15.01.2.03.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 68.690.000,00 | |
| 2.15.01.2.03.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | 49.975.200,00 | |
| 2.15.01.2.03.16 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 25.000.000,00 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran Sementara | Ket |
|---|---|---------------------------|-----|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 2.15.01.2.03.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | 270.575.000,00 | |
| 2.15.01.2.03.18 | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 603.372.600,00 | |
| 2.15.01.2.03.28 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 326.099.200,00 | |
| 2.15.01.2.03.30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 1.621.578.000,00 | |
| 2.15.01.2.04 | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 59.720.000,00 | |
| 2.15.01.2.04.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | 59.720.000,00 | |
| 2.15.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | 12.292.450.000,00 | |
| 2.15.02.2.02 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | 4.479.065.000,00 | |
| 2.15.02.2.02.01 | Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | 2.801.930.000,00 | |
| 2.15.02.2.02.02 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | 1.677.135.000,00 | |
| 2.15.02.2.04 | Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir | 2.046.270.000,00 | |
| 2.15.02.2.04.01 | Fasilitasi pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | 1.734.590.000,00 | |
| 2.15.02.2.04.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | 311.680.000,00 | |
| 2.15.02.2.05 | Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | 1.714.919.000,00 | |
| 2.15.02.2.05.01 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | 1.514.919.000,00 | |
| 2.15.02.2.05.07 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | 200.000.000,00 | |
| 2.15.02.2.06 | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | 2.990.930.000,00 | |
| 2.15.02.2.06.01 | Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi | 2.118.730.000,00 | |
| 2.15.02.2.06.02 | Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas | 205.900.000,00 | |
| 2.15.02.2.06.04 | Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Provinsi | 666.300.000,00 | |
| 2.15.02.2.08 | Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan | 245.080.000,00 | |
| 2.15.02.2.08.04 | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota | 76.200.000,00 | |
| 2.15.02.2.08.05 | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum | 168.880.000,00 | |
| 2.15.02.2.09 | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 621.852.000,00 | |
| 2.15.02.2.09.01 | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 260.592.000,00 | |
| 2.15.02.2.09.02 | Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | 361.260.000,00 | |
| 2.15.02.2.10 | Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 107.954.000,00 | |
| 2.15.02.2.10.02 | Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | 107.954.000,00 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran Sementara | Ket |
|---|---|---------------------------|-----|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 2.15.02.2.11 | Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 86.380.000,00 | |
| 2.15.02.2.11.02 | Penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 86.380.000,00 | |
| 2.16 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 22.054.076.188,91 | |
| 1.01.2.22.0.00.02.00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 10.000.000,00 | |
| 1.01.2.22.0.00.02.00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 10.000.000,00 | |
| 2.16.03 | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | 10.000.000,00 | |
| 2.16.03.2.02 | Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 10.000.000,00 | |
| 2.16.03.2.02.07 | Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik | 10.000.000,00 | |
| | Dinas Komunikasi dan Informatika | 21.544.076.188,91 | |
| 2.16.0.00.0.00.01.00 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 21.544.076.188,91 | |
| 2.16.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | 10.281.729.188,91 | |
| 2.16.01.2.01 | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 123.610.000,00 | |
| 2.16.01.2.01.01 | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | 123.610.000,00 | |
| 2.16.01.2.02 | Administrasi Keuangan | 7.741.909.188,91 | |
| 2.16.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 7.671.709.188,91 | |
| 2.16.01.2.02.07 | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran | 70.200.000,00 | |
| 2.16.01.2.03 | Administrasi Umum | 2.377.315.000,00 | |
| 2.16.01.2.03.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 340.000.000,00 | |
| 2.16.01.2.03.08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 280.275.000,00 | |
| 2.16.01.2.03.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 197.500.000,00 | |
| 2.16.01.2.03.11 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 117.345.000,00 | |
| 2.16.01.2.03.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 7.000.000,00 | |
| 2.16.01.2.03.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | 2.256.000,00 | |
| 2.16.01.2.03.16 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 30.000.000,00 | |
| 2.16.01.2.03.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | 808.275.000,00 | |
| 2.16.01.2.03.24 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | 139.259.000,00 | |
| 2.16.01.2.03.28 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 50.640.000,00 | |
| 2.16.01.2.03.30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 323.810.000,00 | |
| 2.16.01.2.03.32 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | 80.955.000,00 | |
| 2.16.01.2.04 | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 38.895.000,00 | |
| 2.16.01.2.04.09 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | 38.895.000,00 | |
| 2.16.02 | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | 1.465.591.500,00 | |
| 2.16.02.2.01 | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 1.465.591.500,00 | |
| 2.16.02.2.01.02 | Monitoring Opini dan Aspirasi Publik | 367.990.000,00 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran Sementara | Ket |
|---|---|---------------------------|-----|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 2.16.02.2.01.03 | Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah | 135.000.000,00 | |
| 2.16.02.2.01.04 | Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik | 167.920.000,00 | |
| 2.16.02.2.01.06 | Pelayanan Informasi Publik | 754.066.500,00 | |
| 2.16.02.2.01.10 | Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik | 40.615.000,00 | |
| 2.16.03 | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | 9.796.755.500,00 | |
| 2.16.03.2.01 | Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 7.727.120.500,00 | |
| 2.16.03.2.01.01 | Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi | 360.210.000,00 | |
| 2.16.03.2.01.03 | Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah | 7.366.910.500,00 | |
| 2.16.03.2.02 | Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 2.069.635.000,00 | |
| 2.16.03.2.02.01 | Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi | 117.770.000,00 | |
| 2.16.03.2.02.08 | Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah | 146.300.000,00 | |
| 2.16.03.2.02.09 | Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas | 1.390.490.000,00 | |
| 2.16.03.2.02.10 | Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | 415.075.000,00 | |
| 4.01.0.00.0.00.01.00 | Sekretariat Daerah | 500.000.000,00 | |
| 4.01.0.00.0.00.01.07 | Bagian Hubungan Masyarakat | 500.000.000,00 | |
| 2.16.02 | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | 500.000.000,00 | |
| 2.16.02.2.01 | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 500.000.000,00 | |
| 2.16.02.2.01.05 | Pengelolaan Media Komunikasi Publik | 500.000.000,00 | |
| 2.17 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | 50.842.187.944,70 | |
| 2.17.3.31.3.30.07.00 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | 50.842.187.944,70 | |
| 2.17.3.31.3.30.07.00 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | 50.842.187.944,70 | |
| 2.17.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | 47.253.250.944,70 | |
| 2.17.01.2.01 | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 318.840.000,00 | |
| 2.17.01.2.01.01 | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | 71.650.000,00 | |
| 2.17.01.2.01.02 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | 1.000.000,00 | |
| 2.17.01.2.01.03 | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | 213.760.000,00 | |
| 2.17.01.2.01.05 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 32.430.000,00 | |
| 2.17.01.2.02 | Administrasi Keuangan | 41.285.761.944,70 | |
| 2.17.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 40.977.501.944,70 | |
| 2.17.01.2.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 32.280.000,00 | |
| 2.17.01.2.02.04 | Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | 175.000.000,00 | |
| 2.17.01.2.02.06 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1.500.000,00 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran Sementara | Ket |
|---|--|---------------------------|-----|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 2.17.01.2.02.07 | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran | 99.480.000,00 | |
| 2.17.01.2.03 | Administrasi Umum | 5.348.649.000,00 | |
| 2.17.01.2.03.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 877.500.000,00 | |
| 2.17.01.2.03.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 477.205.000,00 | |
| 2.17.01.2.03.08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 180.000.000,00 | |
| 2.17.01.2.03.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 260.978.023,00 | |
| 2.17.01.2.03.11 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 687.884.807,00 | |
| 2.17.01.2.03.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | 20.000.000,00 | |
| 2.17.01.2.03.16 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 60.000.000,00 | |
| 2.17.01.2.03.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | 331.525.000,00 | |
| 2.17.01.2.03.18 | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 770.710.580,00 | |
| 2.17.01.2.03.24 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | 100.000.000,00 | |
| 2.17.01.2.03.28 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 110.845.590,00 | |
| 2.17.01.2.03.30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 1.422.000.000,00 | |
| 2.17.01.2.03.32 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | 50.000.000,00 | |
| 2.17.01.2.04 | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 300.000.000,00 | |
| 2.17.01.2.04.09 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | 300.000.000,00 | |
| 2.17.03 | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | 108.618.000,00 | |
| 2.17.03.2.01 | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota | 108.618.000,00 | |
| 2.17.03.2.01.02 | Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota | 108.618.000,00 | |
| 2.17.04 | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI | 129.140.000,00 | |
| 2.17.04.2.01 | Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 129.140.000,00 | |
| 2.17.04.2.01.01 | Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | 129.140.000,00 | |
| 2.17.05 | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | 335.925.000,00 | |
| 2.17.05.2.01 | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota | 335.925.000,00 | |
| 2.17.05.2.01.01 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | 335.925.000,00 | |
| 2.17.06 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI | 188.737.000,00 | |
| 2.17.06.2.01 | Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota | 188.737.000,00 | |
| 2.17.06.2.01.01 | Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Provinsi | 188.737.000,00 | |
| 2.17.07 | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | 588.038.500,00 | |
| 2.17.07.2.01 | Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | 588.038.500,00 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran Sementara | Ket |
|---|---|---------------------------|-----|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 2.17.07.2.01.01 | Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | 174.700.000,00 | |
| 2.17.07.2.01.02 | Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro | 104.450.000,00 | |
| 2.17.07.2.01.03 | Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro | 59.855.000,00 | |
| 2.17.07.2.01.04 | Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | 248.820.000,00 | |
| 2.17.07.2.01.05 | Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro | 213.500,00 | |
| 2.17.08 | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | 1.938.478.500,00 | |
| 2.17.08.2.01 | Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil | 1.938.478.500,00 | |
| 2.17.08.2.01.01 | Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi | 1.938.478.500,00 | |
| 2.18 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL | 1.246.438.500,00 | |
| 2.07.2.18.0.00.02.00 | Dinas Tenaga Kerja dan Penanaman Modal | 1.246.438.500,00 | |
| 2.07.2.18.0.00.02.00 | Dinas Tenaga Kerja dan Penanaman Modal | 1.246.438.500,00 | |
| 2.18.02 | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | 125.000.000,00 | |
| 2.18.02.2.01 | Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | 25.000.000,00 | |
| 2.18.02.2.01.02 | Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | 25.000.000,00 | |
| 2.18.02.2.02 | Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | 100.000.000,00 | |
| 2.18.02.2.02.01 | Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | 100.000.000,00 | |
| 2.18.03 | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | 25.000.000,00 | |
| 2.18.03.2.01 | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | 25.000.000,00 | |
| 2.18.03.2.01.02 | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | 25.000.000,00 | |
| 2.18.04 | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | 807.660.000,00 | |
| 2.18.04.2.01 | Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | 807.660.000,00 | |
| 2.18.04.2.01.01 | Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | 807.660.000,00 | |
| 2.18.05 | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | 134.308.500,00 | |
| 2.18.05.2.01 | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | 134.308.500,00 | |
| 2.18.05.2.01.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal | 25.000.000,00 | |
| 2.18.05.2.01.03 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal | 109.308.500,00 | |
| 2.18.06 | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL | 154.470.000,00 | |
| 2.18.06.2.01 | Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 154.470.000,00 | |
| 2.18.06.2.01.01 | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | 154.470.000,00 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran Sementara | Ket |
|---|--|---------------------------|-----|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 2.19 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 34.806.469.699,70 | |
| 2.19.3.26.0.00.02.00 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | 34.806.469.699,70 | |
| 2.19.3.26.0.00.02.00 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | 34.806.469.699,70 | |
| 2.19.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | 19.054.958.619,70 | |
| 2.19.01.2.01 | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 493.640.000,00 | |
| 2.19.01.2.01.01 | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | 396.640.000,00 | |
| 2.19.01.2.01.05 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 97.000.000,00 | |
| 2.19.01.2.02 | Administrasi Keuangan | 12.520.958.699,70 | |
| 2.19.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 12.167.688.699,70 | |
| 2.19.01.2.02.04 | Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | 197.020.000,00 | |
| 2.19.01.2.02.06 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 60.000.000,00 | |
| 2.19.01.2.02.07 | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran | 96.250.000,00 | |
| 2.19.01.2.03 | Administrasi Umum | 5.846.759.920,00 | |
| 2.19.01.2.03.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 174.860.000,00 | |
| 2.19.01.2.03.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 1.120.116.620,00 | |
| 2.19.01.2.03.06 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | 52.200.000,00 | |
| 2.19.01.2.03.08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 768.091.500,00 | |
| 2.19.01.2.03.11 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 196.099.500,00 | |
| 2.19.01.2.03.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 44.562.000,00 | |
| 2.19.01.2.03.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | 44.450.000,00 | |
| 2.19.01.2.03.16 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 13.650.000,00 | |
| 2.19.01.2.03.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | 1.170.615.000,00 | |
| 2.19.01.2.03.18 | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 499.695.000,00 | |
| 2.19.01.2.03.20 | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | 101.900.000,00 | |
| 2.19.01.2.03.24 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | 650.050.000,00 | |
| 2.19.01.2.03.28 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 615.740.000,00 | |
| 2.19.01.2.03.30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 326.130.300,00 | |
| 2.19.01.2.03.34 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | 68.600.000,00 | |
| 2.19.01.2.04 | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 193.600.000,00 | |
| 2.19.01.2.04.09 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | 193.600.000,00 | |
| 2.19.02 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | 1.129.715.080,00 | |
| 2.19.02.2.01 | Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota | 1.129.715.080,00 | |
| 2.19.02.2.01.01 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor | 99.780.000,00 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran Sementara | Ket |
|---|---|---------------------------|-----|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 2.19.02.2.01.02 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemuda | 61.400.000,00 | |
| 2.19.02.2.01.04 | Pemenuhan Hak Setiap Pemuda yang Meliputi: Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda Dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan | 31.568.080,00 | |
| | Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan | | |
| 2.19.02.2.01.07 | Pemberian Penghargaan Pemuda dan organisasi pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi | 282.542.000,00 | |
| 2.19.02.2.01.08 | Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda | 654.425.000,00 | |
| 2.19.03 | PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | 3.871.796.000,00 | |
| 2.19.03.2.02 | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 1.193.850.200,00 | |
| 2.19.03.2.02.01 | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota | 87.836.400,00 | |
| 2.19.03.2.02.03 | Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan | 1.106.013.800,00 | |
| 2.19.03.2.03 | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi | 328.989.700,00 | |
| 2.19.03.2.03.02 | Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science) | 99.666.640,00 | |
| 2.19.03.2.03.03 | Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kab/Kota | 159.926.400,00 | |
| 2.19.03.2.03.05 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga | 69.396.660,00 | |
| 2.19.03.2.05 | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi | 2.348.956.100,00 | |
| 2.19.03.2.05.02 | Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi | 215.014.500,00 | |
| 2.19.03.2.05.04 | Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi | 2.000.000.000,00 | |
| 2.19.03.2.05.06 | Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat | 133.941.600,00 | |
| 2.20 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK | 1.138.980.000,00 | |
| 2.16.0.00.0.00.01.00 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 1.138.980.000,00 | |
| 2.16.0.00.0.00.01.00 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 1.138.980.000,00 | |
| 2.20.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | 1.138.980.000,00 | |
| 2.20.02.2.01 | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | 1.138.980.000,00 | |
| 2.20.02.2.01.01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral | 312.360.000,00 | |
| 2.20.02.2.01.02 | Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi | 208.200.000,00 | |
| 2.20.02.2.01.03 | Membangun Metadata Statistik Sektoral | 271.120.000,00 | |
| 2.20.02.2.01.04 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral | 248.040.000,00 | |
| 2.20.02.2.01.05 | Pengembangan Infrastruktur | 99.260.000,00 | |
| 2.21 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN | 348.080.000,00 | |
| 2.16.0.00.0.00.01.00 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 348.080.000,00 | |
| 2.16.0.00.0.00.01.00 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 348.080.000,00 | |
| 2.21.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | 348.080.000,00 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran Sementara | Ket |
|---|--|---------------------------|-----|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 2.21.02.2.01 | Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 218.780.000,00 | |
| 2.21.02.2.01.02 | Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 67.860.000,00 | |
| 2.21.02.2.01.03 | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | 74.060.000,00 | |
| 2.21.02.2.01.04 | Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 76.860.000,00 | |
| 2.21.02.2.02 | Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota | 129.300.000,00 | |
| 2.21.02.2.02.01 | Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 129.300.000,00 | |
| 2.22 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | 280.500.000,00 | |
| 1.01.2.22.0.00.02.00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 280.500.000,00 | |
| 1.01.2.22.0.00.02.00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 280.500.000,00 | |
| 2.22.02 | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | 222.000.000,00 | |
| 2.22.02.2.01 | Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | 7.000.000,00 | |
| 2.22.02.2.01.01 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan | 3.500.000,00 | |
| 2.22.02.2.01.02 | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan | 3.500.000,00 | |
| 2.22.02.2.02 | Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | 15.000.000,00 | |
| 2.22.02.2.02.03 | Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan | 15.000.000,00 | |
| 2.22.02.2.03 | Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota | 200.000.000,00 | |
| 2.22.02.2.03.03 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat | 200.000.000,00 | |
| 2.22.03 | PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL | 33.500.000,00 | |
| 2.22.03.2.01 | Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | 33.500.000,00 | |
| 2.22.03.2.01.01 | Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional | 3.500.000,00 | |
| 2.22.03.2.01.02 | Standarisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan | 30.000.000,00 | |
| 2.22.05 | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA | 20.000.000,00 | |
| 2.22.05.2.01 | Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota | 20.000.000,00 | |
| 2.22.05.2.01.02 | Pencegahan dan Penanggulangan dari Kerusakan, Kehancuran, atau Kemusnahan Cagar Budaya | 5.000.000,00 | |
| 2.22.05.2.01.03 | Peningkatan Potensi Nilai, Informasi, dan Promosi Cagar Budaya Serta Pemanfaatannya | 15.000.000,00 | |
| 2.22.06 | PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN | 5.000.000,00 | |
| 2.22.06.2.01 | Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota | 5.000.000,00 | |
| 2.22.06.2.01.01 | Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu | 5.000.000,00 | |
| 2.23 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN | 10.018.886.433,02 | |
| 2.23.2.24.0.00.02.00 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 10.018.886.433,02 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran Sementara | Ket |
|---|--|---------------------------|-----|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 2.23.2.24.0.00.02.00 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 10.018.886.433,02 | |
| 2.23.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | 9.028.381.433,02 | |
| 2.23.01.2.01 | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 144.256.000,00 | |
| 2.23.01.2.01.01 | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | 144.256.000,00 | |
| 2.23.01.2.02 | Administrasi Keuangan | 7.073.401.433,02 | |
| 2.23.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 7.001.501.433,02 | |
| 2.23.01.2.02.06 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 5.500.000,00 | |
| 2.23.01.2.02.07 | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran | 66.400.000,00 | |
| 2.23.01.2.03 | Administrasi Umum | 1.745.724.000,00 | |
| 2.23.01.2.03.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 19.250.000,00 | |
| 2.23.01.2.03.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 291.416.000,00 | |
| 2.23.01.2.03.06 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | 70.810.000,00 | |
| 2.23.01.2.03.08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 273.398.000,00 | |
| 2.23.01.2.03.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 107.235.000,00 | |
| 2.23.01.2.03.11 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 17.640.000,00 | |
| 2.23.01.2.03.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 8.250.000,00 | |
| 2.23.01.2.03.16 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 33.000.000,00 | |
| 2.23.01.2.03.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | 157.785.000,00 | |
| 2.23.01.2.03.18 | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 174.730.000,00 | |
| 2.23.01.2.03.24 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | 111.210.000,00 | |
| 2.23.01.2.03.28 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 105.430.000,00 | |
| 2.23.01.2.03.30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 250.080.000,00 | |
| 2.23.01.2.03.34 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | 100.000.000,00 | |
| 2.23.01.2.03.35 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur | 15.000.000,00 | |
| 2.23.01.2.03.38 | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor | 10.490.000,00 | |
| 2.23.01.2.04 | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 65.000.000,00 | |
| 2.23.01.2.04.09 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | 65.000.000,00 | |
| 2.23.02 | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | 990.505.000,00 | |
| 2.23.02.2.01 | Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 768.230.000,00 | |
| 2.23.02.2.01.02 | Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 421.120.000,00 | |
| 2.23.02.2.01.08 | Pengembangan Bahan Pustaka | 287.110.000,00 | |
| 2.23.02.2.01.09 | Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka | 60.000.000,00 | |
| 2.23.02.2.02 | Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 222.275.000,00 | |
| 2.23.02.2.02.01 | Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat | 222.275.000,00 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran Sementara | Ket |
|---|---|---------------------------|-----|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 2.24 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN | 203.750.000,00 | |
| 2.23.2.24.0.00.02.00 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 203.750.000,00 | |
| 2.23.2.24.0.00.02.00 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 203.750.000,00 | |
| 2.24.02 | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP | 203.750.000,00 | |
| 2.24.02.2.01 | Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota | 106.330.000,00 | |
| 2.24.02.2.01.01 | Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis | 106.330.000,00 | |
| 2.24.02.2.02 | Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota | 52.420.000,00 | |
| 2.24.02.2.02.02 | Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis | 52.420.000,00 | |
| 2.24.02.2.03 | Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota | 45.000.000,00 | |
| 2.24.02.2.03.01 | Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah kab/kota Melalui JIKN | 45.000.000,00 | |
| 3 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | |
| 3.25 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN | 665.821.000,00 | |
| 2.09.3.27.0.00.02.00 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | 665.821.000,00 | |
| 2.09.3.27.0.00.02.00 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | 665.821.000,00 | |
| 3.25.03 | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | 579.495.000,00 | |
| 3.25.03.2.02 | Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil | 247.060.000,00 | |
| 3.25.03.2.02.04 | Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan | 247.060.000,00 | |
| 3.25.03.2.04 | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan | 332.435.000,00 | |
| 3.25.03.2.04.02 | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 332.435.000,00 | |
| 3.25.05 | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | 86.326.000,00 | |
| 3.25.05.2.02 | Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil | 86.326.000,00 | |
| 3.25.05.2.02.01 | Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil | 86.326.000,00 | |
| 3.26 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | 2.730.166.000,00 | |
| 2.19.3.26.0.00.02.00 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | 2.730.166.000,00 | |
| 2.19.3.26.0.00.02.00 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | 2.730.166.000,00 | |
| 3.26.02 | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | 1.475.289.000,00 | |
| 3.26.02.2.03 | Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | 1.405.789.000,00 | |
| 3.26.02.2.03.03 | Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | 69.500.000,00 | |
| 3.26.02.2.03.06 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | 908.289.000,00 | |
| 3.26.02.2.03.07 | Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | 428.000.000,00 | |
| 3.26.02.2.04 | Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota | 69.500.000,00 | |
| 3.26.02.2.04.03 | Pengelolaan Investasi Pariwisata | 69.500.000,00 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran Sementara | Ket |
|---|---|---------------------------|-----|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 3.26.03 | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | 303.327.000,00 | |
| 3.26.03.2.01 | Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | 303.327.000,00 | |
| 3.26.03.2.01.02 | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten/Kota | 303.327.000,00 | |
| 3.26.05 | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | 951.550.000,00 | |
| 3.26.05.2.01 | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | 951.550.000,00 | |
| 3.26.05.2.01.01 | Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | 263.180.000,00 | |
| 3.26.05.2.01.02 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata | 61.820.000,00 | |
| 3.26.05.2.01.05 | Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konsevasi Ekonomi Kreatif | 576.550.000,00 | |
| 3.26.05.2.01.06 | Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif | 50.000.000,00 | |
| 3.27 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | 574.441.000,00 | |
| 2.09.3.27.0.00.02.00 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | 574.441.000,00 | |
| 2.09.3.27.0.00.02.00 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | 574.441.000,00 | |
| 3.27.02 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | 299.740.000,00 | |
| 3.27.02.2.01 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | 230.775.000,00 | |
| 3.27.02.2.01.01 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | 86.890.000,00 | |
| 3.27.02.2.01.02 | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | 143.885.000,00 | |
| 3.27.02.2.05 | Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/ Kota | 68.965.000,00 | |
| 3.27.02.2.05.05 | Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak | 68.965.000,00 | |
| 3.27.04 | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | 214.951.000,00 | |
| 3.27.04.2.01 | Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota | 96.500.000,00 | |
| 3.27.04.2.01.01 | Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis | 96.500.000,00 | |
| 3.27.04.2.04 | Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehataan Masyarakat Veteriner | 118.451.000,00 | |
| 3.27.04.2.04.01 | Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan | 60.921.000,00 | |
| 3.27.04.2.04.02 | Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan | 57.530.000,00 | |
| 3.27.07 | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | 59.750.000,00 | |
| 3.27.07.2.01 | Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian | 59.750.000,00 | |
| 3.27.07.2.01.01 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa | 53.250.000,00 | |
| 3.27.07.2.01.02 | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa | 6.500.000,00 | |
| 3.30 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN | 20.507.664.000,00 | |
| 2.17.3.31.3.30.07.00 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | 20.507.664.000,00 | |
| 2.17.3.31.3.30.07.00 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | 20.507.664.000,00 | |
| 3.30.02 | PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN | 170.080.000,00 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran Sementara | Ket |
|---|--|---------------------------|-----|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 3.30.02.2.02 | Penerbitan Tanda Daftar Gudang | 39.605.000,00 | |
| 3.30.02.2.02.01 | Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang | 39.605.000,00 | |
| 3.30.02.2.03 | Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Untuk Penerima Waralaba Dari Waralaba Dalam Negeri | 90.915.000,00 | |
| 3.30.02.2.03.02 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri | 90.915.000,00 | |
| 3.30.02.2.05 | Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C Untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum Di Tempat | 39.560.000,00 | |
| 3.30.02.2.05.01 | Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C | 39.560.000,00 | |
| 3.30.03 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | 18.789.723.400,00 | |
| 3.30.03.2.01 | Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | 18.487.585.400,00 | |
| 3.30.03.2.01.01 | Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan | 11.371.304.200,00 | |
| 3.30.03.2.01.02 | Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | 7.116.281.200,00 | |
| 3.30.03.2.02 | Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya | 302.138.000,00 | |
| 3.30.03.2.02.01 | Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | 234.388.000,00 | |
| 3.30.03.2.02.02 | Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | 67.750.000,00 | |
| 3.30.04 | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | 310.105.200,00 | |
| 3.30.04.2.02 | Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota | 310.105.200,00 | |
| 3.30.04.2.02.02 | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan | 240.800.000,00 | |
| 3.30.04.2.02.03 | Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | 69.305.200,00 | |
| 3.30.05 | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR | 68.320.000,00 | |
| 3.30.05.2.01 | Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 68.320.000,00 | |
| 3.30.05.2.01.01 | Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota | 68.320.000,00 | |
| 3.30.06 | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | 561.565.400,00 | |
| 3.30.06.2.01 | Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan | 561.565.400,00 | |
| 3.30.06.2.01.01 | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang | 389.520.400,00 | |
| 3.30.06.2.01.02 | Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal | 172.045.000,00 | |
| 3.30.07 | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI | 607.870.000,00 | |
| 3.30.07.2.01 | Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri | 607.870.000,00 | |
| 3.30.07.2.01.01 | Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota | 452.070.000,00 | |
| 3.30.07.2.01.02 | Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota | 100.000.000,00 | |
| 3.30.07.2.01.03 | Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan | 55.800.000,00 | |
| 3.31 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN | 2.902.429.000,00 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran Sementara | Ket |
|---|--|---------------------------|-----|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 2.17.3.31.3.30.07.00 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | 2.902.429.000,00 | |
| 2.17.3.31.3.30.07.00 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | 2.902.429.000,00 | |
| 3.31.02 | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | 2.657.429.000,00 | |
| 3.31.02.2.01 | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | 2.657.429.000,00 | |
| 3.31.02.2.01.03 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri | 677.980.000,00 | |
| 3.31.02.2.01.04 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | 575.000.000,00 | |
| 3.31.02.2.01.05 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | 1.359.449.000,00 | |
| 3.31.02.2.01.06 | Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri | 45.000.000,00 | |
| 3.31.03 | PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI | 75.000.000,00 | |
| 3.31.03.2.01 | Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan IUI Menengah | 75.000.000,00 | |
| 3.31.03.2.01.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan (IUI) Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Memenuhi Ketentuan Perizinan | 25.000.000,00 | |
| 3.31.03.2.01.03 | Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Pengamanan dan Penyelamatan Industri | 50.000.000,00 | |
| 3.31.04 | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL | 170.000.000,00 | |
| 3.31.04.2.01 | Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota | 170.000.000,00 | |
| 3.31.04.2.01.01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) | 120.000.000,00 | |
| 3.31.04.2.01.02 | Diseminasi dan Publikasi Data Informasi Industri Kabupaten/Kota | 50.000.000,00 | |
| 4 | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | | |
| 4.01 | SEKRETARIAT DAERAH | 73.499.130.650,58 | |
| 4.01.0.00.0.00.01.00 | Sekretariat Daerah | 73.499.130.650,58 | |
| 4.01.0.00.0.00.01.01 | Bagian Pemerintahan | 2.348.474.000,00 | |
| 4.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | 15.000.000,00 | |
| 4.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan | 15.000.000,00 | |
| 4.01.01.2.02.06 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 15.000.000,00 | |
| 4.01.02 | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 2.333.474.000,00 | |
| 4.01.02.2.01 | Administrasi Tata Pemerintahan | 2.158.474.000,00 | |
| 4.01.02.2.01.01 | Penataan Administrasi Pemerintahan | 45.000.000,00 | |
| 4.01.02.2.01.02 | Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | 1.227.923.000,00 | |
| 4.01.02.2.01.03 | Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | 885.551.000,00 | |
| 4.01.02.2.04 | Fasilitasi Kerjasama Daerah | 175.000.000,00 | |
| 4.01.02.2.04.01 | Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri | 175.000.000,00 | |
| 4.01.0.00.0.00.01.02 | Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan | 4.891.913.000,00 | |
| 4.01.02 | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 4.891.913.000,00 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran Sementara | Ket |
|---|--|---------------------------|-----|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 4.01.02.2.02 | Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | 4.891.913.000,00 | |
| 4.01.02.2.02.01 | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | 1.987.056.000,00 | |
| 4.01.02.2.02.02 | Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial | 260.624.000,00 | |
| 4.01.02.2.02.03 | Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat | 344.233.000,00 | |
| 4.01.0.00.0.00.01.03 | Bagian Hukum | 2.608.369.000,00 | |
| 4.01.02 | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 2.608.369.000,00 | |
| 4.01.02.2.03 | Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah | 2.608.369.000,00 | |
| 4.01.02.2.03.01 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah | 933.510.000,00 | |
| 4.01.02.2.03.02 | Fasilitasi Bantuan Hukum | 837.939.500,00 | |
| 4.01.02.2.03.03 | Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum | 836.919.500,00 | |
| 4.01.0.00.0.00.01.04 | Bagian Perekonomian, Infrastruktur dan Sumber Daya Alam | 791.424.000,00 | |
| 4.01.03 | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | 791.424.000,00 | |
| 4.01.03.2.01 | Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian | 591.424.000,00 | |
| 4.01.03.2.01.02 | Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | 591.424.000,00 | |
| 4.01.03.2.02 | Administrasi Pembangunan | 100.000.000,00 | |
| 4.01.03.2.02.02 | Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | 100.000.000,00 | |
| 4.01.03.2.04 | Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam | 100.000.000,00 | |
| 4.01.03.2.04.02 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup | 100.000.000,00 | |
| 4.01.0.00.0.00.01.05 | Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa | 1.449.897.000,00 | |
| 4.01.03 | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | 1.449.897.000,00 | |
| 4.01.03.2.03 | Pengadaan Barang dan Jasa | 1.449.897.000,00 | |
| 4.01.03.2.03.01 | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | 550.000.000,00 | |
| 4.01.03.2.03.02 | Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik | 150.000.000,00 | |
| 4.01.03.2.03.03 | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | 749.897.000,00 | |
| 4.01.0.00.0.00.01.06 | Bagian Organisasi | 1.559.501.000,00 | |
| 4.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | 72.075.000,00 | |
| 4.01.01.2.01 | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 72.075.000,00 | |
| 4.01.01.2.01.01 | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | 72.075.000,00 | |
| 4.01.04 | PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM | 1.487.426.000,00 | |
| 4.01.04.2.02 | Penataan Organisasi | 1.487.426.000,00 | |
| 4.01.04.2.02.01 | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | 403.610.000,00 | |
| 4.01.04.2.02.02 | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | 497.396.000,00 | |
| 4.01.04.2.02.03 | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | 586.420.000,00 | |
| 4.01.0.00.0.00.01.07 | Bagian Hubungan Masyarakat | 7.615.261.000,00 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran Sementara | Ket |
|---|--|---------------------------|-----|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 4.01.04 | PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM | 7.615.261.000,00 | |
| 4.01.04.2.03 | Protokol dan Komunikasi Pimpinan | 7.615.261.000,00 | |
| 4.01.04.2.03.01 | Fasilitasi Keprotokolan | 329.000.000,00 | |
| 4.01.04.2.03.02 | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | 6.540.261.000,00 | |
| 4.01.04.2.03.03 | Pendokumentasian Tugas Pimpinan | 746.000.000,00 | |
| 4.01.0.00.0.00.01.08 | Bagian Umum | 52.234.291.650,58 | |
| 4.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | 47.107.018.708,20 | |
| 4.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan | 29.740.436.708,20 | |
| 4.01.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 29.099.624.208,20 | |
| 4.01.01.2.02.04 | Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | 45.000.000,00 | |
| 4.01.01.2.02.07 | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran | 595.812.500,00 | |
| 4.01.01.2.03 | Administrasi Umum | 14.566.582.000,00 | |
| 4.01.01.2.03.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 170.536.000,00 | |
| 4.01.01.2.03.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 1.300.000.000,00 | |
| 4.01.01.2.03.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 1.875.850.000,00 | |
| 4.01.01.2.03.06 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | 756.800.000,00 | |
| 4.01.01.2.03.08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 755.848.000,00 | |
| 4.01.01.2.03.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 662.800.000,00 | |
| 4.01.01.2.03.11 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 150.000.000,00 | |
| 4.01.01.2.03.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 150.000.000,00 | |
| 4.01.01.2.03.14 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 150.000.000,00 | |
| 4.01.01.2.03.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | 4.132.562.000,00 | |
| 4.01.01.2.03.18 | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 500.000.000,00 | |
| 4.01.01.2.03.21 | Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas | 390.000.000,00 | |
| 4.01.01.2.03.22 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | 400.000.000,00 | |
| 4.01.01.2.03.26 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan | 687.300.000,00 | |
| 4.01.01.2.03.28 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 497.550.000,00 | |
| 4.01.01.2.03.29 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan | 100.000.000,00 | |
| 4.01.01.2.03.30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 1.381.000.000,00 | |
| 4.01.01.2.03.32 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | 247.839.000,00 | |
| 4.01.01.2.03.34 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | 108.497.000,00 | |
| 4.01.01.2.03.38 | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor | 150.000.000,00 | |
| 4.01.01.2.04 | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 2.800.000.000,00 | |
| 4.01.01.2.04.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | 2.600.000.000,00 | |
| 4.01.01.2.04.09 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | 200.000.000,00 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran Sementara | Ket |
|---|--|---------------------------|-----|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 4.01.04 | PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM | 5.127.272.942,38 | |
| 4.01.04.2.01 | Pelaksanaan Administrasi Umum | 3.391.917.500,00 | |
| 4.01.04.2.01.01 | Fasilitasi Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian | 950.000.000,00 | |
| 4.01.04.2.01.03 | Pengelolaan Rumah Tangga | 2.441.917.500,00 | |
| 4.01.04.2.04 | Perencanaan dan Keuangan | 1.735.355.442,38 | |
| 4.01.04.2.04.02 | Pengelolaan Keuangan | 1.735.355.442,38 | |
| 4.02 | SEKRETARIAT DPRD | 88.731.731.957,93 | |
| 4.02.0.00.0.00.01.00 | Sekretariat DPRD | 88.731.731.957,93 | |
| 4.02.0.00.0.00.01.00 | Sekretariat DPRD | 88.731.731.957,93 | |
| 4.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | 8.885.635.000,93 | |
| 4.02.01.2.01 | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 77.882.000,00 | |
| 4.02.01.2.01.01 | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | 77.882.000,00 | |
| 4.02.01.2.02 | Administrasi Keuangan | 7.621.584.000,93 | |
| 4.02.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 7.315.956.000,93 | |
| 4.02.01.2.02.05 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | 12.910.000,00 | |
| 4.02.01.2.02.06 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 30.558.000,00 | |
| 4.02.01.2.02.09 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | 262.160.000,00 | |
| 4.02.01.2.03 | Administrasi Umum | 1.186.169.000,00 | |
| 4.02.01.2.03.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | 100.000,00 | |
| 4.02.01.2.03.19 | Pengadaan Mobil Jabatan | 1.186.069.000,00 | |
| 4.02.02 | PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN | 41.444.675.457,00 | |
| 4.02.02.2.01 | Layanan Administrasi DPRD | 14.838.905.500,00 | |
| 4.02.02.2.01.01 | Penyelenggaraan Administrasi, Ketatausahaan Dan Kepegawaian DPRD | 9.704.198.500,00 | |
| 4.02.02.2.01.02 | Fasilitasi Rapat DPRD | 1.096.315.000,00 | |
| 4.02.02.2.01.04 | Pengadaan dan Pemeliharaan Kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan DPRD | 1.001.190.000,00 | |
| 4.02.02.2.01.05 | Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor DPRD | 3.037.202.000,00 | |
| 4.02.02.2.02 | Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | 26.605.769.957,00 | |
| 4.02.02.2.02.01 | Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD | 25.936.689.957,00 | |
| 4.02.02.2.02.02 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD | 482.430.000,00 | |
| 4.02.02.2.02.03 | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD | 186.550.000,00 | |
| 4.02.03 | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | 38.401.421.500,00 | |
| 4.02.03.2.01 | Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD | 13.773.788.000,00 | |
| 4.02.03.2.01.01 | Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | 1.489.200.000,00 | |
| 4.02.03.2.01.02 | Pembahasan Rancangan Perda | 5.788.974.000,00 | |
| 4.02.03.2.01.04 | Fasilitasi penyusunan Naskah Akademik | 2.351.744.000,00 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran Sementara | Ket |
|---|--|---------------------------|-----|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 4.02.03.2.01.05 | Penyusunan Tata Tertib DPRD | 4.143.870.000,00 | |
| 4.02.03.2.02 | Pembahasan Kebijakan Anggaran | 1.890.802.000,00 | |
| 4.02.03.2.02.03 | Pembahasan APBD | 1.890.802.000,00 | |
| 4.02.03.2.03 | Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | 9.426.750.000,00 | |
| 4.02.03.2.03.01 | Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum | 1.966.750.000,00 | |
| 4.02.03.2.03.02 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur | 1.966.750.000,00 | |
| 4.02.03.2.03.03 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat | 2.538.870.000,00 | |
| 4.02.03.2.03.04 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian | 1.966.750.000,00 | |
| 4.02.03.2.03.07 | Pengawasan Penggunaan Anggaran | 987.630.000,00 | |
| 4.02.03.2.04 | Peningkatan Kapasitas DPRD | 5.541.520.000,00 | |
| 4.02.03.2.04.02 | Bimbingan Teknis DPRD | 3.685.120.000,00 | |
| 4.02.03.2.04.03 | Publikasi dan Dokumentasi Dewan | 1.549.850.000,00 | |
| 4.02.03.2.04.06 | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat | 306.550.000,00 | |
| 4.02.03.2.05 | Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | 2.494.734.250,00 | |
| 4.02.03.2.05.03 | Pelaksanaan Reses | 2.494.734.250,00 | |
| 4.02.03.2.06 | Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD | 551.340.000,00 | |
| 4.02.03.2.06.01 | Penyusunan Kode Etik DPRD | 551.340.000,00 | |
| 4.02.03.2.07 | Pembahasan Kerja Sama Daerah | 202.650,00 | |
| 4.02.03.2.07.02 | Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi | 202.650,00 | |
| 4.02.03.2.08 | Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD | 4.722.284.600,00 | |
| 4.02.03.2.08.01 | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | 2.366.081.400,00 | |
| 4.02.03.2.08.02 | Penyusunan Laporan Kinerja Pimpinan DPRD | 2.356.203.200,00 | |
| 5 | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | |
| 5.01 | PERENCANAAN | 15.593.456.008,79 | |
| 5.01.0.00.0.00.01.00 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 15.593.456.008,79 | |
| 5.01.0.00.0.00.01.00 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 15.593.456.008,79 | |
| 5.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | 10.540.977.808,79 | |
| 5.01.01.2.01 | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 202.290.000,00 | |
| 5.01.01.2.01.01 | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | 151.450.000,00 | |
| 5.01.01.2.01.02 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | 50.840.000,00 | |
| 5.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan | 7.783.276.008,79 | |
| 5.01.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 7.769.626.008,79 | |
| 5.01.01.2.02.04 | Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | 4.900.000,00 | |
| 5.01.01.2.02.06 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 8.750.000,00 | |
| 5.01.01.2.03 | Administrasi Umum | 2.442.771.800,00 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran Sementara | Ket |
|---|--|---------------------------|-----|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 5.01.01.2.03.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 226.340.000,00 | |
| 5.01.01.2.03.05 | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | 27.000.000,00 | |
| 5.01.01.2.03.06 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | 11.000.000,00 | |
| 5.01.01.2.03.07 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | 127.950.000,00 | |
| 5.01.01.2.03.08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 149.228.500,00 | |
| 5.01.01.2.03.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 240.623.500,00 | |
| 5.01.01.2.03.11 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 65.240.000,00 | |
| 5.01.01.2.03.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 10.000.000,00 | |
| 5.01.01.2.03.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | 11.769.000,00 | |
| 5.01.01.2.03.16 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 80.000.000,00 | |
| 5.01.01.2.03.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | 377.000.000,00 | |
| 5.01.01.2.03.18 | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 685.500.000,00 | |
| 5.01.01.2.03.22 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | 184.960.000,00 | |
| 5.01.01.2.03.28 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 116.160.800,00 | |
| 5.01.01.2.03.30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 90.000.000,00 | |
| 5.01.01.2.03.32 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | 40.000.000,00 | |
| 5.01.01.2.04 | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 112.640.000,00 | |
| 5.01.01.2.04.11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | 112.640.000,00 | |
| 5.01.02 | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | 1.694.877.000,00 | |
| 5.01.02.2.01 | Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah | 1.008.300.000,00 | |
| 5.01.02.2.01.01 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Kabupaten/Kota | 434.600.000,00 | |
| 5.01.02.2.01.07 | Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah | 573.700.000,00 | |
| 5.01.02.2.02 | Perencanaan Pendanaan Pembangunan Daerah | 397.577.000,00 | |
| 5.01.02.2.02.03 | Analisa dan Pengkajian Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah | 397.577.000,00 | |
| 5.01.02.2.03 | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah | 289.000.000,00 | |
| 5.01.02.2.03.03 | Evaluasi Capaian Program/Kegiatan Perangkat Daerah | 289.000.000,00 | |
| 5.01.03 | PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA | 1.184.370.000,00 | |
| 5.01.03.2.01 | Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan | 147.160.000,00 | |
| 5.01.03.2.01.02 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan | 147.160.000,00 | |
| 5.01.03.2.02 | Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia | 275.540.000,00 | |
| 5.01.03.2.02.02 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia | 150.540.000,00 | |
| 5.01.03.2.02.03 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia | 125.000.000,00 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran Sementara | Ket |
|---|---|---------------------------|-----|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 5.01.03.2.03 | Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kesejahteraan Masyarakat | 761.670.000,00 | |
| 5.01.03.2.03.01 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat | 458.850.000,00 | |
| 5.01.03.2.03.02 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat | 125.280.000,00 | |
| 5.01.03.2.03.03 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat | 177.540.000,00 | |
| 5.01.04 | PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | 841.960.000,00 | |
| 5.01.04.2.01 | Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian | 203.520.000,00 | |
| 5.01.04.2.01.01 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian | 161.480.000,00 | |
| 5.01.04.2.01.02 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian | 42.040.000,00 | |
| 5.01.04.2.02 | Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Ekonomi Kreatif | 450.140.000,00 | |
| 5.01.04.2.02.01 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Ekonomi Kreatif | 122.170.000,00 | |
| 5.01.04.2.02.02 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Ekonomi Kreatif | 85.060.000,00 | |
| 5.01.04.2.02.03 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Ekonomi Kreatif | 242.910.000,00 | |
| 5.01.04.2.03 | Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Alam | 188.300.000,00 | |
| 5.01.04.2.03.01 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam | 33.360.000,00 | |
| 5.01.04.2.03.02 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam | 85.060.000,00 | |
| 5.01.04.2.03.03 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam | 69.880.000,00 | |
| 5.01.05 | PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN | 1.331.271.200,00 | |
| 5.01.05.2.01 | Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup | 220.870.000,00 | |
| 5.01.05.2.01.01 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup | 55.480.000,00 | |
| 5.01.05.2.01.02 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup | 61.030.000,00 | |
| 5.01.05.2.01.03 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup | 104.360.000,00 | |
| 5.01.05.2.02 | Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan | 67.620.000,00 | |
| 5.01.05.2.02.01 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan | 8.340.000,00 | |
| 5.01.05.2.02.02 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan | 59.280.000,00 | |
| 5.01.05.2.03 | Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Keciptakarya dan Kewilayahan | 1.042.781.200,00 | |
| 5.01.05.2.03.01 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Keciptakarya dan Kewilayahan | 41.480.000,00 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran Sementara | Ket |
|---|--|---------------------------|-----|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 5.01.05.2.03.02 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Keciptakarya dan Kewilayahan | 345.200.000,00 | |
| 5.01.05.2.03.03 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Keciptakarya dan Kewilayahan | 656.101.200,00 | |
| 5.02 | KEUANGAN | 131.668.405.182,39 | |
| 5.02.0.00.0.00.02.00 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | 78.147.471.587,85 | |
| 5.02.0.00.0.00.02.00 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | 78.147.471.587,85 | |
| 5.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | 33.072.352.305,41 | |
| 5.02.01.2.01 | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 205.760.000,00 | |
| 5.02.01.2.01.01 | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | 149.570.000,00 | |
| 5.02.01.2.01.05 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 56.190.000,00 | |
| 5.02.01.2.02 | Administrasi Keuangan | 29.009.699.305,41 | |
| 5.02.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 28.914.379.305,41 | |
| 5.02.01.2.02.04 | Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | 25.280.000,00 | |
| 5.02.01.2.02.06 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 70.040.000,00 | |
| 5.02.01.2.03 | Administrasi Umum | 3.205.563.000,00 | |
| 5.02.01.2.03.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 347.520.000,00 | |
| 5.02.01.2.03.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 34.320.000,00 | |
| 5.02.01.2.03.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 125.600.000,00 | |
| 5.02.01.2.03.05 | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | 45.400.000,00 | |
| 5.02.01.2.03.06 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | 21.450.000,00 | |
| 5.02.01.2.03.07 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | 86.340.000,00 | |
| 5.02.01.2.03.08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 159.122.000,00 | |
| 5.02.01.2.03.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 532.277.200,00 | |
| 5.02.01.2.03.11 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 110.320.000,00 | |
| 5.02.01.2.03.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 40.094.000,00 | |
| 5.02.01.2.03.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | 35.400.000,00 | |
| 5.02.01.2.03.16 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 27.400.000,00 | |
| 5.02.01.2.03.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | 522.060.000,00 | |
| 5.02.01.2.03.18 | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 756.960.000,00 | |
| 5.02.01.2.03.22 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | 202.474.800,00 | |
| 5.02.01.2.03.30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 158.825.000,00 | |
| 5.02.01.2.04 | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 651.330.000,00 | |
| 5.02.01.2.04.09 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | 651.330.000,00 | |
| 5.02.02 | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | 3.009.734.600,00 | |
| 5.02.02.2.01 | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | 1.691.159.600,00 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran Sementara | Ket |
|---|--|---------------------------|-----|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 5.02.02.2.01.01 | Penyusunan KUA dan PPAS | 206.350.000,00 | |
| 5.02.02.2.01.03 | Penyusunan dan Review RKA SKPD/Perubahan RKA SKPD | 162.720.000,00 | |
| 5.02.02.2.01.05 | Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD | 394.200.000,00 | |
| 5.02.02.2.01.08 | Penyusunan Regulasi Bidang Anggaran | 161.140.000,00 | |
| 5.02.02.2.01.10 | Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah | 766.749.600,00 | |
| 5.02.02.2.02 | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | 1.074.145.000,00 | |
| 5.02.02.2.02.02 | Penatausahaan Pembiayaan Daerah | 859.070.000,00 | |
| 5.02.02.2.02.04 | Pemrosesan, Penerbitan dan Pendistribusian Lembar SP2D | 104.615.000,00 | |
| 5.02.02.2.02.09 | Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban (SPJ) | 110.460.000,00 | |
| 5.02.02.2.03 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | 244.430.000,00 | |
| 5.02.02.2.03.03 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Provinsi | 88.700.000,00 | |
| 5.02.02.2.03.05 | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA | 155.730.000,00 | |
| 5.02.03 | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | 4.484.720.400,00 | |
| 5.02.03.2.01 | Pengelolaan Barang Milik Daerah | 4.484.720.400,00 | |
| 5.02.03.2.01.05 | Penatausahaan Barang Milik Daerah | 514.348.000,00 | |
| 5.02.03.2.01.06 | Inventarisasi Barang Milik Daerah | 430.910.400,00 | |
| 5.02.03.2.01.07 | Koordinasi Pelaksanaan Pengamanan Fisik, Administrasi dan Hukum Barang Milik Daerah | 2.457.342.000,00 | |
| 5.02.03.2.01.08 | Koordinasi Hasil Penilaian Barang Milik Daerah | 232.200.000,00 | |
| 5.02.03.2.01.09 | Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah | 496.802.000,00 | |
| 5.02.03.2.01.10 | Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Pemindahtanganan Barang Milik Daerah | 127.348.000,00 | |
| 5.02.03.2.01.13 | Koordinasi dan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah | 225.770.000,00 | |
| 5.02.0.00.0.00.03.00 | Badan Pendapatan Daerah | 53.520.933.594,54 | |
| 5.02.0.00.0.00.03.00 | Badan Pendapatan Daerah | 53.520.933.594,54 | |
| 5.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | 46.582.500.594,54 | |
| 5.02.01.2.01 | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 389.785.000,00 | |
| 5.02.01.2.01.01 | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | 173.175.000,00 | |
| 5.02.01.2.01.05 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 216.610.000,00 | |
| 5.02.01.2.02 | Administrasi Keuangan | 39.578.323.594,54 | |
| 5.02.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 39.342.403.594,54 | |
| 5.02.01.2.02.07 | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran | 235.920.000,00 | |
| 5.02.01.2.03 | Administrasi Umum | 6.285.532.000,00 | |
| 5.02.01.2.03.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 161.789.000,00 | |
| 5.02.01.2.03.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 1.088.020.000,00 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran Sementara | Ket |
|---|--|---------------------------|-----|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 5.02.01.2.03.05 | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | 100.000.000,00 | |
| 5.02.01.2.03.06 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | 75.000.000,00 | |
| 5.02.01.2.03.08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 139.991.900,00 | |
| 5.02.01.2.03.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 400.000.000,00 | |
| 5.02.01.2.03.11 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 1.665.451.800,00 | |
| 5.02.01.2.03.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 4.996.500,00 | |
| 5.02.01.2.03.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | 19.287.600,00 | |
| 5.02.01.2.03.16 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 35.190.000,00 | |
| 5.02.01.2.03.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | 550.000.000,00 | |
| 5.02.01.2.03.18 | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 515.726.000,00 | |
| 5.02.01.2.03.24 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | 689.735.700,00 | |
| 5.02.01.2.03.30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 640.343.500,00 | |
| 5.02.01.2.03.34 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | 200.000.000,00 | |
| 5.02.01.2.04 | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 328.860.000,00 | |
| 5.02.01.2.04.09 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | 328.860.000,00 | |
| 5.02.04 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | 6.938.433.000,00 | |
| 5.02.04.2.02 | Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah | 6.938.433.000,00 | |
| 5.02.04.2.02.01 | Penyusunan Kebijakan Teknis Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah | 556.525.000,00 | |
| 5.02.04.2.02.06 | Perumusan Kebijakan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Yang Berbasis Teknologi Informasi | 791.705.000,00 | |
| 5.02.04.2.02.07 | Konsultasi dan Pendampingan Wajib Pajak dan Retribusi | 1.582.323.000,00 | |
| 5.02.04.2.02.08 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | 2.086.080.000,00 | |
| 5.02.04.2.02.09 | Pemeliharaan dan Pemutakhiran Basis Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | 1.195.950.000,00 | |
| 5.02.04.2.02.10 | Pemeriksaan Pajak Daerah | 675.850.000,00 | |
| 5.02.04.2.02.11 | Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | 50.000.000,00 | |
| 5.03 | KEPEGAWAIAN | 13.678.920.739,57 | |
| 5.03.0.00.0.00.01.00 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia | 13.678.920.739,57 | |
| 5.03.0.00.0.00.01.00 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia | 13.678.920.739,57 | |
| 5.03.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | 10.905.356.739,57 | |
| 5.03.01.2.01 | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 217.874.000,00 | |
| 5.03.01.2.01.01 | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | 154.474.000,00 | |
| 5.03.01.2.01.02 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | 941.000,00 | |
| 5.03.01.2.01.03 | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | 61.518.000,00 | |
| 5.03.01.2.01.05 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 941.000,00 | |
| 5.03.01.2.02 | Administrasi Keuangan | 7.377.252.709,56 | |
| 5.03.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 7.311.714.709,56 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran Sementara | Ket |
|---|--|---------------------------|-----|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 5.03.01.2.02.04 | Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | 44.666.000,00 | |
| 5.03.01.2.02.06 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 19.922.000,00 | |
| 5.03.01.2.02.07 | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran | 950.000,00 | |
| 5.03.01.2.03 | Administrasi Umum | 3.198.472.030,00 | |
| 5.03.01.2.03.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1.796.000,00 | |
| 5.03.01.2.03.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 22.470.000,00 | |
| 5.03.01.2.03.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 23.453.000,00 | |
| 5.03.01.2.03.05 | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | 25.650.000,00 | |
| 5.03.01.2.03.06 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | 40.292.000,00 | |
| 5.03.01.2.03.07 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | 80.178.000,00 | |
| 5.03.01.2.03.08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 67.266.000,00 | |
| 5.03.01.2.03.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 222.183.000,00 | |
| 5.03.01.2.03.11 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 115.697.000,00 | |
| 5.03.01.2.03.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | 4.489.000,00 | |
| 5.03.01.2.03.16 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 28.583.000,00 | |
| 5.03.01.2.03.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | 265.960.000,00 | |
| 5.03.01.2.03.18 | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 1.511.013.030,00 | |
| 5.03.01.2.03.20 | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | 212.330.000,00 | |
| 5.03.01.2.03.24 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | 219.331.000,00 | |
| 5.03.01.2.03.28 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 152.431.000,00 | |
| 5.03.01.2.03.30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 171.898.000,00 | |
| 5.03.01.2.03.34 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | 33.452.000,00 | |
| 5.03.01.2.04 | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 111.758.000,00 | |
| 5.03.01.2.04.09 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | 111.758.000,00 | |
| 5.03.02 | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | 2.773.564.000,00 | |
| 5.03.02.2.01 | Pengelolaan Data dan Informasi ASN | 194.958.000,00 | |
| 5.03.02.2.01.04 | Pengelolaan Data Kepegawaian | 194.958.000,00 | |
| 5.03.02.2.02 | Administrasi Kepegawaian | 1.284.538.000,00 | |
| 5.03.02.2.02.01 | Penyusunan Analisis Kebutuhan, Formasi, dan Pelaksanaan Pengadaan ASN | 455.383.000,00 | |
| 5.03.02.2.02.02 | Penataan dan Mutasi Jabatan | 503.691.000,00 | |
| 5.03.02.2.02.04 | Penyelesaian Pemberhentian dan Pemberian Pensiun | 168.937.000,00 | |
| 5.03.02.2.02.10 | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | 156.527.000,00 | |
| 5.03.02.2.03 | Peningkatan Kapasitas ASN | 669.743.000,00 | |
| 5.03.02.2.03.01 | Peningkatan Kapasitas ASN | 75.249.000,00 | |
| 5.03.02.2.03.02 | Pengembangan Penilaian Kinerja ASN | 217.453.000,00 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran Sementara | Ket |
|---|---|---------------------------|-----|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 5.03.02.2.03.05 | Fasilitasi Profesi ASN | 222.303.000,00 | |
| 5.03.02.2.03.09 | Pengelolaan Karir dalam Jabatan Fungsional | 154.738.000,00 | |
| 5.03.02.2.05 | Pembinaan ASN | 624.325.000,00 | |
| 5.03.02.2.05.01 | Pembinaan Disiplin ASN | 527.639.000,00 | |
| 5.03.02.2.05.03 | Penegakkan Disiplin, Pemberian Penghargaan dan Perlindungan | 96.686.000,00 | |
| 5.04 | PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | 3.215.369.970,00 | |
| 5.03.0.00.0.00.01.00 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia | 3.215.369.970,00 | |
| 5.03.0.00.0.00.01.00 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia | 3.215.369.970,00 | |
| 5.04.02 | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 3.215.369.970,00 | |
| 5.04.02.2.01 | Pengembangan Kompetensi Teknis | 1.949.592.970,00 | |
| 5.04.02.2.01.03 | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | 680.835.970,00 | |
| 5.04.02.2.01.04 | Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | 1.268.757.000,00 | |
| 5.04.02.2.02 | Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional | 1.265.777.000,00 | |
| 5.04.02.2.02.07 | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan | 1.265.777.000,00 | |
| 5.05 | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | 2.194.710.000,00 | |
| 5.01.0.00.0.00.01.00 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 2.194.710.000,00 | |
| 5.01.0.00.0.00.01.00 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 2.194.710.000,00 | |
| 5.05.02 | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 2.194.710.000,00 | |
| 5.05.02.2.01 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | 1.776.680.000,00 | |
| 5.05.02.2.01.01 | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah | 1.776.680.000,00 | |
| 5.05.02.2.04 | Pengembangan Inovasi dan Teknologi | 418.030.000,00 | |
| 5.05.02.2.04.01 | Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi | 276.300.000,00 | |
| 5.05.02.2.04.03 | Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif | 61.870.000,00 | |
| 5.05.02.2.04.04 | Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan | 79.860.000,00 | |
| 6 | UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN | | |
| 6.01 | INSPEKTORAT DAERAH | 14.310.569.222,30 | |
| 6.01.0.00.0.00.01.00 | Inspektorat | 14.310.569.222,30 | |
| 6.01.0.00.0.00.01.00 | Inspektorat | 14.310.569.222,30 | |
| 6.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | 10.365.069.222,30 | |
| 6.01.01.2.01 | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 262.500.000,00 | |
| 6.01.01.2.01.01 | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | 262.500.000,00 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran Sementara | Ket |
|---|---|---------------------------|-----|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 6.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan | 6.870.295.222,30 | |
| 6.01.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 6.768.595.222,30 | |
| 6.01.01.2.02.06 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 21.000.000,00 | |
| 6.01.01.2.02.07 | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran | 80.700.000,00 | |
| 6.01.01.2.03 | Administrasi Umum | 1.982.274.000,00 | |
| 6.01.01.2.03.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 59.000.000,00 | |
| 6.01.01.2.03.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 336.000.000,00 | |
| 6.01.01.2.03.06 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | 323.600.000,00 | |
| 6.01.01.2.03.08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 136.000.000,00 | |
| 6.01.01.2.03.09 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | 31.900.000,00 | |
| 6.01.01.2.03.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 137.000.000,00 | |
| 6.01.01.2.03.11 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 120.350.000,00 | |
| 6.01.01.2.03.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | 17.912.000,00 | |
| 6.01.01.2.03.16 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 31.581.500,00 | |
| 6.01.01.2.03.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | 311.680.500,00 | |
| 6.01.01.2.03.18 | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 477.250.000,00 | |
| 6.01.01.2.04 | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 1.250.000.000,00 | |
| 6.01.01.2.04.09 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | 1.250.000.000,00 | |
| 6.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | 2.924.700.000,00 | |
| 6.01.02.2.01 | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | 1.435.200.000,00 | |
| 6.01.02.2.01.01 | Audit Kinerja dan Keuangan | 947.500.000,00 | |
| 6.01.02.2.01.02 | Review Kinerja dan Keuangan | 319.200.000,00 | |
| 6.01.02.2.01.04 | Evaluasi Kinerja dan Keuangan | 168.500.000,00 | |
| 6.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | 1.489.500.000,00 | |
| 6.01.02.2.02.01 | Audit Kinerja dan Keuangan | 291.800.000,00 | |
| 6.01.02.2.02.02 | Review Kinerja dan Keuangan | 45.250.000,00 | |
| 6.01.02.2.02.03 | Pemantauan Kinerja dan Keuangan | 703.950.000,00 | |
| 6.01.02.2.02.04 | Evaluasi Kinerja dan Keuangan | 448.500.000,00 | |
| 6.01.03 | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | 1.020.800.000,00 | |
| 6.01.03.2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitas Pengawasan | 706.800.000,00 | |
| 6.01.03.2.01.01 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan | 155.800.000,00 | |
| 6.01.03.2.01.02 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan | 551.000.000,00 | |
| 6.01.03.2.02 | Asistensi dan Pendampingan | 314.000.000,00 | |
| 6.01.03.2.02.02 | Asistensi dan Pendampingan | 314.000.000,00 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran Sementara | Ket |
|---|--|---------------------------|-----|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 7 | UNSUR KEWILAYAHAN | | |
| 7.01 | KECAMATAN | 205.940.180.098,17 | |
| 7.01.0.00.0.00.01.00 | Kecamatan Klojen | 35.418.619.579,74 | |
| 7.01.0.00.0.00.01.00 | Kecamatan Klojen | 19.175.752.579,74 | |
| 7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | 18.954.622.579,74 | |
| 7.01.01.2.01 | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 17.969.222.579,74 | |
| 7.01.01.2.01.01 | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | 33.000.000,00 | |
| 7.01.01.2.01.02 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | 900.000,00 | |
| 7.01.01.2.01.05 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 5.600.000,00 | |
| 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan | 18.004.622.579,74 | |
| 7.01.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 17.929.722.579,74 | |
| 7.01.01.2.02.06 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 900.000,00 | |
| 7.01.01.2.02.07 | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran | 74.000.000,00 | |
| 7.01.01.2.03 | Administrasi Umum | 895.500.000,00 | |
| 7.01.01.2.03.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 4.161.500,00 | |
| 7.01.01.2.03.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 57.900.000,00 | |
| 7.01.01.2.03.05 | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | 104.900.000,00 | |
| 7.01.01.2.03.08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 73.000.000,00 | |
| 7.01.01.2.03.09 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | 43.538.500,00 | |
| 7.01.01.2.03.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 42.000.000,00 | |
| 7.01.01.2.03.11 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 11.000.000,00 | |
| 7.01.01.2.03.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 2.400.000,00 | |
| 7.01.01.2.03.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | 7.400.000,00 | |
| 7.01.01.2.03.16 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 15.000.000,00 | |
| 7.01.01.2.03.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | 222.100.000,00 | |
| 7.01.01.2.03.18 | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 59.000.000,00 | |
| 7.01.01.2.03.28 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 86.100.000,00 | |
| 7.01.01.2.03.30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 100.000.000,00 | |
| 7.01.01.2.03.34 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | 17.000.000,00 | |
| 7.01.01.2.03.38 | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor | 50.000.000,00 | |
| 7.01.01.2.04 | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 15.000.000,00 | |
| 7.01.01.2.04.09 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | 15.000.000,00 | |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 10.800.000,00 | |
| 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 7.000.000,00 | |
| 7.01.02.2.01.02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 7.000.000,00 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran Sementara | Ket |
|---|---|---------------------------|-----|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | 3.800.000,00 | |
| 7.01.02.2.02.01 | Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan | 3.800.000,00 | |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 148.530.000,00 | |
| 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 148.530.000,00 | |
| 7.01.03.2.02.03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 123.230.000,00 | |
| 7.01.03.2.02.04 | Evaluasi Kelurahan | 25.300.000,00 | |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 20.000.000,00 | |
| 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 20.000.000,00 | |
| 7.01.04.2.01.01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan | 20.000.000,00 | |
| 7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 41.800.000,00 | |
| 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | 41.800.000,00 | |
| 7.01.05.2.01.08 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 41.800.000,00 | |
| 7.01.0.00.0.00.01.02 | Kelurahan Klojen | 1.306.290.000,00 | |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 351.500.000,00 | |
| 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 327.000.000,00 | |
| 7.01.02.2.01.02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 327.000.000,00 | |
| 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | 24.500.000,00 | |
| 7.01.02.2.02.01 | Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan | 24.500.000,00 | |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 924.790.000,00 | |
| 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 924.790.000,00 | |
| 7.01.03.2.02.01 | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan | 14.860.000,00 | |
| 7.01.03.2.02.02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 198.430.000,00 | |
| 7.01.03.2.02.03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 711.500.000,00 | |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 30.000.000,00 | |
| 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 30.000.000,00 | |
| 7.01.04.2.01.01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan | 30.000.000,00 | |
| 7.01.0.00.0.00.01.03 | Kelurahan Rampalcelaket | 1.190.215.000,00 | |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 287.429.400,00 | |
| 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 284.254.400,00 | |
| 7.01.02.2.01.02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 284.254.400,00 | |
| 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | 3.175.000,00 | |
| 7.01.02.2.02.01 | Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan | 3.175.000,00 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran Sementara | Ket |
|---|---|---------------------------|-----|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 888.740.600,00 | |
| 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 888.740.600,00 | |
| 7.01.03.2.02.01 | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan | 17.080.000,00 | |
| 7.01.03.2.02.02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 234.229.800,00 | |
| 7.01.03.2.02.03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 637.430.800,00 | |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 14.045.000,00 | |
| 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 14.045.000,00 | |
| 7.01.04.2.01.01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan | 14.045.000,00 | |
| 7.01.0.00.0.00.01.04 | Kelurahan Samaan | 1.248.703.000,00 | |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 281.373.000,00 | |
| 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 279.733.000,00 | |
| 7.01.02.2.01.02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 279.733.000,00 | |
| 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | 1.640.000,00 | |
| 7.01.02.2.02.01 | Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan | 1.640.000,00 | |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 960.795.000,00 | |
| 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 960.795.000,00 | |
| 7.01.03.2.02.01 | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan | 10.070.000,00 | |
| 7.01.03.2.02.02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 140.000.000,00 | |
| 7.01.03.2.02.03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 810.725.000,00 | |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 6.535.000,00 | |
| 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 6.535.000,00 | |
| 7.01.04.2.01.01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan | 6.535.000,00 | |
| 7.01.0.00.0.00.01.05 | Kelurahan Kiduldalem | 1.284.620.000,00 | |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 315.664.500,00 | |
| 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 306.339.500,00 | |
| 7.01.02.2.01.02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 306.339.500,00 | |
| 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | 9.325.000,00 | |
| 7.01.02.2.02.01 | Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan | 9.325.000,00 | |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 956.855.500,00 | |
| 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 956.855.500,00 | |
| 7.01.03.2.02.01 | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan | 27.170.500,00 | |
| 7.01.03.2.02.02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 129.350.000,00 | |
| 7.01.03.2.02.03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 800.335.000,00 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran Sementara | Ket |
|---|---|---------------------------|-----|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 12.100.000,00 | |
| 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 12.100.000,00 | |
| 7.01.04.2.01.01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan | 12.100.000,00 | |
| 7.01.0.00.0.00.01.06 | Kelurahan Sukoharjo | 1.553.626.000,00 | |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 302.801.000,00 | |
| 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 284.951.000,00 | |
| 7.01.02.2.01.02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 284.951.000,00 | |
| 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | 17.850.000,00 | |
| 7.01.02.2.02.01 | Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan | 17.850.000,00 | |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 1.245.275.000,00 | |
| 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 1.245.275.000,00 | |
| 7.01.03.2.02.01 | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan | 13.250.000,00 | |
| 7.01.03.2.02.02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 223.410.000,00 | |
| 7.01.03.2.02.03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 1.008.615.000,00 | |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 5.550.000,00 | |
| 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 5.550.000,00 | |
| 7.01.04.2.01.01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan | 5.550.000,00 | |
| 7.01.0.00.0.00.01.07 | Kelurahan Kasin | 1.852.057.000,00 | |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 299.132.000,00 | |
| 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 297.382.000,00 | |
| 7.01.02.2.01.02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 297.382.000,00 | |
| 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | 1.750.000,00 | |
| 7.01.02.2.02.01 | Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan | 1.750.000,00 | |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 1.542.275.000,00 | |
| 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 1.542.275.000,00 | |
| 7.01.03.2.02.01 | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan | 21.000.000,00 | |
| 7.01.03.2.02.02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 250.000.000,00 | |
| 7.01.03.2.02.03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 1.271.275.000,00 | |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 10.650.000,00 | |
| 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 10.650.000,00 | |
| 7.01.04.2.01.01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan | 10.650.000,00 | |
| 7.01.0.00.0.00.01.08 | Kelurahan Kauman | 1.721.268.000,00 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran Sementara | Ket |
|---|---|---------------------------|-----|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 238.837.000,00 | |
| 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 237.617.000,00 | |
| 7.01.02.2.01.02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 237.617.000,00 | |
| 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | 1.220.000,00 | |
| 7.01.02.2.02.01 | Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan | 1.220.000,00 | |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 1.470.606.000,00 | |
| 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 1.470.606.000,00 | |
| 7.01.03.2.02.01 | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan | 14.645.000,00 | |
| 7.01.03.2.02.02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 255.750.000,00 | |
| 7.01.03.2.02.03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 1.200.211.000,00 | |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 11.825.000,00 | |
| 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 11.825.000,00 | |
| 7.01.04.2.01.01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan | 11.825.000,00 | |
| 7.01.0.00.0.00.01.09 | Kelurahan Oro-Oro Dowo | 1.641.099.000,00 | |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 282.420.000,00 | |
| 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 278.420.000,00 | |
| 7.01.02.2.01.02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 278.420.000,00 | |
| 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | 4.000.000,00 | |
| 7.01.02.2.02.01 | Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan | 4.000.000,00 | |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 1.346.879.000,00 | |
| 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 1.346.879.000,00 | |
| 7.01.03.2.02.01 | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan | 17.151.000,00 | |
| 7.01.03.2.02.02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 305.000.000,00 | |
| 7.01.03.2.02.03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 1.024.728.000,00 | |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 11.800.000,00 | |
| 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 11.800.000,00 | |
| 7.01.04.2.01.01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan | 11.800.000,00 | |
| 7.01.0.00.0.00.01.10 | Kelurahan Bareng | 1.695.622.000,00 | |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 228.234.000,00 | |
| 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 226.234.000,00 | |
| 7.01.02.2.01.02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 226.234.000,00 | |
| 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | 2.000.000,00 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran Sementara | Ket |
|---|---|---------------------------|-----|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 7.01.02.2.02.01 | Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan | 2.000.000,00 | |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 1.452.388.000,00 | |
| 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 1.452.388.000,00 | |
| 7.01.03.2.02.01 | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan | 15.000.000,00 | |
| 7.01.03.2.02.02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 225.400.000,00 | |
| 7.01.03.2.02.03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 1.211.988.000,00 | |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 15.000.000,00 | |
| 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 15.000.000,00 | |
| 7.01.04.2.01.01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan | 15.000.000,00 | |
| 7.01.0.00.0.00.01.11 | Kelurahan Gadingkasri | 1.351.731.000,00 | |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 290.553.500,00 | |
| 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 275.025.500,00 | |
| 7.01.02.2.01.02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 275.025.500,00 | |
| 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | 15.528.000,00 | |
| 7.01.02.2.02.01 | Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan | 15.528.000,00 | |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 1.011.632.500,00 | |
| 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 1.011.632.500,00 | |
| 7.01.03.2.02.01 | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan | 13.640.000,00 | |
| 7.01.03.2.02.02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 161.000.000,00 | |
| 7.01.03.2.02.03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 836.992.500,00 | |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 49.545.000,00 | |
| 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 49.545.000,00 | |
| 7.01.04.2.01.01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan | 49.545.000,00 | |
| 7.01.0.00.0.00.01.12 | Kelurahan Penanggungan | 1.397.636.000,00 | |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 360.056.000,00 | |
| 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 350.791.000,00 | |
| 7.01.02.2.01.02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 350.791.000,00 | |
| 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | 9.265.000,00 | |
| 7.01.02.2.02.01 | Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan | 9.265.000,00 | |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 1.016.305.000,00 | |
| 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 1.016.305.000,00 | |
| 7.01.03.2.02.01 | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan | 17.365.000,00 | |
| 7.01.03.2.02.02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 157.750.000,00 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran Sementara | Ket |
|---|---|---------------------------|-----|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 7.01.03.2.02.03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 841.190.000,00 | |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 21.275.000,00 | |
| 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 21.275.000,00 | |
| 7.01.04.2.01.01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan | 21.275.000,00 | |
| 7.01.0.00.0.00.02.00 | Kecamatan Blimbing | 41.807.009.526,50 | |
| 7.01.0.00.0.00.02.00 | Kecamatan Blimbing | 20.204.343.526,50 | |
| 7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | 19.962.564.526,50 | |
| 7.01.01.2.01 | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 56.599.000,00 | |
| 7.01.01.2.01.01 | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | 54.375.000,00 | |
| 7.01.01.2.01.02 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | 1.224.000,00 | |
| 7.01.01.2.01.05 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1.000.000,00 | |
| 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan | 19.039.920.526,50 | |
| 7.01.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 18.962.000.526,50 | |
| 7.01.01.2.02.06 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1.000.000,00 | |
| 7.01.01.2.02.07 | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran | 76.920.000,00 | |
| 7.01.01.2.03 | Administrasi Umum | 794.895.000,00 | |
| 7.01.01.2.03.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 3.050.000,00 | |
| 7.01.01.2.03.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 41.500.000,00 | |
| 7.01.01.2.03.05 | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | 57.600.000,00 | |
| 7.01.01.2.03.08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 84.000.000,00 | |
| 7.01.01.2.03.09 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | 6.050.000,00 | |
| 7.01.01.2.03.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 60.958.000,00 | |
| 7.01.01.2.03.11 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 57.717.000,00 | |
| 7.01.01.2.03.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 5.480.000,00 | |
| 7.01.01.2.03.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | 4.800.000,00 | |
| 7.01.01.2.03.16 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 30.650.000,00 | |
| 7.01.01.2.03.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | 150.800.000,00 | |
| 7.01.01.2.03.18 | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 54.900.000,00 | |
| 7.01.01.2.03.22 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | 93.990.000,00 | |
| 7.01.01.2.03.28 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 74.000.000,00 | |
| 7.01.01.2.03.30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 69.400.000,00 | |
| 7.01.01.2.04 | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 71.150.000,00 | |
| 7.01.01.2.04.09 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | 71.150.000,00 | |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 53.904.000,00 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran Sementara | Ket |
|---|---|---------------------------|-----|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 15.400.000,00 | |
| 7.01.02.2.01.02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 15.400.000,00 | |
| 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | 36.054.000,00 | |
| 7.01.02.2.02.01 | Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan | 36.054.000,00 | |
| 7.01.02.2.03 | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | 2.450.000,00 | |
| 7.01.02.2.03.01 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | 2.450.000,00 | |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 110.575.000,00 | |
| 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 110.575.000,00 | |
| 7.01.03.2.02.01 | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan | 26.475.000,00 | |
| 7.01.03.2.02.03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 55.500.000,00 | |
| 7.01.03.2.02.04 | Evaluasi Kelurahan | 28.600.000,00 | |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 27.300.000,00 | |
| 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 27.300.000,00 | |
| 7.01.04.2.01.01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan | 27.300.000,00 | |
| 7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 50.000.000,00 | |
| 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | 50.000.000,00 | |
| 7.01.05.2.01.08 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 50.000.000,00 | |
| 7.01.0.00.0.00.02.02 | Kelurahan Blimbing | 1.517.292.000,00 | |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 346.659.000,00 | |
| 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 338.659.000,00 | |
| 7.01.02.2.01.02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 338.659.000,00 | |
| 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | 8.000.000,00 | |
| 7.01.02.2.02.01 | Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan | 8.000.000,00 | |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 1.148.083.000,00 | |
| 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 1.148.083.000,00 | |
| 7.01.03.2.02.01 | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan | 12.450.000,00 | |
| 7.01.03.2.02.02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 231.155.750,00 | |
| 7.01.03.2.02.03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 904.477.250,00 | |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 22.550.000,00 | |
| 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 22.550.000,00 | |
| 7.01.04.2.01.01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan | 22.550.000,00 | |
| 7.01.0.00.0.00.02.03 | Kelurahan Polowijen | 1.282.084.000,00 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran Sementara | Ket |
|---|---|---------------------------|-----|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 363.184.000,00 | |
| 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 355.484.000,00 | |
| 7.01.02.2.01.02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 355.484.000,00 | |
| 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | 7.700.000,00 | |
| 7.01.02.2.02.01 | Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan | 7.700.000,00 | |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 908.500.000,00 | |
| 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 908.500.000,00 | |
| 7.01.03.2.02.01 | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan | 10.000.000,00 | |
| 7.01.03.2.02.02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 215.000.000,00 | |
| 7.01.03.2.02.03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 683.500.000,00 | |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 10.400.000,00 | |
| 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 10.400.000,00 | |
| 7.01.04.2.01.01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan | 10.400.000,00 | |
| 7.01.0.00.0.00.02.04 | Kelurahan Arjosari | 1.302.770.000,00 | |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 255.440.000,00 | |
| 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 255.090.000,00 | |
| 7.01.02.2.01.02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 255.090.000,00 | |
| 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | 350.000,00 | |
| 7.01.02.2.02.01 | Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan | 350.000,00 | |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 1.029.080.000,00 | |
| 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 1.029.080.000,00 | |
| 7.01.03.2.02.01 | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan | 14.950.000,00 | |
| 7.01.03.2.02.02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 150.000.000,00 | |
| 7.01.03.2.02.03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 864.130.000,00 | |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 18.250.000,00 | |
| 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 18.250.000,00 | |
| 7.01.04.2.01.01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan | 18.250.000,00 | |
| 7.01.0.00.0.00.02.05 | Kelurahan Purwodadi | 1.895.133.000,00 | |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 541.614.500,00 | |
| 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 285.442.900,00 | |
| 7.01.02.2.01.02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 285.442.900,00 | |
| 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | 256.171.600,00 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran Sementara | Ket |
|---|---|---------------------------|-----|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 7.01.02.2.02.01 | Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan | 256.171.600,00 | |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 1.344.148.500,00 | |
| 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 1.344.148.500,00 | |
| 7.01.03.2.02.01 | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan | 27.865.000,00 | |
| 7.01.03.2.02.03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 1.316.283.500,00 | |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 9.370.000,00 | |
| 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 9.370.000,00 | |
| 7.01.04.2.01.01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan | 9.370.000,00 | |
| 7.01.0.00.0.00.02.06 | Kelurahan Pandanwangi | 2.531.981.000,00 | |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 307.600.000,00 | |
| 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 301.600.000,00 | |
| 7.01.02.2.01.02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 301.600.000,00 | |
| 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | 6.000.000,00 | |
| 7.01.02.2.02.01 | Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan | 6.000.000,00 | |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 2.199.881.000,00 | |
| 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 2.199.881.000,00 | |
| 7.01.03.2.02.01 | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan | 10.000.000,00 | |
| 7.01.03.2.02.02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 217.881.000,00 | |
| 7.01.03.2.02.03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 1.972.000.000,00 | |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 24.500.000,00 | |
| 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 24.500.000,00 | |
| 7.01.04.2.01.01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan | 24.500.000,00 | |
| 7.01.0.00.0.00.02.07 | Kelurahan Purwantoro | 2.837.781.000,00 | |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 376.960.000,00 | |
| 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 366.600.000,00 | |
| 7.01.02.2.01.02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 366.600.000,00 | |
| 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | 10.360.000,00 | |
| 7.01.02.2.02.01 | Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan | 10.360.000,00 | |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 2.451.663.500,00 | |
| 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 2.451.663.500,00 | |
| 7.01.03.2.02.01 | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan | 25.527.500,00 | |
| 7.01.03.2.02.02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 238.436.000,00 | |
| 7.01.03.2.02.03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 2.187.700.000,00 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran Sementara | Ket |
|---|---|---------------------------|-----|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 9.157.500,00 | |
| 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 9.157.500,00 | |
| 7.01.04.2.01.01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan | 9.157.500,00 | |
| 7.01.0.00.0.00.02.08 | Kelurahan Bunulrejo | 2.474.447.000,00 | |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 318.097.000,00 | |
| 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 306.287.000,00 | |
| 7.01.02.2.01.02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 306.287.000,00 | |
| 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | 11.810.000,00 | |
| 7.01.02.2.02.01 | Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan | 11.810.000,00 | |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 2.154.100.000,00 | |
| 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 2.154.100.000,00 | |
| 7.01.03.2.02.01 | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan | 6.500.000,00 | |
| 7.01.03.2.02.02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 346.550.000,00 | |
| 7.01.03.2.02.03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 1.801.050.000,00 | |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 2.250.000,00 | |
| 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 2.250.000,00 | |
| 7.01.04.2.01.01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan | 2.250.000,00 | |
| 7.01.0.00.0.00.02.09 | Kelurahan Kesatrian | 1.688.557.000,00 | |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 234.527.000,00 | |
| 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 234.527.000,00 | |
| 7.01.02.2.01.02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 234.527.000,00 | |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 1.432.430.000,00 | |
| 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 1.432.430.000,00 | |
| 7.01.03.2.02.01 | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan | 15.300.000,00 | |
| 7.01.03.2.02.02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 395.700.000,00 | |
| 7.01.03.2.02.03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 1.021.430.000,00 | |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 21.600.000,00 | |
| 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 21.600.000,00 | |
| 7.01.04.2.01.01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan | 21.600.000,00 | |
| 7.01.0.00.0.00.02.10 | Kelurahan Polehan | 1.813.740.000,00 | |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 258.862.500,00 | |
| 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 257.662.500,00 | |
| 7.01.02.2.01.02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 257.662.500,00 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran Sementara | Ket |
|---|---|---------------------------|-----|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | 1.200.000,00 | |
| 7.01.02.2.02.01 | Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan | 1.200.000,00 | |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 1.540.422.500,00 | |
| 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 1.540.422.500,00 | |
| 7.01.03.2.02.01 | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan | 14.500.000,00 | |
| 7.01.03.2.02.02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 313.330.000,00 | |
| 7.01.03.2.02.03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 1.212.592.500,00 | |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 14.455.000,00 | |
| 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 14.455.000,00 | |
| 7.01.04.2.01.01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan | 14.455.000,00 | |
| 7.01.0.00.0.00.02.11 | Kelurahan Jodipan | 1.644.478.000,00 | |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 278.924.500,00 | |
| 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 276.348.500,00 | |
| 7.01.02.2.01.02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 276.348.500,00 | |
| 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | 2.576.000,00 | |
| 7.01.02.2.02.01 | Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan | 2.576.000,00 | |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 1.361.703.500,00 | |
| 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 1.361.703.500,00 | |
| 7.01.03.2.02.01 | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan | 15.810.000,00 | |
| 7.01.03.2.02.02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 162.137.000,00 | |
| 7.01.03.2.02.03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 1.183.756.500,00 | |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 3.850.000,00 | |
| 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 3.850.000,00 | |
| 7.01.04.2.01.01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan | 3.850.000,00 | |
| 7.01.0.00.0.00.02.12 | Kelurahan Balarjosari | 1.372.060.000,00 | |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 339.725.000,00 | |
| 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 331.850.000,00 | |
| 7.01.02.2.01.02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 331.850.000,00 | |
| 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | 7.875.000,00 | |
| 7.01.02.2.02.01 | Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan | 7.875.000,00 | |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 1.025.720.000,00 | |
| 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 1.025.720.000,00 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran Sementara | Ket |
|---|---|---------------------------|-----|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 7.01.03.2.02.01 | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan | 9.030.000,00 | |
| 7.01.03.2.02.02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 190.460.000,00 | |
| 7.01.03.2.02.03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 826.230.000,00 | |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 6.615.000,00 | |
| 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 6.615.000,00 | |
| 7.01.04.2.01.01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan | 6.615.000,00 | |
| 7.01.0.00.0.00.03.00 | Kecamatan Kedungkandang | 46.470.186.625,38 | |
| 7.01.0.00.0.00.03.00 | Kecamatan Kedungkandang | 22.651.561.625,38 | |
| 7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | 22.245.795.475,38 | |
| 7.01.01.2.01 | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 40.250.000,00 | |
| 7.01.01.2.01.01 | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | 37.000.000,00 | |
| 7.01.01.2.01.02 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | 1.500.000,00 | |
| 7.01.01.2.01.05 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1.750.000,00 | |
| 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan | 21.075.600.625,38 | |
| 7.01.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 20.995.848.625,38 | |
| 7.01.01.2.02.06 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2.000.000,00 | |
| 7.01.01.2.02.07 | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran | 77.752.000,00 | |
| 7.01.01.2.03 | Administrasi Umum | 1.124.944.850,00 | |
| 7.01.01.2.03.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 16.400.000,00 | |
| 7.01.01.2.03.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 45.000.000,00 | |
| 7.01.01.2.03.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 45.000.000,00 | |
| 7.01.01.2.03.05 | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | 70.880.000,00 | |
| 7.01.01.2.03.08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 113.000.000,00 | |
| 7.01.01.2.03.09 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | 10.000.000,00 | |
| 7.01.01.2.03.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 35.386.000,00 | |
| 7.01.01.2.03.11 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 10.975.000,00 | |
| 7.01.01.2.03.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 5.000.000,00 | |
| 7.01.01.2.03.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | 5.000.000,00 | |
| 7.01.01.2.03.16 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 20.000.000,00 | |
| 7.01.01.2.03.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | 185.824.000,00 | |
| 7.01.01.2.03.18 | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 30.000.000,00 | |
| 7.01.01.2.03.20 | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | 300.000.000,00 | |
| 7.01.01.2.03.28 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 54.549.850,00 | |
| 7.01.01.2.03.30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 76.030.000,00 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran Sementara | Ket |
|---|---|---------------------------|-----|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 7.01.01.2.03.38 | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor | 101.900.000,00 | |
| 7.01.01.2.04 | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 5.000.000,00 | |
| 7.01.01.2.04.09 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | 5.000.000,00 | |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 67.446.750,00 | |
| 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 45.654.750,00 | |
| 7.01.02.2.01.02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 45.654.750,00 | |
| 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | 21.792.000,00 | |
| 7.01.02.2.02.01 | Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan | 21.792.000,00 | |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 86.504.400,00 | |
| 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 86.504.400,00 | |
| 7.01.03.2.02.01 | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan | 25.000.000,00 | |
| 7.01.03.2.02.03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 40.936.400,00 | |
| 7.01.03.2.02.04 | Evaluasi Kelurahan | 20.568.000,00 | |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 53.670.000,00 | |
| 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 53.670.000,00 | |
| 7.01.04.2.01.01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan | 53.670.000,00 | |
| 7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 198.145.000,00 | |
| 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | 198.145.000,00 | |
| 7.01.05.2.01.08 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 198.145.000,00 | |
| 7.01.0.00.0.00.03.02 | Kelurahan Kedungkandang | 1.617.206.000,00 | |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 210.114.600,00 | |
| 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 201.314.600,00 | |
| 7.01.02.2.01.02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 201.314.600,00 | |
| 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | 8.800.000,00 | |
| 7.01.02.2.02.01 | Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan | 8.800.000,00 | |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 1.407.091.400,00 | |
| 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 1.407.091.400,00 | |
| 7.01.03.2.02.01 | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan | 11.862.000,00 | |
| 7.01.03.2.02.02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 320.450.000,00 | |
| 7.01.03.2.02.03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 1.074.779.400,00 | |
| 7.01.0.00.0.00.03.03 | Kelurahan Kotalama | 2.651.249.000,00 | |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 374.100.000,00 | |
| 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 371.600.000,00 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran Sementara | Ket |
|---|---|---------------------------|-----|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 7.01.02.2.01.02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 371.600.000,00 | |
| 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | 2.500.000,00 | |
| 7.01.02.2.02.01 | Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan | 2.500.000,00 | |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 2.273.749.000,00 | |
| 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 2.273.749.000,00 | |
| 7.01.03.2.02.01 | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan | 10.000.000,00 | |
| 7.01.03.2.02.02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 247.549.000,00 | |
| 7.01.03.2.02.03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 2.016.200.000,00 | |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 3.400.000,00 | |
| 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 3.400.000,00 | |
| 7.01.04.2.01.01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan | 3.400.000,00 | |
| 7.01.0.00.0.00.03.04 | Kelurahan Mergosono | 1.797.412.000,00 | |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 216.687.000,00 | |
| 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 207.687.000,00 | |
| 7.01.02.2.01.02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 207.687.000,00 | |
| 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | 9.000.000,00 | |
| 7.01.02.2.02.01 | Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan | 9.000.000,00 | |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 1.555.725.000,00 | |
| 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 1.555.725.000,00 | |
| 7.01.03.2.02.01 | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 7.01.03.2.02.02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 300.000.000,00 | |
| 7.01.03.2.02.03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 1.235.725.000,00 | |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 25.000.000,00 | |
| 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 25.000.000,00 | |
| 7.01.04.2.01.01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan | 25.000.000,00 | |
| 7.01.0.00.0.00.03.05 | Kelurahan Bumiayu | 2.080.156.000,00 | |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 219.066.000,00 | |
| 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 201.466.000,00 | |
| 7.01.02.2.01.02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 201.466.000,00 | |
| 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | 17.600.000,00 | |
| 7.01.02.2.02.01 | Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan | 17.600.000,00 | |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 1.839.490.000,00 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran Sementara | Ket |
|---|---|---------------------------|-----|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 1.839.490.000,00 | |
| 7.01.03.2.02.01 | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan | 12.600.000,00 | |
| 7.01.03.2.02.02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 325.000.000,00 | |
| 7.01.03.2.02.03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 1.501.890.000,00 | |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 21.600.000,00 | |
| 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 21.600.000,00 | |
| 7.01.04.2.01.01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan | 21.600.000,00 | |
| 7.01.0.00.0.00.03.06 | Kelurahan Wonokoyo | 1.485.247.000,00 | |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 304.747.000,00 | |
| 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 282.247.000,00 | |
| 7.01.02.2.01.02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 282.247.000,00 | |
| 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | 22.500.000,00 | |
| 7.01.02.2.02.01 | Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan | 22.500.000,00 | |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 1.146.900.000,00 | |
| 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 1.146.900.000,00 | |
| 7.01.03.2.02.01 | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 7.01.03.2.02.02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 200.000.000,00 | |
| 7.01.03.2.02.03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 926.900.000,00 | |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 33.600.000,00 | |
| 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 33.600.000,00 | |
| 7.01.04.2.01.01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan | 33.600.000,00 | |
| 7.01.0.00.0.00.03.07 | Kelurahan Buring | 1.914.389.000,00 | |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 262.982.500,00 | |
| 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 262.982.500,00 | |
| 7.01.02.2.01.02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 262.982.500,00 | |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 1.637.376.500,00 | |
| 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 1.637.376.500,00 | |
| 7.01.03.2.02.01 | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan | 14.806.500,00 | |
| 7.01.03.2.02.02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 317.470.000,00 | |
| 7.01.03.2.02.03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 1.305.100.000,00 | |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 14.030.000,00 | |
| 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 14.030.000,00 | |
| 7.01.04.2.01.01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan | 14.030.000,00 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran Sementara | Ket |
|---|---|---------------------------|-----|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 7.01.0.00.0.00.03.08 | Kelurahan Lesanpuro | 1.952.671.000,00 | |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 313.471.000,00 | |
| 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 306.471.000,00 | |
| 7.01.02.2.01.02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 306.471.000,00 | |
| 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | 7.000.000,00 | |
| 7.01.02.2.02.01 | Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan | 7.000.000,00 | |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 1.634.700.000,00 | |
| 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 1.634.700.000,00 | |
| 7.01.03.2.02.01 | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan | 10.000.000,00 | |
| 7.01.03.2.02.02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 297.000.000,00 | |
| 7.01.03.2.02.03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 1.327.700.000,00 | |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 4.500.000,00 | |
| 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 4.500.000,00 | |
| 7.01.04.2.01.01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan | 4.500.000,00 | |
| 7.01.0.00.0.00.03.09 | Kelurahan Sawojajar | 2.622.230.000,00 | |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 263.922.000,00 | |
| 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 262.622.000,00 | |
| 7.01.02.2.01.02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 262.622.000,00 | |
| 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | 1.300.000,00 | |
| 7.01.02.2.02.01 | Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan | 1.300.000,00 | |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 2.341.408.000,00 | |
| 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 2.341.408.000,00 | |
| 7.01.03.2.02.01 | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan | 10.000.000,00 | |
| 7.01.03.2.02.02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 455.758.000,00 | |
| 7.01.03.2.02.03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 1.875.650.000,00 | |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 16.900.000,00 | |
| 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 16.900.000,00 | |
| 7.01.04.2.01.01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan | 16.900.000,00 | |
| 7.01.0.00.0.00.03.10 | Kelurahan Madyopuro | 2.506.492.000,00 | |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 359.585.500,00 | |
| 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 325.983.500,00 | |
| 7.01.02.2.01.02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 325.983.500,00 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran Sementara | Ket |
|---|---|---------------------------|-----|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | 33.602.000,00 | |
| 7.01.02.2.02.01 | Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan | 33.602.000,00 | |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 2.116.606.500,00 | |
| 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 2.116.606.500,00 | |
| 7.01.03.2.02.01 | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan | 28.645.000,00 | |
| 7.01.03.2.02.02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 325.986.500,00 | |
| 7.01.03.2.02.03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 1.761.975.000,00 | |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 30.300.000,00 | |
| 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 30.300.000,00 | |
| 7.01.04.2.01.01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan | 30.300.000,00 | |
| 7.01.0.00.0.00.03.11 | Kelurahan Cemorokandang | 1.921.708.000,00 | |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 350.502.700,00 | |
| 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 348.493.700,00 | |
| 7.01.02.2.01.02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 348.493.700,00 | |
| 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | 2.009.000,00 | |
| 7.01.02.2.02.01 | Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan | 2.009.000,00 | |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 1.558.255.300,00 | |
| 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 1.558.255.300,00 | |
| 7.01.03.2.02.01 | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan | 18.512.500,00 | |
| 7.01.03.2.02.02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 379.500.000,00 | |
| 7.01.03.2.02.03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 1.160.242.800,00 | |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 12.950.000,00 | |
| 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 12.950.000,00 | |
| 7.01.04.2.01.01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan | 12.950.000,00 | |
| 7.01.0.00.0.00.03.12 | Kelurahan Arjowinangun | 1.750.125.000,00 | |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 372.845.000,00 | |
| 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 365.795.000,00 | |
| 7.01.02.2.01.02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 365.795.000,00 | |
| 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | 7.050.000,00 | |
| 7.01.02.2.02.01 | Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan | 7.050.000,00 | |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 1.367.030.000,00 | |
| 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 1.367.030.000,00 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran Sementara | Ket |
|---|---|---------------------------|-----|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 7.01.03.2.02.01 | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan | 9.660.000,00 | |
| 7.01.03.2.02.02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 197.300.000,00 | |
| 7.01.03.2.02.03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 1.160.070.000,00 | |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 10.250.000,00 | |
| 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 10.250.000,00 | |
| 7.01.04.2.01.01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan | 10.250.000,00 | |
| 7.01.0.00.0.00.03.13 | Kelurahan Tlogowaru | 1.519.740.000,00 | |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 329.402.000,00 | |
| 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 303.902.000,00 | |
| 7.01.02.2.01.02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 303.902.000,00 | |
| 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | 25.500.000,00 | |
| 7.01.02.2.02.01 | Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan | 25.500.000,00 | |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 1.169.698.000,00 | |
| 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 1.169.698.000,00 | |
| 7.01.03.2.02.01 | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan | 8.280.000,00 | |
| 7.01.03.2.02.02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 264.600.000,00 | |
| 7.01.03.2.02.03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 896.818.000,00 | |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 20.640.000,00 | |
| 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 20.640.000,00 | |
| 7.01.04.2.01.01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan | 20.640.000,00 | |
| 7.01.0.00.0.00.04.00 | Kecamatan Lowokwaru | 41.904.448.462,67 | |
| 7.01.0.00.0.00.04.00 | Kecamatan Lowokwaru | 21.456.160.462,67 | |
| 7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | 21.151.635.462,67 | |
| 7.01.01.2.01 | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 51.795.000,00 | |
| 7.01.01.2.01.01 | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | 39.850.000,00 | |
| 7.01.01.2.01.02 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | 2.645.000,00 | |
| 7.01.01.2.01.05 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 9.300.000,00 | |
| 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan | 20.328.570.462,67 | |
| 7.01.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 20.252.970.462,67 | |
| 7.01.01.2.02.06 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 3.000.000,00 | |
| 7.01.01.2.02.07 | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran | 72.600.000,00 | |
| 7.01.01.2.03 | Administrasi Umum | 721.170.000,00 | |
| 7.01.01.2.03.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 2.750.000,00 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran Sementara | Ket |
|---|---|---------------------------|-----|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 7.01.01.2.03.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 41.000.000,00 | |
| 7.01.01.2.03.05 | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | 73.060.000,00 | |
| 7.01.01.2.03.08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 85.200.000,00 | |
| 7.01.01.2.03.09 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | 5.000.000,00 | |
| 7.01.01.2.03.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 45.539.000,00 | |
| 7.01.01.2.03.11 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 11.750.000,00 | |
| 7.01.01.2.03.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 7.500.000,00 | |
| 7.01.01.2.03.13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 58.326.000,00 | |
| 7.01.01.2.03.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | 5.280.000,00 | |
| 7.01.01.2.03.16 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 15.950.000,00 | |
| 7.01.01.2.03.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | 200.260.000,00 | |
| 7.01.01.2.03.18 | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 40.000.000,00 | |
| 7.01.01.2.03.22 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | 12.555.000,00 | |
| 7.01.01.2.03.28 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 50.000.000,00 | |
| 7.01.01.2.03.30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 42.000.000,00 | |
| 7.01.01.2.03.38 | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor | 25.000.000,00 | |
| 7.01.01.2.04 | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 50.100.000,00 | |
| 7.01.01.2.04.09 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | 50.100.000,00 | |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 8.125.000,00 | |
| 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 500.000,00 | |
| 7.01.02.2.01.02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 500.000,00 | |
| 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | 7.625.000,00 | |
| 7.01.02.2.02.01 | Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan | 7.625.000,00 | |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 146.950.000,00 | |
| 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 146.950.000,00 | |
| 7.01.03.2.02.01 | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan | 30.450.000,00 | |
| 7.01.03.2.02.03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 65.000.000,00 | |
| 7.01.03.2.02.04 | Evaluasi Kelurahan | 51.500.000,00 | |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 18.750.000,00 | |
| 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 18.750.000,00 | |
| 7.01.04.2.01.01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan | 18.750.000,00 | |
| 7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 130.700.000,00 | |
| 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | 130.700.000,00 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran Sementara | Ket |
|---|---|---------------------------|-----|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 7.01.05.2.01.08 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 130.700.000,00 | |
| 7.01.0.00.0.00.04.02 | Kelurahan Lowokwaru | 2.218.842.000,00 | |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 225.846.000,00 | |
| 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 224.289.000,00 | |
| 7.01.02.2.01.02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 224.289.000,00 | |
| 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | 1.557.000,00 | |
| 7.01.02.2.02.01 | Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan | 1.557.000,00 | |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 1.983.996.000,00 | |
| 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 1.983.996.000,00 | |
| 7.01.03.2.02.01 | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan | 10.131.000,00 | |
| 7.01.03.2.02.02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 360.000.000,00 | |
| 7.01.03.2.02.03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 1.613.865.000,00 | |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 9.000.000,00 | |
| 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 9.000.000,00 | |
| 7.01.04.2.01.01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan | 9.000.000,00 | |
| 7.01.0.00.0.00.04.03 | Kelurahan Dinoyo | 1.668.605.000,00 | |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 310.355.000,00 | |
| 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 294.215.000,00 | |
| 7.01.02.2.01.02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 294.215.000,00 | |
| 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | 16.140.000,00 | |
| 7.01.02.2.02.01 | Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan | 16.140.000,00 | |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 1.323.250.000,00 | |
| 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 1.323.250.000,00 | |
| 7.01.03.2.02.01 | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan | 15.000.000,00 | |
| 7.01.03.2.02.02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 136.700.000,00 | |
| 7.01.03.2.02.03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 1.171.550.000,00 | |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 35.000.000,00 | |
| 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 35.000.000,00 | |
| 7.01.04.2.01.01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan | 35.000.000,00 | |
| 7.01.0.00.0.00.04.04 | Kelurahan Sumbersari | 1.273.080.000,00 | |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 273.600.000,00 | |
| 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 271.600.000,00 | |
| 7.01.02.2.01.02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 271.600.000,00 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran Sementara | Ket |
|---|---|---------------------------|-----|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | 2.000.000,00 | |
| 7.01.02.2.02.01 | Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan | 2.000.000,00 | |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 988.375.000,00 | |
| 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 988.375.000,00 | |
| 7.01.03.2.02.01 | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan | 20.300.000,00 | |
| 7.01.03.2.02.02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 252.000.000,00 | |
| 7.01.03.2.02.03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 716.075.000,00 | |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 11.105.000,00 | |
| 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 11.105.000,00 | |
| 7.01.04.2.01.01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan | 11.105.000,00 | |
| 7.01.0.00.0.00.04.05 | Kelurahan Ketawanggede | 1.149.151.000,00 | |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 364.600.000,00 | |
| 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 346.600.000,00 | |
| 7.01.02.2.01.02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 346.600.000,00 | |
| 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | 18.000.000,00 | |
| 7.01.02.2.02.01 | Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan | 18.000.000,00 | |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 780.126.000,00 | |
| 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 780.126.000,00 | |
| 7.01.03.2.02.01 | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan | 15.000.000,00 | |
| 7.01.03.2.02.02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 284.561.000,00 | |
| 7.01.03.2.02.03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 480.565.000,00 | |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 4.425.000,00 | |
| 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 4.425.000,00 | |
| 7.01.04.2.01.01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan | 4.425.000,00 | |
| 7.01.0.00.0.00.04.06 | Kelurahan Jatimulyo | 1.899.069.000,00 | |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 449.307.000,00 | |
| 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 428.408.000,00 | |
| 7.01.02.2.01.02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 428.408.000,00 | |
| 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | 20.899.000,00 | |
| 7.01.02.2.02.01 | Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan | 20.899.000,00 | |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 1.441.162.000,00 | |
| 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 1.441.162.000,00 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran Sementara | Ket |
|---|---|---------------------------|-----|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 7.01.03.2.02.01 | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan | 6.240.000,00 | |
| 7.01.03.2.02.02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 269.280.000,00 | |
| 7.01.03.2.02.03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 1.165.642.000,00 | |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 8.600.000,00 | |
| 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 8.600.000,00 | |
| 7.01.04.2.01.01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan | 8.600.000,00 | |
| 7.01.0.00.0.00.04.07 | Kelurahan Tunjungsekar | 1.656.409.000,00 | |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 306.984.000,00 | |
| 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 305.679.000,00 | |
| 7.01.02.2.01.02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 305.679.000,00 | |
| 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | 1.305.000,00 | |
| 7.01.02.2.02.01 | Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan | 1.305.000,00 | |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 1.339.425.000,00 | |
| 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 1.339.425.000,00 | |
| 7.01.03.2.02.01 | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan | 15.000.000,00 | |
| 7.01.03.2.02.02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 333.250.000,00 | |
| 7.01.03.2.02.03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 991.175.000,00 | |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 10.000.000,00 | |
| 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 10.000.000,00 | |
| 7.01.04.2.01.01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan | 10.000.000,00 | |
| 7.01.0.00.0.00.04.08 | Kelurahan Mojolangu | 2.281.590.000,00 | |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 402.250.000,00 | |
| 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 395.000.000,00 | |
| 7.01.02.2.01.02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 395.000.000,00 | |
| 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | 7.250.000,00 | |
| 7.01.02.2.02.01 | Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan | 7.250.000,00 | |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 1.852.240.000,00 | |
| 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 1.852.240.000,00 | |
| 7.01.03.2.02.01 | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan | 10.000.000,00 | |
| 7.01.03.2.02.02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 188.520.000,00 | |
| 7.01.03.2.02.03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 1.653.720.000,00 | |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 27.100.000,00 | |
| 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 27.100.000,00 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran Sementara | Ket |
|---|---|---------------------------|-----|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 7.01.04.2.01.01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan | 27.100.000,00 | |
| 7.01.0.00.0.00.04.09 | Kelurahan Tulusrejo | 2.035.268.000,00 | |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 532.310.000,00 | |
| 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 529.710.000,00 | |
| 7.01.02.2.01.02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 529.710.000,00 | |
| 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | 2.600.000,00 | |
| 7.01.02.2.02.01 | Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan | 2.600.000,00 | |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 1.500.558.000,00 | |
| 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 1.500.558.000,00 | |
| 7.01.03.2.02.01 | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan | 12.300.000,00 | |
| 7.01.03.2.02.03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 1.488.258.000,00 | |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 2.400.000,00 | |
| 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 2.400.000,00 | |
| 7.01.04.2.01.01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan | 2.400.000,00 | |
| 7.01.0.00.0.00.04.10 | Kelurahan Tasikmadu | 1.367.927.000,00 | |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 226.985.000,00 | |
| 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 222.485.000,00 | |
| 7.01.02.2.01.02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 222.485.000,00 | |
| 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | 4.500.000,00 | |
| 7.01.02.2.02.01 | Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan | 4.500.000,00 | |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 1.119.342.000,00 | |
| 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 1.119.342.000,00 | |
| 7.01.03.2.02.01 | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan | 11.500.000,00 | |
| 7.01.03.2.02.02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 440.000.000,00 | |
| 7.01.03.2.02.03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 667.842.000,00 | |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 21.600.000,00 | |
| 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 21.600.000,00 | |
| 7.01.04.2.01.01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan | 21.600.000,00 | |
| 7.01.0.00.0.00.04.11 | Kelurahan Tunggulwulung | 1.270.794.000,00 | |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 317.194.000,00 | |
| 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 315.194.000,00 | |
| 7.01.02.2.01.02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 315.194.000,00 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran Sementara | Ket |
|---|---|---------------------------|-----|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | 2.000.000,00 | |
| 7.01.02.2.02.01 | Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan | 2.000.000,00 | |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 943.650.000,00 | |
| 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 943.650.000,00 | |
| 7.01.03.2.02.01 | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan | 11.000.000,00 | |
| 7.01.03.2.02.02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 205.000.000,00 | |
| 7.01.03.2.02.03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 727.650.000,00 | |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 9.950.000,00 | |
| 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 9.950.000,00 | |
| 7.01.04.2.01.01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan | 9.950.000,00 | |
| 7.01.0.00.0.00.04.12 | Kelurahan Tlogomas | 1.620.408.000,00 | |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 284.533.000,00 | |
| 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 263.283.000,00 | |
| 7.01.02.2.01.02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 263.283.000,00 | |
| 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | 21.250.000,00 | |
| 7.01.02.2.02.01 | Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan | 21.250.000,00 | |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 1.331.850.000,00 | |
| 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 1.331.850.000,00 | |
| 7.01.03.2.02.01 | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan | 12.000.000,00 | |
| 7.01.03.2.02.02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 355.500.000,00 | |
| 7.01.03.2.02.03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 964.350.000,00 | |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 4.025.000,00 | |
| 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 4.025.000,00 | |
| 7.01.04.2.01.01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan | 4.025.000,00 | |
| 7.01.0.00.0.00.04.13 | Kelurahan Merjosari | 2.007.145.000,00 | |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 344.735.000,00 | |
| 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 344.735.000,00 | |
| 7.01.02.2.01.02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 344.735.000,00 | |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 1.657.710.000,00 | |
| 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 1.657.710.000,00 | |
| 7.01.03.2.02.01 | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan | 10.260.000,00 | |
| 7.01.03.2.02.02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 258.000.000,00 | |
| 7.01.03.2.02.03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 1.389.450.000,00 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran Sementara | Ket |
|---|---|---------------------------|-----|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 4.700.000,00 | |
| 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 4.700.000,00 | |
| 7.01.04.2.01.01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan | 4.700.000,00 | |
| 7.01.0.00.0.00.05.00 | Kecamatan Sukun | 41.582.258.903,89 | |
| 7.01.0.00.0.00.05.00 | Kecamatan Sukun | 20.515.007.903,89 | |
| 7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | 20.310.720.903,89 | |
| 7.01.01.2.01 | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 32.500.000,00 | |
| 7.01.01.2.01.01 | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | 23.500.000,00 | |
| 7.01.01.2.01.02 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | 3.500.000,00 | |
| 7.01.01.2.01.05 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 5.500.000,00 | |
| 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan | 19.407.720.903,89 | |
| 7.01.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 19.309.720.903,89 | |
| 7.01.01.2.02.07 | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran | 98.000.000,00 | |
| 7.01.01.2.03 | Administrasi Umum | 863.000.000,00 | |
| 7.01.01.2.03.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 55.000.000,00 | |
| 7.01.01.2.03.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 62.000.000,00 | |
| 7.01.01.2.03.05 | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | 85.000.000,00 | |
| 7.01.01.2.03.08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 65.000.000,00 | |
| 7.01.01.2.03.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 50.000.000,00 | |
| 7.01.01.2.03.11 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 16.000.000,00 | |
| 7.01.01.2.03.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 5.000.000,00 | |
| 7.01.01.2.03.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | 6.000.000,00 | |
| 7.01.01.2.03.16 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 20.000.000,00 | |
| 7.01.01.2.03.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | 225.000.000,00 | |
| 7.01.01.2.03.18 | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 65.000.000,00 | |
| 7.01.01.2.03.28 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 25.000.000,00 | |
| 7.01.01.2.03.30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 44.000.000,00 | |
| 7.01.01.2.03.38 | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor | 140.000.000,00 | |
| 7.01.01.2.04 | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 7.500.000,00 | |
| 7.01.01.2.04.09 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | 7.500.000,00 | |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 16.500.000,00 | |
| 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 10.000.000,00 | |
| 7.01.02.2.01.02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 10.000.000,00 | |
| 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | 6.500.000,00 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran Sementara | Ket |
|---|---|---------------------------|-----|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 7.01.02.2.02.01 | Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan | 6.500.000,00 | |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 132.787.000,00 | |
| 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 132.787.000,00 | |
| 7.01.03.2.02.01 | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan | 16.500.000,00 | |
| 7.01.03.2.02.03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 93.787.000,00 | |
| 7.01.03.2.02.04 | Evaluasi Kelurahan | 22.500.000,00 | |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 25.000.000,00 | |
| 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 25.000.000,00 | |
| 7.01.04.2.01.01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan | 25.000.000,00 | |
| 7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 30.000.000,00 | |
| 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | 30.000.000,00 | |
| 7.01.05.2.01.08 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 30.000.000,00 | |
| 7.01.0.00.0.00.05.02 | Kelurahan Sukun | 2.189.891.000,00 | |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 228.121.000,00 | |
| 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 227.721.000,00 | |
| 7.01.02.2.01.02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 227.721.000,00 | |
| 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | 400.000,00 | |
| 7.01.02.2.02.01 | Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan | 400.000,00 | |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 1.957.920.000,00 | |
| 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 1.957.920.000,00 | |
| 7.01.03.2.02.01 | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan | 9.870.000,00 | |
| 7.01.03.2.02.02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 280.000.000,00 | |
| 7.01.03.2.02.03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 1.668.050.000,00 | |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 3.850.000,00 | |
| 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 3.850.000,00 | |
| 7.01.04.2.01.01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan | 3.850.000,00 | |
| 7.01.0.00.0.00.05.03 | Kelurahan Ciptomulyo | 1.635.026.000,00 | |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 356.296.000,00 | |
| 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 349.796.000,00 | |
| 7.01.02.2.01.02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 349.796.000,00 | |
| 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | 6.500.000,00 | |
| 7.01.02.2.02.01 | Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan | 6.500.000,00 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran Sementara | Ket |
|---|---|---------------------------|-----|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 1.265.500.000,00 | |
| 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 1.265.500.000,00 | |
| 7.01.03.2.02.01 | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan | 16.000.000,00 | |
| 7.01.03.2.02.02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 226.500.000,00 | |
| 7.01.03.2.02.03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 1.023.000.000,00 | |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 13.230.000,00 | |
| 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 13.230.000,00 | |
| 7.01.04.2.01.01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan | 13.230.000,00 | |
| 7.01.0.00.0.00.05.04 | Kelurahan Gadang | 1.985.722.000,00 | |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 338.822.000,00 | |
| 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 331.822.000,00 | |
| 7.01.02.2.01.02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 331.822.000,00 | |
| 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | 7.000.000,00 | |
| 7.01.02.2.02.01 | Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan | 7.000.000,00 | |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 1.639.250.000,00 | |
| 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 1.639.250.000,00 | |
| 7.01.03.2.02.01 | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan | 15.650.000,00 | |
| 7.01.03.2.02.02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 233.700.000,00 | |
| 7.01.03.2.02.03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 1.389.900.000,00 | |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 7.650.000,00 | |
| 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 7.650.000,00 | |
| 7.01.04.2.01.01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan | 7.650.000,00 | |
| 7.01.0.00.0.00.05.05 | Kelurahan Kebonsari | 1.749.347.000,00 | |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 377.600.000,00 | |
| 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 371.600.000,00 | |
| 7.01.02.2.01.02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 371.600.000,00 | |
| 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | 6.000.000,00 | |
| 7.01.02.2.02.01 | Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan | 6.000.000,00 | |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 1.371.747.000,00 | |
| 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 1.371.747.000,00 | |
| 7.01.03.2.02.01 | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan | 10.000.000,00 | |
| 7.01.03.2.02.02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 120.447.000,00 | |
| 7.01.03.2.02.03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 1.241.300.000,00 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran Sementara | Ket |
|---|---|---------------------------|-----|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 7.01.0.00.0.00.05.06 | Kelurahan Bandungrejosari | 2.702.242.000,00 | |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 328.388.000,00 | |
| 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 306.388.000,00 | |
| 7.01.02.2.01.02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 306.388.000,00 | |
| 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | 22.000.000,00 | |
| 7.01.02.2.02.01 | Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan | 22.000.000,00 | |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 2.367.400.000,00 | |
| 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 2.367.400.000,00 | |
| 7.01.03.2.02.01 | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan | 10.000.000,00 | |
| 7.01.03.2.02.02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 300.000.000,00 | |
| 7.01.03.2.02.03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 2.057.400.000,00 | |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 6.454.000,00 | |
| 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 6.454.000,00 | |
| 7.01.04.2.01.01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan | 6.454.000,00 | |
| 7.01.0.00.0.00.05.07 | Kelurahan Tanjungrejo | 2.389.434.000,00 | |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 324.468.900,00 | |
| 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 316.068.900,00 | |
| 7.01.02.2.01.02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 316.068.900,00 | |
| 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | 8.400.000,00 | |
| 7.01.02.2.02.01 | Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan | 8.400.000,00 | |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 2.060.215.100,00 | |
| 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 2.060.215.100,00 | |
| 7.01.03.2.02.01 | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan | 9.200.000,00 | |
| 7.01.03.2.02.02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 185.236.350,00 | |
| 7.01.03.2.02.03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 1.865.778.750,00 | |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 4.750.000,00 | |
| 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 4.750.000,00 | |
| 7.01.04.2.01.01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan | 4.750.000,00 | |
| 7.01.0.00.0.00.05.08 | Kelurahan Pisangcandi | 1.933.319.000,00 | |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 227.767.000,00 | |
| 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 206.267.000,00 | |
| 7.01.02.2.01.02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 206.267.000,00 | |
| 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | 21.500.000,00 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran Sementara | Ket |
|---|---|---------------------------|-----|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 7.01.02.2.02.01 | Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan | 21.500.000,00 | |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 1.683.052.000,00 | |
| 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 1.683.052.000,00 | |
| 7.01.03.2.02.01 | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 7.01.03.2.02.02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 330.110.500,00 | |
| 7.01.03.2.02.03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 1.332.941.500,00 | |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 22.500.000,00 | |
| 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 22.500.000,00 | |
| 7.01.04.2.01.01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan | 22.500.000,00 | |
| 7.01.0.00.0.00.05.09 | Kelurahan Karangbesuki | 1.738.517.000,00 | |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 350.872.000,00 | |
| 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 349.419.000,00 | |
| 7.01.02.2.01.02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 349.419.000,00 | |
| 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | 1.453.000,00 | |
| 7.01.02.2.02.01 | Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan | 1.453.000,00 | |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 1.372.645.000,00 | |
| 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 1.372.645.000,00 | |
| 7.01.03.2.02.01 | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan | 21.475.000,00 | |
| 7.01.03.2.02.02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 200.000.000,00 | |
| 7.01.03.2.02.03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 1.151.170.000,00 | |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 15.000.000,00 | |
| 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 15.000.000,00 | |
| 7.01.04.2.01.01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan | 15.000.000,00 | |
| 7.01.0.00.0.00.05.10 | Kelurahan Bandulan | 1.767.276.000,00 | |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 344.176.000,00 | |
| 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 323.176.000,00 | |
| 7.01.02.2.01.02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 323.176.000,00 | |
| 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | 21.000.000,00 | |
| 7.01.02.2.02.01 | Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan | 21.000.000,00 | |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 1.408.100.000,00 | |
| 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 1.408.100.000,00 | |
| 7.01.03.2.02.01 | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan | 15.000.000,00 | |
| 7.01.03.2.02.02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 250.000.000,00 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran Sementara | Ket |
|---|---|---------------------------|-----|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 7.01.03.2.02.03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 1.143.100.000,00 | |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 15.000.000,00 | |
| 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 15.000.000,00 | |
| 7.01.04.2.01.01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan | 15.000.000,00 | |
| 7.01.0.00.0.00.05.11 | Kelurahan Mulyorejo | 1.575.717.000,00 | |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 271.567.000,00 | |
| 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 266.117.000,00 | |
| 7.01.02.2.01.02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 266.117.000,00 | |
| 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | 5.450.000,00 | |
| 7.01.02.2.02.01 | Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan | 5.450.000,00 | |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 1.280.425.000,00 | |
| 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 1.280.425.000,00 | |
| 7.01.03.2.02.01 | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan | 10.000.000,00 | |
| 7.01.03.2.02.02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 250.000.000,00 | |
| 7.01.03.2.02.03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 1.020.425.000,00 | |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 23.725.000,00 | |
| 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 23.725.000,00 | |
| 7.01.04.2.01.01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan | 23.725.000,00 | |
| 7.01.0.00.0.00.05.12 | Kelurahan Bakalankrajan | 1.400.760.000,00 | |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 246.630.000,00 | |
| 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 240.930.000,00 | |
| 7.01.02.2.01.02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 240.930.000,00 | |
| 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | 5.700.000,00 | |
| 7.01.02.2.02.01 | Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan | 5.700.000,00 | |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 1.150.365.000,00 | |
| 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 1.150.365.000,00 | |
| 7.01.03.2.02.01 | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan | 24.065.000,00 | |
| 7.01.03.2.02.02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 273.200.000,00 | |
| 7.01.03.2.02.03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 853.100.000,00 | |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 3.765.000,00 | |
| 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 3.765.000,00 | |
| 7.01.04.2.01.01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan | 3.765.000,00 | |
| 8 | UNSUR PEMERINTAHAN UMUM | | |
| 8.01 | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 11.503.493.134,94 | |
| 8.01.0.00.0.00.01.00 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 11.128.493.134,94 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran Sementara | Ket |
|---|--|---------------------------|-----|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 8.01.0.00.0.00.01.00 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 11.128.493.134,94 | |
| 8.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | 6.698.953.134,94 | |
| 8.01.01.2.01 | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 48.000.000,00 | |
| 8.01.01.2.01.01 | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | 48.000.000,00 | |
| 8.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan | 224.789.000,00 | |
| 8.01.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 4.698.953.134,94 | |
| 8.01.01.2.02.04 | Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | 118.070.900,00 | |
| 8.01.01.2.02.06 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 106.718.100,00 | |
| 8.01.01.2.03 | Administrasi Umum | 1.717.211.000,00 | |
| 8.01.01.2.03.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 141.836.000,00 | |
| 8.01.01.2.03.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 85.937.919,00 | |
| 8.01.01.2.03.08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 266.685.000,00 | |
| 8.01.01.2.03.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | 54.500.000,00 | |
| 8.01.01.2.03.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | 441.030.000,00 | |
| 8.01.01.2.03.18 | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 250.000.000,00 | |
| 8.01.01.2.03.22 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | 87.657.403,00 | |
| 8.01.01.2.03.30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 189.128.000,00 | |
| 8.01.01.2.03.34 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | 200.436.678,00 | |
| 8.01.01.2.04 | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 10.000.000,00 | |
| 8.01.01.2.04.11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | 10.000.000,00 | |
| 8.01.02 | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN | 61.681.300,00 | |
| 8.01.02.2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | 61.681.300,00 | |
| 8.01.02.2.01.03 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | 61.681.300,00 | |
| 8.01.03 | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | 277.660.000,00 | |
| 8.01.03.2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik | 277.660.000,00 | |
| 8.01.03.2.01.04 | Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | 277.660.000,00 | |
| 8.01.04 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN | 140.422.000,00 | |
| 8.01.04.2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | 140.422.000,00 | |
| 8.01.04.2.01.03 | Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | 140.422.000,00 | |
| 8.01.05 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA | 520.318.700,00 | |
| 8.01.05.2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya | 520.318.700,00 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran Sementara | Ket |
|---|--|---------------------------|-----|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 8.01.05.2.01.04 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | 520.318.700,00 | |
| 8.01.06 | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | 1.900.000.000,00 | |
| 8.01.06.2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | 1.900.000.000,00 | |
| 8.01.06.2.01.04 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | 1.900.000.000,00 | |

